



Pemerintah Kota
Padang Panjang



Hendri Arnis
Wali Kota Padang Panjang

Alex Saputra
Wakil Wali Kota Padang Panjang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Wali Kota Padang Panjang Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Padang Panjang, 31 Maret 2026

Inspektur

Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, yang tata cara dan substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dengan tolok ukur indikator kinerja program-program pembangunan urusan Desentralisasi (urusan wajib dan pilihan) konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas, tugas pembantuan dan penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang dapat terselenggara dengan baik karena terbangunnya sinergitas antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kota Padang Panjang dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota dan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagai motivasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Padang Panjang dan warga masyarakat Kota Padang Panjang serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, atas segala dukungan dan kerjasamanya yang terbina selama ini sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 disampaikan, atas terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang diamanatkan kepada saya selaku Wali Kota Padang Panjang saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan bekerja sama demi kelancaran roda Pemerintahan di Kota Padang Panjang. Semoga segala upaya dan ikhtiar kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan senantiasa menjadi catatan amal ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin Ya Robbal Aalamiin.

Padang Panjang, 31 Maret 2026





DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
a Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-1
b Data Geografis Wilayah	I-2
c Informasi Umum Data Kependudukan	I-5
d Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	I-6
e Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	I-8
f Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	I-10
g Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	I-13
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-17
a Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	I-17
b Visi dan Misi Kepala Daerah	I-23
c Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-29
d Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024).....	I-47
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-54
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-3
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-28
2.2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II-33
BAB III.	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III-2
3.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	III-2
3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-2
3.4	Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-2
3.5	Saran dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-3
BAB IV.	PENERAPAN DAN PERCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-1
4.1.3	Realisasi	IV-1
4.1.4	Alokasi Anggaran	IV-3
4.1.5	Dukungan Personil	IV-3
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	IV-4
4.2	Urusan Kesehatan	IV-4
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-4
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-4
4.2.3	Realisasi	IV-5
4.2.4	Alokasi Anggaran	IV-14
4.2.5	Dukungan Personil	IV-14
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV-14
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV-15
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-15
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-15
4.3.3	Realisasi	IV-16
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV-18
4.3.5	Dukungan Personil	IV-18
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-18
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-19
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-19
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-19
4.4.3	Realisasi	IV-19



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4.4.4	Alokasi Anggaran	IV-24
4.4.5	Dukungan Personil	IV-24
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-24
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-25
4.5.1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	IV-25
4.5.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-25
4.5.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-25
4.5.1.3	Realisasi	IV-25
4.5.1.4	Alokasi Anggaran	IV-28
4.5.1.5	Dukungan Personil	IV-29
4.5.1.6	Permasalahan dan Solusi	IV-29
4.5.2	BPBD dan Kesbangpol.....	IV-30
4.5.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-30
4.5.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-30
4.5.2.3	Realisasi	IV-30
4.5.2.4	Alokasi Anggaran	IV-35
4.5.2.5	Dukungan Personil	IV-36
4.5.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV-36
4.6	Urusan Sosial	IV-37
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-37
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-37
4.6.3	Realisasi	IV-37
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-41
4.6.5	Dukungan Personil	IV-41
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-41
4.7	Program dan Kegiatan	IV-43
BAB V.	PENUTUP	V-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1 Permendagri No.18 Tahun 2019). Lebih lanjut dijelaskan bahwa LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal selama satu tahun anggaran.

Memahami dan memenuhi amanat peraturan tersebut, maka disusunlah LPPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang formatnya mempedomani sistematika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA, tanggal 12 Febrauai 2026 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.



b. Data Geografis Wilayah

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara 100°20' - 100°30' Bujur Timur dan 0°27' - 0°32' Lintang Selatan. Kota ini berada di jalur perlintasan regional yang menghubungkan Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Batusangkar. Dengan posisi strategis tersebut, Kota Padang Panjang menjadi bagian dari jalur utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Secara topografis, Kota Padang Panjang didominasi oleh dataran tinggi yang bergelombang dengan jenis tanah andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Kota ini terletak pada ketinggian 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut, serta diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat, yang menyebabkan daerah ini memiliki iklim yang sejuk.

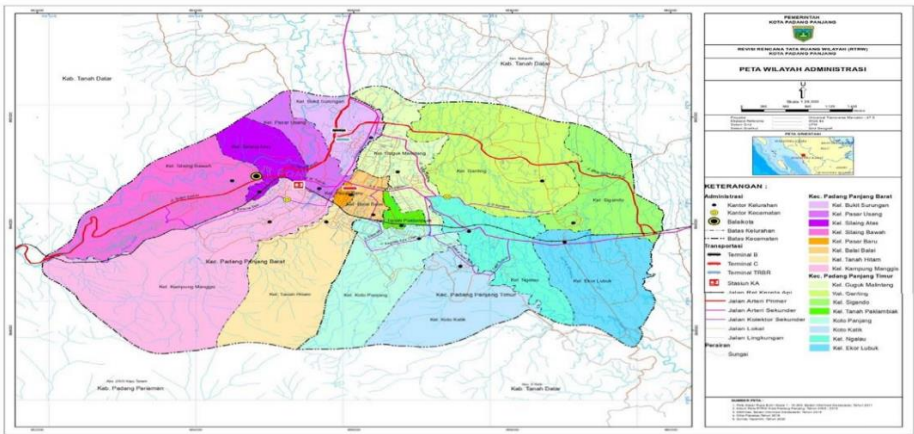
Dengan ketinggian tersebut, Kota Padang Panjang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu, kota ini juga sering mengalami gempa bumi karena berada di kawasan pegunungan berapi.

Luas wilayah Kota Padang Panjang adalah ±23 km² (2.300 ha), di mana seluruh batas wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar. Adapun batas-batas administratif Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan peta administratif Kota Padang Panjang:

Gambar 1.1
Peta Administratif Kota Padang Panjang



Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Secara administratif, Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat. Setiap kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
A.	Kecamatan Padang Panjang Barat	975	42,39
	1. Silaing Bawah	261	11,35
	2. Silaing Atas	54	2,35
	3. Pasar Usang	59	2,57
	4. Kampung Manggis	316	13,74
	5. Tanah Hitam	72	3,13
	6. Pasar Baru	23	1,00
	7. Bukit Surungan	121	5,26
	8. Balai – Balai	69	3,00
B.	Kecamatan Padang Panjang Timur	1.325	57,61
	1. Koto Panjang	133	5,78
	2. Koto Katik	101	4,39
	3. Ngalau	145	6,30
	4. Ekor Lubuk	280	12,17
	5. Sigando	140	6,09
	6. Ganting	310	13,48
	7. Guguk Malintang	190	8,26
	8. Tanah Pak Lambik	26	1,13
Jumlah/Total		2.300	100,00

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Ditinjau dari ketinggian, kedua Kecamatan di Kota Padang Panjang berada pada ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut, sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Tinggi Wilayah per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2025

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Padang Panjang Barat	750
Padang Panjang Timur	750
Padang Panjang	750

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Luas lahan di Kota Padang Panjang terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Berdasarkan Tabel 1.3, persentase pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian lebih besar, yaitu 58,7%, dibandingkan dengan lahan bukan pertanian yang sebesar 41,3%. Rincian luas tanah berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 1.3
Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan di Kota Padang Panjang 2025

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
I. Lahan Pertanian	1.350	58,7%
a. Sawah	552	24, 0%
b. Tegal/Kebun	264	11,5%
c. Ladang/Huma	95	4,1%
d. Hutan Rakyat	213	9,3%
e. Kolam/Tebet/Empang	87	3,8%
f. Sementara tidak diusahakan	139	6,0%
II. Lahan Bukan Pertanian	950	41,3%
Padang Panjang	2.300	100,00%

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Kota Padang Panjang dilintasi oleh 10 sungai/batang air. Di Kecamatan Padang Panjang Barat, terdapat 3 sungai/batang air, sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur, terdapat 7 sungai/batang air, sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1.4
Nama - Nama Sungai/Batang Air di Kota Padang Panjang

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)
Padang Panjang Barat	1. Batang Air Putih	1,56
	2. Batang Air Berkarek - Karek	3,73
	3. Sungai Andok	1,15
Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)
Padang Panjang Timur	1. Sungai Talang	4,39
	2. Sungai Sibunian	4,45
	3. Sungai Jirek	1,10
	4. Sungai Sikareh	4,02
	5. Batang Arau	3,66
	6. Parik Rumpang	4,41
	7. Batang Air Sitabak	4,15

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Dengan letak geografis yang strategis sebagai jalur perlintasan antar-kota dan antar-provinsi, Kota Padang Panjang memiliki keuntungan karena berjarak relatif dekat dengan kota/kabupaten lain di Sumatera Barat. Begitu pula dengan jarak Kota Padang Panjang ke beberapa kota besar di Pulau Sumatera, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 1.5
Jarak Antara Kota Padang Panjang dengan Beberapa Kota di Sumatera

Rute	Jarak (Km)
1. Padang Panjang – Medan (via Sibolga)	740
2. Padang Panjang – Pekanbaru (via Payakumbuh)	236
3. Padang Panjang – Jambi	520
4. Padang Panjang – Palembang (via Muara Enim)	943
5. Padang Panjang – Banda Aceh (via Gunung Tua)	1.365



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Rute	Jarak (Km)
6. Padang Panjang – Bengkulu	709
7. Padang Panjang – Tanjung Karang	1.253

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah 64.381 jiwa dengan rincian 32.448 jiwa penduduk Laki - Laki dan 31.933 jiwa penduduk Perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang hingga semester II tahun 2025 adalah 19.401 KK. Rincian data jumlah penduduk Kota Padang Panjang per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Per Kelurahan, Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin			Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ganting	1.819	1.740	3.559	1.000
2	Sigando	1.133	1.074	2.207	654
3	Ekor Lubuk	1.424	1.366	2.790	887
4	Ngalau	1.746	1.795	3.541	1.044
5	Guguk Malintang	3.631	3.697	7.328	2.130
6	Koto Panjang	2.597	2.495	5.092	1.552
7	Koto Katik	718	670	1.388	429
8	Tanah Pak Lambik	1.014	1.046	2.060	624
	Kecamatan Padang Panjang Timur	14.082	13.883	27.965	8.320
1	Bukit Surungan	1.412	1.448	2.860	862
2	Pasar Usang	1.979	1.971	3.950	1.236
3	Kampung Manggis	4.199	4.034	8.233	2.461
4	Silaing Bawah	3.343	3.259	6.602	1.976
5	Silaing Atas	1.240	1.234	2.474	751
6	Pasar Baru	868	843	1.711	507
7	Tanah Hitam	1.946	1.992	3.938	1.269
8	Balai – Balai	3.379	3.269	6.648	2.019
	Kecamatan Padang Panjang Barat	18.366	18.050	36.416	11.081
	Kota Padang Panjang	32.448	31.933	64.381	19.401

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2026

Selama tahun 2025, Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,76% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2025. Pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat di Kelurahan Tanah Pak Lambiak, yaitu sebesar 3,10%. Di sisi lain, terdapat beberapa kelurahan yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif, yaitu penurunan jumlah penduduk dibandingkan tahun 2025. Perkembangan jumlah penduduk di setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.7
Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENDUDUK TAHUN 2024			PENDUDUK TAHUN 2025			PERTUMBUHAN (%)
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
I	PADANG PANJANG TIMUR	13.958	13.724	27.682	14.082	13.883	27.965	1,02
1	GANTING	1.784	1.738	3.522	1.819	1.740	3.559	1.05
2	SIGANDO	1.106	1.037	2.143	1.133	1.074	2.207	2.99
3	EKOR LUBUK	1.416	1.362	2.778	1.424	1.366	2.790	0.43
4	NGALAU	1.735	1.774	3.509	1.746	1.795	3.541	0.91
5	GUGUK MALINTANG	3.635	3.695	7.330	3.631	3.697	7.328	-0.03
6	KOTO PANJANG	2.551	2.439	4.990	2.597	2.495	5.092	2.04
7	KOTO KATIAK	715	661	1.376	718	670	1.388	0.87
8	TANAH PAK LAMBIAK	1.016	1.018	2.034	1.014	1.046	2.060	1.28
II	PADANG PANJANG BARAT	18.231	17.982	36.213	18.366	18.050	36.416	0,56
1	BUKIT SURUNGAN	1.360	1.414	2.774	1.412	1.448	2.860	3.10
2	PASAR USANG	2.010	1.995	4.005	1.979	1.971	3.950	-1.37
3	KAMPUNG MANGGIS	4.129	3.966	8.095	4.199	4.034	8.233	1.70
4	SILAIANG BAWAH	3.338	3.275	6.613	3.343	3.259	6.602	-0.17
5	SILAIANG ATAS	1.271	1.253	2.524	1.240	1.234	2.474	-1.98
6	PASAR BARU	879	860	1.739	868	843	1.711	-1.61
7	TANAH HITAM	1.927	1.969	3.896	1.946	1.992	3.938	1.08
8	BALAI-BALAI	3.317	3.250	6.567	3.379	3.269	6.648	1.23
JUMLAH		31.538	32.189	31.706	63.895	32.448	31.933	64.381

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2026, (data diolah)

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum
Pembentukan Perangkat Daerah

Berikut ini Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar
Hukum Pembentukan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Tabel 1.8
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat Daerah	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Dinas Kesehatan	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Dinas Perhubungan	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
16	Dinas Pangan dan Pertanian	
17	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	
19	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
21	Kecamatan Padang Panjang Timur	
22	Kecamatan Padang Panjang Barat	
23	Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-kanak	Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-kanak, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
24	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Dasar	
25	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama	
26	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	
27	Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan	Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pada Dinas Pangan Dan Pertanian
28	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan	
29	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan	
30	Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup	Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
31	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Kulit	Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Kulit, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal ,Unit Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
32	Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar	
33	Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal	
34	Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir	
35	Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Farmasi	Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Farmasi Pada Dinas Kesehatan
36	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
37	Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak	Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang
38	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama	
39	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	
40	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
41	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak	Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Sumber: Bagian Hukum Setdako padang Panjang, Tahun 2026

e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki 1.785 Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri atas 663 PNS laki-laki dan 1.122 PNS perempuan. Para PNS ini tersebar di 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS terbanyak terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena didominasi oleh guru yang tersebar di berbagai SD dan SMP di Kota Padang Panjang.

Sebaran jumlah PNS berdasarkan OPD di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025
(Keadaan 31 Desember 2025)

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat Daerah	54	52	106
2	Sekretariat DPRD	12	11	23
3	Inspektorat	17	12	29
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16	13	29
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	22	40
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	126	445	571
7	Dinas Kesehatan	22	188	210
8	Badan Pengelola Keuangan Daerah	21	23	44
9	Dinas Pangan dan Pertanian	28	17	45
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	16	48
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33	16	49
12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	24	33



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

13	Dinas Perhubungan	48	12	60
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	28	20	48
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	10	17
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7	19	26
17	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	56	10	66
18	Rumah Sakit Umum Daerah	67	297	364
19	Kecamatan Padang Panjang Barat	34	19	53
20	Kecamatan Padang Panjang Timur	36	23	59
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	22	11	33
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	11	23
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	12	26
24	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	18	9	27
TOTAL		736	1.293	2.029

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, Tahun 2026

Di Kota Padang Panjang, terdapat 268 PNS dengan golongan IV, yang terdiri atas 110 PNS laki-laki dan 158 PNS perempuan. Sementara itu, jumlah PNS terbanyak berada pada golongan III, dengan total 1.254 orang, yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan dalam golongan III tersebut.

Secara rinci, komposisi PNS Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.10 di bawah ini:

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Padang Panjang
Sesuai Pangkat Golongan Tahun 2025 (Keadaan 31 Desember 2025)

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	IV/e	0	0	0
	IV/d	1	0	1
	IV/c	25	27	52
	IV/b	32	66	98
	IV/a	52	65	117
	Total	110	158	268
2	III/d	135	370	505
	III/c	77	151	228
	III/b	107	224	331
	III/a	108	82	190
	Total	427	827	1.254
3	II/d	40	53	93
	II/c	36	30	66
	II/b	6	2	8
	II/a	5	2	7
	Total	87	87	174
4	I/d	5	0	5
	I/c	0	0	0
	I/b	0	0	0
	I/a	0	0	0
	Total	5	0	5
Total		629	1.072	1.701

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, Tahun 2026



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.587.001.204.447,00. Target ini terealisasi sebesar Rp.565.000.090.757,76 atau 96,25%.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), target yang direncanakan sebesar Rp.112.742.349.470,00, sementara realisasinya mencapai Rp.100.426.050.107,76 atau 89,07%. PAD ini terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

Untuk Pendapatan Transfer, yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan sebesar Rp.470.208.854.977,00 dengan realisasi Rp.460.518.396.206,00 atau 97,93%.

Sementara itu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.4.050.000.000,00 dan memiliki realisasi sebesar Rp.4.055.644.444,00 atau sebesar 100,13%, yang bersumber dari Pendapatan hibah tahun 2025, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian realisasi pendapatan berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Keadaan Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	587.001.204.447,00	565.000.090.757,76	96,24	19,040,426,789.24
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.742.349.470,00	100.426.050.107,76	89,04	12,355,612,462
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	20.372.697.142,00	17.328.596.978,00	85,05	3,044,100,164.00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	75.740.473.872,00	63.853.202.614,00	84,30	11,887,271,258.00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	100,00	0
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	8.637.399.200,00	11.213.158.159,76	129,82	(2,575,758,959.76)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	470208854977	460518396206	97,93	9,690,458,771.00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	438168129880	435977261779	99,49	2,190,868,101.00
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32040725097	24541134427	76,59	7,499,590,670.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,13	(6.644.444,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100	0
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	6.644.444,00	100,13	(6.644.444,00)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026

1. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025, belanja daerah Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar Rp.593.452.610.116,94 dengan realisasi Rp.531.654.227.109,81 atau 89,58% dari total anggaran belanja yang tersedia.

Realisasi belanja berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- a. Belanja Operasi
 - Anggaran: Rp.522.167.052.361,94
 - Realisasi: Rp.475.913.255.150,25
 - Persentase capaian: 91,14%
- b. Belanja Modalerny
 - Anggaran: Rp.64.445.641.755,00
 - Realisasi: Rp.55.109.708.175,56
 - Persentase capaian: 85,51%
- c. Belanja Tak Terduga
 - Anggaran: Rp.6.239.916.000,00
 - Realisasi: Rp.631.263.784,00
 - Persentase capaian: 10,11%

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Keadaan Desember 2025

No.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,58
5.1	BELANJA OPERASI	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14
5.1.01	Belanja Pegawai	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20
5.1.04	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11
5.1.05	Belanja Hibah	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,91
5.2	BELANJA MODAL	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57
5.2.04	Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	97,62
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11
TOTAL BELANJA		593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,58

Sumber: BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2026

2. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan konsekuensi dari selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang dapat berbentuk surplus atau defisit. Secara keseluruhan, pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Pengeluaran Pembiayaan merupakan alokasi untuk penyertaan modal pada entitas tertentu



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

sesuai kebijakan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.6.451.405.669,94, yang berasal dari SiLPA Tahun 2025.

Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Keadaan Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, Tahun 2026

Tabel 1.14
Realisasi Anggaran Pada Masing - Masing OPD
se - Kota Padang Panjang Pada Tahun 2025

NO.	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	Sekretariat Daerah	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	85,68
2	Sekretariat DPRD	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	91,67
3	Inspektorat	5.845.888.067	5.533.353.067,00	94,50
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.785.766.037,00	5.207.535.069,00	90,00
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	506.653.331.375,00	496.057.641.645,76	97,90
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.501.596.993,00	8.216.207.042,00	86,47
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	8.969.795.069,00	8.226.325.894,37	91,71
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.231.779.195,00	106.448.273.483,08	94,00
9	Dinas Kesehatan	70.213.334.897,00	61.572.219.094,00	87,69
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.965.352.251,00	21.475.877.304,79	82,70
11	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.720.229.145,00	10.645.218.527,00	90,82
12	Dinas Pangan dan Pertanian	10.787.208.876,00	9.954.627.048,00	92,28
13	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	29.358.624.906,00	25.681.430.914,00	87,47
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	90,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.678.757.686,00	7.188.976.478,00	93,62
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil & Menengah	20.221.375.517,00	17.510.492.645,98	86,59
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.576.360.112,00	4.817.307.721,00	86,38
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.250.809.773,00	4.892.202.807,00	93,17
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.632.434.365,00	8.071.296.459,36	83,79
20	Dinas Perhubungan	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	93,95
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan	13.726.650.523,00	13.232.956.393,00	96,40



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Pemadam Kebakaran			
22	Kecamatan Padang Panjang Barat	17.201.483.588,00	15.623.459.865,00	90,82
23	Kecamatan Padang Panjang Timur	16.711.452.140,00	15.657.645.506,00	93,69
	JUMLAH	593.452.610.116,94	531.645.227.109,81	89,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, Tahun 2026

g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan program berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan yang memuat alokasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.15
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.591.991.839	72.704.907.923
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.522.975.365	33.772.401.460,08
2	KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	63.057.291.492	60.217.789.393
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.457.020.959	16.259.923.192.6
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	384.083.150	342.140.750
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	497.679.700	376.758.942
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	368.345.600	300.919.250
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.169.801.914	6.923.810.731
		PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.366.489.780	2.925.489.700.37
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	364.936.340	355.534.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	823.951.100	589.453.114
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.810.936.850	2.680.612.942
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.125.827.000	1.133.832.294
		PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN	6.848.497.617	6.334.902.488,42
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	92.376.500	88.314.700
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	665.468.600	414.582.160
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.053.983.826	6.657.228.690
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	374.760.230	292.922.665
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.514.285.960	2.313.008.900
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.451.667.195	7.991.854.071
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.499.724.126	6.753.429.053
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.854.966.500	3.692.337.050
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	2.933.683.700	2.787.190.290



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
		PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
6	SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.090.399.166	5.769.962.849
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.068.070.000	1.040.648.011
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.106.400.584	1.027.505.951
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.905.900	62.327.220
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	179.661.840	178.348.250
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	107.667.500	84.947.500
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.007.420.912	3.826.286.595
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	640.769.000	418.713.630
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	226.222.000	31.831.139
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	603.187.200	486.024.000
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	254.165.440	196.914.350
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	147.632.000	94.048.050
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	79.570.950	65.537.550
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	315.970.700	242.185.784
3	PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.247.103.916	7.841.719.421
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	114.880.900	111.154.250
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
4	PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	81.149.700	29.345.175
5	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	171.067.200	145.110.625
		PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	41.781.100	38.895.685
		PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.842.699.370	1.783.636.207
		PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	28.218.360	25.587.205
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.987.420	14.831.965
		PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	117.395.900	84.998.865
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	78.454.650	37.101.485
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.536.700	751.820
		PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	6.119.653.640	5.516.377.644
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	370.097.400	235.080.303
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.820.682.482	2.557.007.284
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	195.078.840	182.790.502
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	98.276.970	79.554.154
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.579.850	73.371.766
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.981.000	7.665.000
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	73.344.600	65.076.231
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.005.030.465	694.835.891
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.221.410.000	1.122.880.890
9	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	8.322.289.073	8.094.937.010



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.414.753.856	2.932.157.183
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.105.152.286	4.734.773.225
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.204.723.400	1.154.274.150
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.359.527.000	1.292.657.178
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.013.010.003	7.579.479.448
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.610.000	1.610.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	111.200.000	101.219.550
12	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO UMKM	531.666.684	409.938.192
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.186.401.818	2.674.294.150
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.991.000	52.109.607
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	42.270.000	1.842.750
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000	500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.549.537.408	5.106.895.985
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	232.512.950	217.688.741
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000	97.554.630,36
14	STATISTIK	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.089.811.887	1.743.973.110
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.505.000	4.376.925
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	643.712.000	600.964.100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.720.137.280	1.566.498.525
15	PERSANDIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERTANIAN	69.549.780	39.732.950
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	105.143.200	98.167.952
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	949.282.025	885.251.545
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101.377.050	78.799.822
16	KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	15.667.850	13.451.050
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	232.512.950	217.688.741
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000	97.554.630,36
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.089.811.887	1.743.973.110
17	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.184.482.848	3.914.700.390
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	949.282.025	885.251.545
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101.377.050	78.799.822
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	15.667.850	13.451.050
18	KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	285.489.500	225.728.750
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12.274.900	9.646.750
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	591.673.170	478.199.100
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	362.508.800	282.659.022
19	PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	44.175.000	44.165.236
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	662.215.150	100.160.635
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.720.137.280	1.566.498.525
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	69.549.780	39.732.950
20	PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	105.143.200	98.167.952
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	7.600.000	0
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	225.029.400	182.779.450
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.787.300	7.292.800
21	KEHUTANAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.867.922.060	5.598.428.763,98
		Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
		Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
		Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
22	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.787.300	7.292.800
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.867.922.060	5.598.428.763,98
		Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
		Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
23	PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.787.300	7.292.800
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.867.922.060	5.598.428.763,98
		Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
		Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	43.051.300	34.421.200
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59.385.850	38.263.500
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	843.718.700	604.414.342
7	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	551.528.552	460.080.700
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1.093.250	1.050.000
8	TRANSMIGRASI	Tahun 2025 tidak ada di Kota Padang Panjang		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	33.708.382.469	30.158.240.408
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.283.209.630	10.191.251.387,91
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	317.111.600	188.939.809
2	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	17.487.689.772	15.900.074.414
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.319.873.450	13.257.997.452
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	BAPPEDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.137.671.237	4.741.158.046
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	283.559.890	191.298.460
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.835.950	23.316.700
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	302.698.960	251.761.863
2	BPKD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.573.943.095,06	8.053.658.604
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.594.484.750	1.340.785.484
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	471.984.100	152.841.732
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	636.286.900	321.432.430
3	BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.218.292.125	7.612.346.466
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	635.732.600	544.126.082
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.414.000	603.860.576
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.339.075.667	5.025.198.217
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	463.218.000	459.229.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	52.594.400	48.925.850
URUSAN KEWILAYAHAN				
1	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.183.721.329	10.402.342.689
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.432.692.023	1.240.290.825
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.884.545.625	3.975.370.326
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.643.800	1.350.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.223.500	4.106.025
2	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.631.087.690	11.208.159.851
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.207.992.400	967.320.925
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.768.843.050	3.471.744.480
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.529.000	10.420.250
URUSAN BPBD, KESATUAN BANGSA & POLITIK				
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.876.335.843	4.491.621.106
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	896.737.760	854.931.922



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
	MASYARAKAT	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	711.840.750	699.349.850
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMABAGA PENDIDKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.308.064.716	2.004.621.602,37
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	75.000.000	74.193.400
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	101.816.000	101.608.014

Sumber : LRA Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Secara umum pelaksanaan program di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang relatif baik pada sebagian besar urusan pemerintahan, khususnya pada urusan pelayanan dasar dan fungsi pendukung pemerintahan. Mayoritas program pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar terealisasi di atas 85%, yang menunjukkan baiknya konsistensi perencanaan dan penganggaran, stabilitas pelaksanaan kegiatan, dan efektivitas pengendalian internal perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa program dengan serapan rendah yang memerlukan perhatian khusus dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1. Identifikasi Permasalahan

Dalam melakukan identifikasi permasalahan pembangunan, digunakan tiga kriteria yaitu: (a) cakupan masalah dan dampak yang ditimbulkan; (b) merupakan masalah yang terus menerus terjadi sehingga menghambat proses pembangunan dan (c) masalah tersebut terkait dengan komponen utama pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.16
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kota Padang Panjang

Akar Masalah	Permasalahan
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFIS	
1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	
- Terjadi kenaikan suhu rata-rata dan suhu maksimum - Penurunan kelembaban maksimum - Variasi curah hujan dan fluktuasi penyinaran matahari	Perubahan Iklim membuat meningkatnya risiko bencana
Kota ini berada di jalur lintasan regional, posisi ini memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan pengelolaan lalu lintas, urbanisasi cepat, dan tekanan pembangunan, permasalahan lingkungan	Posisi Strategis namun daya saing belum optimal
1.2 Potensi Sumber Daya Alam	
Semakin berkurangnya lahan pertanian	Berkurangnya hasil produksi pertanian
1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	
Kenaikan ini relatif kecil dan cenderung stagnan, dengan fluktuasi tipis setiap tahun	Meskipun jumlah penduduk dan listrik terjual meningkat, konsumsi listrik per kapita hanya naik



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Akar Masalah	Permasalahan
Ketergantungan pada Sumber Energi Konvensional	sedikit
- IKP Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi yang menunjukkan ketahanan pangan yang belum stabil dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. - Pengurangan Lahan Pertanian dan Ketergantungan pada Pasokan Luar - Jumlah produksi padi tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk	- Ketahanan pangan belum stabil dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. - Berkurangnya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan - Pangan yang dikonsumsi masyarakat Kota Padang Panjang belum beragam dan seimbang (masih kurang mengonsumsi sayur, buah dan ubi-ubian namun berlebih padi-padian, lemak dan minyak)	Masih banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara nutrisi
1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas	
- Kota Padang Panjang berada di hilir dari sistem sungai yang hulunya berada di Kabupaten Tanah Datar. - Kontaminasi air sudah terjadi sejak di wilayah hulu, sehingga Padang Panjang menerima air yang sudah tercemar sejak awal masuk ke wilayahnya.	Rendahnya mutu kualitas air akibat pencemaran Sungai
- Masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestik langsung ke sungai, terutama limbah tinja. - Hal ini menyebabkan tingginya kadar fecal coli, yang sangat mempengaruhi nilai IKA. - Edukasi, pengawasan, dan sanksi terhadap pembuangan limbah tidak berjalan optimal.	Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sanitasi
- Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal atau tangki septik yang layak. - Pemukiman padat atau di bantaran sungai mungkin tidak memiliki akses ke sistem sanitasi tertutup.	Belum memadainya Infrastruktur Pengelolaan Limbah
- Tidak ada atau minimnya pengawasan rutin terhadap kualitas air dan aktivitas pencemar. - Penegakan aturan lingkungan hidup masih lemah, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha (jika ada) yang mencemari air.	Kurangnya Monitoring dan Penegakan Hukum
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali	Penurunan kualitas tutupan lahan
Penurunan nilai IKTL mempengaruhi IKLH	Kualitas lingkungan hidup menurun
- Fluktuasi persentase sampah terolah akibat sistem pengelolaan yang belum optimal - Total timbulan sampah yang terus meningkat	Belum optimalnya pengelolaan timbulan sampah terolah
Tantangan dalam pengelolaan sampah organik dan daur ulang material	Kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah terbatas
Cakupan layanan pengumpulan sampah yang masih sangat rendah (di bawah 10% rumah tangga)	Sebagian besar rumah tangga belum mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah
Keterbatasan armada dan sistem pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah belum merata dan optimal
- Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan volume sampah. - Gaya hidup konsumtif dan penggunaan produk sekali pakai memperbanyak sampah non-organik (plastik, kemasan, dsb). - Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya (reduce, reuse, recycle / 3R).	TPA sudah melebihi kapasitas daya tampung
- Pengelolaan limbah B3 masih bergantung pada pihak ketiga - Limbah B3 belum sepenuhnya terkelola secara efektif	- Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 - Masih rendahnya cakupan sanitasi aman
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
- Belum tersedianya Dokumen Kebencanaan (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontingensi), sehingga kegiatan yang dilakukan selama ini belum terarah dengan baik. - Nilai Indeks risiko Bencana stagnan sejak 2015 meskipun ada perubahan risiko	Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Akar Masalah	Permasalahan
Terjadinya bencana galodo akibat cuaca ekstrem (hidrometerologi) pada akhir tahun 2025	
2.1.7 Demografi	
Belum optimalnya sebaran infrastruktur kewilayahan	Tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayah terutama pada kec.ppb
- Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) tinggi, dengan dependency ratio muda sebesar 38,94% - Mayoritas penduduk berada pada usia produktif (67,31%), namun lapangan kerja didominasi sektor jasa	- Beban pada sistem pendidikan dan kesehatan meningkat, kebutuhan fasilitas dan tenaga pendidik serta kesehatan bertambah - Risiko pengangguran terselubung dan kurangnya diversifikasi ekonomi, potensi bonus demografi belum optimal
Ketergantungan penduduk tua mulai meningkat (9,62%)	Kebutuhan layanan sosial dan kesehatan lansia meningkat, potensi beban jangka panjang jika tidak diantisipasi
Tingkat pendidikan didominasi lulusan SMA ke atas (66,4%), namun proporsi lulusan SD dan SLTP masih signifikan	Masih ada kelompok masyarakat dengan keterampilan rendah
Komposisi pekerjaan didominasi sektor jasa (22.197 orang), pertanian dan manufaktur jauh lebih kecil	Belum optimalnya pengembangan sektor jasa untuk mendukung perekonomian
2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
2.1 Kesejahteraan Ekonomi	
Belum optimalnya pengelolaan ekonomi lokal	laju pertumbuhan ekonomi relatif stagnan cenderung menurun
- Kurangnya diversifikasi sumber penghasilan: Ketergantungan pada sektor tertentu membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi. - Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dan keterampilan: Masyarakat miskin seringkali memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan pelatihan keterampilan. - Mental masyarakat yang cenderung mengandalkan bantuan dari Pemerintah	Tren Kemiskinan yang Fluktuatif dan Cenderung Naik
- Banyak pencari kerja belum memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan lapangan usaha - Meningkatnya jumlah pencari kerja - Kurang tersedianya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka fluktuatif dan cenderung naik
Masih Adanya Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Penurunan gini ratio relatif lambat.
2.2 Kesehatan untuk Semua	
- Pemenuhan 12 indikator IKS (seperti imunisasi lengkap, KB, sanitasi, dll) masih rendah - Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum membudaya - Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak masih terbatas di beberapa wilayah - Kurangnya intervensi promotif dan preventif oleh Puskesmas	IKS Kota Padang Panjang masih berada di kategori "keluarga tidak sehat"
- Asupan gizi ibu hamil dan balita belum tercukupi - Pemantauan tumbuh kembang anak tidak rutin - Edukasi gizi kepada keluarga belum intensif - Masih ada keluarga yang tidak memanfaatkan Posyandu secara aktif	Masih ada balita yang mengalami stunting, menunjukkan masalah gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak belum optimal.
- Kepatuhan pasien rendah karena pengobatan lama dan efek samping obat - Sistem pelacakan dan pengawasan pasien TB (DOTS) belum kuat - Kurangnya edukasi mengenai pentingnya pengobatan tuntas - Under-reporting oleh fasilitas layanan kesehatan swasta atau mandiri	Penemuan kasus TB meningkat, namun banyak pasien tidak menyelesaikan pengobatan (lose follow-up), under-reporting, dan kepatuhan pasien rendah
2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	
Peningkatan RLS lambat, hanya naik sedikit tiap tahun.	Masih ada masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
- Literasi meningkat sangat lambat, numerasi stagnan - Kompetensi dan distribusi guru belum merata	Kualitas pembelajaran numerasi dan literasi belum optimal
- Kurangnya infrastruktur yang memadai - Rendahnya minat baca	Belum optimal peningkatan indek pembangunan literasi masyarakat



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Akar Masalah	Permasalahan
2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	
Masih adanya kelompok rentan tetap tidak terlindungi dari risiko ekonomi, kecelakaan kerja, dan tidak memiliki jaminan hari tua	Penurunan persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meski jumlah peserta stabil, diakibatkan bertambahnya penduduk usia kerja
Kurangnya akses dan kesempatan kerja layak bagi penyandang disabilitas di sektor formal, serta implementasi kebijakan yang belum optimal	Rendahnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya	Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar
Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku seni	Rendahnya tingkat partisipasi pelaku seni
Penurunan fungsi pemangku adat dan ulama akibat disrupsi teknologi	Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat pada generasi muda
Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional	Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat
2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya	Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar
Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku seni	Rendahnya tingkat partisipasi pelaku seni
Penurunan fungsi pemangku adat dan ulama akibat disrupsi teknologi	Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat pada generasi muda
Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional	Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat
2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
- Masih adanya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi anak. - Lemahnya regulasi terkait perlindungan khusus anak - Belum adanya sistem pelaporan terintegrasi terkait permasalahan anak - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menindak lanjuti permasalahan anak	Belum terwujudnya sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.
- Masih rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) belum merata. - Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pola asuh - Masih terdapatnya kasus pernikahan dini - Belum optimalnya program bangga kencana	Nilai iBangga masih dalam kategori berkembang, belum mencapai kategori tangguh.
- Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan - Rendahnya pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
3 ASPEK DAYA SAING DAERAH	
3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	
Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan vokasi	Rendahnya daya saing tenaga kerja
3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
- Kurangnya diversifikasi produk industri pengolahan dan inovasi menyebabkan daya saing sektor ini kurang optimal dalam menghadapi persaingan pasar regional dan global - Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri pengolahan	Menurunnya kontribusi PDRB Industri Pengolahan
- Belum optimalnya daya tarik wisata - Belum optimalnya promosi pariwisata	Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB
- Fasilitas pendukung seperti ruang kreatif, akses teknologi, dan sarana produksi masih terbatas - Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan - Kurangnya Jaringan Promosi dan Pemasaran yang Efektif - Keterbatasan Tenaga Kerja Kreatif dan SDM Terampil	Belum optimalnya perkembangan ekonomi kreatif
Sebagian besar koperasi masih bergerak di usaha simpan pinjam, perlu mendorong hadirnya banyak koperasi berbasis produk/jasa/perdagangan (koperasi sektor riil)	Masih rendahnya kontribusi koperasi dalam perekonomian kota padang panjang
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah - Banyak orang lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal yang dianggap lebih stabil dan bergaji tetap, sehingga minat untuk menjadi wirausaha rendah - Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan	Belum optimalnya rasio kewirausahaan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Akar Masalah	Permasalahan
	Tingkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja fluktuatif dan cenderung naik
- Perempuan seringkali harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan produktif, sehingga mengurangi kesempatan bekerja di sektor formal. - Minimnya fasilitas yang mendukung perempuan bekerja, seperti tempat penitipan anak dan kebijakan ramah gender di tempat kerja.	Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
Masih rendahnya asset dan omset industri	Belum adanya industri kecil
3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	
- Belum optimalnya pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian (PIHP) Bukit Surungan. - Populasi Sapi perah yang terus menurun - Teknologi pengolahan susu belum optimal - Produksi susu tidak semuanya terserap pasar - Belum semua petani tergabung dalam kelompok tani agar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi - Alokasi pupuk belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan petani pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) - Masih adanya petani yang tidak melakukan penebusan pupuk sesuai dengan RDKK yang telah disusun sebelumnya - Belum meratanya kios pengecer di tiap kecamatan - Masih terjadinya penebusan pupuk diatas HET - Masih ditemui kondisi stok pupuk tidak tersedia di kios pengecer - Tidak semua jenis komoditi pertanian mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi	Rendahnya PDRB Sektor Pertanian
Rendahnya minat masyarakat bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.	Belum optimalnya Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
3.4 Transformasi Digital	
- Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana produktivitas - Masih belum terbentuknya Relawan TIK	Belum optimalnya nilai Indeks Masyarakat Digital
3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
- Rendahnya minat investasi baru - Kurangnya insentif investasi - Keterbatasan lahan - Diversifikasi produk ekspor kurang - Daya saing produk rendah	Belum optimalnya nilai investasi dan ekspor barang dan jasa
3.6 Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar	Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur
Belum optimalnya ketersediaan/pengelolaan gedung strategis kota	
Kurangnya sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman	
Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian	masih belum optimalnya rumah tangga dengan akses hunian layak (data https://sumbar.bps.go.id)
Masih cukup tingginya angka kemiskinan	
3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal - Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Masih rendahnya kemandirian ekonomi
4. ASPEK PELAYANAN UMUM	
4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
- Belum optimalnya adopsi teknologi informasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik - Belum meratanya kualitas infrastruktur teknologi informasi - Kapasitas SDM TI belum memenuhi kompetensi	Belum optimalnya Pelayanan publik dan layanan pemerintahan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Akar Masalah	Permasalahan
- Pengawasan internal dan budaya integritas belum sepenuhnya kuat - Regulasi belum sepenuhnya sederhana	Indeks Integritas daerah masih fluktuatif dan belum stabil pada tren peningkatan Belum optimalnya proses birokrasi
4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	
- Maraknya penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Masih terjadinya kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

Sumber : RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan utama pembangunan daerah akan menjadi prioritas utama sesuai dengan periode atau waktu perencanaan. Identifikasi masalah yang telah dilakukan akan menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah Kota Padang Pnajang berdasarkan identifikasi permasalahan diatas secara umum adalah sebagai berikut:

- Kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial belum merata**, ditandai dengan rendahnya akses layanan dasar, masih adanya anak putus sekolah, ketimpangan distribusi guru, rendahnya cakupan jaminan sosial, serta belum optimalnya perlindungan kelompok rentan.
- Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan belum tercapai**, ditandai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi, kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, ketergantungan pada sektor tertentu, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.
- Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya efisien, akuntabel, dan berbasis digital**, ditandai dengan lemahnya regulasi, belum optimalnya pelayanan publik, serta transformasi digital yang belum berjalan maksimal.
- Supremasi hukum, stabilitas sosial, dan kepastian ekonomi daerah belum optimal**, ditandai dengan lemahnya penegakan hukum lingkungan, pengawasan, serta stabilitas ekonomi makro dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal.
- Ketahanan sosial, budaya, dan nilai keagamaan Kota Serambi Mekkah belum sepenuhnya terjaga**, ditandai dengan Permasalahan pada pelestarian budaya, rendahnya partisipasi generasi muda dalam seni budaya, serta ketahanan sosial dan keluarga yang masih lemah.
- Kualitas lingkungan hidup masih rendah dan upaya adaptasi serta mitigasi bencana belum memadai**, ditandai dengan masih adanya pencemaran air, pengelolaan sampah yang



belum optimal, rendahnya cakupan sanitasi, serta mitigasi dan penanganan pasca bencana yang belum optimal.

7. **Pembangunan daerah belum sepenuhnya berkelanjutan**, ditandai dengan masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, ketergantungan pada sumber eksternal, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal.
8. **Infrastruktur dasar dan strategis belum sepenuhnya berkualitas dan ramah lingkungan**, ditandai dengan Permasalahan terkait infrastruktur dasar, transportasi publik, hunian layak, dan pengelolaan limbah.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi dan Misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah: **“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”**.

Untuk memperjelas makna dan arah dari visi tersebut, berikut ini disajikan penjabaran dari setiap unsur utama dalam visi pembangunan:

- Maju** : Memiliki makna bahwa pembangunan yang akan dicapai adalah pembangunan yang pesat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Yaitu dalam bentuk Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai didukung adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas. Padang Panjang tumbuh dengan ekonomi yang stabil dan merata ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah.
- Sejahtera** : Adanya perbaikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, merata dan berkeadilan. Pembangunan kota diselenggarakan dalam semangat mewujudkan masyarakat kota yang berdaya / mandiri / berdaulat yang ditandai dengan akses setiap individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Infrastruktur kota mendukung kemajuan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi semua warga. Selain itu, hubungan sosial di antara masyarakat.
- Bermarwah** : Kota yang menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai luhur agama, kearifan lokal dan adat istiadat berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dijunjung tinggi yang mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup harmonis



dan beradab.

2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi “**Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah**”, serta dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis, serta tantangan dan potensi Kota Padang Panjang ke depan, maka dirumuskan lima misi pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah.

Adapun misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi

Misi ini bertujuan untuk menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama dalam pencapaian kemajuan Kota Padang Panjang. SDM yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga oleh kemampuannya beradaptasi, berpikir kritis, serta memiliki akhlak dan karakter yang kuat sebagai fondasi kehidupan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan menjadi langkah strategis. Pendidikan vokasional, pelatihan kerja, serta penguatan literasi digital dan kewirausahaan akan diperkuat guna menciptakan lulusan yang siap kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya, pengembangan kreativitas dan inovasi menjadi aspek penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era disrupsi teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah daerah akan mendorong tumbuhnya ruang-ruang kreatif, memperkuat ekosistem inovasi lokal, serta menjembatani sinergi antara sektor pendidikan, industri, dan komunitas. Hal ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide segar yang memberi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, program pembangunan diarahkan untuk membentuk individu yang memiliki kompetensi unggul, produktivitas tinggi, serta mampu bersaing secara sehat di tingkat lokal, nasional, maupun global. Daya saing ini tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga keunggulan sikap, etos kerja, dan semangat berinovasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, seluruh upaya tersebut perlu ditopang oleh masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Oleh karena itu, pembangunan sektor kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian misi ini. Layanan kesehatan dasar yang berkualitas, pemenuhan gizi, pengendalian penyakit, serta peningkatan kesadaran hidup bersih dan sehat akan terus dioptimalkan. Dengan masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif, Kota Padang Panjang akan memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan.



Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal

Misi ini mengarahkan pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang agar bertumpu pada kekuatan dan keunikan potensi lokal yang dimiliki daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian strategi yang komprehensif, termasuk penguatan kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung iklim usaha, investasi, dan daya saing lokal. Revitalisasi dan penataan pusat-pusat perdagangan juga akan dilakukan untuk menstimulasi berkembangnya sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, perdagangan, pertanian dan peternakan, serta industri pengolahan.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan pelaku usaha lokal dengan memberikan dukungan pelatihan, akses permodalan, serta penguatan jaringan distribusi dan pemasaran produk. Dalam jangka menengah, pendirian perusahaan daerah berbasis multiusaha akan menjadi instrumen penting dalam mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal. Penguatan sektor pariwisata juga menjadi bagian integral dari misi ini, khususnya pariwisata berbasis budaya yang menonjolkan kekayaan lokal seperti seni, tradisi, sejarah, dan nilai-nilai keislaman khas Serambi Mekah. Upaya ini akan diiringi dengan penyelenggaraan event tematik, festival budaya, dan pengembangan kuliner khas daerah sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, pembangunan pusat ekonomi kreatif akan difokuskan sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara nyata, yang ditandai dengan meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan. Pembangunan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berorientasi keberlanjutan inilah yang menjadi landasan utama bagi Kota Padang Panjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama untuk memastikan terciptanya sistem birokrasi yang efisien, partisipatif, serta adaptif terhadap dinamika perubahan.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, responsif, dan inovatif. Profesionalisme aparatur pemerintah dapat



ditingkatkan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penerapan manajemen talenta guna mengoptimalkan potensi individu dan mendorong budaya kerja yang kompeten dan berintegritas. Penguatan kapasitas kelembagaan juga akan dilakukan agar sistem pemerintahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat. Aspek akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam proses pemerintahan akan terus diperkuat melalui reformasi birokrasi dan penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan diselenggarakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.

Penyediaan pelayanan publik yang prima merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan misi ini. Hal ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih mudah diakses, murah, efisien, dan efektif. Selain itu, inovasi dalam layanan publik terus didorong sebagai bagian dari transformasi pemerintahan menuju sistem kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kota Padang Panjang akan menciptakan ruang bagi lahirnya berbagai bentuk inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal

Misi ini mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat Padang Panjang yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter hanya dapat dicapai apabila nilai-nilai agama, adat istiadat, serta kearifan lokal benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi sosial dan budaya dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan memiliki identitas yang kuat.

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang rukun, aman, dan tertib melalui penguatan kohesi sosial, toleransi antar warga, serta pengelolaan keamanan berbasis masyarakat. Upaya ini berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan kelompok rentan seperti pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas, agar setiap lapisan masyarakat merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam pembangunan.

Untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat, pemerintah mendorong penguatan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan aktivitas keagamaan, terutama di masjid sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat. Pendidikan karakter yang berbasis nilai agama dan kearifan lokal juga terus dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya. Pelestarian dan pengembangan budaya serta



kearifan lokal menjadi elemen penting dari misi ini. Seni tradisional, adat istiadat, dan ekspresi budaya masyarakat akan terus dirawat dan dikembangkan agar menjadi kekuatan budaya yang mampu memperkuat jati diri daerah sekaligus menjadi daya tarik budaya yang bernilai ekonomi. Dengan misi ini, Kota Padang Panjang diarahkan menjadi kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kokoh dalam nilai, harmonis dalam kehidupan sosial, dan kaya dalam warisan budaya serta spiritualitas masyarakatnya.

Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota hijau yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan masa depan. Pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap infrastruktur dasar. Hal ini meliputi perbaikan dan pengembangan prasarana transportasi, penyediaan air minum yang layak, penataan drainase, serta sistem perpustakaan yang terpadu dan efisien.

Pada aspek lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas utama. Salah satu fokus strategisnya adalah pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan, guna mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di perkotaan. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) secara fungsional dan inklusif juga menjadi bagian penting dari misi ini. RTH akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekologis masyarakat, seperti ruang publik, taman keluarga, taman anak, taman lansia, dan hutan kota, yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan kota terhadap tekanan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim. Dengan pendekatan berkelanjutan dan partisipatif, pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan diharapkan dapat berjalan seimbang, sehingga mendukung transformasi Padang Panjang sebagai kota hijau yang nyaman, sehat, dan inklusif bagi seluruh warganya.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan rumusan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi, yang didasarkan kepada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.



Berdasarkan rumusan visi dan misi, maka ditetapkanlah 5 (lima) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan

Tabel 1.17
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH		
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	S1.1 : Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat
		S1.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		S1.3 : Meningkatkan prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan
		S1.4 : Meningkatkan pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal	T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat	S2.1 : Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal
		S2.2 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
		S2.3 : Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah
		S2.4 : Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
		S2.5 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah
		S2.6 : Meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan daerah
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif	T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif
		S3.2 : Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		S3.3 : Meningkatkan profesionalisme ASN
		S3.4 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Misi 4 : Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya	S4.1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
		S4.2 : Meningkatkan perlindungan sosial terhadap masyarakat
		S4.3 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan	T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan	S5.1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
		S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Sumber : RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah atau program prioritas, merupakan program yang diturunkan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030, sebagai langkah utama dalam mencapai tujuan pembangunan lima tahun ke depan.

Program prioritas ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi serta misi daerah. Rincian program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tabel 1.18
Program Pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030

KODE REKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN(OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TOTAL					579.992.019.273		583.574.833.000		592.550.001.000		610.298.701.000		626.105.571.000		644.794.128.000			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					112.768.706.656		124.967.092.215		127.271.536.525		125.817.122.794		123.918.381.731		121.672.737.216		736.415.577.137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					112.135.194.656		123.372.924.215		125.646.536.525		124.202.122.794		122.290.381.731		119.975.737.216	-	727.622.897.137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%	100	100	74.503.344.278	100	63.526.672.343	100	53.650.123.900	100	53.769.710.169	100	57.574.969.106	100	54.600.324.591	100	357.625.144.387	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah				37.631.850.378		59.696.251.872		71.473.912.625		69.909.912.625		64.192.912.625		64.852.912.625	-	367.757.752.750	
		APSPAUD (5-6 tahun)	Angka	62	63	37.631.850.378	64	59.696.251.872	65	71.473.912.625	66	69.909.912.625	70	64.192.912.625	71,00	64.852.912.625	71	367.757.752.750	
		APS SD sederajat	Angka	99,7	99,71		99,72		99,73		99,74		99,75		99,76		99,76		
		APS SMP sederajat	Angka	97,5	97,51		97,52		97,53		97,54		97,55		97,57		97,57		
		APK Paud (3-6 tahun)	Angka	50	51		53		55		57		59		59,05		59,05		
		APK SD sederajat	Angka	106	106,1		106,30		106,50		106,70		106,90		106,92		106,92		
		APK SMP sederajat	Angka	107	107,1		107,20		107,30		107,40		107,40		107,50		107,50		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	%	20	20	-	30	150.000.000	40	350.000.000	60	350.000.000	80	350.000.000	100	350.000.000	100	1.550.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	%	10	0	-	25	152.500.000	50	152.500.000	75	152.500.000	100	152.500.000	100	152.500.000	100	610.000.000	
		Indeks Pemerataan Guru	%	90	0	-	92	-	95	-	96	-	97	-	98	-	98	-	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	%	0	0	-	0	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					633.512.000		1.594.168.000		1.625.000.000		1.615.000.000		1.628.000.000		1.697.000.000	-	8.792.680.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					633.512.000		1.594.168.000		1.465.000.000		1.465.000.000		1.465.000.000		1.465.000.000	0	8.087.680.000	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	%	86,16	75	633.512.000	75,1	1.594.168.000	75,25	1.465.000.000	75,45	1.465.000.000	75,55	1.465.000.000	75,57	1.465.000.000	75,57	8.087.680.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN					-		-		160.000.000		150.000.000		163.000.000		232.000.000		705.000.000	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	%	49	0	-	0	160.000.000	60	160.000.000	65	150.000.000	70	163.000.000	70,3	232.000.000	70,3	705.000.000	
	DINAS KESEHATAN					163.272.878.269		169.303.603.570		189.265.667.930		207.321.265.758	-	221.995.896.719	-	235.815.804.656	-	1.186.975.116.902	Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					80.132.347.525		69.495.607.150		189.265.667.930		207.321.265.758	-	221.995.896.719	-	235.815.804.656	-	1.004.026.589.738	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%	100	100	61.889.689.116	100	52.281.807.650	100	167.555.621.430	100	185.601.219.258	100	199.950.850.219	100	214.369.558.156	100	881.648.745.829	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					17.042.549.959		17.041.299.000		20.544.946.000		20.554.946.000		20.654.946.000		20.654.946.000	-	116.493.632.959	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	0	1	17.042.549.959	1	17.041.299.000	1	20.544.946.000	1	20.554.946.000	1	20.654.946.000	1	20.654.946.000	1	116.493.632.959	
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	8	5		4		4		3		3		2		2		
		Prevalensi stunting	%	19	17,08		15,17		13,25		11,33		9,42		7,50		7,50		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					384.083.150		15.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		-	539.083.150
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan	%	50	68	384.083.150	68	15.000.000	70	35.000.000	72	35.000.000	74	35.000.000	76	35.000.000	76	539.083.150	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN					497.679.700		32.500.500		32.500.500		32.500.500		32.500.500		32.500.500		-	660.182.200
	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	NA	49,3	497.679.700	49,5	32.500.500	50,0	32.500.500	52,0	32.500.500	54,0	32.500.500	56,0	32.500.500	56,0	660.182.200	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					318.345.600		125.000.000		1.097.600.000		1.097.600.000		1.322.600.000		723.800.000		-	4.684.945.600
	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	NA	57,5	318.345.600	58	125.000.000	57,50	1.097.600.000	63	1.097.600.000	63	1.322.600.000	68	723.800.000	68	4.684.945.600	
	PUSKESMAS KOTO KATIK					1.827.682.040		1.052.456.640		-		-		-		-	-	2.880.138.680	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					930.154.840		760.656.640		-		-		-		-	-	1.690.811.480	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	%	100	100	930.154.840	100	760.656.640		-		-		-		-	100	1.690.811.480	
1.02.02..	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					855.351.200		125.000.000									-	980.351.200	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	0	1	855.351.200	1	125.000.000									1	980.351.200	
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	8	5		4										4		
		Prevalensi stunting	%	19	17,08		15,17										15,17		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					42.176.000		Rp 166.800.000										Rp 208.976.000	
	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	persen	NA	57,5	42.176.000	57,5	Rp 166.800.000									57,5	Rp 208.976.000	
	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS					2.813.393.436		1.708.725.780		-		-		-		-	-	4.522.119.216	Dinas Kesehatan
1.02.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.847.023.436		1.481.725.780		-		-		-		-	-	3.328.749.216	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	%	100	100	1.847.023.436	100	1.481.725.780									100	3.328.749.216	
1.02.02..	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					922.891.000		125.000.000									-	1.047.891.000	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	0	1	922.891.000	1	125.000.000									1	1.047.891.000	
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	8	5		4										4		
		Prevalensi stunting	%	19	17,08		15,17										15,17		
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					43.479.000		102.000.000										145.479.000	
	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	NA	57,5	43.479.000	57,5	102.000.000										57,5	145.479.000	
	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN					2.285.906.211		1.334.787.360		-		-		-		-	-	3.620.693.571	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.347.122.641		1.032.787.360										2.379.910.001	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	%	100	100	1.347.122.641	100	1.032.787.360									100	2.379.910.001	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

1.02.02..	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	0	1	917.183.570	1	125.000.000										-	1.042.183.570	
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	8	5		4											1	1.042.183.570	
		Prevalensi stunting	%	19	17,08		15,17											4		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	NA	57,5	21.600.000	57,5	177.000.000										57,5	198.600.000	
						21.600.000		177.000.000											198.600.000	
	PUSKESMAS GUNUNG					2.053.994.305		1.137.030.640										-	3.191.024.945	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	%	100	100	1.237.623.305	100	859.030.640										-	2.096.653.945	
						1.237.623.305		859.030.640										-	2.096.653.945	
1.02.02..	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	0	1	761.467.000	1	125.000.000										1	886.467.000	
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	8	5		4											4		
		Prevalensi stunting	%	19	17,08		15,17											15,17		
1.02.05..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	NA	57,5	54.904.000	57,5	153.000.000										57,5	207.904.000	
						54.904.000		153.000.000											207.904.000	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					74.159.554.752		94.574.996.000	-									-	168.734.550.752	Dinas Kesehatan
1.02.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	%	100	100	65.947.503.252	100	90.000.000.000										-	155.947.503.252	
						65.947.503.252		90.000.000.000										-	155.947.503.252	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	0	1	34.018.799.252	1	53.635.416.391										1	196.276.004.286	
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	8	5		4											4		
		Prevalensi stunting	%	19	17,08		15,17											15,17		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					25.806.747.752		49.060.420.391		31.320.732.601		28.526.094.671		25.270.909.781		23.504.051.589			183.488.956.786	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					25.802.697.752		49.056.370.391		31.316.682.601		28.522.044.671		25.266.859.781		23.500.001.589		-	183.464.656.786	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	6.909.310.356	100	6.938.240.000	100	4.653.283.100	100	5.086.869.921	100	4.873.109.781	100	4.905.051.589	100		33.365.864.748	
						6.909.310.356		6.938.240.000		4.653.283.100		5.086.869.921		4.873.109.781		4.905.051.589			33.365.864.748	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88,84	89,04	3.581.611.630	89,24	720.000.000	89,44	300.000.000	89,64	3.200.000.000	89,84	3.200.000.000	90,04	3.200.000.000	90,04		14.201.611.630	
						3.581.611.630		720.000.000		300.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000			14.201.611.630	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	%	88,4	88,60	373.936.340	88,80	250.000.000	89,00	100.000.000	89,20	100.000.000	89,40	100.000.000	89,60	100.000.000	89,60		1.023.936.340	
						373.936.340		250.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			1.023.936.340	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	89,6	89,8	841.951.100	90,00	500.000.000	90,20	1.100.000.000	90,40	975.000.000	90,60	400.000.000	90,80	400.000.000	90,80	4.216.951.100	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	%	93,19	93,39	3.862.186.850	93,59	904.180.391	93,79	3.100.000.000	93,99	3.100.000.000	94,19	3.100.000.000	94,39	3.100.000.000	94,39	17.166.367.241	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam kondisi Baik	%	46,8	47	3.296.577.000	47,2	35.830.000.000	47,40	8.800.000.000	47,60	3.530.000.000	47,80	4.030.000.000	48,00	4.030.000.000	48,00	59.516.577.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	NA	12,5	-	13,65	2.633.000.000	50,00	8.998.449.501	70,00	7.659.224.750	90,00	4.698.800.000	100,00	5.000.000.000	100,00	28.989.474.251	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dalam kota	Tingkat Kemantapan Jalan	%	89,34	89,54	6.393.694.826	89,74	1.000.000.000	89,94	4.000.000.000	90,14	4.600.000.000	90,34	4.600.000.000	90,54	2.500.000.000	90,54	23.093.694.826	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi	%	21	28	61.460.900	35	60.000.000	42	60.000.000	49	60.000.000	56	60.000.000	60	60.000.000	60	361.460.900	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian kasus Pelanggaran	%	72,5	75,00	481.968.750	80,00	220.950.000	82,50	204.950.000	90,00	210.950.000	95,00	204.950.000	100,00	204.950.000	100,00	1.528.718.750	
2.10.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					4.050.000		4.050.000		4.050.000		4.050.000		4.050.000		4.050.000		24.300.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.10.10	PROGRAM PENATAAN TANAH Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	NA	40,00	4.050.000	50,00	4.050.000	55,00	4.050.000	60,00	4.050.000	65,00	4.050.000	70,00	4.050.000	70,00	24.300.000	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					29.041.667.667		17.346.488.668		17.852.793.918		25.430.737.193		24.683.105.229		25.863.087.383		140.217.880.059	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					18.044.293.765		7.548.406.470		6.901.923.210		8.980.458.971		9.291.276.125		9.597.016.675	0	60.363.375.217	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	%	90	90 %	6.727.830.379	90	6.790.974.210	90	4.584.786.910	90	5.213.322.671	90	5.224.139.825	90	5.029.880.375	90	33.570.934.371	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100	310.942.230	100	425.166.300	100	1.057.136.300	100	557.136.300	100	557.136.300	100	557.136.300	100	3.464.653.730	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh yang di tangani	%	0	3,9	-	5,85	-	8,19	1.010.000.000	10,92	1.010.000.000	14,04	1.010.000.000	17,55	1.010.000.000	17,55	4.040.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	%	87,29	88,48	2.667.765.960	89,53	132.265.960	90,65	50.000.000	91,76	1.000.000.000	92,29	1.000.000.000	93,99	1.000.000.000	93,99	5.850.031.920	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) meningkatkan penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	79,31	87,11	8.337.755.196	87,98	200.000.000	88,00	200.000.000	88,50	1.200.000.000	89,0	1.500.000.000	89,50	2.000.000.000	89,50	13.437.755.196	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					10.425.711.349		9.187.070.708		10.339.859.218		14.839.266.732		13.780.817.614		14.655.059.218	0	73.227.784.839	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP <i>Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP</i>	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersedia	%	NA	40	111.067.200	60	1.000.000	80	1.000.000	80	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	713.067.200	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP <i>Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	50.382.100	100	84.989.800	100	83.989.800	100	83.989.800	100	83.989.800	100	83.989.800	100	471.331.100	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) <i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati</i>	Persentase RTH Kota	%	4,19	10,45	1.870.363.570	10,49	2.192.178.770	10,53	2.393.178.770	10,57	3.492.178.770	10,62	2.992.178.770	10,66	2.992.178.770	10,66	15.932.257.420	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) <i>Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3)</i>	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola	%	32	32	28.218.360	32	31.197.760	32	31.197.760	32	31.197.760	32	31.197.760	32	31.197.760	32	184.207.160	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) <i>Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diberikan</i>	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	%	55,17	60	17.987.420	61	10.000.000	62	10.000.000	63	55.000.000	64	55.000.000	65	55.000.000	65	202.987.420	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH <i>Meningkatnya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem berbasis kearifan lokal</i>	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	%	10	10	-	20	-	30	10.000.000	40	10.000.000	50	10.000.000	60	10.000.000	60	40.000.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT <i>Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup</i>	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup /Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya	%	100	100	117.395.900	100	139.754.250	100	119.754.250	100	119.754.250	100	119.754.250	100	119.754.250	100	736.167.150	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT <i>Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	45	50	78.454.650	55	78.454.650	65	78.454.650	75	78.454.650	85	78.454.650	90	78.454.650	90	470.727.900	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP <i>Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup</i>	Persentase Penyelesaian Sengketa / kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	8.536.700	100	8.536.700	100	8.536.700	100	8.536.700	100	8.536.700	100	8.536.700	100	51.220.200	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN <i>Meningkatnya tata kelola persampahan</i>	Persentase pengelolaan sampah	%	99,19	99,24	8.143.305.449	99,29	6.640.958.778	99,34	7.603.747.288	99,39	10.760.154.802	99,44	10.201.705.684	99,49	11.075.947.288	99,49	54.425.819.289	
	UPTD LABORATORIUM DAN LINGKUNGAN HIDUP					571.662.553		611.011.490		611.011.490		1.611.011.490		1.611.011.490		1.611.011.490		6.626.720.003	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					201.565.153		196.836.600		196.836.600		196.836.600		196.836.600		196.836.600		1.185.748.153	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	%	90	90	201.565.153	90	196.836.600	90	196.836.600	90	196.836.600	90	196.836.600	90	196.836.600	90	1.185.748.153	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					370.097.400		414.174.890		414.174.890		1.414.174.890		1.414.174.890		1.414.174.890		5.440.971.850	
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	370.097.400	100	414.174.890	100	414.174.890	100	1.414.174.890	100	1.414.174.890	100	1.414.174.890	100	5.440.971.850	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					11.484.539.832		9.977.765.786		9.128.175.183		9.011.004.655		9.901.617.898		9.843.190.524		59.346.293.878	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.484.539.832		9.977.765.786		9.128.175.183		9.011.004.655		9.901.617.898		9.843.190.524		59.346.293.878	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.653.297.632		6.667.851.736		4.458.215.183		4.954.024.655		4.744.637.898		4.781.210.524		32.259.237.628	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	%	100	100	6.653.297.632	100	6.667.851.736	100	4.458.215.183	100	4.954.024.655	100	4.744.637.898	100	4.781.210.524	100	32.259.237.628	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.977.263.900		2.968.423.900		3.606.980.000		3.121.980.000		3.471.980.000		3.376.980.000		20.523.607.800	
	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan PERDA	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	3.977.263.900	100	2.968.423.900	100	3.606.980.000	100	3.121.980.000	100	3.471.980.000	100	3.376.980.000	100	20.523.607.800	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	74	75		76		77		78		79		80		80		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	0	0		50		60		0		0		70		70		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					853.978.300		341.490.150		1.062.980.000		935.000.000		1.685.000.000		1.685.000.000		6.563.448.450	
	Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	0	10	853.978.300	20	341.490.150	40	1.062.980.000	60	935.000.000	80	1.685.000.000	95	1.685.000.000	95	6.563.448.450	
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	0	100		100		100		100		100		100		100		
	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.248.019.339	-	8.893.284.000	-	8.174.378.100		8.610.071.043		8.394.288.911		8.492.724.554		53.812.765.947	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.144.876.093		6.772.409.134		6.389.661.100		6.825.354.043		6.609.571.911		6.708.007.554	-	41.449.879.835	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.792.358.172		5.905.009.134		3.987.601.100	-	4.423.294.043	-	4.207.511.911	-	4.305.947.554	-	28.621.721.914	
1.06.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	5.792.358.172	100	5.905.009.134	100	3.987.601.100	100	4.423.294.043	100	4.207.511.911	100	4.305.947.554	100	28.621.721.914	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.055.710.050		333.700.000		1.097.000.000	-	1.097.000.000	-	1.097.000.000	-	1.097.000.000	-	5.777.410.050	
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	1.055.710.050	100	333.700.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	5.777.410.050	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.015.300.584		203.800.000		1.203.560.000	-	1.203.560.000	-	1.203.560.000	-	1.203.560.000	-	6.033.340.584	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	1.015.300.584	100	203.800.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	6.033.340.584	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					75.977.750		294.100.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		450.077.750	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	75.977.750	100	294.100.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	450.077.750	
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	7	7.3		7,35		7,40		7,45		7,5		7,55		7,55		
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	7	7.3		7,35		7,40		7,45		7,5		7,55		7,55		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					90.912.037		21.000.000		56.500.000		56.500.000		56.500.000		56.500.000		337.912.037	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	90.912.037	100	21.000.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	337.912.037	
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					114.617.500		14.800.000		25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	229.417.500	
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	%	100	100	114.617.500	100	14.800.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	229.417.500	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					789.964.181		82.000.000		749.660.000	-	749.660.000	-	749.660.000	-	749.660.000	-	3.870.604.181	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					263.935.440		52.000.000		265.000.000	-	265.000.000	-	265.000.000	-	265.000.000	-	1.375.935.440	
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	15,38	15,40	263.935.440	15,42	52.000.000	15,44	265.000.000	15,46	265.000.000	15,48	265.000.000	15,50	265.000.000	15,50	1.375.935.440	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	66.33	66.37		66.43		66.44		66.45		66.46		66.47		66.47		
2.08.03	PROGRAM PEREMPUAN					147.632.000		10.000.000		182.353.750		182.353.750		182.353.750		182.353.750		858.002.000	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPQ yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	147.632.000	100	10.000.000	100	182.353.750	100	182.353.750	100	182.353.750	100	182.353.750	100	858.002.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					86.291.041		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		196.291.041	
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	64,05	64,08	86.291.041	64,10	10.000.000	64,14	25.000.000	64,18	25.000.000	64,20	25.000.000	64,24	25.000.000	64,24	196.291.041	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					321.150.700		10.000.000		277.306.250		277.306.250		277.306.250		277.306.250		1.440.375.700	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	321.150.700	100	10.000.000	100	277.306.250	100	277.306.250	100	277.306.250	100	277.306.250	100	1.440.375.700	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	85,74	85,80		85,84		85,88		85,90		85,95		85,98		85,98		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.313.179.065		2.038.874.866		1.035.057.000	-	1.035.057.000	-	1.035.057.000	-	1.035.057.000	-	8.492.281.931	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19) Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	Angka	2,51	2,39	73.344.600	2,38	46.000.000	2,37	49.200.000	2,36	49.200.000	2,35	49.200.000	2,34	49.200.000	2	316.144.600	
			Angka	6,2	6,1		6,08		6,06		6,04		6,02		6,00		6		
			%	0,89	0,89		0,88		0,88		0,88		0,88		0,88		1		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Rasio akseptor KB Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	62	62,25	1.005.030.465	62,50	217.000.000	63,00	306.657.000	63,50	306.657.000	64,00	306.657.000	64,50	306.657.000	64,50	2.448.658.465	
			%	14	13,7		13,50		13,00		12,50		12,00		11,50		11,50		
			%	74,41	74,45		74,49		74,54		74,59		74,64		74,69		74,69		
			%	65,73	66		66,20		66,40		66,60		66,80		67		67		
			%	100	100		100		100		100		100		100		100		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	%	62	62,25	1.234.804.000	62,50	1.775.874.866	63,00	679.200.000	63,50	679.200.000	64,00	679.200.000	64,50	679.200.000	64,50	5.727.478.866	
			Angka	NA	59,4		59,80		60,20		60,60		61,00		61,40		61,40		
			Angka	86,86	86,96		87,96		88,96		89,96		90,96		91,96		91,96		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					5.151.694.195		5.449.783.890		4.735.792.690		5.088.697.960		4.909.641.677		4.965.544.982		30.301.155.394	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.052.894.195		5.089.783.890		4.620.792.690		4.973.697.960		4.794.641.677		4.850.544.982	0	29.382.355.394	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	3.872.577.195	100	3.674.783.890	100	2.665.292.690	100	3.077.672.960	100	2.858.065.427	100	2.873.389.920	100	19.021.782.081	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	%	NA	0		- 0		- 100	100.000.000		- 100		- 100		- 100		100.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	%	54,45	59,45 %	106.234.000	64,45	175.000.000	69,45	185.500.000	74,45	196.025.000	79,45	206.576.250	84,45	217.155.063	84,45	1.086.490.313	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,2	0,4	670.883.000	0,6	840.000.000	0,8	1.270.000.000	1	1.300.000.000	1,2	1.330.000.000	1,4	1.360.000.000	1,4	6.770.883.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					403.200.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.403.200.000	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	7883	9883	403.200.000	11883	400.000.000	13883	400.000.000	15883	400.000.000	17883	400.000.000	19883	400.000.000	19883	2.403.200.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					98.800.000		360.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	0	918.800.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					56.000.000		245.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		501.000.000	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap target investasi	%	NA	75	56.000.000	80	245.000.000	85	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	501.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					42.300.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		342.300.000	
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	NA	3	42.300.000	3	100.000.000	3	50.000.000	8	50.000.000	15	50.000.000	25	50.000.000	25	342.300.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					500.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		75.500.000	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	75.500.000	
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN					10.594.480.886		8.394.979.977		9.576.503.352		10.480.017.365		11.146.916.492		10.304.657.349		60.497.555.421	Dinas Pangan Dan Pertanian
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.125.946.726		7.785.256.252		5.858.620.952		6.208.123.465		5.994.662.092		6.027.452.949	0	40.000.062.436	Dinas Pangan Dan Pertanian
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.029.343.426		7.670.414.252		5.348.620.952		5.748.123.465		5.534.662.092		5.567.452.949		37.898.617.136	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	%	100	100	8.029.343.426	100		100		100		100		100		100		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					96.603.300		104.842.000		480.000.000		430.000.000		430.000.000		430.000.000		1.971.445.300	
	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,18	85,19	96.603.300	85,20	104.842.000	85,21	480.000.000	85,22	430.000.000	85,23	430.000.000	85,24	430.000.000	85,24	1.971.445.300	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					-		10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		130.000.000	
	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	50	51	-	52	10.000.000	53	30.000.000	54	30.000.000	55	30.000.000	56	30.000.000	56	130.000.000	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					390.145.900		164.201.725		874.576.400		899.265.900		884.576.400		889.576.400		4.102.342.725	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					345.145.900		89.151.725		794.576.400		814.265.900		794.576.400		794.576.400		3.632.292.725	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	751,03	752	345.145.900	753	89.151.725	754	794.576.400	755	814.265.900	756	794.576.400	757	794.576.400	4.527	3.632.292.725	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					45.000.000		75.050.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		470.050.000	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita /th	41,98	42,16	45.000.000	42,35	75.050.000	42,58	80.000.000	42,60	85.000.000	42,85	90.000.000	42,92	95.000.000	42,92	470.050.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.078.388.260		445.522.000		2.843.306.000		3.372.628.000		4.267.678.000		3.387.628.000		16.395.150.260	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.595.137.880		141.854.000		1.310.000.000		1.720.000.000		1.800.000.000		2.080.000.000		8.646.991.880	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	77	80	1.595.137.880	81	141.854.000	82	1.310.000.000	85	1.720.000.000	95	1.800.000.000	100	2.080.000.000	100	8.646.991.880	
		Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian	%	75	80		81		82		85		95		100		100		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					69.549.780		56.700.000		506.700.000		576.700.000		1.281.750.000		231.700.000		2.723.099.780	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	75	80	69.549.780	81	56.700.000	82	506.700.000	85	576.700.000	95	1.281.750.000	100	231.700.000	100	2.723.099.780	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					105.143.200		155.984.000		436.884.000		437.884.000		437.884.000		437.884.000		2.011.663.200	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	11	11,11	105.143.200	11,62	155.984.000	12,12	436.884.000	12,63	437.884.000	13,13	437.884.000	13,64	437.884.000	13,64	2.011.663.200	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					7.600.000			11.084.000			16.762.000			25.084.000			25.084.000			25.084.000			110.698.000	
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	75	80	7.600.000	81		11.084.000	82		16.762.000	85		25.084.000	86		25.084.000	87		25.084.000	87		110.698.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					300.957.400			79.900.000			572.960.000			612.960.000			722.960.000			612.960.000			2.902.697.400	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas lembaga tani	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	100	100	300.957.400	100		79.900.000	100		572.960.000	100		612.960.000	100		722.960.000	100		612.960.000	100		2.902.697.400	
		Jumlah Kelembagaan Tani yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	5	9		9			9			9			9			9			54			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.210.784.031			2.604.579.600	-		2.193.169.416	-		2.428.455.065	-		2.476.070.635	-		2.537.804.600			15.450.863.347	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.210.784.031			2.604.579.600			2.193.169.416			2.428.455.065			2.476.070.635			2.537.804.600			15.450.863.347	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.795.534.191			2.492.003.600			1.822.618.100			2.020.012.503			2.023.969.529			2.035.214.740			13.189.352.663	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	2.795.534.191	100		2.492.003.600	100		1.822.618.100	100		2.020.012.503	100		2.023.969.529	100		2.035.214.740	100		13.189.352.663	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					200.474.680			5.000.000			209.339.986			219.806.985			230.797.335			242.337.201			1.107.756.187	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	30,93	34	200.474.680	38		5.000.000	42		209.339.986	46		219.806.985	50		230.797.335	54		242.337.201	54		1.107.756.187	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	96,99	97		97,1			97,2			97,3			97,4			97,5			97,5			
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					101.779.310			46.152.400			55.382.880			66.459.456			79.751.347			95.701.617			445.227.010	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	101.779.310	100		46.152.400	100		55.382.880	100		66.459.456	100		79.751.347	100		95.701.617	100		445.227.010	
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	91,80	100		100			100			100			100			100			100			
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100		100			100			100			100			100			100			
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100		100			100			100			100			100			100			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					103.014.850			61.423.600			98.848.050			114.846.701			133.856.533			156.470.357			668.460.090	
	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	103.014.850	100		61.423.600	100		98.848.050	100		114.846.701	100		133.856.533	100		156.470.357	100		668.460.090	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					9.981.000			-			6.980.400			7.329.420			7.695.891			8.080.686			40.067.397	
	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	3	100	9.981.000	100		-	100		6.980.400	100		7.329.420	100		7.695.891	100		8.080.686	100		40.067.397	
	DINAS PERHUBUNGAN					11.299.781.282			10.129.955.233			9.351.732.914			9.416.619.891			9.152.386.702			9.182.984.183			58.533.460.205	Dinas Perhubungan
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11.299.781.282			10.129.955.233			9.351.732.914			9.416.619.891			9.152.386.702			9.182.984.183			58.533.460.205	Dinas Perhubungan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.894.086.217			7.521.525.564			5.389.275.464			5.804.162.441			5.589.929.252			5.620.526.733			37.819.505.671	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	%	100	100 %	7.894.086.217	100 %		7.521.525.564	100		5.389.275.464	100		5.804.162.441	100		5.589.929.252	100		5.620.526.733	100		37.819.505.671	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					3.405.695.065			2.608.429.669			3.962.457.450			3.612.457.450			3.562.457.450			3.562.457.450			20.713.954.534	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Konektivitas Darat	%	86,59	86,63	3.405.695.065	86,64		2.608.429.669	86,65		3.962.457.450	86,67		3.612.457.450	86,69		3.562.457.450	87,00		3.562.457.450	87,00		20.713.954.534	
			Indeks	1	1,00		1			1			1			1			1			1			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.505.913.153			6.084.899.843			5.210.043.427			6.707.696.956			6.525.910.303			6.588.567.598			38.623.031.280	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.496.558.153			6.064.899.843			5.185.043.427			6.037.696.956			5.870.910.303			5.918.567.598	0		36.573.676.280	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.934.313.753			4.547.545.400			3.356.507.400			3.886.160.929			3.672.374.276			3.690.031.571			24.086.933.329	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	%	100	100	4.934.313.753	100	4.547.545.400	100	3.356.507.400	100	3.886.160.929	100	3.672.374.276	100	3.690.031.571	100	24.086.933.329	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.202.717.400		962.234.600		1.000.515.500		1.510.515.500		1.510.515.500		1.510.515.500		7.697.014.000	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	NA	77	1.202.717.400	78	962.234.600	79	1.000.515.500	80	1.510.515.500	81	1.510.515.500	82	1.510.515.500	82	7.697.014.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2,90	2,90	1.359.527.000	2,90	555.119.843	2,90	828.020.527	2,90	641.020.527	2,90	688.020.527	2,90	718.020.527	2,90	4.789.728.951	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai aspek strategi dan rencana	Angka	NA	NA		1,22		1,33		1,44		1,55		1,66		1,66		
		Nilai aspek tata kelola	Angka	NA	NA		1,91		2,02		2,13		2,24		2,35		2,35		
		Nilai aspek teknologi digital	Angka	NA	NA		3,22		3,33		3,44		3,55		3,66		3,66		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					3.850.000		10.000.000		10.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000	0	1.943.850.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					3.850.000		10.000.000		10.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		1.943.850.000	
	Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	nilai	78	82	3.850.000	87	10.000.000	91	10.000.000	95	640.000.000	98	640.000.000	100	640.000.000	100	1.943.850.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					5.505.000		10.000.000		15.000.000		30.000.000		15.000.000		30.000.000	0	105.505.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					5.505.000		10.000.000		15.000.000		30.000.000		15.000.000		30.000.000		105.505.000	
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI)	Nilai domain prinsip SDI	Angka	1,5	1,5	5.505.000	2,5	10.000.000	2,7	15.000.000	3,1	30.000.000	3,3	15.000.000	3,6	30.000.000	3,6	105.505.000	
		Nilai domain kualitas	Angka	1,87	1,87		2,7		2,91		3,01		3,31		3,5		3,5		
		Nilai domain proses bisnis	Angka	2,17	2,17		2,92		3,12		3,32		3,4		3,6		3,6		
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					19.889.076.226		16.805.160.383		17.172.737.676		21.232.298.391		21.081.591.524		21.309.174.781		117.490.038.982	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					11.541.569.164		9.128.450.170		6.225.737.676		8.439.992.281		8.254.285.414		8.606.868.670		52.196.903.375	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.400.199.403		7.563.250.170		4.728.777.110		4.899.992.281		4.686.285.414		4.718.378.614		33.996.882.992	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	%	100	100	7.400.199.403	100	7.563.250.170	100	4.728.777.110	100	4.899.992.281	100	4.686.285.414	100	4.718.378.614	100	33.996.882.992	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					1.610.000		40.000.000		7.000.000		10.000.000		13.000.000		16.000.000		87.610.000	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	29,90	32,25	1.610.000	34,60	40.000.000	38,46	7.000.000	42,30	10.000.000	46,15	13.000.000	48,71	16.000.000	48,71	87.610.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					-		-		85.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		375.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0	0	-	20,51	-	26,93	85.000.000	33,33	90.000.000	39,74	100.000.000	46,15	100.000.000	46,15	375.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					111.200.000		100.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		50.000.000		471.200.000	
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	73,33	80,85	111.200.000	85,71	100.000.000	87,30	60.000.000	88,89	70.000.000	90,48	80.000.000	92,06	50.000.000	92,06	471.200.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					682.180.599		350.000.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		330.000.000		2.322.180.599	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Foma Pertumbuhan Wirausaha	%	16,60	19,04	682.180.599	20,00	350.000.000	21,66	315.000.000	22,22	320.000.000	22,72	325.000.000	23,14	330.000.000	23,14	2.322.180.599	
			%	15,00	25,00		26,66		28,94		30,61		31,25		32,14		32,14		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					3.346.379.163		1.075.200.000		1.029.960.566		3.050.000.000		3.050.000.000		3.392.490.056		14.944.029.785	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro miskin dan wirausaha pemula	%	33	35	3.346.379.163	37	1.075.200.000	39	1.029.960.566	41	3.050.000.000	43	3.050.000.000	45	3.392.490.056	45	14.944.029.785	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					616.202.102		1.759.299.800		1.155.000.000		990.306.111		995.306.111		1.000.306.111	0	6.516.420.234	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	%	9	15,8	615.108.852	22,6	1.756.299.800	29,4	1.125.000.000	36,2	960.306.111	43	965.306.111	50	970.306.111	50	6.392.326.984	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase perizinan industri yang verifikasi tepat waktu	%	100	100	1.093.250	100	3.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	44.093.250	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat dan Terkini	%	0	0	-	0	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					7.731.304.960		5.917.410.413		9.792.000.000		11.802.000.000		11.832.000.000		11.702.000.000	0	58.776.715.373	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	34	37	13.397.300	39	55.000.000	40	22.000.000	42	22.000.000	44	22.000.000	45	22.000.000	45	156.397.300	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Pendukung pada Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	NA	10	6.719.191.560	20	5.311.596.300	40	8.800.000.000	60	10.800.000.000	80	10.800.000.000	100	10.650.000.000	100	53.080.787.860	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	94,7	94,7	73.986.300	94,76	32.600.000	94,82	80.000.000	94,88	80.000.000	94,94	80.000.000	95	80.000.000	95	426.586.300	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya perlindungan konsumen di bidang metrologi legal	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	%	100	100	59.386.100	100	193.214.113	100	120.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	792.600.213	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100	100	865.343.700	100	325.000.000	100	770.000.000	100	780.000.000	100	780.000.000	100	800.000.000	100	4.320.343.700	
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					10.459.604.674		9.804.378.159		8.013.172.759		7.981.043.370		8.047.798.965		9.056.263.211		53.362.261.138	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.647.974.568		5.839.418.809		4.398.213.409		4.366.084.020		4.382.839.615		4.392.037.892	0	29.026.568.313	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	%	100	100	5.315.461.618	100	4.999.418.909	100	3.578.213.509	100	3.556.084.120	100	3.562.839.715	100	3.582.037.992	100	24.594.055.863	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	%	0,55	0,72	232.512.950	0,76	739.999.900	0,81	769.999.900	0,85	759.999.900	0,89	769.999.900	0,92	759.999.900	0,92	4.032.512.450	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah keanggotaan pramuka	Orang	12664	12714	100.000.000	12764	100.000.000	12814	50.000.000	12864	50.000.000	12914	50.000.000	12964	50.000.000	12964	400.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya pembudayaan dan prestasi plah raga	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	%	53,44	57,54	3.236.038.336	57,69	1.014.595.000	59,26	664.595.000	60,71	664.595.000	62,07	664.595.000	64,41	664.595.000	64,41	6.909.013.336	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.575.591.770		2.950.364.350		2.950.364.350		2.950.364.350		3.000.364.350		3.999.630.319	0	17.426.679.489	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					541.673.470		1.680.000.350		1.680.000.350		1.680.000.350		1.730.000.350		2.680.000.350		9.991.675.220	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	15157	16673	541.673.470	18340	1.680.000.350	20174	1.680.000.350	22191	1.680.000.350	24411	1.730.000.350	26852	2.680.000.350	278691	9.991.675.220	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					262.528.150		100.364.000		100.364.000		100.364.000		100.364.000		100.364.000		764.348.150	
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah media pemasaran pariwisata	Media	6	7	262.528.150		100.364.000	9	100.364.000	10	100.364.000	11	100.364.000	12	100.364.000	49	764.348.150	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					44.175.000		40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		204.175.000	
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	35,00%	9,52%	44.175.000	9,77%	40.000.000	9,93%	30.000.000	10%	30.000.000	10,63%	30.000.000	11,70%	30.000.000	11,70%	204.175.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					727.215.150		1.130.000.000		1.140.000.000		1.140.000.000		1.140.000.000		1.189.265.969	0,00%	6.466.481.119	
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	83,33%	84,13%	727.215.150	84,21%	1.130.000.000	84,40%	1.140.000.000	84,67%	1.140.000.000	85,63%	1.140.000.000	85,96%	1.189.265.969	85,96%	6.466.481.119	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					5.215.021.218		4.692.828.533		19.966.643.035		4.606.137.411		4.221.324.126		4.238.486.143		42.940.440.466	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.199.353.368		4.692.828.533		17.634.143.035		4.420.012.411		4.141.324.126		4.158.486.143	0	40.246.147.616	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.061.613.493		3.692.828.533		2.502.697.132		2.983.566.508		2.764.605.573		2.781.767.590	0	18.787.078.829	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%	100	100	4.061.613.493	100	3.692.828.533	100	2.502.697.132	100	2.983.566.508	100	2.764.605.573	100	2.781.767.590	100	18.787.078.829	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.036.362.825		898.622.950		15.025.000.000		1.330.000.000		1.270.272.650		1.270.272.650		20.830.531.075	
	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	0	7	1.036.362.825	9	898.622.950	11	15.025.000.000	13	1.330.000.000	15	1.270.272.650	17	1.270.272.650	17	20.830.531.075	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					101.377.050		101.377.050		106.445.903		106.445.903		106.445.903		106.445.903		628.537.712	
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar	%	25,00	37,5	101.377.050	50,00	101.377.050	62,50	106.445.903	75,00	106.445.903	87,50	106.445.903	100	106.445.903	100	628.537.712	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					15.667.850		-		2.332.500.000		186.125.000		80.000.000		80.000.000	0	2.694.292.850	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					15.667.850		-		2.202.500.000		166.125.000		60.000.000		60.000.000	0	2.504.292.850	
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	43,48%	69,57%	15.667.850	73,91	-	78,26	2.202.500.000	82,61	166.125.000	86,96	60.000.000	91,3	60.000.000	91,30	2.504.292.850	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		130.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	0%	190.000.000	
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	58,33%	65,50	-	66,00	-	70,80	130.000.000	75,00	20.000.000	79,00	20.000.000	83,3	20.000.000	83,30	190.000.000	
	SEKRETARIAT DAERAH					47.404.348.358		32.957.316.819		33.843.046.603		33.300.564.831		33.875.792.060		34.055.679.732		215.436.748.404	Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					47.404.348.358		32.957.316.819		33.843.046.603		33.300.564.831		33.875.792.060		34.055.679.732	0	215.436.748.404	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.875.791.528		27.286.329.340		19.830.140.023		19.104.658.251		19.731.245.480		19.806.801.952	0	139.634.966.575	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	%	100	100	33.875.791.528	100	27.286.329.340	100	19.830.140.023	100	19.104.658.251	100	19.731.245.480	100	19.806.801.952	100	139.634.966.575	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					13.101.015.030		5.005.987.479		13.020.000.000		12.995.000.000		12.995.000.000		12.995.000.000		70.112.002.509	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	13.101.015.030	100	5.005.987.479	100	13.020.000.000	100	12.995.000.000	100	12.995.000.000	100	12.995.000.000	100	70.112.002.509	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					427.541.800		665.000.000		992.906.580		1.200.906.580		1.149.546.580		1.253.877.780		5.689.779.320	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	427.541.800	100	665.000.000	100	992.906.580	100	1.200.906.580	100	1.149.546.580	100	1.253.877.780	100	5.689.779.320	
	SEKRETARIAT DPRD					31.699.437.865		28.487.694.743		27.558.191.487		28.018.764.725		28.258.828.321		27.816.060.052		171.838.977.193	Sekretariat DPRD
	SEKRETARIAT DPRD					31.699.437.865		28.487.694.743		27.558.191.487		28.018.764.725		28.258.828.321		27.816.060.052		171.838.977.193	Sekretariat DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.453.422.960		16.034.631.612		14.016.690.912		14.477.264.150		14.217.327.746		14.274.559.477		90.473.896.857	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Sekretarisat DPRD	%	100	100	17.453.422.960	100	16.034.631.612	100	14.016.690.912	100	14.477.264.150	100	14.217.327.746	100	14.274.559.477	100	90.473.896.857	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.246.014.905		12.453.063.131		13.541.500.575		13.541.500.575		14.041.500.575		13.541.500.575		81.365.080.336	
	Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	92	100	14.246.014.905	100	12.453.063.131	100	13.541.500.575	100	13.541.500.575	100	14.041.500.575	100	13.541.500.575	100	81.365.080.336	
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					5.351.515.549		14.838.213.045		13.421.720.945		13.820.545.229		13.633.428.125		13.655.830.003		74.721.252.896	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01	PERENCANAAN					5.247.917.999		14.738.213.045		13.291.720.945		13.690.545.229		13.503.428.125		13.525.830.003		73.997.655.346	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA																		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	4.916.245.499	100	4.708.213.045	100	3.241.720.945	100	3.640.545.229	100	3.453.428.125	100	3.475.830.003	100	23.435.982.846	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persen	84,00	85	250.691.900	86	9.925.000.000	87,00	9.945.000.000	88,00	9.945.000.000	89,00	9.945.000.000	90,00	9.945.000.000	90	49.955.691.900	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD																	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persen	100	100	80.980.600	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	605.980.600	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, serta perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD																	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					103.597.550		100.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		723.597.550	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	NA	81	103.597.550	82	100.000.000	83	130.000.000	84,00	130.000.000	85,00	130.000.000	86,00	130.000.000	86	723.597.550	
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	NA	75		76		77		78,00		79,00		80,00		80		
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					12.055.271.358		11.371.734.853		9.218.365.048		10.660.745.689		10.933.728.081		11.499.591.885		65.739.436.914	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02	KEUANGAN					12.055.271.358		11.371.734.853		9.218.365.048		10.660.745.689		10.933.728.081		11.499.591.885		65.739.436.914	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA					8.129.301.859		8.305.310.000		6.722.182.400		7.857.255.794		7.922.400.214		8.271.842.250		47.208.292.517	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	8.129.301.859	100	8.305.310.000	100	6.722.182.400	100	7.857.255.794	100	7.922.400.214	100	8.271.842.250	100	47208292517	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.829.473.500		2.899.029.550		2.324.321.095		2.626.715.467		2.829.149.276		3.039.626.466	0%	16.548.315.355	
	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	47,3	47%	2.829.473.500	40%	2.899.029.550	30%	2.324.321.095	30%	2.626.715.467	30%	2.829.149.276	30%	3.039.626.466	30%	16.548.315.355	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	28	30%		40%		40%		40%			40%		40%	40%		
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	20	20%		20%		20%		20%			20%		20%	20%		
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100%		100%		100%		100%			100%		100%	100%		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					317.781.100		78.912.500		83.378.750		88.291.625		93.695.788		99.640.366	0	761.700.129	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4%	10	317.781.100	10	78.912.500	10	83.378.750	10	88.291.625	10	93.695.788	10	99.640.366	10	761.700.129	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					778.714.899		88.482.803		88.482.803		88.482.803		88.482.803		88.482.803		1.221.128.914	
	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	16.18	16,28	778.714.899	24,83	88.482.803	26,53	88.482.803	28,25	88.482.803	29,99	88.482.803	31,81	88.482.803	31,81	1.221.128.914	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	OPD	14	14		14		14		14		14		14		14		
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8.336.750.200		10.555.337.170		8.629.870.645		8.889.006.352		8.696.076.109		8.759.585.514		53.866.625.991	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03	KEPEGAWAIAN					7.363.836.200		9.955.337.170		7.429.870.645		7.789.006.352		7.596.076.109		7.659.585.514	0,00	47.793.711.991	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.760.603.600		9.761.353.320		6.434.091.295		6.768.227.002		6.565.296.759		6.613.806.164	0	42.903.378.141	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	100	100		100	9.761.353.320	100	6.434.091.295	100	6.768.227.002	100	6.565.296.759	100	6.613.806.164	100	42.903.378.141	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					603.232.600		193.983.850		995.779.350		1.020.779.350		1.030.779.350		1.045.779.350	0,00	4.890.333.850	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100,00	98,59	603.232.600	100,00	193.983.850	100,00	995.779.350	100,00	1.020.779.350	100,00	1.030.779.350	100,00	1.045.779.350	100,00	4.890.333.850	
		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	20,00	30,00		40,00		60,00		70,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	99,98	99,98		99,98		99,98		99,98		99,98		99,98		99,98		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					972.914.000		600.000.000		1.200.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	0	6.072.914.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					972.914.000		600.000.000		1.200.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	0	6.072.914.000	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	10,45	15,00	972.914.000	20,00	600.000.000	25,00	1.200.000.000	30,00	1.100.000.000	35,00	1.100.000.000	40,00	1.100.000.000	40,00	6.072.914.000	
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	24,5	20,19		20,20		20,21		20,22		20,23		20,24		20,24		
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	12,55	3,48		5,39		5,39		5,39		5,39		5,39		5,39		
	INSPEKTORAT DAERAH					5.796.672.161		5.500.947.300		3.781.699.000		4.185.794.520		4.127.928.169		4.152.372.444		27.545.413.594	Inspektorat
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					5.796.672.161		5.500.947.300		3.781.699.000		4.185.794.520		4.024.183.169		4.048.627.444		26.943.924.194	Inspektorat
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.233.011.761		5.167.115.300		3.447.867.000		3.851.962.520		3.794.096.169		3.818.540.444		25.312.593.194	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	%	100	100	5.233.011.761	100	5.167.115.300	100	3.447.867.000	100	3.851.962.520	100	3.794.096.169	100	3.818.540.444	100	25.312.593.194	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					480.896.000		230.087.000		230.087.000		230.087.000		230.087.000		230.087.000		1.631.331.000	
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	%	85	85	480.896.000	85	230.087.000	85	230.087.000	85	230.087.000	85	230.087.000	85	230.087.000	85	1.631.331.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					82.764.400	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	601.489.400	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturnitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	82.764.400	Level 3	103.745.000	Level 3	103.745.000	Level 3	103.745.000	Level 4	103.745.000	Level 4	103.745.000	Level 4	601.489.400	
			Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		
	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR					16.597.389.129		14.596.454.276		12.784.562.726		13.122.782.144		12.924.557.617		14.101.253.315		84.126.999.207	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01	KECAMATAN					11.311.377.679		11.138.192.556		7.875.647.456		8.206.866.874		7.998.642.347		8.046.315.445		54.577.042.357	Kecamatan Padang Panjang Timur



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.311.377.679		11.138.192.556		7.875.647.456		8.206.866.874		7.998.642.347		8.046.315.445	0	54.577.042.357	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	95	95	11.311.377.679	95	11.138.192.556	95	7.875.647.456	95	8.206.866.874	95	7.998.642.347	95	8.046.315.445	95	54.577.042.357	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					998.134.400		822.631.270		852.631.270		852.631.270		852.631.270		852.631.270		5.231.290.750	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100	100	998.134.400	100	822.631.270	100	852.631.270	100	852.631.270	100	852.631.270	100	852.631.270	100	5.231.290.750	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		100.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		170.100.000	
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100	100	-	100	100.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	170.100.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.200.000		3.300.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		86.500.000	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100	100	3.200.000	100	3.300.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	86.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.284.677.050		2.632.230.450		4.001.284.000		4.003.284.000		4.008.284.000		5.132.306.600		24.062.066.100	
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39,20	39,21	4.284.677.050	39,22	2.632.230.450	39,23	4.001.284.000	39,24	4.003.284.000	39,25	4.008.284.000	39,26	5.132.306.600	39,26	24.062.066.100	
	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT					17.097.564.341		13.716.423.140		14.336.661.700		14.705.613.426		14.495.343.551		14.537.204.113		88.888.810.271	Kecamatan Padang Panjang Barat
7.01	KECAMATAN					17.097.564.341		13.716.423.140		14.336.661.700		14.705.613.426		14.495.343.551		14.537.204.113	0	88.888.810.271	Kecamatan Padang Panjang Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.759.233.082		10.129.691.600		7.195.331.700		7.564.283.426		7.354.013.551		7.395.874.113		50.398.427.472	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	95	95	10.759.233.082	95	10.129.691.600	95	7.195.331.700	95	7.564.283.426	95	7.354.013.551	95	7.395.874.113	95	50.398.427.472	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.346.361.023		944.331.000		954.330.000		954.330.000		954.330.000		954.330.000		6.108.012.023	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	100	100	1.346.361.023	100	944.331.000	100	954.330.000	100	954.330.000	100	954.330.000	100	954.330.000	100	6.108.012.023	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					12.643.800		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		67.643.800	
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	100	100	12.643.800	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	67.643.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.723.500	100	15.100.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		99.823.500	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	4.723.500	100	15.100.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.974.602.936		2.616.300.540		6.156.000.000		6.156.000.000		6.156.000.000		6.156.000.000		32.214.903.476	
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39,20	39,21	4.974.602.936	39,22	2.616.300.540	39,23	6.156.000.000	39,24	6.156.000.000	39,25	6.156.000.000	39,26	6.156.000.000	39,26	32.214.903.476	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK					8.675.110.132		8.035.491.406		9.742.803.320		10.937.621.562		17.434.048.274		22.841.472.170		77.666.546.863	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.857.533.022		6.890.996.106		7.705.010.220		8.699.353.762		14.641.790.474		19.734.724.370		65.529.407.953	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.635.761.556		4.644.847.390		3.202.358.470		3.626.702.012		3.919.138.724		3.940.272.620		23.969.080.771	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	Persen	100	100	4.635.761.556	100	4.644.847.390	100	3.202.358.470	100	3.626.702.012	100	3.919.138.724	100	3.940.272.620	100	23.969.080.771	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					635.440.750		695.151.750		1.722.651.750		1.752.651.750		1.722.651.750		1.772.651.750		8.301.199.500	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	80	80	635.440.750	80	695.151.750	80	1.722.651.750	80	1.752.651.750	80	1.722.651.750	80	1.772.651.750	80	8.301.199.500	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.333.714.716		1.223.154.966		2.200.000.000		2.200.000.000		8.330.000.000		13.020.000.000		29.306.869.682	
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	Persen	100	100	2.333.714.716	100	1.223.154.966	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	8.330.000.000	100	13.020.000.000	100	29.306.869.682	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					-		-		150.000.000		150.000.000		240.000.000		200.000.000		740.000.000	
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					-		82.250.000		125.000.000		395.000.000		125.000.000		310.900.000		1.038.150.000	
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	Persen	100	100	-	100	82.250.000	100	125.000.000	100	395.000.000	100	125.000.000	100	310.900.000	100	1.038.150.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					252.616.000		245.592.000		305.000.000		575.000.000		305.000.000		490.900.000		2.174.108.000	
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persen	100	100	252.616.000	100	245.592.000	100	305.000.000	100	575.000.000	100	305.000.000	100	490.900.000	100	2.174.108.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					817.577.110		1.144.495.300		2.037.793.100		2.238.267.800		2.792.257.800		3.106.747.800		12.137.138.910	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					817.577.110		1.144.495.300		2.037.793.100		2.238.267.800		2.792.257.800		3.106.747.800		12.137.138.910	
	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	85	88	817.577.110	90	1.144.495.300	93	2.037.793.100	93	2.238.267.800	93	2.792.257.800	93	3.106.747.800	93	12.137.138.910	



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah “**Peningkatan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dan Kualitas SDM Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing**”. Tema pembangunan tersebut akan diturunkan menjadi prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.19
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P-RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5	6
T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi		Indeks Pembangunan Manusia	81.5	121,796,655,626	
S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat		Harapan Lama Sekolah	15.67	48,146,889,126	
		Rata-Rata Lama Sekolah	12.16		
		Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	Na		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Na		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS PAUD (5-6 tahun)	63	37,631,850,376	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS SD sederajat	99,71		
		APS SMP sederajat	97,51		
		APK Paud (3-6 tahun)	51		
		APK SD sederajat	106,1		
		APK SMP sederajat	107,1		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	3325 Orang	10,363,628,250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar	37,5%	101,377,050	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	69,57%	50,033,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	76,17	17,540,229,659	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	1 kasus	17,042,549,959	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Bayi	5 kasus		
		Prevalensi stunting	17,08%		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan	68, %	384083150,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	49.30%	497,679,700	Dinas Kesehatan
S1.3 : Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,24%	55,611,678,360	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.96%		
		Rasio Daya Saing Keolahragaan	29,76		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	14,08%	23,251,295,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	57,54%	32,360,383,360	
S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70	497,858,481	
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	66,56		
		Indeks Pembangunan	98,25		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P-RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
Gender (IPG)					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15,4%	263,935,440	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66.37%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	147,632,000	Dinas Sosial PPKB PPPA
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64,08	86,291,041	Dinas Sosial PPKB PPPA
T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.15	18,582,178,987	
		Tingkat Kemiskinan	4.71		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.43		
		Indeks Ketahanan Pangan	88.5		
S2.1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal		Rasio PDRB Industri Pengolahan	9.54	12,229,297,123	
		Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	18.35		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	15,8 %	615,108,852	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perizinan industri yang verifikasi tepat waktu	100%	1,093,250	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100%	865,343,700	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	19,04 %	682,180,599	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Pertumbuhan Wirausaha	25%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro miskin dan wirausaha pemula	35%	3,346,379,162	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Pendukung pada Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	10%	6,719,191,560	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
S2.2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah		Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	2.94	1,575,591,770	
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	5.38		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan mancanegara	166723	541,673,470	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah media pemasaran pariwisata	7 Media	262,528,150	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	14,08%	44,175,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	84,13%	727,215,150	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
S2.3 : Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,19	98,300,500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target investasi	75%	56,000,000	Dinas Penanaman Modal PTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	3%	42,300,000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	500	
S2.4 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga		Tingkat produktivitas	137,78	1,180,317,000	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P-RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
kerja		tenaga kerja			
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,20		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	59,45 %	106,234,000	Dinas Penanaman Modal PTSP
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	0,4 %	670,883,000	Dinas Penanaman Modal PTSP
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	9883 Orang	403,200,000	Dinas Penanaman Modal PTSP
S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah		Jumlah penduduk miskin	2.714	1,091,278,334	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	1,015,300,584	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
		Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	75,977,750	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%		
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7.30%		
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%		
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	7.30%		
S2.7 : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah		Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	5,2	2,407,394,260	
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	5,31		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,19 Angka	96,603,300	Dinas Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	0%	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	752	345,145,900	Dinas Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80%	1,595,137,880	Dinas Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	80%		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	80%	69,549,780	Dinas Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN	Persentase SDM Penyuluh	100%	300,957,400	Dinas Pangan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P- RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
	PERTANIAN	Pertanian yang ditingkatkan Jumlah Kelembagaan			dan Pertanian
T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	79,72	5,983,012,099	
S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,38	43,836,651,718	
		Indeks Pelayanan Publik	4,2		
		Indeks Reformasi Hukum	96,82		
		Nilai AKIP Kota	65		
		Indeks SPBE	3,16		
		Indeks Pemerintahan Digital	na		
		Indeks Inovasi Daerah	82,22 (Sangat inovatif)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada organisasi Perangkat Daerah	100%	33,875,791,528	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	34%	200,474,680	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	97%		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	101,779,310	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	103,014,850	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	9,981,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	77%	1,202,717,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.90 angka	1,359,527,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai aspek strategi dan rencana	Na		
		Nilai aspek tata kelola	Na		
		Nilai aspek teknologi digital	Na		
		Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah	2.9	1,359,527,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	82	3,850,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai domain prinsip SDI	2,5	5,505,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai domain kualitas	2,3		
		Nilai domain proses bisnis	2,7		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	85%	250,691,900	Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	100%	80,980,600	Bappeda
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%	998,134,400	Kecamatan Padang Panjang Timur



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P- RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%	-	Kecamatan Padang Panjang Timur
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,21 %	4,284,677,050	Kecamatan Padang Panjang Timur
S3.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah		Indeks Integritas (Survey Penilaian Integritas KPK)	78,10	480,896,000	
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	73		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	64,46		
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	85%	480,896,000	
S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN		Indeks Profesionalitas ASN	86,4	1,576,146,600	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	98,59%	603,232,600	BKPSDM
		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	30%		
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,98 %		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	15%	972,914,000	BKPSDM
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	20,19 %		
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	3,48 %		
S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,29	3,925,969,499	
		Nilai Pendapatan Asli Daerah	112,742		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	47%	2,829,473,500	BPKD
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	30%		
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	20%		
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10%	317,781,100	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,28 %	778,714,899	BPKD
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	14 OPD		
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100%		
T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya		Indeks Rasa Aman	61,57	21,691,726,401	
S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,5	5,719,298,950	
		Indeks Harmoni	70		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan	100%	3,977,263,900	Satpol PP Damkar



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P-RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	75%		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	0%		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	10	853,978,300	Satpol PP Damkar
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80%	635,440,750	BPBD Kesbangpol
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	100%	252,616,000	BPBD Kesbangpol
S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat		Angka PPKS	3,34	2,237,900,421	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100%	1,055,710,050	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	1,015,300,584	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
		Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	75,977,750	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%		
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7.30%		
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%		
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	7.30%		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100%	90,912,037	Dinas Sosial PPKB PPPA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P-RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
		Bencana			
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	100%		
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100%		
S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat		Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	85	13,734,527,030	
		Persentase objek pemajuan kebudayaan	66,6		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	13,101,015,030	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	75%	633,512,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	95,6	36,191,687,240	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,34		
S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak		IKLI KePUan	96,81	25,281,840,651	
		IKLI Perkim	96,92		
		IKLI Perhubungan	96,83		
		Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	73,63		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	47%	3,296,577,000	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi	28%	61,460,900	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	89,04 %	3,581,611,630	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	88,6 %	373,936,340	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	89,8 %	841,951,100	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	93,39 %	3,862,186,850	Dinas PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	89,54 %	6,393,694,826	Dinas PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Penyelesaian kasus Pelanggaran	75%	481,968,750	Dinas PUPR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	40%	4,050,000	Dinas PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	86,63 %	3,405,695,065	Dinas Perhubungan
		Konektivitas Darat	1		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	310,942,230	Dinas Perkim LH
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	88,48 %	2,667,765,960	Dinas Perkim LH
S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Udara	78,68	10,092,269,479	
		Indeks Kualitas Air	72,47		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tujuan RPJMD	Program	Indikator	Target P-RKPD 2025	Pagu P-RKPD 2025	Perangkat Daerah Pelaksana
		Indeks Kualitas Lahan	69,51		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100%	50,382,100	Dinas Perkim LH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kota	10,45 %	1,870,363,570	Dinas Perkim LH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan / verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola	32%	28,218,360	Dinas Perkim LH
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	10%	-	Dinas Perkim LH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99,24 %	8,143,305,449	Dinas Perkim LH
S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,32	817,577,110	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	88%	817,577,110	BPBD Kesbangpol

Sumber : P-RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025

Secara keseluruhan, capaian Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah berada pada jalur pembangunan yang konsisten dan terarah, namun akselerasi hasil (outcome) belum sepenuhnya optimal.

Tahun 2025 merupakan tahun konsolidasi dan penguatan fondasi, dengan prioritas:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
2. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani
4. Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya
5. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan Upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yakni Perencanaan Strategis, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing–masing misi, berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing–masing Urusan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dijelaskan bahwa Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Padang Panjang, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1.20
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
1	2	3	4	5	6
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Penanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan kesetaraan	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	
3	Pendidikan Dasar	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1	Angka putus Sekolah SD	
		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1	Angka Putus Sekolah SMP	
		Program Bantuan Pendidikan	1	Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	
			2	Angka putus sekolah SMP	
			3	Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	
			4	Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Jenis Pelayanan Dasar	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
1	2	3	4	5	6
SPM KESEHATAN					
1	Kesehatan Ibu Bersalin	Program Kesehatan Masyarakat	1	Masalah Gizi Buruk	Penanggung Jawab Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan		2	Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada bayi, balita, anak, remaja, ibu dan lansia	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir				
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar				
6	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut				
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	1	Tingkat pencegahan dan pengendlaian penyakit	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		2	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus				
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkolosis				
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1	Tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit	
			2	Persentase penanganan penderita penyakit menular	
			3	Universal Child Immunization (UCI)	
			4	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa 24 jam	
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program penataan kawasan pemukiman	1	Cakupan layanan air bersih	Penanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		2	Persentase pengolahan air limbah rumah tangga	
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan	1	Persentase kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Penanggung Jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program penataan kwasan pemukiman	1	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan ketentraman dan keteertiban umum	Program Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum	1	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Penanggung Jawab: - Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program penegakan produk daerah	1	Cakupan penyelesaian perda	
			2	Persentase penegakan perda	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program penyelenggaraan penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat bencana	1	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		2	Persentase jumlah aparaturnegara yang ikut pelatihan	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3	Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program pembinaan para penyandang cacat dan ekstrauma	1	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	Penanggung Jawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia terlantar	1	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti				
4	Rehabilitasi sosial khususnya gelandangan dan pengemin di luar panti	Program rehabilitasi kesejahteraan sosial	1	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota	Program perlindungan sosial bencana	1	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Untuk melihat laju Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Padang Panjang Tahun 2025 akan dimuat pada Bab IV pada laporan ini.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak Terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan Indikator Kinerja Makro untuk Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (2024)	CAPAIAN KINERJA TAHUN N (2025)	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,6	81,32	0,89
2	Persentase Penduduk Miskin	0,46	0,43	-6,52
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,94	5,07	2,63
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,52	3,61	-20,13
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	11.840 Ribu Rupiah/Orang/Tahun	12.148 Ribu Rupiah/Orang/Tahun	2,6
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,266	0,275	3,38

Sumber: Data Pendukung dari Padang Panjang Dalam Angka 2026 (Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang).

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintahan dan Urusan Penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap. Pada Data Kinerja Kunci dibagi menjadi 4 indikator, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar dengan 6 Urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Soisal, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang;
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar dengan 18 Urusan yaitu Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Komunikasi dan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Informatika, Statistik, Persandian, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pangan, Perpustakaan, Kearsipan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Urusan Pilihan dengan 5 Urusan yaitu Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Kelautan dan Perikanan, dan
4. Fungsi Penunjang dengan 8 Urusan yaitu Perencanaan, Keuangan, Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi Pengawasan, Pengadaan, Hubungan dengan Perwakilan Daerah, Pelayanan Publik dan Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melihat pencapaian dari masing-masing indikator (Indikator Kinerja Kunci Hasil, Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
1	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	1.342	60,92	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	2.203				
2	1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	10.329	100	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	10.329				
3	1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	330	83,12	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	397				
4	1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	61	48,03	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah seluruh toilet	127				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5	1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	187	44,95	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah ruang kelas	416				

2. Kesehatan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
6	1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	0	0	%	Tidak ada Ibu yang meninggal pada Tahun 2025	Dinas Kesehatan
			Jumlah ibu melahirkan tahun N	751				
7	1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	295	9,03	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	3.267				
8	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	756	83,17	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	909				
9	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu	751	82,62	%	-	Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			satu tahun					
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	909				
10	1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	731	88,82	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	823				
11	1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	2.962	83,04	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	3.567				
12	1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	7.146	100	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam	7.146				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			kurun waktu satu tahun ajaran yang sama					
13	1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	22.407	100	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	22.407				
14	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	5.689	100	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	5.689				
15	1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	6.147	100	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6.147				
16	1.b.11	Persentase pelayanan	Jumlah penderita diabetes melitus	1.043	100	%	-	Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun					
			Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1.043				
17	1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	136	90,67	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	150				
18	1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	1.400	100	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1.400				
19	1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.510	100	%	-	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang dengan risiko	1.510				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Sosial

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
20	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	350	97,22	%	- Keterbatasan anggaran pelayanan sosial di luar panti - Data PPKS yang bersifat dinamis dan cepat berubah - Keterbatasan sumber daya manusia pendamping sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	360				
21	1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35	70,00	-	- Kompleksitas permasalahan anak terlantar - Keterbatasan basis data dan penjangkauan kasus - Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendamping - Koordinasi lintas sektor yang belum optimal - Minimnya peran keluarga dan lingkungan	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	50				
22	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	450	85,07	-	- Keterbatasan dukungan keluarga - Keterbatasan anggaran dan intensitas layanan - Validitas dan pembaruan data	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	529				
23	1.f.4	Persentase gelandangan dan	Jumlah gelandangan dan pengemis	42	100	-	Dinamika dan mobilitas	Dinas Sosial, Pengendalian



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				- sasaran - Risiko ketergantungan bantuan - Faktor sosial dan ekonomi struktural (kemiskinan, rendahnya keterampilan kerja, minimnya dukungan keluarga) - Koordinasi lintas wilayah	Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	42				
24	1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	395			- Keterbatasan sumber daya logistik dan personel pada kondisi bencana tertentu - Potensi keterlambatan distribusi bantuan akibat kondisi geografis atau aksesibilitas lokasi bencana - Ketergantungan pada faktor eksternal, seperti intensitas dan skala bencana yang tidak dapat diprediksi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	395	100	-		
25	1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	25.385			- Cakupan sasaran yang luas dan heterogen - Keterbatasan anggaran dan prioritas program - Validitas dan pemutakhiran data - Keterbatasan SDM dan pendampingan - Koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	30.153	84,19	-		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
26	1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	1	33,33	%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3				
27	1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34	100	%	-	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
			Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	34				
28	1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	8	100	%	-	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
			Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	8				
29	1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.506	3,89	%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	64.381				
30	1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan	5.730	100	%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		penyelamatan dan evakuasi korban bencana	penyelamatan dan evakuasi korban bencana					Bangsa dan Politik
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	5.730				
31	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	25	100	%	-	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
			Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota.	25				

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
32	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	14	82,35	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	17				
33	1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	0	0	%	Pada Tahun 2025 belum ada penanganan terhadap kawasan kumuh sesuai dengan SK Wali Kota Padang Panjang Nomor 241 Tahun 2024, karena penanganan kawasan kumuh mengacu kepada masterplan yang disusun dalam dokumen RP2KPKPK dimana lanjutan pembuatan dokumen RK2KPKPK dianggarkan pada Tahun 2027	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	25.64				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

34	1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	111	8,75	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	1.269				
35	1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	7	100	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	7				

6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
36	1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	366.3	74,98	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	488.5				
37	1.c.2	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	91.957	89,96	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	102.225				
38	1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di	64.159	100	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	kabupaten/kota pada tahun N					
			Jumlah total penduduk kabupaten/kota	64.159				
39	1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	10.011	91,30	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah rumah di kabupaten/kota	10.965				
40	1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	0	0	%	Permukiman rawan banjir tidak ada urusan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, karena urusan tersebut berada pada Dinas PerkimLH Padang Panjang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1				
41	1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	%	Peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai tidak ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Tidak Dapat Dilaksanakan				
42	1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	48	1,09	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	4.419				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

43	1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	0	0	%	Perwako Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2024 Menetapkan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1				
44	1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	519	20,67	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	2.511				
45	1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	69	100	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	69				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Kebudayaan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
46	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	11	100	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	11				
47	2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	8.674	-0,28	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	8.698				

2. Kepemudaan dan Olahraga

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
48	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	195	1,18	%	Masih sedikitnya pemuda yang memiliki nomor induk berusaha karena pemuda yang terdata merupakan pelaku usaha muda pemula yang baru merintis usaha	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	16.532				
49	2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di	98	0,59	-	Masih belum adanya organisasi-organisasi kepemudaan memiliki nomor identitas anggota, karena	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			kabupaten/kota				ketidak pahaman akan manfaat nomor identitas anggota.	
			Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	16.532				
50	2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0			Tidak ada atlet arti Kota Padang Panjang yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	273	0	%		
51	2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	38				Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	38	100	%		

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
52	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	98			- Fenomena Gunung Es (Underreporting) Tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan - Kualitas dan keberlanjutan pemulihan - Koordinasi lintas sektor - Kapasitas SDM dan sarana pendukung	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	98	100	%		
53	2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	10			- Fenomena Underreporting (Kasus tidak terlapor). - Kompleksitas Dampak Psikososial dan Ekonomi - Koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana	10	100	%		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			Perdagangan Orang				Ketersediaan SDM profesional dan sarana layanan.	
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
54	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	19.438	99,92	%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	19.453				
55	2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	18.064	98,80	%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	18.284				
56	2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100	%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 dokumen	2				
57	2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	45.464	98,63	%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	46.097				
58	2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	413	100	%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	413				
59	2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	4	100	%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	4				
60	2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	0	0	%	Tidak ada akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan di Kota Padang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan	1				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			(perceraian) yang tercatat dan melaporkan				Panjang Tahun 2025	
--	--	--	---	--	--	--	--------------------	--

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
61	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	%	Secara nomenklatur pemerintahan, wilayah administratif di Padang Panjang tidak memiliki desa, tetapi seluruh wilayah pemerintahan tingkat terbawah berbentuk kelurahan.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	Tidak Dapat Dilaksanakan				
62	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	%		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	Tidak Dapat Dilaksanakan				
63	2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	%		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah kerja sama desa yang ditangani	Tidak Dapat Dilaksanakan				

6. Penanaman Modal

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
64	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	49.851.538.411	24,74	%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	39.963.624.944				
65	2.l.2	Realisasi total terhadap target	Total realisasi investasi	49.851.538.411	110,78	%	-	Dinas Penanaman Modal dan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	investasi	kabupaten/kota					Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	45.000.000.000				

7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
66	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	78.372.260	5,84	%	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	74.046.997				
67	2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	172	1,22	%	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Σ Usaha mikro	14.051				

8. Tenaga Kerja

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
68	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	0	0	%	Belum tersedianya anggaran untuk penyusunan RTKD Kota Padang Panjang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	4				
69	2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah,	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	0	0	-	Belum adanya intervensi dari pemerintah kota kepada perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak karena belum ada Bidang Hubungan Industrial	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah perusahaan	1				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).					yang menaungi persoalan tersebut di Pemerintah Kota Padang Panjang	
70	2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	4.404	110,10	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	4.000				

9. Komunikasi dan Informatika

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
71	2.p.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	23	100	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	23				
72	2.p.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	13	81,25	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Layanan Publik	16				
73	2.p.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	42.656	100	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
			Jumlah penduduk	42.656			

10.Statistik

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
74	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	4.123	91,85	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	4.489				

11.Persandian

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
75	2.0	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	650	70,81	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	918				

12.Pertanahan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
76	2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	904.836	89,11	%	Tidak ada tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah di Kota Padang Panjang pada Tahun 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	1.015.420				
77	2.d.2	Persentase Kesesuaian	Luas Rencana Pola Ruang yang	2.326,68	78,25	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	telah terwujud pada Kondisi Eksisting					Penataan Ruang
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	2.973,54				
78	2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	0	0	%	Tidak ada Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting di Kota Padang Panjang pada Tahun 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1				

13.Perhubungan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
79	2.j.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	0,7692	0,77	Rasio	-	Dinas Perhubungan
80	2.j.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	0,41	0,41	Rasio	-	Dinas Perhubungan
81	2.j.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	0	0	%	-	Dinas Perhubungan
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

14.Lingkungan Hidup

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
82	2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	20	60,61	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	33				
83	2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	18.104	96,64	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	18.734				

15.Pangan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
84	2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	17.458	92,49	%	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	18.876				

16.Perpustakaan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
85	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) +	70,99	70,99	Nilai	-	Dinas Perpustakaan dan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		Membaca (TKM) masyarakat	$(0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca}) \times 100$					Kearsipan
86	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$\text{IPLM} = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	30,74	30,74	Nilai	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

17.Kearsipan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
87	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	87,93	87,93	%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

18.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
88	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	2,42	101,26	%	- Belum optimalnya akses dan partisipasi program Keluarga Berencana - Faktor Sosial Budaya - Perkawinan Usia Muda - Ketimpangan akses informasi dan edukasi kesehatan reproduksi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,39				
89	2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	4.404	62,70	%	- Masih terdapat pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi belum menggunakan kontrasepsi modern - Preferensi terhadap metode tradisional atau tidak ber-KB	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	7.024				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

							- Tingkat drop out akseptor KB - Edukasi dan KIE belum merata	
90	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	6,88	45,11	%	- Kurangnya informasi dan konseling - Kekhawatiran terhadap efek samping - Faktor sosial budaya - Faktor Drop out Akseptor KB	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	15,25				

C. Urusan Pilihan

1. Pariwisata

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
91	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	413.134.000	0.83	%	-	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Realisasi investasi Tahun N	49.851.538.441				
92	3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	12.871	-15,08	%	-	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah wisatawan asing tahun N-1	15.157				
93	3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	553.339	-5,47	%	-	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah wisatawan tahun N-1	585.339				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2. Perindustrian

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
94	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	0	0	%	Pada RPIK Kota Padang Panjang, penetapan sasaran pembangunan industri kota dilaksanakan per lima tahun sehingga pengukuran indikator tahunan tidak bisa dilaksanakan, Hal ini merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang pedoman penyusunan Rencana pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana dalam RPIP Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengukuran indikator per lima tahun.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
95	3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	186	21,14	%		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	880				
96	3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	880	14,29	%		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	770				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

97	3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	9.901.191.000	1,38	%		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Total investasi seluruh sektor	719.872.397.746				

3. Perdagangan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
98	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	195	15,44	%	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	1.263				

4. Pertanian

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
99	3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	8.571,79	-7,52	%	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			Produksi tanaman pangan tahun N-1	9.268,59				
100	3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	64.189	-24,08	%	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			Produksi hortikultura tahun N-1	84.550				
101	3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	540.620	-19,90	%	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			Produksi komoditas peternakan tahun N-1	674.956				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

102	3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	3,7	16,09	%	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	23				

5. Kelautan dan Perikanan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
103	3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	42,16	42,16	Kg / Kap / Tahun	-	Dinas Pangan dan Pertanian
104	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	752	100	%	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	752				

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
105	4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	17	100	%	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program	17				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			prioritas presiden				
--	--	--	--------------------	--	--	--	--

2. Keuangan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
106	4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	276.833.919.825,06	46,65	%	-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	593.452.610.116,94				
107	4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100.391.737.007,76	17,77	%	-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Realisasi pendapatan daerah	564.965.777.657,76				
108	4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	321.248.893090,19	91,75	%	-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	350.116.766.262,88				
109	4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	207.626.514.651,88	35,02	%	-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	592.852.610.116,94				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
110	4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	727	80,42	%	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	904				

4. Fungsi Pengawasan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
111	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	4	4	Nilai		Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang
112	4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	0	0	Nilai	Nilai Kapabilitas APIP belum disampaikan oleh BPKP dikarenakan penilaian akan menggunakan Format Penilaian baru, berdasarkan penyampaian pihak BPKP hasil penilaian Kapabilitas APIP akan disampaikan pada Akhir Triwulan I Tahun 2026	Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang
113	4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	4	4	Nilai		
114	4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	28	71,79	%		Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang
			Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-	39				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			1				
--	--	--	---	--	--	--	--

5. Pengadaan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
115	4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40	40	Poin	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Sekretariat Daerah Kota
116	4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	25,9	25,9	Poin	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Sekretariat Daerah Kota
117	4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	30	30	Poin	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Sekretariat Daerah Kota

6. Hubungan dengan Perwakilan Daerah

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
118	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat	Tepat	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
119	4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	4	33.33	%	-	Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kota
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	12				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

7. Pelayanan Publik

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
120	4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	78,28	78,28	Nilai	-	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah Kota

8. Penelitian dan Pengembangan

No	No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Keterangan	Sumber Data
			Definisi Parameter	Nilai				
121	4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	235	93.25	%	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	252				



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah disusun berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta memuat analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga bisa memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai.

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, terdapat 5 (lima) Tujuan dengan 15 (lima belas) Sasaran pembangunan.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang merupakan tahun kedua periode RPD 2024-2026 adalah seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PADANG PANJANG YANG ISLAMI DAN MAKMUR				
I	MISI I "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"			
T1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Indeks Pembangunan Manusia	80,78	81,5
	S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah	12,14	12,16
		2. Harapan Lama Sekolah	15,48	15,67
	S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Umur Harapan Hidup	74,51	76,17
		4. Prevalensi Stunting	9,22	9,22
	S3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,05	73,05
		6. Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama
	S4. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	7. Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama
		8. Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,50	0,50
II.	MISI 2 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya			
T2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	2 Indeks Reformasi Birokrasi	78,66	79,72



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	S5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9.	Nilai SAKIP	64,86	65,00
			10.	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71,50	68,40
			11.	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (325)
			12.	Maturitas SPIP	3 (3,2)	3 (3,2)
			13.	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	94,5	94,5
			14.	Indeks SPBE	3,20	3,16
III.	MISI 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif					
T3.	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai dengan Penurunan Ketimpangan		3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	5,60
			4	Indeks Gini	0,264	0,264
	S6.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	15.	LPE Sektor Perdagangan	6,90	6,90
			16.	LPE Sektor Pertanian	5,69	5,69
			17.	LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	11,19	11,19
	S7.	Meningkatnya Investasi	18.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	39,00	39,00
	S8.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	19.	Tingkat Kemiskinan	4,23	4,23
			20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,94	4,43
	S9.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	21.	Pengeluaran Perkapita	12,010	12,010
III.	MISI 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif					
T4.	Terwujudnya Tataan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis		5	Indeks Rasa Aman	Aman (92,57)	Aman (84,178)
	S10.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	22.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	74,00	66,60
			23.	Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	100,00	85,00
	S11.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00
	S12.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	25.	Angka PPKS	3,68	3,68
III.	MISI 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif					
T5.	Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas		6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	95,65	95,65
			7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,71	74,34
	S13.	Terbangunnya Insfrastruktur layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	26.	IKLI KePUan	98,00	98,00
			27.	IKLI Perkim	100,00	100,00
			28.	IKLI Perhubungan	98,00	98,00
	S14.	Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	29.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,50	83,50
	S15.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	30.	Indeks Kualitas Air	45,75	72,47
			31.	Indeks Kualitas Udara	90,25	78,68
			32.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,00	69,51

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025



Pada tabel diatas dapat dilihat terdapat perubahan target pada beberapa indikator kinerja. Beberapa penyesuaian terutama untuk indikator yang terkait dengan peningkatan ekonomi dan kemiskinan. Surat edaran dari Pemerintah Pusat melakukan efisiensi belanja daerah tahun 2025, hal ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat perekonomian Kota Padang Panjang, karena dalam 5 tahun terakhir sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, merupakan salah satu dari 5 sektor penyumbang tertinggi dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 capaian kinerja dari 32 indikator kinerja yang diukur, 10 indikator melebihi target yaitu Harapan Lama Sekolah; Umur Harapan Hidup; Prevalensi Stunting; Rasio Daya Saing Keolahragaan; Nilai SAKIP; Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Indeks SPBE; Pengeluaran Perkapita; Angka PPKS; Indeks Kualitas Udara , 4 indikator sesuai target yaitu Status Kota Layak Pemuda; Maturitas SPIP; Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan masih ada 15 indikator yang masih belum mencapai target yaitu Rata-rata Lama Sekolah; IPKD; LPE Sektor Perdagangan; LPE Sektor Pertanian; LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum; Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi; Tingkat Kemiskinan; Tingkat Pengangguran Terbuka; Persentase Pemajuan Kebudayaan; Persentase masjid yang aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan; IKLI Ke-Puan; IKLI Perkim; IKLI Perhubungan; Indeks Kualitas Air; , sementara masih ada 3 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023, capaian kinerja dari 24 indikator kinerja yang diukur, 9 indikator melebihi target, 2 indikator sesuai target dan masih ada 11 indikator yang masih belum mencapai target, sementara masih ada 2 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya. 16 indikator RPD 2024-2026 yang masih mempertahankan indikator RPJMD 2018-2023 5 indikator capaiannya melebihi target yaitu pengeluaran perkapita, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, angka PPKS dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8 indikator belum mencapai target yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, prevalensi stunting dan persentase pemajuan kebudayaan. Satu indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum sesuai target. Indikator yang belum bisa diukur dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai ini baru dirilis dalam portal BPS Provinsi Sumatera Barat setelah Laporan Kinerja Tahun 2024 dikirimkan. Nilai IDG Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 67,58 masih kurang 3,26 dari target dengan capaian 95,40%.

b. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dibanding capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022, 2024 dan Target Tahun Kedua dan Target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Capaian tujuan terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*descent standart*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu : sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$). Untuk lebih jelasnya capaian IPM Kota Padang Panjang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	81,5	81,32	99,78	80,60	100,41

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa IPM Kota Padang Panjang pada tahun selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2022. IPM Tahun 2025 naik 0,72 poin dari 80,60 menjadi 81,32 dengan capaian 99,78% masih kurang 0,18 poin dari target yang ditetapkan.

Dari perseptif RPD 2024-2026 capaian IPM telah melebihi target akhir RPD, terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD berturut-turut adalah 102,44% dan 101,99%, sebagaimana ditunjuukan tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Tujuan	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	81,5	81,32	99,78	79,38	102,44

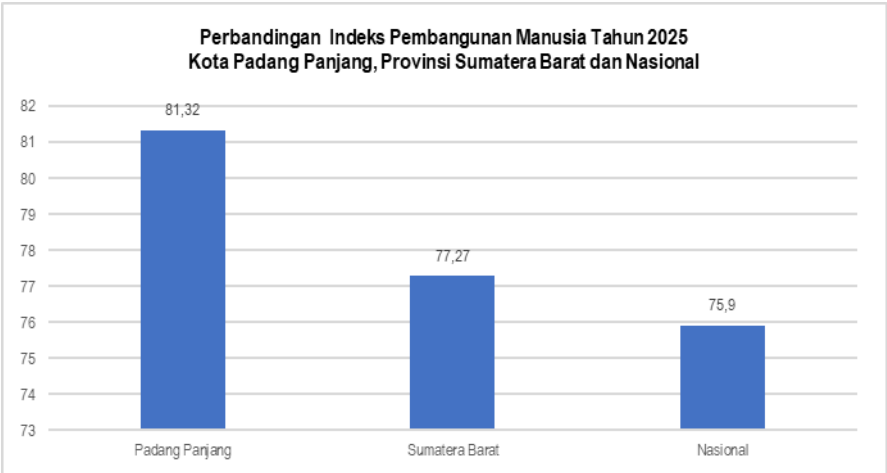
T= Target R = Realisasi C=Capaian

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026



Secara keseluruhan berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing tercapai dengan baik. Bahkan IPM Kota Padang Panjang lebih baik 4,05 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat (77,27) dan lebih baik 5,42 poin dibandingkan IPM Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan IPM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tahun 2024 dari 12,00 tahun menjadi 12,01 tahun.
2. Meningkatkan harapan lama sekolah
Angka harapan lama sekolah di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,27 tahun dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah di tahun 2024 dari 15,47 tahun menjadi 15,74.
3. Meningkatkan umur harapan hidup
Umur harapan hidup di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,38 tahun dibandingkan tahun 2023, dari 74,48 tahun menjadi 74,86 tahun.
4. Menekan prevalensi *stunting*
Prevalensi *stunting* tahun 2024 berhasil ditekan sebesar 0,46% dibanding tahun 2024 dari 9,49% menjadi 9,03%.
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan peningkatan peran perempuan pada Lembaga-lembaga pemerintahan dan nonperintahan serta keterwakilan perempuan dalam partai politik. Indeks pemberdayaan gender merupakan salah



satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur peran dan partisipasi perempuan yang mencakup kepada partisipasi di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Tabel berikut menggambarkan tentang capaian Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Indeks Pemberdayaan Gender	68,04	66,62	69,44	69,44	70,84	67,58	71,44	75,62

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi terhadap indek pemberdayaan gender di Kota Padang Panjang tahun 2021-2024. Meskipun sedikit rendah dari target perencanaan akan tetapi capaian ini masih tergolong baik dengan tingkat partisipasi perempuan di parlemen sebanyak 20% pada periode 2021 Sampai tahun 2024.

6. Predikat Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah konsep yang berfokus pada pembangunan kota yang mendukung kebutuhan dan hak-hak anak-anak. Cakupan dari Kota Layak Anak adalah penciptaan lingkungan yang aman, sehat, dan merangsang perkembangan anak. tujuan dari Kota Layak anak adalah untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dan mendorong masa depan anak kearah yang lebih baik dengan menerapkan sistem ramah anak. Kota yang layak anak harus mampu merencanakan dan menjalankan program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak.

Dilihat dari Capaian Indikator Kota Layak Anak Kota Padang Panjang pada Tahun 2021-2024 terlihat bahwa peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dimana pencapaian maksimal dapat diperoleh dengan prediket Utama. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan Kota yang ramah anak, dalam artian Pemerintah Kota Padang Panjang sudah memenuhi seluruh aspek dalam mengikutsertakan anak dalam Pembangunan dengan memenuhi hak-hak anak.

Tabel berikut menggambarkan capaian Predikat Kota Layak Anak Kota Padang Panjang periode Tahun 2021-2024.

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Madya	Nindya	Madya	Utama	Utama	Utama	Nindya



7. Status Kota Layak Pemuda

Status Kota Layak Pemuda pada tahun 2025 adalah Menuju Pratama, berhasil memenuhi target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

8. Rasio Daya Saing Kelolahragaan

Rasio daya saing keolahragaan pada tahun 2025 sebesar 1,00 melebihi target dari 0,50 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 200%.

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing telah ditetapkan 4 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian empat sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) dan 2) Harapan Lama Sekolah (tahun). Rata-rata lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Capaian dari kedua indikator ini dari tahun 2024-2025 sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Tujuan	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Rata-rata Lama Sekolah	12,16	12,01	98,77	12	99,67
2 Harapan Lama Sekolah	15,67	15,74	100,45	15,47	100,72

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :



Tabel 2.6
Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun ke-2 RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Rata-rata Lama Sekolah	12,16	12,01	98,77	11,96	100,42
2 Harapan Lama Sekolah	15,67	15,74	100,45	15,10	104,24

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

(a) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 meningkat 0,16 tahun dari 12 tahun pada tahun 2024 menjadi 12,16 tahun dengan capaian kinerjanya adalah sebesar 98,77%.

Tabel 2.7
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Rata-rata Lama Sekolah	12,16	12,01	98,77	12	99,67

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Dari perspektif RPD 2024-2026, capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD berturut-turut adalah 100,42% dan 100,25% sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Rata-rata Lama Sekolah	12,16	12,01	98,77	11,96	100,42

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Meskipun belum berhasil mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025, Rata Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2025 dengan realisasi sebesar 12,01 merupakan nilai terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, seperti disajikan dalam grafik berikut ini :

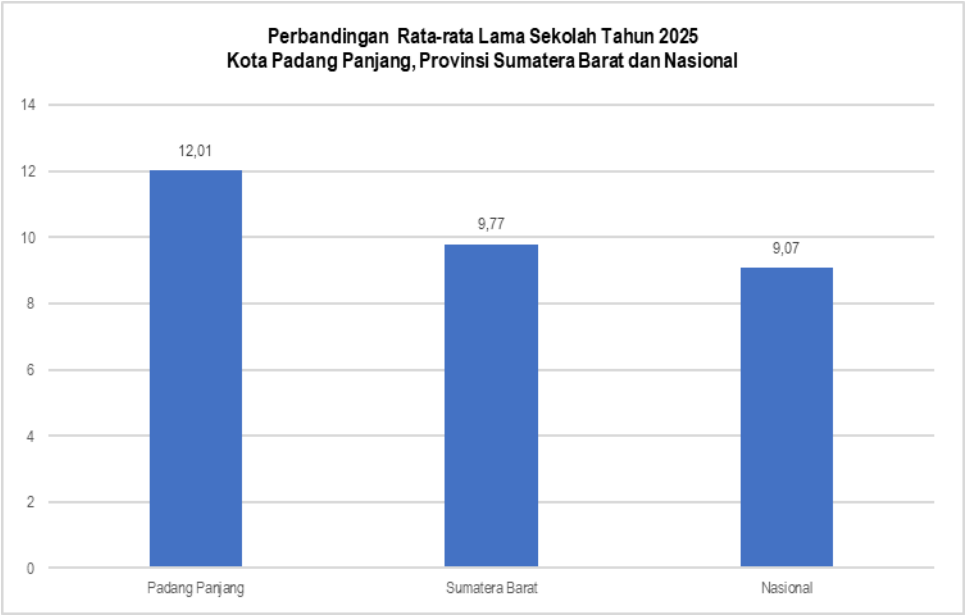


Grafik 2.2



Capaian kinerja ini juga lebih baik dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu 9,77 dan dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Nasional Tahun 2025 yaitu 9,07, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

Grafik 2.3



(b) Indikator Harapan Lama Sekolah

Indikator Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang secara konsisten meningkat sejak tahun 2022. Pada Tahun 2025 harapan lama sekolah meningkat 0,27 tahun dari 15,47 pada tahun 2024 menjadi 15,74. Realisasi ini lebih tinggi 0,07 dari target yang ditetapkan yaitu 15,67 dengan capaian kinerja 100,45%, seperti disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.9
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Harapan Lama Sekolah	15,67	15,74	100.45	15,47	100,72

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Dari perspektif RPD Tahun 2024-2026, realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target akhir RPD yaitu 15,47 tahun dengan capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD secara berurutan adalah 104,24% dan 104,17%.

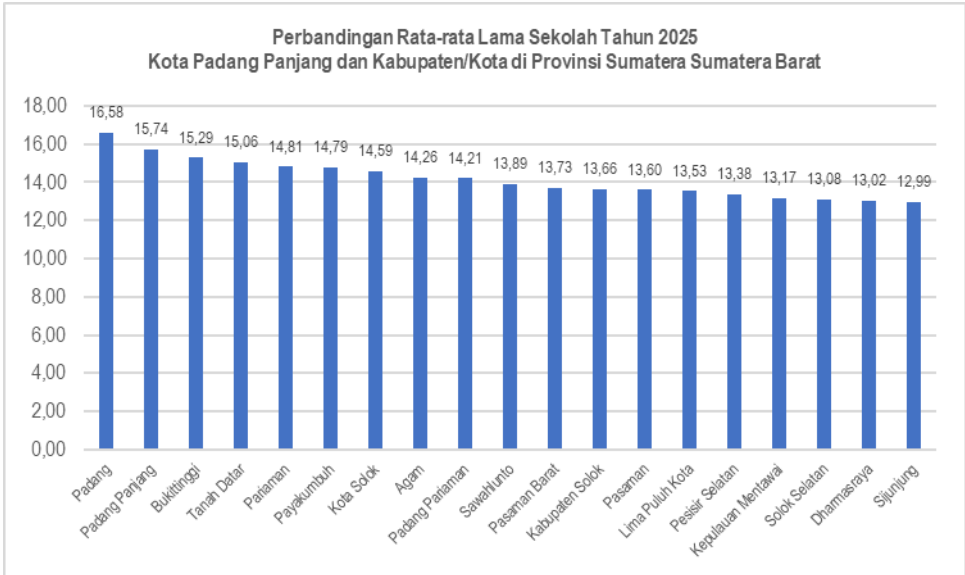
Tabel 2.10
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Harapan Lama Sekolah	15,67	15,74	100.45	15,10	104,24

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2025 menempati posisi kedua jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, terpaut 0,84 dengan Kota Padang yang memiliki nilai Harapan Lama Sekolah tertinggi Tahun 2025, seperti disajikan dalam grafik berikut ini :

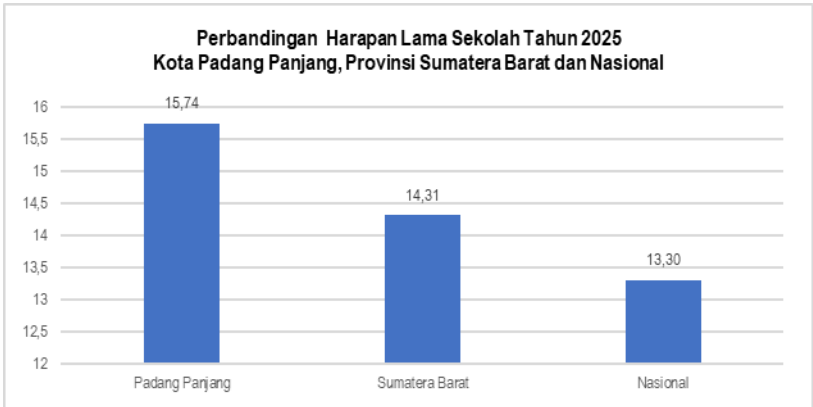
Grafik 2.4



Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang lebih tinggi 1,43 tahun dibandingkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 2,44 tahun dibandingkan Rata Rata Lama Sekolah Nasional, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :



Grafik 2.5



Adapun faktor pendorong/pendukung Sasaran Strategis Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan di Kota Padang Panjang sangat baik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pemahaman orang tua akan arti penting pendidikan untuk anak-anak mereka.
2. Akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dimana jarak antara rumah masyarakat dengan sekolah cukup dekat.
3. Banyaknya fasilitasi dan bantuan dari berbagai pihak untuk peningkatan pendidikan seperti KIP, bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang, beasiswa dan lain-lain.
4. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, kelurahan dan RT untuk merazia dan menegur anak-anak yang berkeliaran yang jam sekolah.
5. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak sekolah, anak-anak dan dengan orang tua.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp.51.866.844.061,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 44.958.101.825,- (84,50%).** untuk melaksanakan

1. Program Pengelolaan Pendidikan,
2. Program Pembinaan Perpustakaan,
3. Program Pelestarian Naskah Nasional dan Naskah Kuno, dan
4. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

2. **Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun) dan 2) Prevalensi *Stunting*. Umur harapan Hidup adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian



pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Sedangkan Prevalensi *Stunting* adalah Jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Capaian Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Umur Harapan Hidup	76,17	74,86	98,28	74.48	100.05
2 Prevalensi Stunting	9,22	9,03	102,06	9.49	132.21

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.12
Capaian Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	T	C
1 Umur Harapan Hidup	76,17	74,86	98,28	73,05	102,48
2 Prevalensi Stunting	9,22	9,03	102,06	12,60	128,33

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

(a) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 adalah 74,86 tahun dari target yang telah ditetapkan 76,17 tahun sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 98,28%.

Tabel 2.13
Capaian Indikator Umur Harapan Hidup Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Umur Harapan Hidup	76,17	74,86	98,28	74.48	100.05

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Capaian Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,77% dari capaian tahun 2024 yang sebesar 100,05 % menjadi 98,28% pada Tahun 2025. Dan dilihat dari perbandingan realisasi, Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,38 yaitu dari realisasi Tahun 2024 sebesar 74,48 tahun menjadi 74,86 tahun pada Tahun 2025. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2025 Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan dan realisasi Tahun 2025 adalah angka Umur Harapan Hidup tertinggi sejak Tahun 2022.



Tabel 2.14
Capaian Indikator Umur Harapan Hidup Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

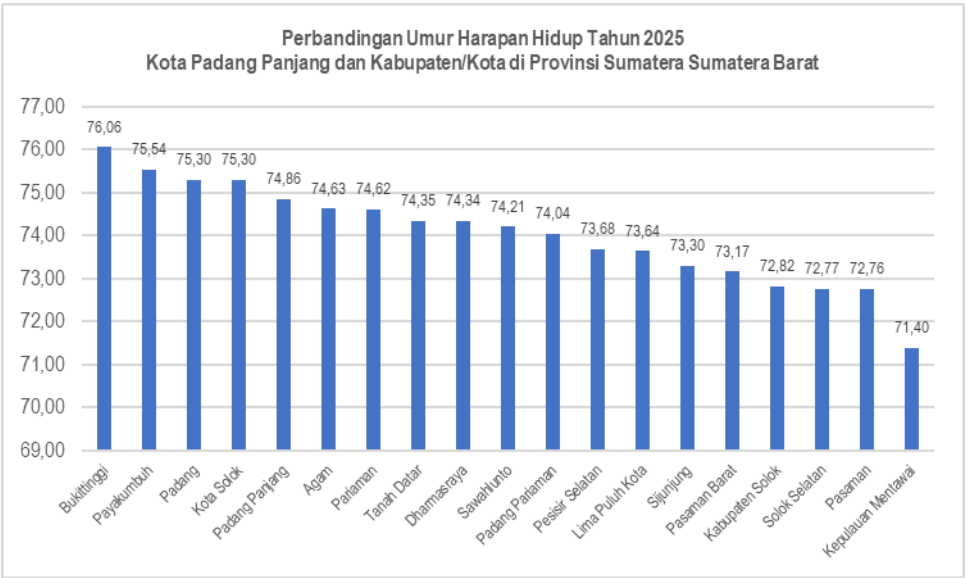
Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Umur Harapan Hidup	76,17	74,86	98,28	73,05	102,48

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah lebih baik 1,8 poin dari target akhir RPD yaitu 73,06 tahun dengan capaian kinerja sebesar 102,46%.

Tahun 2025 apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5, belum sebaik Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang dan Kota Solok.

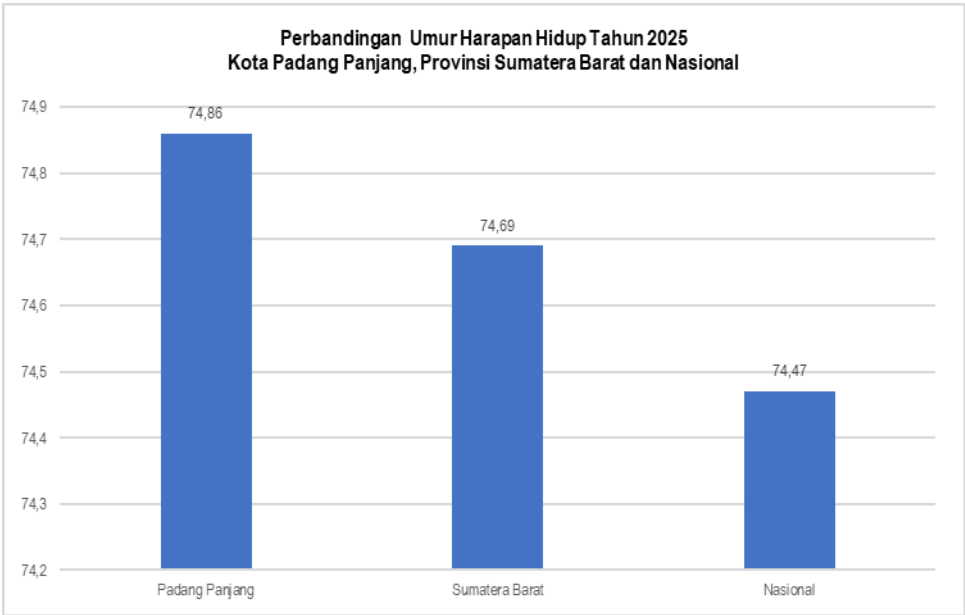
Grafik 2.6



Adapun Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2025 lebih baik 0,17 poin dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 74,69 tahun dan lebih tinggi 0,39 poin dibandingkan Umur Harapan Hidup Nasional yang sebesar 74,47 tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 2.7



(b) **Prevalensi Stunting**

Prevalensi *Stunting* Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 mengalami penurunan positif sebanyak 0,43 poin dari 9,49 pada tahun 2024 menjadi 9.03 dengan capaian kinerja 102,06%.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Prevalensi Stunting	9,22	9,03	102,06	9.49	132.21

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi tren penurunan positif prevalensi stunting sejak 2022. Bahkan realisasi tahun 2025 telah jauh melampaui target akhir RPD 2024-2026, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian Indikator Prevalensi Stunting Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Prevalensi Stunting	9,22	9,03	102,06	12,60	128,33

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Penghitungan prevalensi stunting dilakukan terhadap seluruh balita yang tersebar dalam 16 kelurahan di Kota Padang Panjang pada 2025, dengan hasil sebagai berikut :

No	Desa/Kelurahan	BB/U							TBU						
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	JML	Underweight	% Underweight	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	JML	Stunting	% Stunting
	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	13	115	1608	90	1826	128	7,01	32	163	1628	3	1826	195	10,68
1	KAMPUNG MANGGIS	1	29	437	20	487	30	6,16	2	58	426	1	487	60	12,32
2	TANAH HITAM	2	10	192	11	215	12	5,58	4	15	196	0	215	19	8,84
3	PASAR BARU	0	8	51	3	62	8	12,90	2	2	58	0	62	4	6,45



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4	BALAI-BALAI	5	19	239	20	283	24	8,48	8	22	253	0	283	30	10,60
PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS		8	66	919	54	1047	74	7,07	16	97	933	1	1047	113	10,79
5	SILAING BAWAH	2	17	298	15	332	19	5,72	1	23	308	0	332	24	7,23
6	SILAING ATAS	1	11	109	3	124	12	9,68	5	19	100	0	124	24	19,35
7	PASAR USANG	1	16	145	2	164	17	10,37	7	11	146	0	164	18	10,98
8	BUKIT SURUNGAN	1	5	137	16	159	6	3,77	3	13	141	2	159	16	10,06
PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN		5	49	689	36	779	54	6,93	16	66	695	2	779	82	10,53
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR		10	87	1269	75	1441	97	6,73	23	77	1340	1	1441	100	6,94
9	SIGANDO	0	10	115	5	130	10	7,69	4	11	115	0	130	15	11,54
10	GANTING	2	11	189	10	212	13	6,13	4	20	188	0	212	24	11,32
11	NGALAU	0	13	160	7	180	13	7,22	4	15	161	0	180	19	10,56
12	EKOR LUBUK	2	9	96	18	125	11	8,80	3	8	113	1	125	11	8,80
PUSKESMAS GUNUNG		4	43	560	40	647	47	7,26	15	54	577	1	647	69	10,66
13	GUGUK MALINTANG	1	12	301	15	329	13	3,95	0	3	326	0	329	3	0,91
14	TANAH PAK LAMBIK	1	9	110	6	126	10	7,94	1	4	121	0	126	5	3,97
15	KOTO PANJANG	3	19	227	12	261	22	8,43	5	6	250	0	261	11	4,21
16	KOTO KATIK	1	4	71	2	78	5	6,41	2	10	66	0	78	12	15,38
PUSKESMAS KOTO KATIK		6	44	709	35	794	50	6,30	8	23	763	0	794	31	3,90
KOTA PADANG PANJANG		23	202	2877	165	3267	225	6,89	55	240	2968	4	3267	295	9,03

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Dari 3.267 balita yang diukur oleh 4 puskesmas status gizinya, terdapat 295 kasus balita yang mengalami stunting, dengan kasus tertinggi di wilayah puskesmas Kebun Sikolos sebanyak 113 kasus dan yang terbanyak di kelurahan Kampung Manggis sebanyak 60 kasus.

Adapun faktor pendorong/pendukung pencapaian sasaran strategis derajat Kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang sangat baik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pemahaman masyarakat akan arti penting kesehatan baik kesehatan diri maupun Kesehatan lingkungan.
2. Akses yang mudah bagi masyarakat ke fasilitas Kesehatan (jarak yang cukup dekat, tenaga medis yang siaga pada masyarakat yang membutuhkan, PSC 119).
3. Banyaknya fasilitas dan bantuan dari berbagai pihak dibidang kesehatan seperti, KIS, bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang, air bersih, sanitasi lingkungan yang cukup baik dan lain-lain.
4. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah untuk memantau kondisi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan.
5. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara masyarakat, para kader Kesehatan, kader pemberdayaan masyarakat, petugas medis dan para medis dan pemerintah daerah.



Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.441.062.079.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.493.842.165,60,- (88,10%) bagi Dinas Kesehatan, dan Dinas Pangan dan Pertanian untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

- 1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 4. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 5. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3. **Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan 2) Predikat Kota Layak Anak. Dari sasaran ini untuk indikator Predikat Kota Layak Anak merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Capaian Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,05	NA	BELUM ADA NILAI	75,62	105,85
2 Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI	nindya	Tidak tercapai

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.18
Capaian Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,05	NA	BELUM ADA NILAI	73,05	BELUM ADA NILAI
2 Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI	Utama	BELUM ADA NILAI

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah



(a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penetapan kuota perempuan dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator.

Salah satu Indikator yang diukur untuk melihat partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kota Padang Panjang adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Data IDG Kota Padang Panjang untuk tahun 2025, belum dipublikasikan oleh Kementerian PPPA RI.

Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi IDG di Kota Padang Panjang tahun 2022-2024. IDG meningkat signifikan pada Tahun 2024 setelah mengalami penurunan pada tahun 2023, seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.19
Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender
Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,05	NA	BELUM ADA NILAI	75,62	105,85

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA, 2025

Karena nilai 2025 belum dirilis, belum bisa dilihat capaian IDG terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD, seperti tabel berikut :



Tabel 2.20
Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Tahun ke-2 RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,05	NA	BELUM ADA NILAI	73,05	BELUM ADA NILAI

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

(b) Predikat Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang; dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu melibatkan anak untuk berpartisipasi mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Strategi pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Penyelenggaraan KLA terintegrasi dengan seluruh sistem pembangunan di Kabupaten/Kota yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan dalam setiap tingkatan wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Predikat KLA adalah predikat yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja pelaksanaan 24 indikator KLA, terdiri dari :

- a. Pratama (nilai 500-600)
- b. Madya (nilai 601-700)
- c. Nindya (nilai 701-800)
- d. Utama (nilai 801-900)
- e. KLA (nilai 901-1000)

Pada Tahun 2022 dan 2023 Predikat Kota Layak Anak Kota Padang Panjang sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Nindya, namun pada Tahun 2024 target Utama tidak tercapai, karena predikat masih bertahan di posisi Nindya, seperti disajikan tabel berikut :



Tabel 2.21
Capaian Indikator Predikat Kota Layak Anak Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI	nindya	Tidak tercapai

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Karena nilai 2025 belum dirilis, belum bisa dilihat capaian Predikat Kota Layak Anak terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD, seperti tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Indikator Predikat Kota Layak Anak Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI	Utama	BELUM ADA NILAI

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.023.779.555.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.416.402.515,- (76,88 %) bagi Dinas Sosial, PPKBPPPA untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 2. Perlindungan Perempuan
 3. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 4. Perlindungan Khusus Anak
 5. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 6. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. **Sasaran Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Status Kota Layak Pemuda dan 2) Rasio Daya Saing Keolahragaan. Status Kota Layak Anak adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tertentu dalam melembagakan dan menginternalisasikan kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan atau berbasis kepemudaan. Sedangkan rasio daya saing keolahragaan adalah suatu indikator yang diukur dari jumlah even yang dijuarai / jumlah even yang diikuti.

Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.23
Capaian Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00	Menuju Pratama	100
2 Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,50	1,00	200,00	0,50	250

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2026

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.24
Capaian Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00	Menuju Pratama	tercapai
2 Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,50	1,00	200,00	0,25	400,00

Sumber : BPS, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

(a) Status Kota Layak Pemuda

Penetapan Status Kota Layak Pemuda didasarkan kepada Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor : 1.22.8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Indikator dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda ini didasarkan capaian terhadap lima aspek penilaian yang meliputi antara lain meliputi aspek Kabupaten/Kota Layak Pemuda, indikator variabel pemenuhan persyaratan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, dan koordinasi strategis lintas sektor kepemudaan pada Kementerian.

Tabel 2.25
Capaian Indikator Status Kota Layak Pemuda Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00	Menuju Pratama	100,00

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Status Kota Layak Pemuda tahun 2025 Kota Padang Panjang adalah Menuju Pratama sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan peran pemuda juga ikut dalam pembangunan yang dilakukan di Kota Padang Panjang.



Tabel 2.26
Capaian Indikator Status Kota Layak Pemuda Tahun ke-2 RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00	Menuju Pratama	tercapai

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2026

Sementara jika dilihat dari perspektif Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Status Kota Layak Pemuda Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah sesuai dengan target tahun ke-2 RPD 2024-2026, yaitu Menuju Pratama dan diharapkan dapat mencapai target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang pada tahun 2026, yaitu Pratama.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Status Kota Layak Pemuda antara lain adalah:

- 1. Tersedianya regulasi kepemudaan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan
- 2. Tersedianya anggaran dan program kepemudaan
- 3. Tersedianya pelembagaan partisipasi pemuda
- 4. Tersedianya ruang partisipasi pemuda dalam proses pembangunan

(b) Rasio Daya Saing Keolahragaan

Rasio Daya Saing Keolahragaan diukur dari persentase even yang dijuarai/ jumlah even yang diikuti.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Status Kota Layak Pemuda Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,50	1,00	200,00	0,50	250,00

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian Indikator Rasio Daya Saing Keolahragaan Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 adalah 1,00%, meningkat dua kali lipat dibandingkan Tahun 2024, dengan capaian kinerja sebesar 200%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam meraih juara jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa performa atlet dan efektivitas pembinaan olahraga di Kota Padang Panjang semakin meningkat.



Tabel 2.28
Capaian Indikator Status Kota Layak Pemuda
Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,50	1,00	200,00	0,25	400,00

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2026

Dilihat dari perspektif target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah melewati target tahun ke-2 dan tahun terakhir RPD. Bahkan capaian terhadap target akhir RPD Adalah 333,33%. Secara keseluruhan, capaian yang melampaui target pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa pembangunan bidang keolahragaan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam pembinaan, peningkatan kualitas pelatihan, serta partisipasi pada event yang lebih kompetitif agar rasio daya saing tetap terjaga dan berkelanjutan

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Rasio Daya Saing Keolahragaan adalah tersedianya potensi pelatih olahraga yang berkualitas di Kota Padang Panjang dan meningkatnya jumlah atlit yang kompetitif baik secara perorangan maupun kelompok di tingkat regional dan nasional, serta rutinnnya pelaksanaan kejuaraan dan event baik tingkat daerah, regional, dan nasional, dimana jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi, pada tahun 2025 Kota Padang Panjang meraih 36 prestasi tingkat nasional dan 43 prestasi tingkat provinsi.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 2.422.324.837.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.176.706.914.00,- (69,80%)** pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

- 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



2. Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Bagaimana kinerja birokrasi suatu pemerintahan daerah telah dikelola dengan baik dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Untuk pengukuran Indeks RB tahun 2025 berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Berdasarkan nilai sementara Indeks RB Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah 81,49 seperti ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.29
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	79,72	81,49	102,22	77,66	115,05

Sumber : KemenpanRB, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2022 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang selalu mengalami kenaikan yang signifikan dan selalu melebihi target yang ditetapkan.

Bahkan realisasi Tahun 2023 telah melewati target akhir RPD Tahun 2024-2026, seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.30
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	79,72	81,49	102,22	63,00	129,35

Sumber : KemenpanRB, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang pada tahun 2025 telah melebihi target akhir RPD sebanyak 17,29 poin, dengan capaian 126,93%.

Berikut disajikan perbandingan rincian hasil evaluasi RB Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.31
Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025

No	Komponen dan Sub Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
A	RB General				
	Total Komponen RB General (A)	100	61,72	68,66	71,39
B	RB Tematik				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Total Komponen RB Tematik (B)	20	4,60	9	10,1
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	120	66,54	77,66	81,49

Sumber : Kementerian PANRB, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada komponen RB General dan RB Tematik terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan, tetapi tetap perlu menyusun strategi dan rencana aksi yang lebih baik agar pelaksanaan RB dan penyelesaian isu-isu strategis terlaksana lebih maksimal dimasa yang akan datang.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sistematis dan realistis
Sesuai dengan arahan Kementerian PANRB, Pemerintah Kota telah Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan mengacu kepada Perubahan Roadmap RB Nasional sebagaimana diatur pada PermenPANRB Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Monitoring berkala terhadap pencapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi
Tim Reformasi Birokrasi secara berkala telah melakukan Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi terhadap perangkat daerah pengampu dan memberikan arahan untuk optimalisasi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.
3. Pelaksanaan Evaluasi berkelanjutan
Inspektorat sebagai APIP di Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi yang berkelanjutan, baik dalam penyusunan renacana aksi maupun pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi ini kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk medapatkan arahan dan juga dikoordinasikan kepada perangkat daerah terkait untuk ditidaklanjuti.
4. Koordinasi dan sinergitas Tim
Agar pelaksanaan RB berjalan maksimal sesuai perencanaan, selalu dilakukan koodinasi dan sinergitas antara Tim RB, perangkat daerah terkait dan inspektorat daerah selaku APIP. Koordinasi ini dilakukan secara langsung melalui rapat koordinasi ataupun secara daring.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel telah ditetapkan 1 sasaran strategis



Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada sasaran ini terdapat enam indikator yaitu: Nilai SAKIP, IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah), Indeks Sistem Merit, Maturitas SPIP, Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Indeks SPBE. Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2024-2025 sebagai berikut :

Tabel 2.32
Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Nilai SAKIP	65,00	65,06	100,09	64.22	100.38
2 IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	68,40	53,9064	78,81	63.19	89.01
3 Indeks Sistem Merit	325	325	100,00	NA	BELUM ADA NILAI
4 Maturitas SPIP	3 (3,2)	2 (2,69)	84,06	3	100.00
5 Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91,00	NA	NILAI BELUM KELUAR	94.46	103.80
6 Indeks SPBE	3,16	3,16	100,00	3.16	107.12

Sumber : KemenpanRB-Kemendagri-KASN-BPKP-Ombudsman

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.33
Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Nilai SAKIP	65,00	65,06	100,09	64,86	100,31
2 IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	68,40	53,9064	78,81	71,50	75,39
3 Indeks Sistem Merit	325	325	100,00	335	97,01
4 Maturitas SPIP	3 (3,2)	2 (2,69)	84,06	3 (3,2)	84,06
5 Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91,00	NA	NILAI BELUM KELUAR	93,00	NILAI BELUM KELUAR
6 Indeks SPBE	3,16	3,16	100,00	2,85	110,88

Sumber : KemenpanRB-Kemendagri-KASN-BPKP-Ombudsman

(a) Indikator Nilai SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Guna mengetahui tingkat implementasi SAKIP, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Padang



Panjang. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level kota maupun pada level perangkat daerah. Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	65,00	65,06	100,09	64.22	100.38

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Dari tabel terlihat bahwa Nilai SAKIP Kota Padang Panjang walaupun tidak signifikan selalu mengalami kenaikan dan selalu melebihi target yang ditetapkan. Bahkan hampir mencapai target akhir RPD 2024-2026 hanya terpaut 0,68 poin, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.35
Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Nilai SAKIP	65,00	65,06	100,09	64,86	100,31

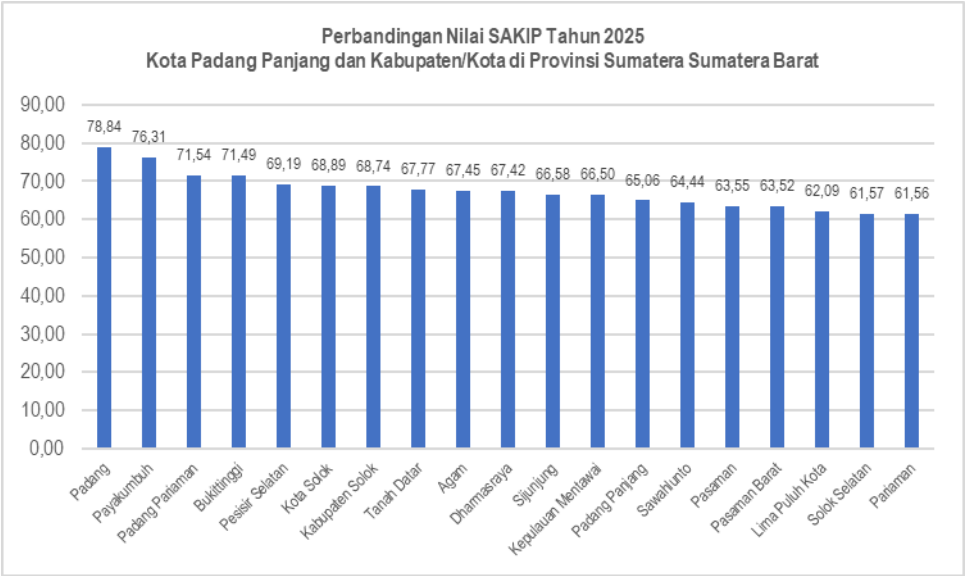
Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa Nilai SAKIP Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah 65,06 dari target yang telah ditetapkan 65,00 sehingga capaian kinerjanya 100,09%.

Tahun 2025 apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Nilai SAKIP Kota Padang Panjang dengan nilai 65,06 menempati posisi ke-13 dari 19 Kabupaten/Kota.



Grafik 2.8



Adapun nilai Nilai SAKIP tertinggi dimiliki oleh Kota Padang dengan nilai 78.84 dan terendah adalah Kota Pariaman dengan nilai 61,56. Adapun Nilai SAKIP Kota Padang Panjang tahun 2025 lebih rendah 13,79 poin dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 78,85.

Berikut rincian penilaian SAKIP tahun 2023 dan 2024 untuk masing-masing komponen penilai:

Tabel 2.36
Penilaian SAKIP tahun 2023-2025

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
		2023	2024	2025
1. Perencanaan Kinerja	30	22,88	22,93	23,20
2. Pengukuran Kinerja	30	15,68	16,39	16,58
3. Pelaporan Kinerja	15	9,74	9,92	9,99
4. Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	14,98	14,98	15,29
Nilai Hasil Evaluasi		63,28	64,22	65,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Sumber : KemenpanRB

Dari empat komponen evaluasi akuntabilitas kinerja, peningkatan capaian kinerja yang paling tinggi terdapat pada komponen evaluasi akuntabilitas internal, yakni 0,31 poin dari total peningkatan nilai 0,84 poin.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Nilai SAKIP Tahun 2025 yaitu adanya pelaksanaan tindaklanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya yakni:

1. Pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2. Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Aplikasi e-SAKIP bekerja sama dengan Biro Organisasi Propinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan Desk Evaluasi Renstra 2025-2029 dan Renja 2025
4. Telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan LPPD dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Namun demikian masih terdapat faktor yang menyebabkan perlambatan pencapaian kinerja SAKIP di Kota Padang Panjang antara lain :

1. Dalam perencanaan kinerja masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur (*measurable*), relevan, dan cukup; penetapan target yang tidak tepat dan tidak menantang; Penjenjangan kinerja PD belum sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja; Penjenjangan kinerja PD belum mengidentifikasi adanya crosscutting antar PD, instansi di luar Pemerintah Kota Padang Panjang, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pencapaian kinerja Organisasi; dan Penetapan rencana aksi pada sebagian PD belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.
2. Dalam pengukuran kinerja harus disempurnakan Kembali, karena masih ada formulasi penghitungan indikator kinerja yang tidak menggambarkan kinerja yang seharusnya; Aplikasi manajemen kinerja belum dimaksimalkan untuk menyampaikan capaian kinerja triwulanan PD kepada publik; Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengumpulan data kinerja unit di bawahnya secara berkala dan berjenjang.
3. Pelaporan kinerja masih belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang lengkap untuk setiap sasaran dan Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya
4. Evaluasi internal yang dilaksanakan hasilnya masih ada yang belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang menjawab catatan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP, dan PD belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat. Dan pemberian reward berupa piagam atas hasil evaluasi



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

akuntabilitas kinerja internal namun belum sepenuhnya cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah dan sedang dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Kota Padang Panjang, antara lain :

1. Pendampingan penyusunan laporan Kinerja dalam penyusunan RPJMD 2025-2029
2. Coaching clinic penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
3. Pembinaan/ peningkatan kapasitas perencana dan *stakeholder* dengan menghadirkan narasumber dari *SMARTid*
4. Bekerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat dalam manajemen kinerja melalui e-SAKIP

(b) **Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penetapan IPKD berdasarkan dimensi dan indikator tertentu, Dimana tujuan dari IPKD adalah untuk membuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah. Indikator dalam menghitung IPKD meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil pengukuran terhadap 6 Dimensi diatas akan memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Dimensi tersebut diatas melihat proses perencanaan pembangunan sampai dengan proses pelaporan keuangan. Dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.



Pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarannya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Capaian Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Capaian Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	68,40	53,9064	78,81	63.1968	89.01

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 turun 9,2904 poin dari 63,1968 (sangat butuh perbaikan) pada tahun 2024 menjadi 53,9064 (cukup baik) dengan capaian 78,80%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan.

Tabel 2.38
Capaian Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	68,40	53,9064	78,81	71,50	75,39

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Padang Panjang Tahun 2025 capaiannya terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD berturut-turut 75,30% dan 74,86%. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya yang signifikan.

Berikut nilai IPKD yang penilaian dilakukan pada tahun 2025 terhadap data keuangan pada tahun anggaran 2024.



Tabel 2.39
Perbandingan Nilai IPKD tahun 2024 dan 2025

No	Dimensi	2024		2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	15	8,5207	15	10,5314
2	Pengalokasian belanja dalam APBD	20	15,0000	-	-
2	Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD	-	-	20	7,7083
3	Transparansi pengelolaan keuangan Daerah	15	12,1552	15	15,0000
4	Penyerapan Anggaran	20	6,6667	20	6,6667
5	Kondisi Keuangan Daerah	15	5,8542	20	4,0000
6	Opini BPK atas LKPD	15	15,0000	10	10,0000
	Total Nilai	100	63,1968	100	53,9064

Sumber Data : Kemendagri, 2024-2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang :

- Memperoleh nilai maksimal dalam 2 dimensi, yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah dan Opini BPK atas LKPD
 - Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyediakan akses informasi terkait pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat secara transparan melalui berbagai media publikasi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
 - Pemerintah Kota Padang Panjang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perlu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah agar bisa mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dengan cara :
 - Menyusun strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - Mengelola belanja daerah secara lebih efektif dan efisien
- Harus melakukan evaluasi rutin terkait penyerapan anggaran dan menyusun langkah antisipatif agar faktor penghambat penyerapan anggaran bisa dikendalikan dengan efektif dan efisien.



4. Fokus menjaga kualitas anggaran belanja dalam APBD dengan memperhatikan *mandatory spending* :
 - a. alokasi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang sudah dialokasikan melalui TKD.
 - b. alokasi belanja infrastruktur minimal 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil.
 - c. Alokasi SPM berdasarkan kebutuhan dan capaian output

5. Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
Meningkatkan konsistensi antara target perencanaan dengan implementasi program dalam dokumen penganggaran.

Faktor-faktor penghambat pencapaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah:

1. Keterbatasan kualitas perencanaan dan konsistensi penganggaran
Pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, meskipun telah menunjukkan capaian yang cukup baik, masih terdapat kendala dalam menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen penganggaran tahunan. Perubahan prioritas program dan kegiatan pada tahap penyusunan anggaran seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana awal dan alokasi anggaran yang ditetapkan. Selain itu, kualitas perumusan indikator kinerja program dan kegiatan belum sepenuhnya terukur secara jelas.
2. Struktur belanja daerah yang belum optimal
Pada dimensi kualitas anggaran belanja dalam APBD, nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa komposisi belanja daerah masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya proporsi belanja operasional dibandingkan belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas anggaran dalam mendorong pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik.
3. Realisasi penyerapan anggaran yang belum maksimal
Penyerapan anggaran yang belum optimal menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya nilai pada dimensi penyerapan anggaran. Beberapa penyebab yang sering terjadi antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, perubahan kegiatan selama tahun berjalan, serta kendala administratif dalam pelaksanaan



program. Selain itu, perencanaan kegiatan yang kurang matang juga dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

4. Keterbatasan kemandirian fiskal daerah

Pada dimensi kondisi keuangan daerah, rendahnya nilai menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Padang Panjang masih terbatas. Pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif belum optimal. Hal ini menjadi tantangan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan

Meskipun transparansi pengelolaan keuangan daerah telah mencapai nilai maksimal, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan dan publikasi informasi masih perlu terus ditingkatkan agar lebih terintegrasi, mudah diakses, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

6. Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan

Faktor lain yang turut mempengaruhi capaian IPKD adalah kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu ditingkatkan. Pemahaman terhadap regulasi keuangan daerah yang terus berkembang, kemampuan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, serta pengelolaan program yang efektif menjadi aspek penting yang perlu terus diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan berbagai upaya strategis untuk memperbaiki dan memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini diarahkan pada peningkatan kinerja pada setiap dimensi penilaian IPKD agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara dokumen RPJMD, RKPD, KUA-



PPAS, dan APBD sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan agar lebih terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

2. Optimalisasi struktur dan kualitas belanja daerah

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengarahkan alokasi anggaran pada kegiatan yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan proporsi belanja pembangunan dan belanja modal yang mendukung peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Peningkatan efektivitas penyerapan anggaran

Untuk meningkatkan tingkat penyerapan anggaran, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah seperti mempercepat proses perencanaan kegiatan, memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala agar potensi hambatan dapat segera diatasi.

4. Penguatan kemandirian fiskal daerah

Dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan efisiensi belanja daerah agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

5. Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pemerintah daerah juga terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait dokumen dan realisasi anggaran. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media publikasi agar masyarakat dapat mengakses dan memantau pengelolaan keuangan daerah secara lebih terbuka.

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan



Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi di bidang perencanaan, penganggaran, serta pelaporan keuangan daerah. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) **Indikator Indeks Sistem Merit**

Sistem Merit adalah sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, kompetitif, dan bebas dari intervensi politik serta praktik nepotisme. Indeks Sistem Merit dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi, rotasi, manajemen kinerja, penghargaan, serta perlindungan pegawai. Melalui penerapan Sistem Merit yang baik yang berkelanjutan, diharapkan birokrasi pemerintahan dapat semakin profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadapi dinamika global secara adaptif dan progresif.

Hasil Indeks Sistem Merit dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip meritokrasi dalam instansi pemerintah. KASN secara berkala melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi bagi instansi yang belum sepenuhnya menerapkan Sistem Merit, guna memastikan efektivitas serta transparansi dalam pengelolaan ASN.

Penilaian Sistem Merit terakhir dilaksanakan Tahun 2022, karena dengan dibubarkannya KASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), fungsi dan tugas KASN dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024. Karena setelah kebijakan tersebut Lembaga terkait masih belum merilis Indeks Sistem Merit, maka Indeks Sistem Merit Kota Padang Panjang Tahun 2025 masih dengan



indeks tahun 2022, sehingga Capaian Indeks Sistem Merit sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Capaian Indikator Indeks Sistem Merit Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Merit	325	325	100,00	325	98,48

Sumber : BKPSDM, 2025

Meskipun penilaian Sistem Merit belum menjadi target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, Kota Padang Panjang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penerapan prinsip meritokrasi. Hal ini tercermin dari Indeks Sistem Merit dalam tahun 2023, yaitu 325 (sangat baik) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 169/KEP.KASN/C/XI/2022 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Indeks Sistem Merit berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2022.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Indeks Sistem Merit Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Sistem Merit	325	325	100,00	335	97,01

Sumber : BKPSDM, 2025

Dari perspektif RPD, capaian terhadap target kedua dan tahun terakhir RPD berturut -turut adalah 97,01% dan 95,59%.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Indeks Sistem Merit yang sangat baik di Kota Padang Panjang antara lain:

1. Implementasi Kebijakan yang Konsisten
Pada tahun 2021 hingga 2023, BKPSDM Kota Padang Panjang secara konsisten menerapkan kebijakan berbasis sistem merit dengan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
2. Peningkatan Profesionalitas ASN
ASN semakin memahami dan menjalankan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan kepegawaian, seperti rekrutmen berbasis kompetensi, promosi yang transparan, dan pengelolaan kinerja yang lebih baik.
3. Digitalisasi Data Kepegawaian



Penerapan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung administrasi kepegawaian turut meningkatkan efektivitas penerapan sistem merit.

7. Dengan komitmen yang kuat dalam penerapan Sistem Merit, diharapkan Kota Padang Panjang dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara, serta mendorong birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan dan memastikan sistem merit tetap berjalan optimal, BKPSDM merancang beberapa langkah strategis:

- 1. Koordinasi lebih intensif dengan BKN dan KemenPAN-RB untuk mendapatkan pedoman terbaru terkait sistem merit pasca peleburan tugas KASN.
- 2. Meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya kelengkapan data kepegawaian, melalui sosialisasi dan pendampingan.
- 3. Mengembangkan sistem pemantauan internal terhadap implementasi sistem merit, sebagai alternatif jika penilaian eksternal tidak dilakukan kembali di tahun berikutnya.
- 4. Optimalisasi sistem informasi kepegawaian berbasis digital agar data ASN dapat diperbarui secara lebih cepat dan akurat.

(d) **Indikator Maturitas SPIP**

Maturitas SPIP Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan SPIP. SPIP dirancang untuk meningkatkan pengendalian internal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan dan terus menerus setiap tahunnya. Capaian Nilai Maturitas SPIP sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Capaian Indikator Maturitas SPIP Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Maturitas SPIP	3 (3,2)	2 (2,690)	84,06	3 (3.037)	100.00

Sumber : BPKP Prov Sumbar, 2025

Dari data di atas terlihat bahwa capaian nilai Maturitas SPIP Kota Padang Panjang pada tahun 2025 berada pada level 2, dengan nilai 2,690, masih belum mencapai dengan target yang telah ditetapkan yaitu level 3 dengan nilai 3,200, dengan capaian 84,06%.



Rincian hasil penilaian Maturitas SPIP Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Aparat:

Tabel 2.43
Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Elemen	Hasil Penjaminan Kualitas		Hasil Evaluasi	
		Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen
1.	Penetapan Tujuan	5,000	2,000	3,000	1,200
2.	Struktur dan Proses	3,022	0,906	2,668	0,800
3.	Pencapaian Tujuan	2,900	0,870	2,300	0,690
Skor Akhir		3,776		2,690	

Sumber Data: Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini menunjukkan terjadinya penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 0,347 poin dari 3,037 pada tahun 2024 menjadi 2,690 pada tahun 2025 yang mengakibatkan terjadi penurunan level dari 3 menjadi 2.

Faktor penyebab turunnya capaian kinerja ini dikarenakan belum relevannya strategi pencapaian kinerja. Selain itu, penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dalam penguatan pada pemantauan risiko strategis dan operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan, meningkatkan peran inspektorat dalam melakukan *review Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendalian dan menganalisis dan mengidentifikasi risiko yang melekat dalam probis OPD.

Dari perspektif target akhir RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, indikator nilai Maturitas SPIP pada tahun 2025 masih belum mencapai target tahun kedua dan tahun terakhir RPD dengan capaian berturut-turut 84,06% dan 89,67%, seperti disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.44
Capaian Indikator Maturitas SPIP Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Maturitas SPIP	3 (3,2)	2 (2,69)	84,06	3 (3,2)	84,06

Sumber : BPKP Prov Sumbar, 2025



Akibat penurunan skor maturitas SPIP ini, dibutuhkan upaya berkelanjutan agar target akhir RPD bisa tercapai. Adapun faktor yang membuat belum tercapainya target secara optimal adalah sebagai berikut:

- a. Pendefinisian kinerja oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sudah baik, namun belum didukung dengan strategi pencapaian kinerja yang relevan;
- b. Penerapan Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern yang dibangun belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Secara Nasional BPKP menargetkan Maturitas SPIP untuk Kabupaten/Kota berada pada level 3 (terdefinisi), namun sampai saat ini belum ada laporan yang menunjukkan capaian kinerja secara Nasional yang mengakomodir nilai Maturitas SPIP Kabupaten/Kota Lainnya, sehingga untuk saat ini Capaian Indikator Maturitas SPIP belum dapat disandingkan dengan realisasi Nasional Tahun 2025.

Beberapa upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan maturitas SPIP di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Pemenuhan SDM sudah sesuai kebutuhan ideal.
2. Audit kinerja dan audit ketaatan perlu memberikan rekomendasi yang lebih strategis.
3. Perencanaan pengawasan perlu lebih fokus pada risiko strategis daerah.
4. Asuransi atas Tata Kelola (GRC) dan Penilaian SPIP perlu ditingkatkan dan didokumentasikan lebih baik.
5. Dokumentasi layanan konsultasi harus lebih terstruktur agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

(e) Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman sebagai upaya pencegahan maladministrasi pada setiap unit pelayanan publik. Unsur yang dinilai adalah kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan.

Pada Tahun 2025 Ombudsman RI melakukan transformasi penilaian yang awalnya penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi penilaian maladministrasi pelayanan publik. Hal ini sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik dan penajaman dalam mengukur



kualitas pelayanan yang bebas maladministrasi yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 61 tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Hasil Penilaian maladministrasi ini akan menghasilkan Opini Ombudsman yang merupakan pernyataan formal atau pernyataan otoritatif Ombudsman terhadap hasil penilaiannya terkait kondisi pelayanan publik di setiap unit penyelenggara pelayanan. Opini yang disampaikan adalah hasil penilaian atas (i) kualitas pelayanan yang terdiri dari 4 (empat) dimensi (input, proses, output dan pengaduan) dan kepercayaan masyarakat, (ii) tingkat kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman berupa tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan dan rekomendasi, dengan metode penilaian berupa wawancara pelaksana layanan dan pengguna layanan, studi dokumen serta penyebaran barcode untuk penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Capaian Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Capaian Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	94,50	78,28	82,84	94.46	103.80

Sumber : Ombudsman RI, 2025

Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 turun 16,18 poin dari 94,46 pada tahun 2024 menjadi adalah 78,28 dengan capaian 82,84%. Karena adanya perbedaan dalam sistem penilaian, tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Dilihat dari perspektif target RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, capaian terhadap tahun kedua dan tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46
Capaian Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	94,50	78,28	82,84	93,00	84,17

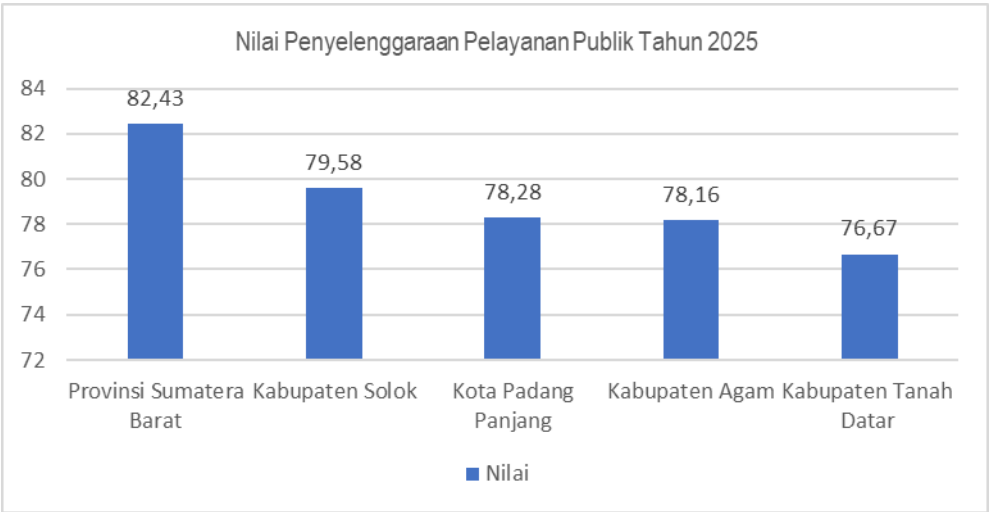
Sumber : Ombudsman RI, 2025



Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk bisa mewujudkan target akhir RPD Pemerintah Kota Padang Panjang perlu upaya yang lebih maksimal, berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, karena capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD berturut-turut masih 84,17% dan 82,40%.

Pada Tahun 2025, penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan *sampling* terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota. Untuk Tingkat Kota se Sumatera Barat, Padang Panjang menempati peringkat pertama dengan Nilai 78,28 dengan Kualitas Pelayanan Baik dan Opini Tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Padang Panjang berada pada peringkat tiga setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 82,43 Kualitas Pelayanan Baik, Tingkat Kepatuhan Rendah dan Opini Kualitas Tinggi dengan Maladministrasi dan Kabupaten Solok dengan nilai 79,58 Kualitas Pelayanan Baik dan Opini Kualitas Tinggi.

Grafik 2.9



Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap unit pelayanan yang menjadi locus penilaian, namun masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Kota Padang Panjang Tahun 2025 :

1. Perbedaan locus yang dinilai, sesuai penetapan dari Ombudsman pada tahun berjalan.
2. Kurangnya kesiapan dari RSUD sebagai locus yang pertama dinilai.



(f) **Indikator Indeks SPBE**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sedangkan Indeks SPBE merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pengukuran indeks SPBE dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interview.

Capaian Kinerja Indeks SPBE sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Indikator Indeks SPBE Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE	3,16	3,16	100,00	3.16	107.12

Sumber : KemenPANRB 2025

Pada tahun 2025 Kota Padang Panjang dan tidak menjadi lokus penilaian SPBE oleh KemenpanRB, sehingga nilai tahun 2025 masih menggunakan nilai realisasi tahun 2024 yaitu 3,16 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang secara keseluruhan telah melakukan penerapan SPBE. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang



mendukung integrasi dan efisiensi. Aplikasi TPP juga menunjukkan fungsi transaksi, validasi, kemajuan status persetujuan data, dan analitik data yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK, mencerminkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan layanan administrasi.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Indeks SPBE Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks SPBE	3,16	3,16	100,00	2,85	110,88

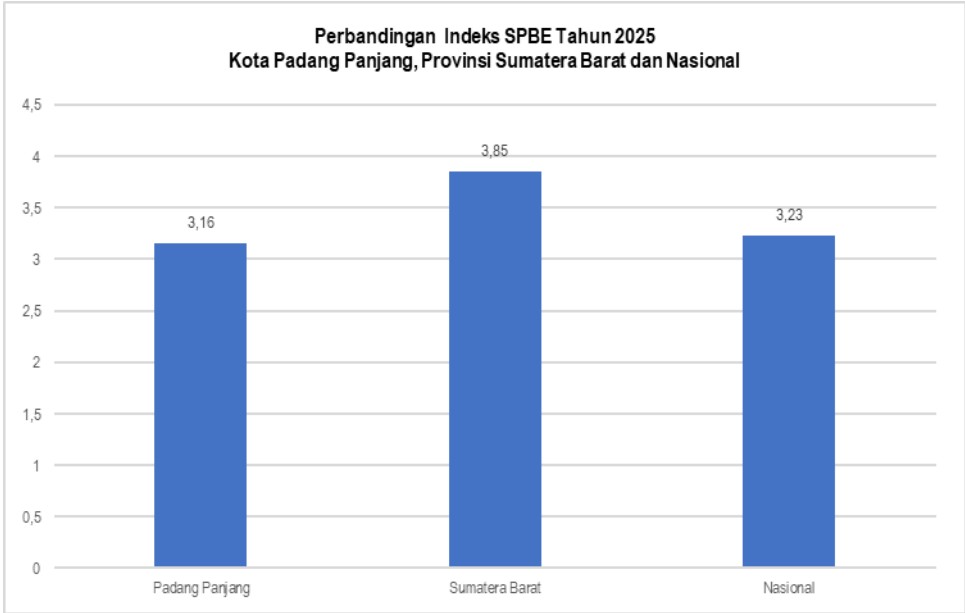
Sumber : KemenPANRB 2025

Dilihat dari perspektif target tahun kedua dan tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah melampaui target tahun kedua dan tahun terakhir RPD dengan capaian berturut-turut 110,88% dan 105,33%. Hal ini telah melebihi target akhir RPD, meskipun demikian Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk meningkatkan indeks SPBE dimasa yang akan datang.

Tahun 2025 Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat tidak menjadi objek pemantauan SPBE, sehingga nilai 2025 masih menggunakan niali Tahun 2024. Indeks SPBE Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 3,85 lebih tinggi 0,73 poin dari Indeks SPBE Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan Indeks SPBE Nasional Tahun 2025, Indeks SPBE Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih rendah 0,07 poin dari indeks SPBE nasional sebesar 3,23. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 2.10



Adapun rincian hasil penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024

Nama Indeks	Bobot	Nilai 2025
SPBE		3,16
Domain Kebijakan SPBE	13%	3,60
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	3,60
Domain Tata Kelola SPBE	25%	2,90
Perencanaan Strategis SPBE	25%	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3,25
Penyelenggara SPBE	5%	3,00
Domain Manajemen SPBE	16,5%	2,82
Penerapan Manajemen SPBE	12%	1,13
Audit TIK	4,5%	2,00
Domain Layanan SPBE	45,5%	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	4,00

Sumber : KemenPANRB 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks domain layanan SPBE merupakan salah satu dari 4 domain SPBE dengan bobot penilaian terbesar yakni 45,5%. Pada Domain layanan SPBE terdiri dari penilaian terhadap penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan



layanan publik berbasis elektronik. Secara umum dari target kinerja sebesar 3,40 berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB untuk tahun 2024 hasil penilaian Kota Padang Panjang terealisasi sebesar 3,82 pada predikat Sangat Baik.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Indeks SPBE Tahun 2024:

1. Kebijakan Internal tata Kelola SPBE, antara lain Kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, dan Layanan Jaringan. Upaya yang dilakukan adalah menyusun kebijakan terkait SPBE yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dokumen perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan *Smart City* dan Arsitektur SPBE.
2. Pemanfaatan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Upaya yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi secara optimal seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi dan melakukan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Adanya komitmen dan penguatan koordinasi, kolaborasi dan konsistensi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Padang Panjang. Upaya yang dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi terkait tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 342.360.756.901,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 331.706.955.333,00,- (76,78%)** pada seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan 20 program, yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
4. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Penelitian Dan Pengembangan Daerah



- 7. Pengelolaan Arsip
- 8. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 9. Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 12. Kepegawaian Daerah
- 13. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 14. Penyelenggaraan Pengawasan
- 15. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- 16. Perekonomian Dan Pembangunan
- 17. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 18. Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 19. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 20. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Tujuan Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing disertai dengan Penurunan Ketimpangan

Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing disertai dengan Penurunan Ketimpangan diukur melalui 2 indikator yaitu (1) laju pertumbuhan ekonomi, dan (2) Indeks Gini. Capaiannya sepanjang Tahun 2024-2025 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.50
Capaian Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing disertai dengan Penurunan Ketimpangan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	3,61	64,46	4,52	90,04
2 Indeks Gini	0,264	0,275	95,83	0,266	101,88

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Sementara perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.51
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	3,61	64,46	5,60	64,46
2 Indeks Gini	0,264	0,275	95,83	0,29	105,17

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang sepanjang tahun 2024-2025 bergerak secara fluktuatif dengan capaian seperti tabel berikut :



Tabel 2.52
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	3,61	64,46	4,52	90,04

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2025 kembali menurun setelah sempat menguat pada Tahun 2023 di angka 4,84%, bahkan lebih rendah 0,91% dibandingkan tahun 2024 dengan capaian kinerja hanya 64,46%. Capaian terendah dalam empat tahun terakhir, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaiannya hanya 60,17%.

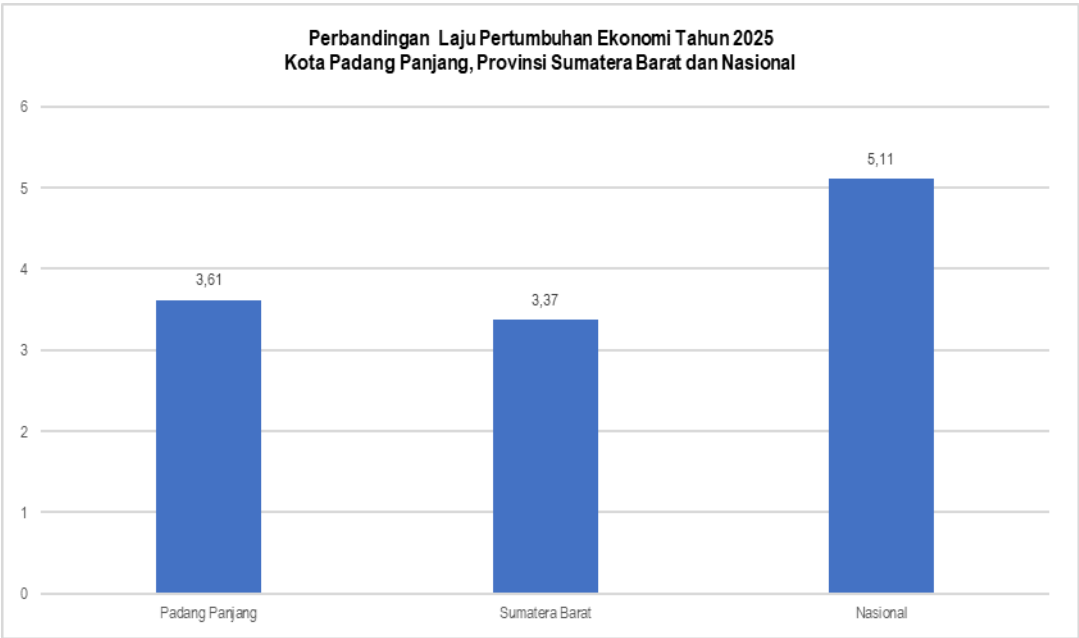
Tabel 2.53
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	3,61	64,46	5,60	64,46

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Hal ini menunjukkan harus dilakukan upaya maksimal agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target jangka menengah daerah.

Grafik 2.11



Sumber Data: BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 3,37%, dengan selisih sebesar 0,24 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,11%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 1,5 poin.



2. Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kota Padang Panjang sepanjang Tahun 2024-2025 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.54
Capaian Indikator Indeks Gini Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Gini	0,264	0,275	95,83	0,266	101,88

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2026

Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2025 meningkat negatif sebesar 0,011 poin dari 0,266 pada tahun 2024 menjadi 0,275 dengan capaian 95,83%. Capaian terendah dalam kurun 4 tahun terakhir, merubah tren positif dalam 3 tahun terakhir menjadi negatif. Menunjukkan terjadinya penurunan pemerataan kesejahteraan Kota Padang Panjang, karena peningkatan Indeks Gini mencerminkan semakin bertambahnya ketimpangan pendapatan, yang merupakan indikator negatif dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Indeks Gini Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Gini	0,264	0,275	95,83	0,29	105,17

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Namun indeks gini tahun 2025 telah berhasil melampaui target akhir RPD 2024-2026 sebesar 0,013 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang telah berhasil mencapai pemerataan pendapatan yang lebih baik dari yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, pada tahun 2025 Indeks Gini Kota Padang Panjang menempati posisi ke-15, masih belum sebaik Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, namun lebih baik dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kota Padang.

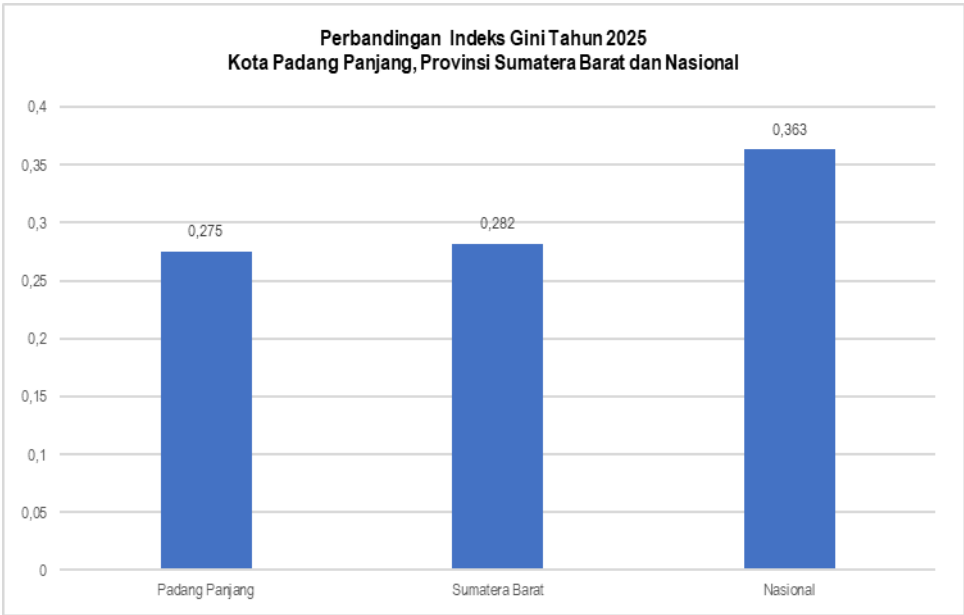


Grafik 2.12



Selain itu, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2025 lebih baik 0,007 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,282. Kota ini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, yang berada di angka 0,363 lebih baik 0,088 poin. Data ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah ini.

Grafik 2.13



Sumber Data: BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Untuk mencapai tujuan "Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing disertai dengan Penurunan Ketimpangan," ditetapkan empat sasaran strategis, yaitu : (1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah, (2)



Meningkatnya investasi, (3) Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, dan (4) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah diukur melalui tiga indikator, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, LPE Sektor Perdagangan, dan LPE Sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan Minum. Capaian pertumbuhan sektor unggulan daerah selama 2024-2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 LPE Sektor Perdagangan	6,90	4,27	61,88	3,98	76,39
2 LPE Sektor Pertanian	5,69	3,93	69,07	0,15	2,98
3 LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	11,19	4,91	43,88	7,45	68,22

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.57
Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 LPE Sektor Perdagangan	6,90	4,27	61,88	6,90	61,88
2 LPE Sektor Pertanian	5,69	3,93	69,07	5,69	69,07
3 LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	11,19	4,91	43,88	11,19	43,88

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Rincian pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dari tahun 2022 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
LPE Sektor Perdagangan	6,90	4,27	61,88	3,98	76,39

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka 2025

Setelah menunjukkan tren penurunan sejak 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 menguat 0,29 poin dibandingkan tahun 2024, namun belum sebaik tahun 2022, masih kurang 1,01 poin. Dan target akhir RPD



2024-2026 juga masih belum tercapai, capaiannya masih 57,39%, seperti ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.59
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

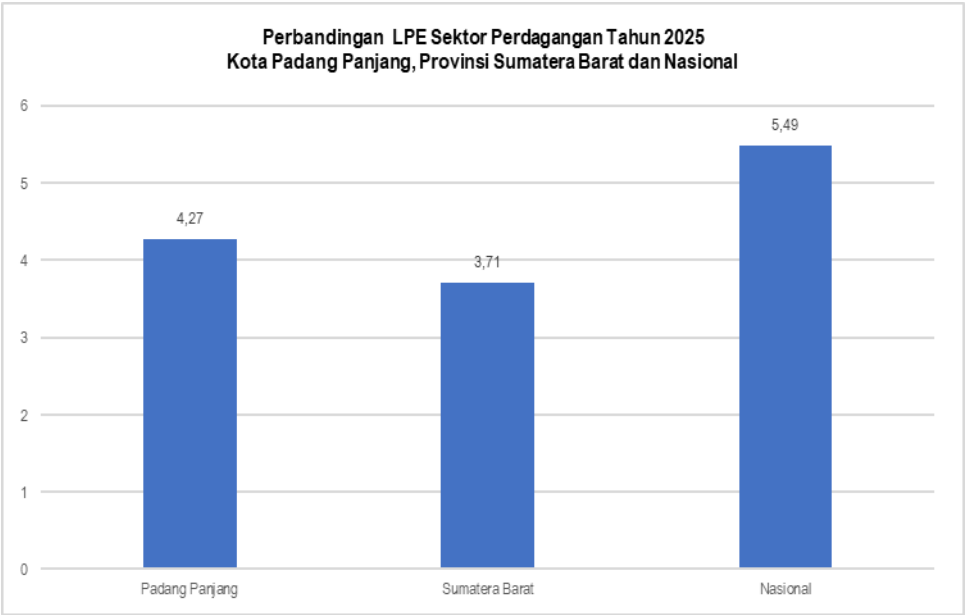
Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
LPE Sektor Perdagangan	6,90	4,27	61,88	6,90	61,88

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka 2025

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2025 masih sangat jauh dari target akhir RPD.

Jika dibandingkan secara regional maupun nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kota Padang Panjang tahun 2025 lebih baik 0,56 poin dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, yang mencatat pertumbuhan sebesar 3,71%. Sementara itu, secara nasional, pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 5,49%, lebih tinggi 1,22 poin dibandingkan dengan Kota Padang Panjang. Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14



Sumber Data: BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Belum tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kota Padang Panjang sesuai target merupakan dampak negatif dari dan Banjir Bandang 27 November 2025, bencana yang terjadi dalam masa pemulihan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana alam lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024. Bencana ini kembali menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya,



terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup.

Untuk mengurangi dampak dari bencana alam ini, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

1. Mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Pusat, mengingat Padang Panjang merupakan salah satu sentra perdagangan hortikultura utama di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pasar, serta melakukan perbaikan jembatan dan jalan yang rusak akibat bencana, guna memastikan kelancaran distribusi barang.
3. Bekerja sama dengan Bulog Cabang Bukittinggi dan distributor bahan pokok untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Panjang, yang dipimpin langsung oleh Pj. Walikota, terus melakukan pemantauan pasar secara harian, dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas ekonomi dan pemulihan sektor perdagangan Kota Padang Panjang dapat segera tercapai.

(b) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

Capaian LPE Sektor Pertanian selama 2024-2025 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 2.60
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
LPE Sektor Pertanian	5,69	3,93	69,07	0.15	2.98

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor pertanian Kota Padang Panjang pada tahun 2025 kembali meningkat setelah menunjukkan tren menurun sejak 2022. Meningkat signifikan dari 0,15 menjadi 3,93. Walau belum sebaik tahun 2022, dan capaiannya terhadap target akhir RPD 2024-2026 hanya 68,47%.



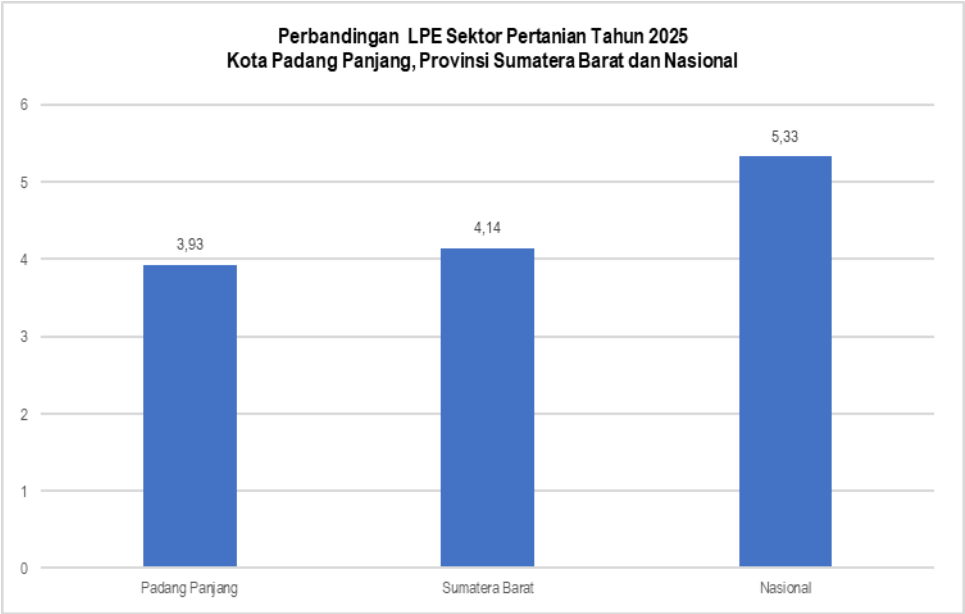
Tabel 2.61
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
LPE Sektor Pertanian	5,69	3,93	69,07	5,69	69,07

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kota Padang Panjang masih lebih rendah, yaitu 0,21 poin lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dan 1,4 poin lebih rendah dari rata-rata nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2.15



Sumber : BPS, Kota Padang Panjang dalam Angka, 2026

Perbaikan infrastruktur berupa pembuatan saluran irigasi di Kelurahan Ekor Lubuk dan akan disusul dengan perbaikan saluran irigasi di kelurahan-kelurahan yang terdampak pasca bencana alam banjir aliran lahar dingin erupsi gunung marapi yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 yang mengakibatkan kerusakan lahan produksi sebanyak lebih kurang 21 hektar lahan sepanjang aliran sungai yang berokasi di kelurahan Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Koto Katik, Guguk Malintang, Pasar Usang dan Silaing Bawah, berhasil meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang pada tahun 2025, namun bencana banjir bandang yang terjadi 27 November 2025 mengakibatkan belum maksimalnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.



(c) **Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Capaian kinerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	11,19	4,91	43,88	7,45	68,22

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Akomodasi Makan dan Minum bergerak fluktuatif sejak 2022, tahun 2025 kembali terjadi penurunan yang signifikan bahkan merupakan capaian terendah untuk periode ini yaitu 4,91 turun tajam sebesar 2,54 poin dari tahun 2024, dan 5,56 poin dari realisasi 2022, dengan capaian hanya 43,88%. Capaian terhadap target akhir RPD 2024-2026 baru 42,96%.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	11,19	4,91	43,88	11,19	43,88

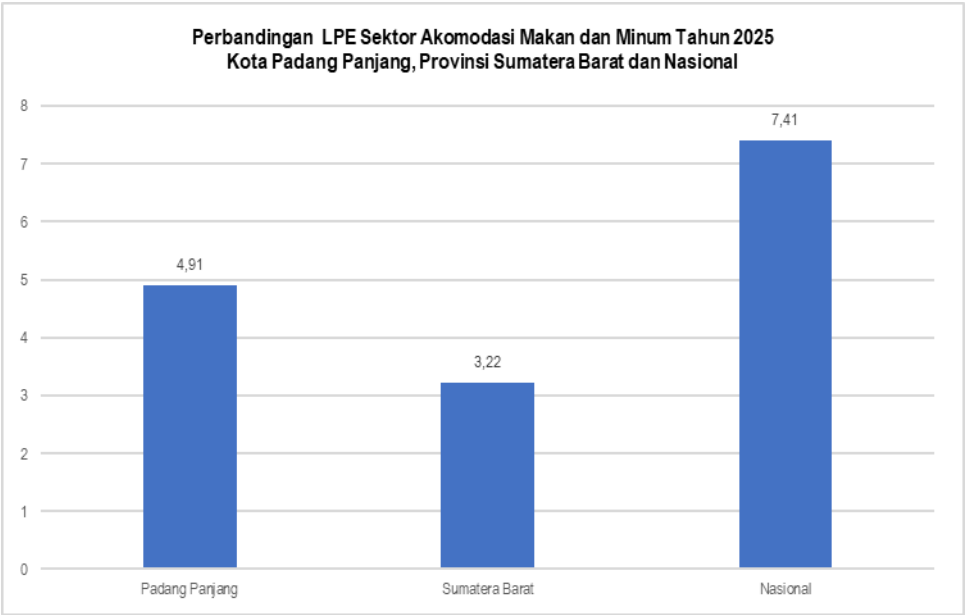
Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Sebagai daerah perlintasan yang dikenal dengan industri kuliner dan jasa penginapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun putusnya akses Padang Bukittinggi akibat bencana alam pada tanggal 11 Mei 2024 dan 27 November 2025 sangat mempengaruhi sektor ini, ditambah lagi Pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sangat berdampak untuk sektor ini.

Jika dibandingkan dengan tingkat regional dan nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang lebih tinggi 1,69 poin dibanding Provinsi Sumatera Barat (3,22%), namun masih lebih rendah 2,5 poin dibandingkan angka nasional (7,41%), seperti ditunjukkan dalam grafik berikut:



Grafik 2.16



Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Untuk menunjang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang bersama perangkat daerah dan stakeholder telah melakukan berbagai upaya, terutama dalam menghadapi kendala akibat terputusnya jalan lintas nasional akibat erupsi lahar dingin Gunung Marapi dan anjir bandang. Setelah jalur jalan pulih kembali, pemerintah mengadakan berbagai event, seperti Festival Merah Putih, Road Race, PAPAFEST 2025, dan berbagai acara lainnya guna menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan pembenahan dan pengaturan Pasar Kuliner Padang Panjang agar semakin menarik bagi pengunjung untuk berbelanja serta menikmati sajian makanan dan minuman yang ditawarkan para pedagang.

Untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor ini, pemerintah juga membuka kesempatan bagi organisasi keagamaan umat Islam, baik dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat, untuk mengadakan acara keagamaan di Masjid Islamic Center, yang telah menjadi ikon wisata halal Kota Padang Panjang.

Upaya pemasaran dan promosi wisata terus dilakukan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengusaha hotel dan penginapan untuk meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta layanan agar lebih menarik bagi wisatawan. Selain itu, rumah makan dan restoran juga didorong untuk menyusun strategi peningkatan kunjungan pelanggan, baik melalui penyesuaian harga,



peningkatan layanan, inovasi rasa, maupun promosi melalui media elektronik dan konvensional.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Panjang dapat terus meningkat dan bergerak ke arah yang lebih positif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 12.476.628.490,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.344.635.837,- (72,77%)** yang tersebar pada perangkat daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan 15 program, yaitu :

- 1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2. Pemasaran Pariwisata
- 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 4. Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 5. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 6. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 7. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 8. Penyuluhan Pertanian
- 9. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- 10. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- 11. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 12. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 13. Pengendalian Izin Usaha Industri
- 14. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 15. Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. **Sasaran Meningkatnya Investasi**

Sasaran "Meningkatnya Investasi" diukur menggunakan indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi. Capaian selama 2024-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	39,00	34,79	89,21	38.6	643.26

Sumber : *DPMP TSP, 2025*



Realisasi persentase pertumbuhan investasi tahun 2025 lebih rendah 3,81 poin dari 38,6 pada tahun 2024 menjadi 34,79. Capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhirRPD 2024-2026 secara beurutuan adalah 579,83% dan 34,79%.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	39,00	34,79	89,21	6,00	579,83

Sumber : DPMP TSP,2025

Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan investasi tahun 2025 sebesar 34,79% jauh melampaui target yang ditetapkan untuk tahun kedua RPD dan dibandingkan dengan target akhir RPD capaiannya baru 34,79%.

Berikut ini tabel perhitungan nilai investasi Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.66
Realiasi Investasi di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Realisasi Investasi Tahunan (Rp. milyar)	26.59	14.3	30.2	32.9	39.9	49,85
2	Jumlah Realisasi Investasi sd Tahun-n (Rp. milyar)	26.59	40.89	71.09	103.38	143.28	193,13
3	Penambahan (Rp.milyar)	-	14.3	30.2	32.29	39.9	49,84
4	Persentase Kenaikan (%)	-	53.78	73.86	45.42	38.60	34,79
5	Capaian (%)		3841.40	7693.41	5161.51	643.26	89,21

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan :

- 1. Realisasi Investasi Tahunan adalah realisasi investasi baru di tahun yang bersangkutan.
- 2. Jumlah realisasi investasi sd Tahun-n diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Realisasi Investasi sampai dengan tahun } n &= \\ &\text{Realisasi Tahun } n + \text{Realisasi Tahun } (n-1) \end{aligned}$$

- 3. Penambahan diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Penambahan} &= \text{Jumlah Realisasi Investasi sampai dengan tahun } n - \\ &\text{Jumlah Realisasi Investasi sampai dengan Tahun } (n-1) \end{aligned}$$

- 4. Persentase kenaikan, diperoleh dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Pertumbuhan Investasi} &= \text{Jumlah Realisasi Tahun } n - \text{Jumlah Realisasi Ta} \\ &\text{hun } (n-1) / \text{Nilai Pertumbuhan Investasi} \times 100\% \end{aligned}$$



5. Adapun capaian indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi diperoleh dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \text{Persentase Kenaikan Tahun } n / \text{Target Tahun } n \times 100\%$$

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pertumbuhan nilai investasi di Kota Padang Panjang tahun 2025 antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan layanan jemput bola perizinan, menyediakan layanan perizinan online, serta menghadirkan kanal pembayaran nontunai untuk mempermudah proses investasi.
2. Pengawasan rutin kepada pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan investasi.
3. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan temu bisnis sebagai ajang promosi investasi, guna menarik lebih banyak investor.
4. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Padang Panjang, yang memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan administrasi investasi secara terintegrasi.
5. Diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, beberapa kemudahan yang diberikan juga berkontribusi terhadap lonjakan pertumbuhan nilai investasi, antara lain:

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dilakukan setelah persyaratan terpenuhi, sehingga mempercepat proses legalitas usaha.
2. Pengunggahan dokumen secara online, yang langsung diproses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melalui aplikasi berbasis web, sehingga lebih efisien.
3. Penyediaan layanan perizinan online, yang memungkinkan pelaku usaha mengurus izin tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Investasi, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp 720.462.702,-** untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan realisasi sebesar **Rp.550.089.357,- (66,01%)** untuk melaksanakan 6 program, yaitu :



- 1. Pelayanan Penanaman Modal
 - 2. Promosi Penanaman Modal
 - 3. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 4. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - 5. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - 6. Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3. **Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran**
Tingkat kemiskinan dan pengangguran Kota Padang Panjang diukur melalui 2 indikator, yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Capaian sasaran ini sepanjang 2024-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67
Capaian Menurunnya Kemiskinan Dan Pengangguran Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Tingkat Kemiskinan	4,23	4,97	82,51	5,31	85,56
2 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43	5,07	85,55	4,94	97,08

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026
Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.68
Capaian Menurunnya Kemiskinan Dan Pengangguran Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Tingkat Kemiskinan	4,23	4,97	82,51	3,79	68,87
2 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43	5,07	85,55	4,48	86,83

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026
Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Capaian untuk masing-masing indikator dapat dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

(a) Indikator Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Negara. Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dalam kurun 4 tahun terakhir bergerak secara fluktuatif seperti terlihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.69
Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	4,23	4,97	82,51	5,31	85,56

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2025, menurun positif sebanyak 0,34 poin dari 5,31 pada tahun 224 menjadi 4,97 dengan capaian 82,51%. Realisasi terbaik dalam 4 tahun terakhir, namun capaian terhadap target akhir RPD 2024-2026 baru 51,20%.

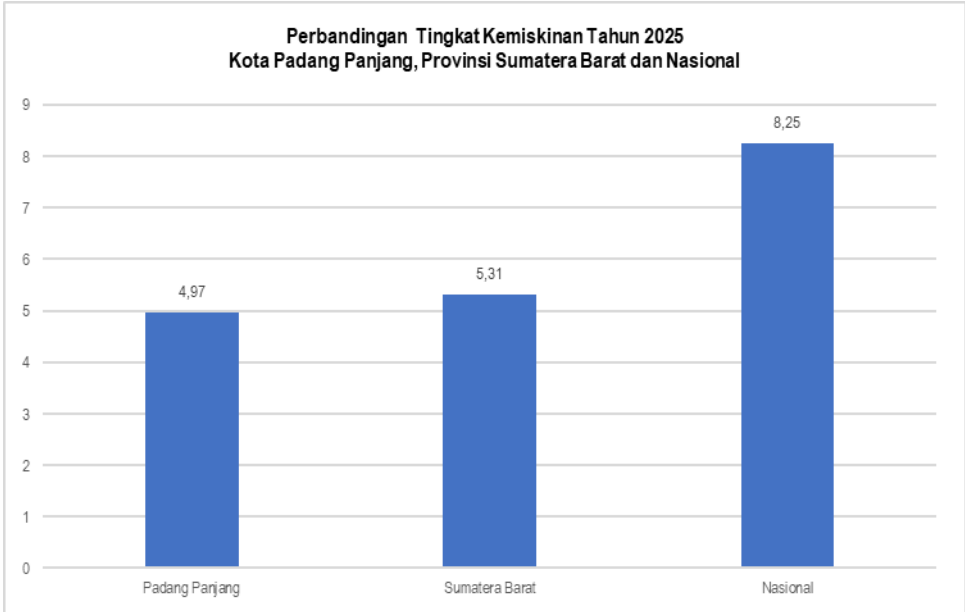
Tabel 2.70
Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Kemiskinan	4,23	4,97	82,51	3,79	68,87

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang tetap lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang masing-masing tercatat sebesar 5,31% dan 8,25%, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 2.17



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang lebih rendah dibandingkan 8 daerah, yaitu Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Payakumbuh, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 2.18



Berikut adalah upaya dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menurunkan tingkat kemiskinan :

1. Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat
Menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program jaminan kesehatan.
2. Dukungan bagi UMKM
Memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa program bedah warung, isi warung, penyediaan gerobak, serta peralatan usaha guna meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.
3. Bantuan di Sektor Peternakan dan Perikanan
Menyalurkan bantuan ternak seperti sapi, ayam, itik, kambing, dan ikan, serta menyediakan sarana produksi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.
4. Peningkatan Kualitas Hunian
Melaksanakan program bedah rumah, mendukung operasional Rusunawa sebagai hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Menyediakan kebutuhan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mencakup permakanan, sandang, alat bantu, serta bimbingan fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, mengupayakan bantuan dari Kementerian Sosial dan BAZNAS bagi masyarakat yang telah terdata dan diasesmen.



6. Dukungan di Sektor Pendidikan

Memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin, serta bantuan peralatan sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

7. Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Menyediakan asuransi ketenagakerjaan bagi 6.568 pekerja rentan di sektor informal, guna memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi pekerja dengan risiko tinggi.

Dengan strategi ini, Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor penghambat keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah:

1. Perilaku dan mentalitas penduduk miskin

Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 2.996 jiwa dari total 60.264 jiwa, atau 4,97% dari total penduduk, dengan angka kemiskina ekstrem mencapai 0,17%.

Meskipun sebagian besar telah menerima berbagai bentuk bantuan dalam beberapa tahun berturut-turut, banyak dari mereka belum mampu keluar dari kategori miskin. Hal ini disebabkan oleh mentalitas dan pola perilaku yang kurang mendukung kemandirian ekonomi, seperti rendahnya motivasi kerja, kecenderungan memilih-milih pekerjaan, serta sikap pasif yang lebih mengandalkan bantuan dibandingkan usaha sendiri. Jika tidak diubah, pola pikir seperti ini akan terus menjadi penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun etos kerja, kemandirian, serta pola pikir produktif di kalangan penduduk miskin agar mereka dapat keluar dari zona kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Minimnya Lapangan Usaha

Selain keterbatasan lahan, minimnya investasi dan peluang usaha di Kota Padang Panjang juga berkontribusi pada rendahnya serapan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pengembangan sektor ekonomi



kreatif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dorongan bagi UMKM dan wirausaha mandiri. Dengan memaksimalkan potensi yang ada, diharapkan perekonomian Kota Padang Panjang dapat lebih inklusif dan memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

3. Belum Optimalnya Koordinasi dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah belum optimalnya koordinasi dan integrasi antarprogram, mulai dari pendataan sasaran, penetapan penerima bantuan, realisasi program, hingga kesinambungan dan keterpaduan sektor-sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

Lemahnya koordinasi ini menyebabkan berbagai permasalahan, di antaranya:

- Kesulitan dalam memetakan profil dan akar permasalahan kemiskinan secara komprehensif.
- Ketidaktepatan dalam proses perencanaan, yang dapat berdampak pada kurang efektifnya intervensi program.
- Tumpang tindih pemberian bantuan, di mana ada individu atau kelompok yang menerima bantuan ganda, sementara yang lain tidak terjangkau.
- Sulitnya mengukur capaian program karena kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan sinkronisasi data antarinstansi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan sistem pemantauan berbasis data yang lebih akurat dan real-time guna memastikan bahwa setiap program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

(b) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang dalam kurun 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.71
Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43	5,07	85,55	4.94	97.08

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2025 kembali terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka sebanyak 0,11 poin dari 4,94 pada tahun 2024 menjadi 5,07 dengan capaian 85,5%.

Sementara dari perspektif RPD Tahun 2024-2026, capaian terhadap tahun kedua dan tahun terakhir RPD berturut-turut adalah 86,83% dan 83,72%, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

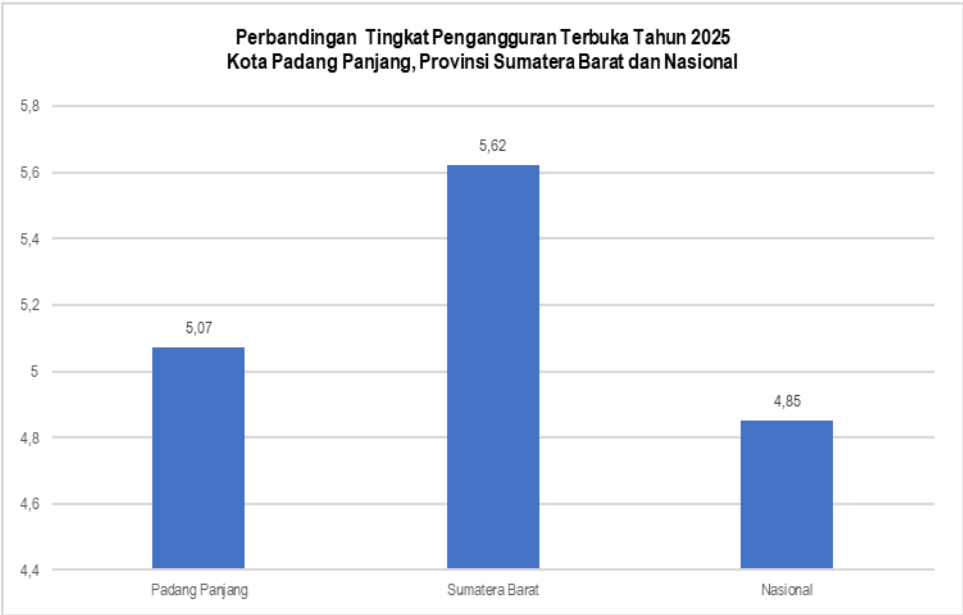
Tabel 2.72
Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43	5,07	85,55	4,48	86,83

Sumber : BPS, Padang Panjang Dalam Angka, diolah

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, angka ini lebih baik sebesar 0,55 poin, meskipun masih belum sebaik capaian nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Grafik 2.19

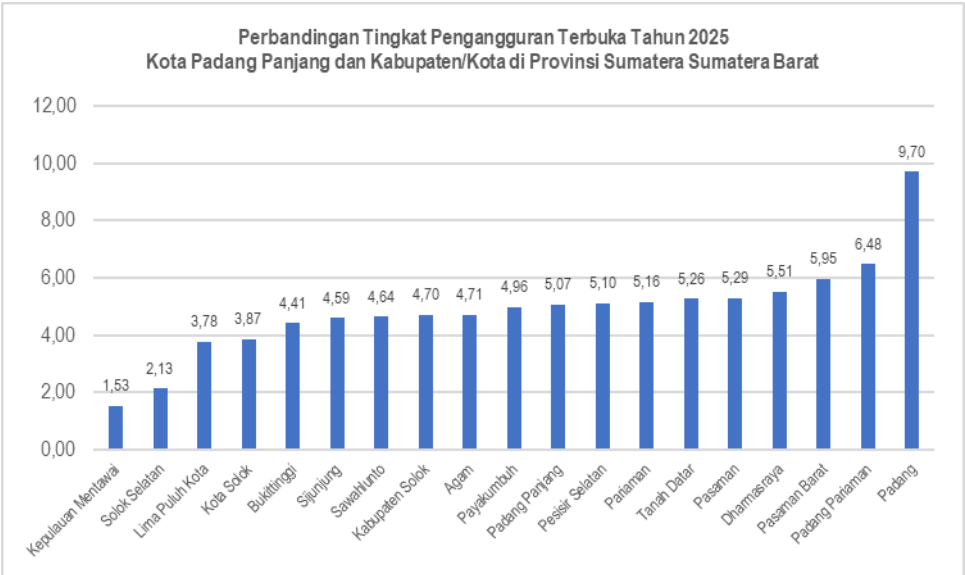


Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman,



Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Namun, angka ini belum sebaik beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh.

Grafik 2.20



Faktor-faktor Penghambat Upaya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang:

1. Meningkatnya Jumlah Penduduk Usia Kerja
Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang Tahun 2025, jumlah angkatan kerja mencapai **29.334 jiwa**, mengalami kenaikan **146 jiwa** dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah **29.188 jiwa**.
2. Ketidaksesuaian Keahlian dengan Kebutuhan Dunia Kerja
Banyak pencari kerja memiliki keterampilan yang belum selaras dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, sehingga sulit terserap dalam pasar kerja.
3. Minimnya Pengalaman Kerja
Hal ini terutama terjadi pada **fresh graduate** atau lulusan baru yang belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.
4. Kurangnya Investasi Baru dan Lapangan Pekerjaan
Rendahnya realisasi investasi di Kota Padang Panjang menyebabkan **minimnya penciptaan lapangan kerja baru**, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja.



Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025:

1. **Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi**

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti **pelatihan Bahasa Jepang** untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b. Melaksanakan pelatihan Satpam bekerjasama dengan lembaga penempatan tenaga kerja, sehingga selesai pelatihan pencari kerja bias langsung ditempatkan.

2. **Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Dunia Usaha**

- a. Melakukan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.
- b. Mengirim peserta pelatihan ke **Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan** untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

3. **Memfasilitasi Penempatan Tenaga Kerja**

- a. Melakukan kerja sama dengan **Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 1 dan SMKN 2 Padang Panjang** serta perusahaan yang bergerak dalam penempatan tenaga kerja.
- b. Melaksanakan Walk Interview dengan perusahaan yang ada di Sumatera Barat

4. **Optimalisasi Informasi Lowongan Kerja**

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Padang Panjang bekerja sama dengan perusahaan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dan luar provinsi untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja.
- b. Menginformasikan ketersediaan lowongan kerja melalui media sosial

5. **Peningkatan Peran Bursa Kerja Khusus (BKK)**

- a. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh **BKK** yang ada di Kota Padang Panjang dalam bentuk:
 - Penyampaian informasi lowongan kerja.
 - Pemberian motivasi kepada BKK agar lebih aktif dalam menempatkan lulusan sekolah menengah ke dunia kerja.



- Kegiatan lain yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran.
- b. Pendataan dan pemetaan tenaga kerja
- c. Peningkatan kompetensi kerja

Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 6.458.576.462.00,-** untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pangan dan Pertanian, dengan realisasi sebesar **Rp. 5.429.072.381.00 (66,77%)** untuk melaksanakan 4 program, yaitu :

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
2. Penempatan Tenaga kerja
3. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Pengembangan UMKM

6. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Sasaran strategis "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat" diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) dalam ribu rupiah.

Pengeluaran per kapita mengacu pada rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri. Indikator ini dihitung dengan membagi total pengeluaran konsumsi rumah tangga selama satu bulan dengan jumlah anggota rumah tangga yang telah disesuaikan berdasarkan paritas daya beli.

Capaian pengeluaran perkapita dalam kurun waktu 2024-2025 ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Capaian Indikator Pengeluaran Perkapita Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Pengeluaran Perkapita	12,010	12,148	101,15	11.840	104.52

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang pada tahun 2025 meningkat Rp. 308 dari Rp.11.840.000,- pada tahun 2024 menjadi 12.148.000,- telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 101,15%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang Panjang pada tahun 2025 memiliki daya beli yang tinggi, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat.



Jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025.

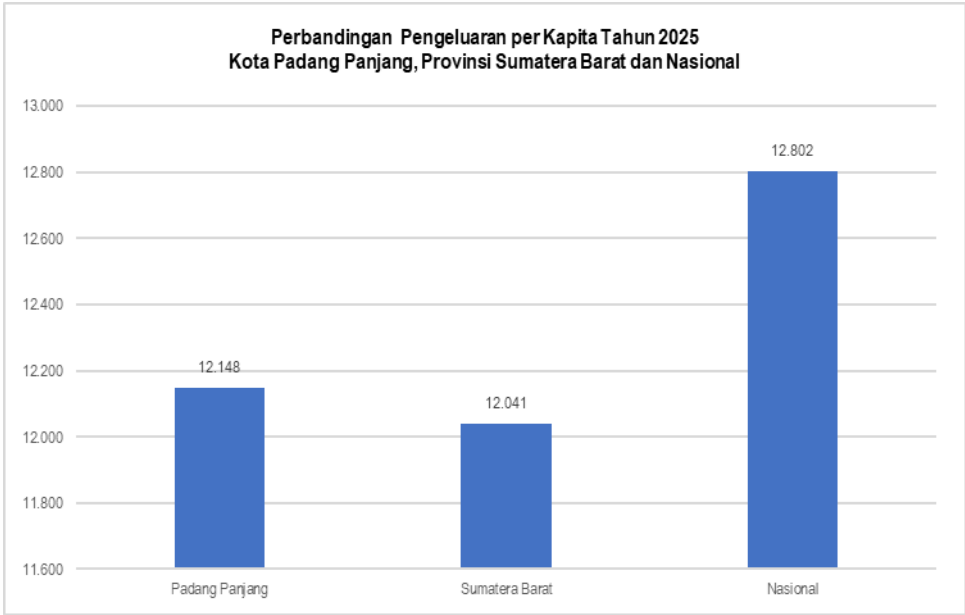
Tabel 2.74
Capaian Indikator Pengeluaran Perkapita Tahun ke-2 RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Pengeluaran Perkapita	12,010	12,148	101,15	11,378	106,77

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, pengeluaran per kapita pada tahun 2025 ini telah berada di atas target yang ditetapkan untuk Tahun 2026, yaitu sebesar Rp.11.453.000,-, dengan capaian kinerja sebesar 106,07%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir yang direncanakan dalam RPD, bahkan telah melebihi pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Barat walaupun belum sebaik pengeluaran per kapita nasional, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

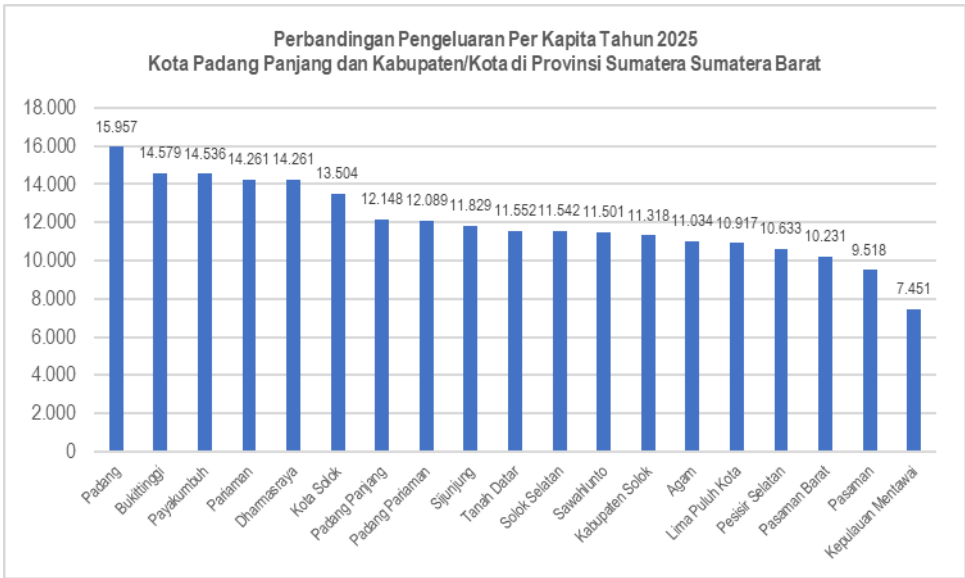
Grafik 2.21



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat pada tahun 2025, pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang menempati peringkat ke-7. Pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang juga tercatat lebih tinggi Rp.107.000 dibandingkan dengan pengeluaran per kapita rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yang mencapai Rp.12.041.000,-, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.



Grafik 2.22



Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka, 2026

Faktor-faktor pendukung keberhasilan sasaran "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat" di Kota Padang Panjang antara lain:

1. Fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta penerapan desain dan teknologi terhadap 391 unit usaha mikro di Kota Padang Panjang.
2. Komitmen Wali Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya dalam peningkatan keterampilan calon pencari kerja melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini didanai melalui berbagai sumber, termasuk APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta sumber dana lainnya.
3. Optimalisasi pembinaan ekonomi kreatif melalui pendampingan kelompok pelaku ekonomi kreatif serta fasilitasi penyelenggaraan event/festival sebagai sarana promosi dan pemasaran produk-produk ekonomi kreatif lokal.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp 697.218.900,00,-** untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan realisasi sebesar **Rp. 468.360.366,- (78,16%)** untuk melaksanakan 3 program, yaitu :

1. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan



4. Tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis

Capaian tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis diukur melalui indikator Indeks Rasa Aman. Indeks Rasa Aman diukur dari dimensi Persentase Pemajuan Budaya (30%), Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan (35%), Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (20%) dan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (15%). Capaian indikator Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang pada Tahun 2024-2025 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.75
Capaian Indikator Indeks Rasa Aman Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Rasa Aman	Aman (84,178)	Aman (85,00)	100,95	79,29	91,35

Sumber : LKjIP OPD 2025, diolah

Dari tabel di atas terlihat realisasi Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang selalu mengalami peningkatan sejak Tahun 2022. Indeks Rasa Aman pada Tahun 2025 meningkta 5,71 poin dari 79,29 pada tahun 2024 menjadi 85,00, telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 100,95%. Realisasi ini bahkan hamper mencapai target akhir RPD 2024-2026 dengan capaian 92,59%, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.76
Capaian Indikator Indeks Rasa Aman Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Rasa Aman	Aman (84,178)	Aman (86,00)	100,95	89,09	95,39

Sumber : LKjIP OPD 2025, diolah

Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang Tahun 2025 masih harus terus ditingkatkan secara signifikan sehingga dapat mencapai target sebesar 91.78 pada Tahun 2026. Artinya diperlukan upaya sungguh-sungguh pada keempat dimensi yang membentuk rasa aman tersebut. Dimensi mana saja yang perlu ditingkatkan secara maksimal, dapat terlihat dari analisis sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat diukur melalui 2 indikator



yaitu persentase pemajuan kebudayaan dan persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan. Persentase pemajuan kebudayaan diukur dari pelaksanaan 11 objek pemajuan kebudayaan. Sedangkan persentase masjid aktif yang melaksanakan kegiatan keagamaan di ukur dengan pelaksanaan aktivitas keagamaan di mesjid dengan komponen Pelaksanaan Kegiatan Shalat Berjamaah Lima Waktu, Wirid Bulanan, Didikan Subuh, Remaja Masjid, Majelis Ta'lim dan Kepengurusan Masjid. Capaian Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.77
Capaian Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Persentase Pemajuan Kebudayaan	66,60	68,60	103,00	66.16	89,24
2 Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85,00	85,71	100,84	71,42	84,02

Sumber : LKjIP OPD, 2025

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.78
Capaian Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Persentase Pemajuan Kebudayaan	66,60	68,60	103,00	74,00	92,70
2 Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85,00	85,71	100,84	90,00	95,23

Sumber LKjIP OPD, 2025

Indikator Persentase Masjid Yang Aktif melaksanakan aktivitas keagamaan merupakan indikator baru yang muncul pada RPD 2024-2026. Sama halnya dengan indikator Persentase Masjid Aktif yang melaksanakan kegiatan keagamaan, persentase pemajuan kebudayaan belum menjadi target kinerja pada tahun 2021, sehingga tidak tersedia data capaian kinerja untuk diperbandingkan. Adapun hasil analisis capaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

(a) Persentase Pemajuan Kebudayaan

Perbandingan capaian indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2022 sampai dengan 2025, serta capaian Tahun ke-1 RPD adalah seperti disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.79
Capaian Indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Pemajuan Kebudayaan	66,60	68,60	103,00	66,16	89,24

Sumber : LKjIP OPD, 2025

Dari tabel di atas terlihat Persentase Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang pada tahun 2025 meningkat 2,44 poin dari 66,16 pada tahun 2024 menjadi 68,60 dengan capaian 103%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja berhasil melebihi target yang ditetapkan.

Persentase pemajuan kebudayaan diukur dari rata-rata nilai pemajuan kebudayaan dari 11 objek pemajuan kebudayaan yaitu :

1. Manuskrip;
2. Tradisi Lisan;
3. Adat Istiadat;
4. Ritus (cagar budaya yang sifatnya kepercayaan);
5. Pengetahuan Tradisional (pasambahan);
6. Teknologi Tradisional;
7. Seni;
8. Bahasa;
9. Permainan Rakyat;
10. Olahraga Tradisional; dan
11. Cagar Budaya

Masing-masing objek dinilai berdasarkan pembobotan dari 6 langkah pengelolaan, yaitu : 30% identifikasi, 10% observasi, 5% sosialisasi, 10% internalisasi, 15% dokumentasi, dan 30% literasi. Berdasarkan hasil data lapangan dan studi kepustakaan yang telah dirumuskan bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya, data per objek pemajuan kebudayaan dituangkan didalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Padang Panjang. Adapun capaian kinerja pemajuan kebudayaan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.80

NILAI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
A Manuskrip								
1	Tambo Nagari Gunuang	√	√			√		55%
JUMLAH NILAI								55,00%
B Tradisi Lisan								
1	Sejarah Masjid Asasi	√	√	√	√	√	√	100%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2	Legenda Payo Sianto Pulang	√	√	√		√		60%
3	Legenda Batu Tingkok	√	√					40%
4	Legenda Batu Anak Daro	√	√					40%
5	Pasambahan	√	√	√	√	√	√	100%
6	Manyerak Bareh Kunyik	√	√	√	√	√	√	100%
JUMLAH NILAI								73,33%

C	Adat Istiadat							
1	Matrilineal	√	√	√				45%
2	Sistem Kelarasan	√	√	√				45%
3	Manjapuk Anak	√	√	√				45%
4	Manjapuk Sumando	√	√					40%
5	Oyak Jambu	√	√	√		√		60%
6	Baronde	√	√	√		√		60%
7	Perkawinan Minangkabau	√	√	√	√			55%
8	Batagak Batu	√	√					40%
9	Batagak Pangulu	√	√	√	√	√	√	100%
JUMLAH NILAI								54,44%

D	Ritus							
1	Manjapuk Anak	√	√	√				45%
2	Manjapuk Sumando	√	√					40%
3	Oyak Jambu	√	√	√		√		60%
4	Baronde	√	√	√		√		60%
5	Perkawinan Minangkabau	√	√	√	√			55%
6	Batagak Batu	√	√	√	√	√	√	100%
7	Batagak Pangulu	√	√	√	√	√	√	100%
8	Ratik	√	√	√				45%
9	Pengangkatan / Pergantian Khatib, Imam, Bilal Masjid Asasi	√	√	√				45%
JUMLAH NILAI								61,11%

E	Pengetahuan Tradisional							
1	Tapuang Pisang	√	√	√	√	√	√	100%
2	Cangkuak	√	√	√	√	√	√	100%
3	Nasi Baka	√	√	√	√	√	√	100%
4	Sitawa	√	√					40%
5	Sidingin	√	√					40%
6	Aia Daun Bungo Rayo	√	√					40%
7	Aia Daun Jarak	√	√					40%
8	Aia Daun Kacang Tujuh	√	√					40%
9	Paragede Jaguang	√	√	√	√	√	√	100%
10	Bareh Gisiak	√	√	√	√	√	√	100%
JUMLAH NILAI								70,00%

F	Teknologi Tradisional							
1	Lasuang	√	√					40%
2	Kincia	√	√	√				45%
3	Bajak Kabau	√	√					40%
4	Padati	√	√					40%
5	Bendi	√	√	√	√	√	√	100%
JUMLAH NILAI								53,00%

G	Seni							
1	Seni Sastra	√	√	√	√	√	√	100%
2	Seni Musik							
	- Dendang Gunuang	√	√	√	√	√	√	100%
	- Pupuik Baranak	√	√	√	√	√	√	100%
	- Salawaik	√	√	√	√	√	√	100%
	- Gamad	√	√	√	√	√	√	100%
3	Seni Teater							
	- Randai Sutan Wahab	√	√					40%
	- Randai	√	√	√	√	√	√	100%
	- Sandiwara	√	√					40%
4	Seni Tari							
	- Tari Mancak	√	√	√	√	√		70%
	- Tari Randai Salapan	√	√	√	√	√	√	100%
	- Tari Sewah	√	√	√	√	√		70%
	- Tari Piriang	√	√	√	√	√	√	100%
JUMLAH NILAI								85,00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

H	Bahasa							
1	Dialek Gunuang	√	√	√				45%
2	Dialek Minangkabau	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						72,50%

I	Permainan Rakyat							
1	Alang – Alang	√	√	√	√	√	√	100%
2	Badia – badia batuang	√	√					40%
3	Dama	√	√					40%
4	Lakon Semba	√	√					40%
		JUMLAH NILAI						55,00%

J	Olahraga Tradisional							
1	Silek Tuo Gunuang	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						100,00%

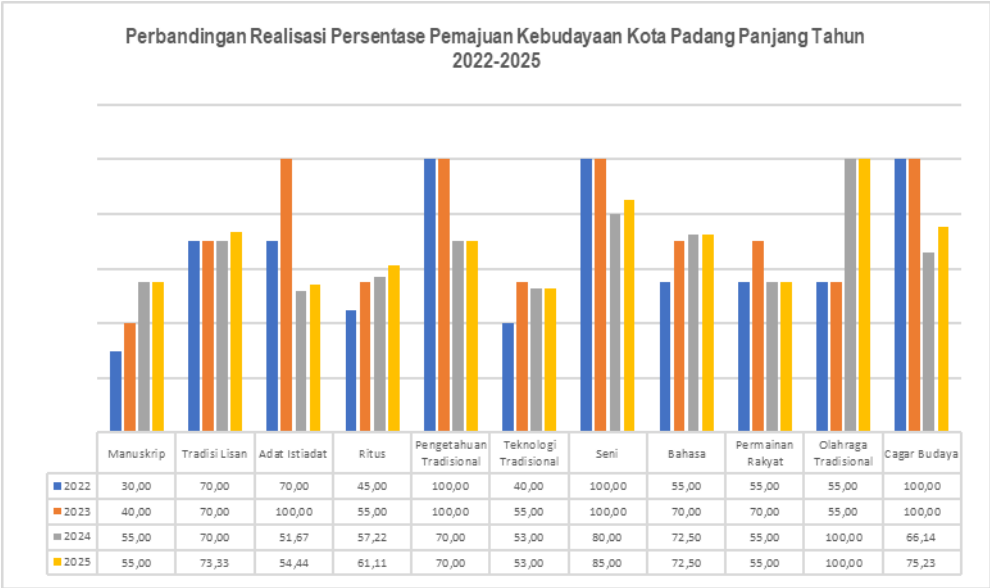
K	Cagar Budaya							
1	Masjid Asasi Sigando	√	√	√	√	√	√	100%
2	Situs Pusaro Tuanku Daulat	√	√			√		55%
3	Gedung SMAN 1 Padang Panjang	√	√	√	√	√	√	100%
4	Gedung SMPN 1 Padang Panjang	√	√	√	√	√	√	100%
5	Rumah Karnalis Sutan Pangeran	√	√			√		55%
6	Stasiun Kereta Api Padang Panjang	√	√	√	√	√	√	100%
7	Jembatan Kereta Api	√	√	√	√	√	√	100%
8	Jembatan Kayu Putihah (Jembatan Kereta Api dalam Kota)	√	√	√	√	√	√	100%
9	Jembatan Ngalau (Jembatan Kereta Api dalam Kota)	√	√	√	√	√	√	100%
10	Asrama Diniyah Puteri dan Tugu Diniyah Putri	√	√	√	√	√	√	100%
11	Mts.DMP Diniyah Puteri	√	√	√	√	√	√	100%
12	Komplek Makam Rahmah El Yunusiyah	√	√	√	√	√	√	100%
13	Tugu Kecelakaan Kereta Api Zaman Jepang (Balai-Balai)	√	√			√		55%
14	Tugu Perang Batipuah	√	√			√		55%
15	Panti Budaya	√	√	√		√		60%
16	Bioskop Karya	√	√			√		55%
17	Puncak Pagaduanan	√	√					40%
18	Bak Aia Simpang Lapan	√	√					40%
19	Surau Jambatan Basi	√	√			√		55%
20	Restoran Gumarang	√	√			√		55%
21	Rumah Gadang Bukitsurungan	√	√	√	√	√		70%
22	Tugu Desa Baru	√	√	√		√		60%
		JUMLAH NILAI						75,23%
		TOTAL NILAI						68,60%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan pada Tahun 2024-2025 mengalami fluktuatif karena pada Tahun 2024 terjadi penambahan jeis pada beberapa objek pemajuan kebudayaan, sebagaimana grafik berikut ini :



Grafik 2.23



Pada tahun 2025 terjadi peningkatan Kembali yang menunjukkan bahwa 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan sudah semakin optimal dan sudah mulai sampai ke langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi.

Sementara dari perspektif RPD Tahun 2024-2026 capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD 2024-2026 berturut-turut adalah 92,70% dan 89,09% seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.81
Capaian Indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Persentase Pemajuan Kebudayaan	66,60	68,60	103,00	74,00	92,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Untuk bisa mencapai target akhir RPD 2024-2026 masih perlu disusun rencana aksi agar langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi bisa optimal pelaksanaannya.

Langkah internalisasi yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang. Berikut beberapa dokumentasi pemajuan kebudayaan yang belum sepenuhnya tersedia di Kota Padang Panjang:

- 1. Dokumen Verbal
- 2. Dokumen Audio



3. Sketsa
4. *Hand Survey*
5. Gotografi/pemotretan
6. dokumentasi Audio Visual
7. Fotogrametri
8. *Terrestrial Lase Scanning* (TLS)
9. Sistem Informasi Geografis (SIG), dan
10. *Unnamed Aerial Vehicle*.

Sedangkan pada langkah literasi, belum maksimalnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan, serta berkontribusi dalam memajukan kebudayaan pun masih sedikit sekali di Kota Padang Panjang.

Belum optimalnya beberapa langkah pemajuan kebudayaan tersebut diatas salah satunya disebabkan karena Kota Padang Panjang belum memiliki tim ahli untuk pemajuan kebudayaan, sehingga mulai dari langkah identifikasi sampai langkah literasi belum optimal dilakukan. Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian kinerja diatas, dapat dirumuskan beberapa langkah yang dapat dilakukan kedepannya dalam rangka pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang, yakni:

1. Bekerjasama dengan Balaibudaya Sumatera Barat untuk mendatangkan tim ahli untuk melakukan pemetaan sampai dengan kajian-kajian pemajuan kebudayaan itu sendiri, sehingga nanti nya terdapat kajian ilmiah mengenai kebudayaan yang ada di kota Padang Panjang.
2. Melakukan sosialisasi Kembali kepada masyarakat kota Padang Panjang tentang penting nya pemajuan terhadap kebudayaan itu sendiri.
3. Melakukan kegiat-kegiatan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, sehingga nanti nya dapat terinternalisasi terhadap masyarakat yang berada di Kota Padang Panjang

(b) Persentase Mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan

Selain dijuluki sebagai Kota Serambi Mekah, Kota Padang Panjang juga menjadi pelopor pendidikan Islam modern di Sumatera, sehingga Kota Padang Panjang memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas keagamaan. Selain keberadaan lembaga pendidikan keislaman yang sudah sejak lama menjadi rujukan oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, berbagai aktivitas keagamaan juga menjadi tolok ukur citra kota. Dalam perencanaan



pembangunan Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu, indikator keagamaan selalu menjadi perhatian dan tidak pernah ditinggalkan. Indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan merupakan indikator baru pada RPD 2024-2026. Capaian indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Capaian Indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85,00	85,71	100,84	71,42	84,02

Sumber : *Bagian Kesra Setdako, 2025*

Realisasi indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 meningkat 14,29% dari 71.42% pada tahun 2024 menjadi 85,71% dengan capaian 100,84%. Terdapat peningkatan jumlah masjid aktif dari 35 pada tahun 2024 menjadi 41 mesjid dari total 29 mesjid yang ada.

Persentase masjid aktif yang melaksanakan aktivitas keagamaan diukur dari pembobotan aktivitas keagamaan yang dilaksanakan pada setiap masjid. Aktivitas keagamaan yang menjadi tolak ukur ke aktivan masjid yakni, Sholat Berjamaah Lima Waktu (40%), Wirid Bulanan (15%), Didikan Subuh (5%), Remaja Mesjid (15%), Kepengurusan Mesjid (15%) dan Majelis Taklim (10%). Perbandingan jumlah Mesjid Aktif yang melaksanakan kegiatan Keagamaan di Kota Padang Panjang tahun 2024 dan 2025, disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Mesjid Aktif yang melaksanakan Kegiatan Keagamaan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2025

N o	Kegiatan Keagamaan	Bentuk Pembinaan	Bobot Nilai Kegiatan	2024	2025
1	Sholat berjamaah Lima Waktu	1 Sholat Lima Waktu Berjamaah	40%	49	49
2	Wirid Bulanan	1 Pembacaan Surah Yasin	15%	49	49
		2 Ceramah			
3	Didikan Subuh	1 Pembinaan ba'da shalat subuh	5%	37	35
4	Remaja Mesjid	1 Wirid pengajian	15%	17	8
		2 Pembinaan Remaja Mesjid			
5	Kepengurusan Mesjid	1 Pengelolaan Aktivitas Mesjid	15%	49	49
6	Majlis Ta'lim	1 Ceramah Agama	10%	31	41
		2 Pendalaman materi agama melalui tanya jawab			

Sumber : *Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2025*



Tingkat keaktifan pada masing-masing komponen dipengaruhi oleh faktor dan kondisi yang berbeda. Dari 49 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang sampai dengan akhir tahun 2025, seluruh mesjid telah melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, melaksanakan wirid bulanan dan seluruh masjid telah memiliki kepengurusan mesjid. Kondisi yang berbeda terjadi pada aktivitas Didikan Subuh. Aktivitas ini rutin dilaksanakan oleh seluruh TPQ/MDA setiap minggu. Di Kota Padang Panjang dari 49 mesjid, terdapat 37 mesjid yang melaksanakan kegiatan TPQ/MDA. 37 Mesjid tersebut rutin melaksanakan aktivitas Didikan Subuh.

Terkait dengan kegiatan Remaja Mesjid, terlihat tingkat aktivitas yang lebih sedikit. Dari 49 mesjid terdapat 8 mesjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Belum maksimalnya kegiatan remaja masjid ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran. Dan terkait majelis taklim, dari 49 mesjid, hanya 41 mesjid yang membentuk Majelis Taklim dan 41 mesjid tersebut secara rutin melaksanakan kegiatan dimesjid dan juga mengikuti pertemuan bulanan tingkat Kota Padang Panjang yang pelaksanaannya digilir dari mesjid ke mesjid. Selain itu, masing-masing kelompok majlis taklim juga telah memiliki jadwal dan program rutin di mesjid masing-masing.

Berdasarkan perspektif RPD Tahun 2024-2026 Mesjid yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan pada tahun 2025 capaiannya terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD secara berturut-turut Adalah 95,23% dan 90,22% sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.84
Capaian Indikator Persentase Mesjid yang Aktif Melaksanakan
Aktifitas Keagamaan Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85,00	85,71	100,84	90,00	95,23

Sumber : *Bagian Kesra Setdako, 2025*

Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih sangat diperlukan upaya yang efektif dan cepat.

Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan dukungan dalam upaya menggairahkan kehidupan keagamaan, dalam bentuk dukungan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan dilingkungan mesjid maupun di tempat-tempat lainnya. Dukungan fasilitasi tersebut antara lain:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- (1) Fasilitas Pertemuan Bulanan BKMT Kota Padang Panjang sebanyak 10 kali

Fasilitas yang diberikan berupa penyediaan snack/minum dan penceramah serta pembawa cara pada pertemuan Majelis Ta'lim Kota setiap bulannya. Pelaksanaan majelis ta'lim ini bergiliran dari masjid ke masjid setiap bulannya

- (2) Fasilitas Kegiatan Subuh Mubarakah sebanyak 6 kali

Fasilitas kegiatan subuh mubarakah dilaksanakan secara bergantian pada beberapa masjid dengan tujuan memberikan motivasi bagi masjid-masjid yang ada di Kota Padang Panjang. Diharapkan setelah adanya fasilitas kegiatan tersebut pada masjid tertentu, maka selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri di masjid tersebut. Saat ini telah ada beberapa masjid yang melaksanakan kegiatan Subuh Mubarakah secara rutin dan mandiri.

- (3) Pembinaan Remaja Masjid tingkat Kota Padang Panjang sebanyak 5 kali.

Fasilitas pembinaan remaja masjid dilaksanakan dalam bentuk wirid remaja dan peningkatan kapasitas berupa outbound bagi 60 (enam puluh) remaja masjid se Kota Padang Panjang. Upaya pembinaan dilakukan oleh BKPRMI Kota Padang Panjang. Upaya pembinaan juga menyasar kepada siswa sekolah yang aktif dalam kegiatan Rohani Islam (Rohis).

- (4) Penyediaan Fasilitas Program *Smart Surau*

Fasilitas Program Smart Surau yang bekerja sama dengan ruang guru diberikan kepada masjid yang berlokasi dekat sarana pendidikan dan memiliki pengurus masjid aktif serta animo yang tinggi dari masyarakatnya. Sampai dengan Tahun 2025 ini fasilitas program smart surau diberikan untuk 10 (sepuluh) masjid, yaitu Masjid Asasi Sigando, Masjid Ashliyah Pasar Usang, Masjid Ilham Koto Panjang, Masjid Nurul, Iman Sialiang Atas, Masjid Nurul Amri Balai-Balai, Masjid Hidayatus Salam Koto Panjang, Masjid Nurul Ihsan Kampung Manggis, Masjid Jami' Nurul Huda Silaing Bawah, Masjid Hidayah Guguk Malintang, dan Masjid Nurul Huda Ganting.

- (5) Dukungan operasional pengelolaan Masjid Agung Manarul 'Ilmi *Islamic Centre*



- (6) Pelaksanaan Wirid Korpri rutin pada minggu I dan III setiap bulannya di Mesjid Manarul ‘Ilmi *Islamic Centre*.
- (7) Pemberian insentif terhadap imam mesjid, garin mesjid dan mushalla serta guru TPQ/MDA
- (8) Pemberian bantuan hibah untuk mesjid dan mushalla.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 751.379.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 685.911.600,- (86,13%)** untuk melaksanakan 2 program, yaitu :

- 1. Program Pengembangan Kebudayaan
- 2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2. **Sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah dalam memberikan rasa aman. Pelanggaran trantibum yang dibiarkan tanpa penyelesaian, selain menimbulkan ketidaknyamanan, juga akan berdampak pada kondisi trantibum secara keseluruhan.

Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum Kota Padang Panjang Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.85
Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100.00	100,00	100.00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian pelanggaran kententeraman dan ketertiban umum untuk tahun 2025 telah sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi tingkat penyelesaian adalah 100%, artinya seluruh pelanggaran kententeraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan.

Dari sudut pandang RPD capaian tahun kedua dan tahun terakhir RPD telah sesuai dengan target, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.86
Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	T	R	C	T	C
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Pada Tahun 2025 terjadi penurunan jumlah gangguan trantibum dilaporkan oleh masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Panjang dari 102 menjadi 96 kasus. Kasus dan jumlah gangguan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.87
Kasus Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran	Bulan												Jumlah per kasus
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Dkt	Nov	Des	
1	Gepeng / stress	-	3	-	2	2	-	-	-	-	1	7	-	16
2	Trantibum hisap lem/ siswa berkeliaran/ pertengkaran ringan/ dicurigai melakukan pencurian	4	7	4	-	6	2	8	2	3	15	15	15	80
3	Mengarah ke perzinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan pasal 6A huruf a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Makan/ minum pada warung/kedai/rumah makan pada siang hari di bulan Ramadhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Menjual/ mengkonsumsi/ menyimpan miras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		4	10	4	2	8	2	8	2	3	16	22	15	96

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2025

Dari Tabel diatas terlihat adanya penurunan jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang dari 102 kasus di Tahun 2024 menjadi 96 kasus pada tahun 2025. Hanya ada 2 jenis pelanggaran yang terjadi yaitu kasus gepeng/stress (16 kasus) dan pelanggaran trantibum, hisap lem, siswa berkeliaran, pertengkaran ringan, serta dicurigai (80 kasus). Penyelesaian masing-masing kasus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda dengan melibatkan stakeholder terkait. Kasus gepeng/stress diselesaikan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKBPPPA) dengan memberikan surat pengantar dan diselesaikan langsung oleh pihak Dinsos PPKBPPPA.

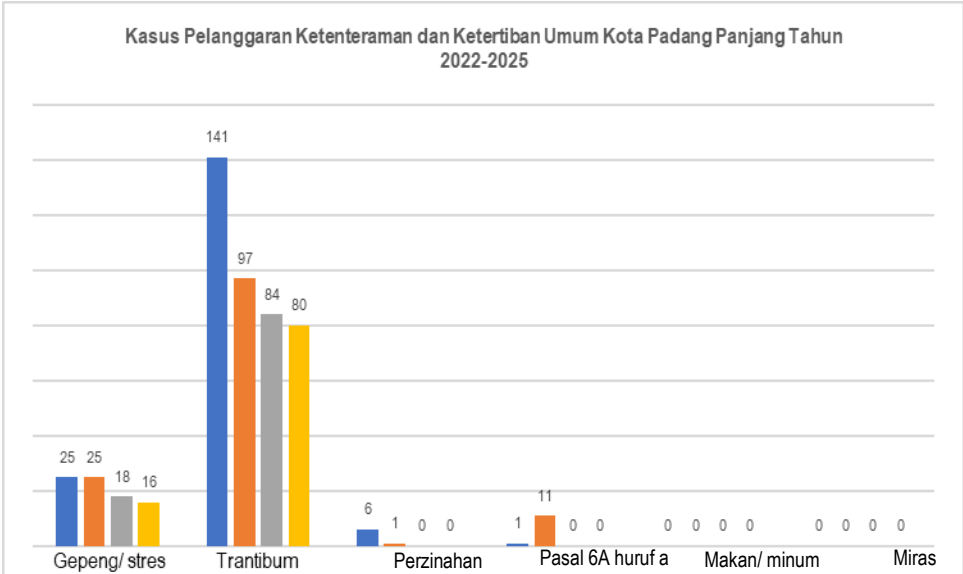
Sementara pelanggaran trantibum, hisap lem, siswa berkeliaran, pertengkaran ringan, serta dicurigai melakukan pencurian dengan jumlah pelanggaran sebanyak 80 kasus sepanjang Tahun 2025. Jumlah ini jauh berkurang dari Tahun 2024 sebanyak 84 kasus. Penanganan kasus ini dilakukan pembinaan oleh Polisi Pamong Praja Ahli Muda bekerja sama dengan pihak



sekolah (untuk pelajar) dengan menghadirkan orang tua dan menandatangani surat pernyataan guna memberikan efek jera dan akibat buruk dari perbuatannya tersebut. Untuk pelanggaran siswa berkeliaran diberikan pembinaan oleh Polisi Pamong Praja Ahli Muda. Apabila siswa sudah berulang kali diamankan oleh anggota Satpol PP, maka pihak Satpol PP akan menyerahkan pelajar tersebut kepada pihak sekolah, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib sekolah dan tata tertib seorang pelajar.

Jumlah jenis dan kasus pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2025 cenderung menurun dibandingkan tahun 2025, seperti disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.24



Kinerja Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini didukung dengan adanya Tim Satuan Kerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang beranggotakan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta Kejaksaaan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 154 Tahun 2025 tentang Tim Satuan Kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Padang Panjang.

Faktor-faktor pendukung terselesaikannya seluruh kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi yang menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat agar merasa aman, tenteram dan tertib serta terhindar dari perilaku tindakan tidak bertanggung jawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Terlaksananya operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya.
3. Terlaksananya Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota.
4. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres.
5. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 9.998.015.466.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.360.650.206,37,- (83,61%)** untuk melaksanakan 7 Program yaitu:

1. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
7. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

3. Sasaran Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran strategis Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial diukur melalui indikator Angka PPKS. PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pendataan dan pengelolaan data PPKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan.

Angka PPKS didapatkan melalui perhitungan berikut ini :

$$\text{Angka PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2025 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 2.88
Capaian Indikator Angka PPKS Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Angka PPKS	3,68	4,96	65,22	3.69	112.14

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk Indikator Angka PPKS Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 mengalami peningkatan negatif sebanyak 1,27 poin dari 3,69 pada tahun 2024 menjadi 4,96 dengan capaian 65,22%, masih belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Dari 26 jenis PPKS, dalam 4 tahun terakhir ditemukan 15 jenis di Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

No	PPKS	2022	2023	2024	2025
1	Anak dengan Kedisabilitasan	98	96	77	93
2	Anak Terlantar	20	10	8	7
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	5	16	20
4	Korban Bencana Alam	0	0	857	1.432
5	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3	1	7	4
6	Lanjut Usia Terlantar	344	304	223	345
7	Pemulung	8	8	8	10
8	Pengemis	2	1	2	-
9	Penyandang Disabilitas	310	307	267	347
10	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	278	275	238	279
11	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	0	0	6	5
12	KK Miskin	2.219	1.749	632	632
13	Anak Balita terlantar	0	0	-	1
14	Anak memerlukan	0	0	-	8

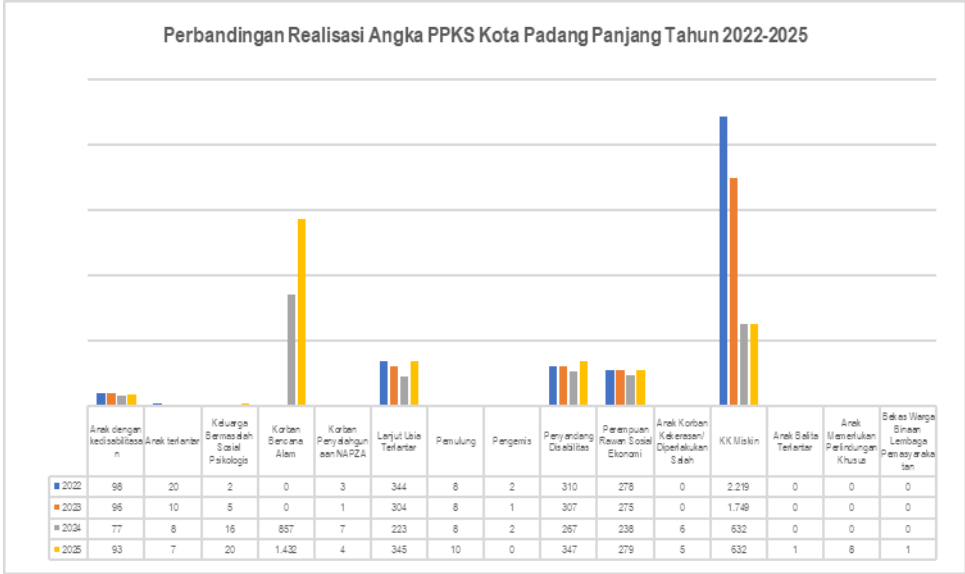


PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PPKS	2022	2023	2024	2025
	perlindungan khusus				
15	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	0	-	1
TOTAL		3.284	2.756	2.341	3.184

PPKS Kota Padang Panjang pada tahun 2025 melonjak sebanyak 843 jiwa dari 2.341 jiwa pada tahun 2024 menjadi 3.184. Lonjakan angka PPKS paling tinggi disumbang oleh korban bencana alam, akibat terjadinya bencana banjir bandang pada tanggal 27 November 2025 PPKS jenis ini bertambah sebanyak 575 jiwa. Berdasarkan jenis PPKS jumlah PPKS dari tahun 2024-2025 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.25



Kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan perbaikan kesejahteraan sosial, setelah terlihat tren positif penurunan selama 2022-2024, pada tahun 2025 terjadi lonjakan karena terjadinya bencana banjir bandang dan penambahan jenis PPKS.

Dari perspektif terhadap RPD Tahun 2024-2026, capaian terhadap target tahun kedua dan target akhir RPD secara beurutan Adalah 89,53% dan 84,65%.

Tabel 2.89
Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Angka PPKS	3,68	4,96	65,22	4,49	89,53

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA, 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pada tahun 2025 Dinsos PPKBPPPA sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang melakukan pelayanan sosial terhadap PPKS yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anak Dengan Kedisabilitas diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan) sebanyak 66 orang, Sembako Disabilitas sebanyak 37 orang, ATENSI sebanyak 26 orang, serta ATENSI Bencana sebanyak 1 orang.
- b. Anak Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah diberikan layanan konseling dari LK3 sebanyak 5 orang.
- c. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus diberikan layanan konseling dari LK3 sebanyak 8 orang.
- d. Anak Terlantar diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan) sebanyak 4 orang.
- e. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis diberikan layanan konseling dari LK3 sebanyak 20 orang.
- f. Korban Bencana Alam diberikan bantuan kebencanaan sebanyak 1.432 orang.
- g. Korban Penyalahgunaan Napza diberikan bantuan PBI-JK sebanyak 1 orang serta respon kasus sebanyak 1 orang.
- h. Lanjut Usia Terlantar diberikan bantuan PBI-JK sebanyak 249 orang, Sembako sebanyak 118 orang, PKH (Program Keluarga Harapan) sebanyak 115 orang, Sembako Lansia sebanyak 172 orang, Sembako Disabilitas sebanyak 1 orang, Permakanan Lansia sebanyak 24 orang, Respon Kasus sebanyak 9 orang, serta ATENSI Bencana sebanyak 1 orang dan ATENSI sebanyak 3 orang.
- i. Pemulung diberikan bantuan PBI-JK sebanyak 9 orang, Sembako sebanyak 3 orang, PKH sebanyak 3 orang, Permakanan Lansia sebanyak 1 orang, Respon Kasus sebanyak 2 orang, serta ATENSI Bencana sebanyak 1 orang.
- j. Penyandang Disabilitas diberikan bantuan PBI-JK sebanyak 244 orang, Sembako sebanyak 62 orang, PKH sebanyak 59 orang, Sembako Lansia sebanyak 27 orang, Sembako Disabilitas sebanyak 102 orang, Permakanan Lansia sebanyak 2 orang, Permakanan Disabilitas sebanyak 7 orang, Respon Kasus sebanyak 6 orang, serta ATENSI Bencana sebanyak 2 orang dan ATENSI sebanyak 54 orang.
- k. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi diberikan bantuan PBI-JK sebanyak 200 orang, Sembako sebanyak 120 orang, PKH sebanyak 82 orang, Sembako



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Lansia sebanyak 2 orang, Sembako Disabilitas sebanyak 1 orang, Respon Kasus sebanyak 1 orang, serta ATENSI Bencana sebanyak 1 orang.

Adapun faktor-faktor penghambat penurunan jumlah PPKS di Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat.
2. Bertambahnya kasus baru PPKS yang terdata.
3. Meningkatnya akurasi dan perluasan cakupan pendataan, sehingga terjadi penambahan 3 jenis PPKS, yaitu anak balita terlantar, anak memerlukan perlindungan khusus dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.
4. Keterbatasan kapasitas intervensi dibandingkan dinamika permasalahan.

Namun demikian telah dilaksanakan Upaya maksimal untuk menurunkan jumlah PPKS melalui :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PPKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat dan pengembangan serta peningkatan kemandirian penyandang disabilitas berat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan organisasi PPDI.
4. Meningkatkan produktifitas lansia melalui penyediaan kebutuhan dasar dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok lansia di Kota Padang Panjang
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana
6. Peningkatan kualitas penanganan dan pemberdayaan penyandang penyakit sosial
7. Peningkatan kualitas penanganan bagi anak jalanan melalui fasilitasi rumah singgah
8. Penyediaan database kemiskinan
9. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengembangan rumah Healing.

Untuk mewujudkan sasaran menurunnya masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 2.720.637.744.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.538.938.835.00,- (86,60%)** untuk melaksanakan 8 program, yaitu :

1. Pemberdayaan Sosial



- 2. Rehabilitasi Sosial
- 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4. Pengendalian Penduduk
- 5. Pendaftaran Penduduk
- 6. Pencatatan Sipil
- 7. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 8. Pengelolaan Profil Kependudukan

5. Tujuan Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Capaian tujuan Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas diukur dengan menggunakan 2 indikator, yaitu (1) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), dan (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan diukur melalui ketersediaan fasilitas, kondisi fasilitas, kemanfaatan dari fasilitas layanan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat yang diukur melalui isian kuesioner survei oleh masyarakat/responden. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu yang diukur melalui diukur melalui indeks komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Capaian indikator IKLI dan IKLH tahun 2024-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.90
Capaian Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	95,65	96,42	100,81	95.50	102.47
2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,34	77,70	104,52	62.62	84.39

Sumber : Setdako-Dinas PerkimLH, 2025

Sementara perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.91
Capaian Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	95,65	96,42	100,81	91,56	105,31
2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,34	77,70	104,52	66,76	116,39

Sumber : Setdako-Dinas PerkimLH, 2025



1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Tahun 2024-2025

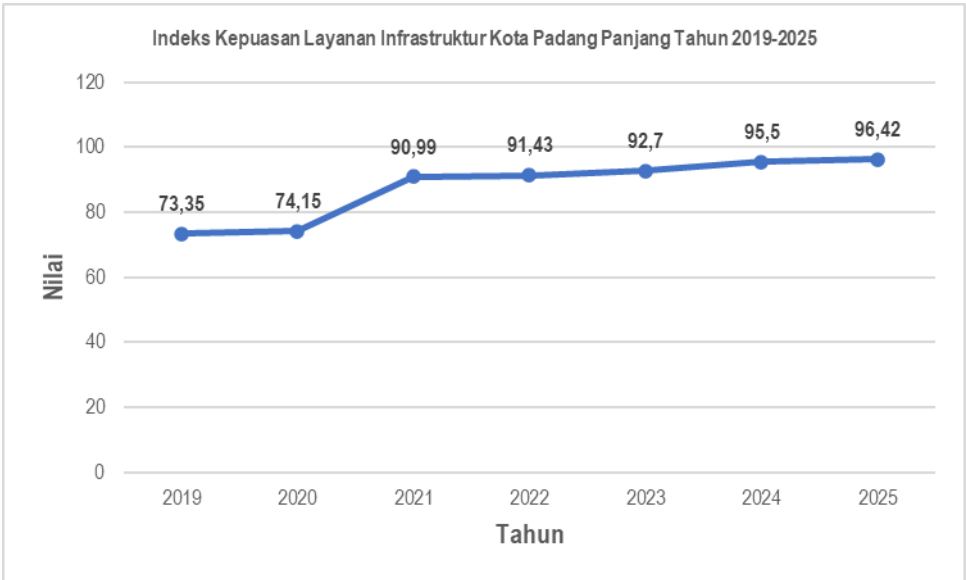
Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	95,65	96,42	100,81	95,50	102,47

Sumber : Bagian Organisasi Setdako, 2025

IKLI Tahun 2025 mengalami peningkatan 0,92 poin dari 95,50 pada tahun 2024 menjadi 96,42, melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 100,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangan pada organisasi perangkat daerah yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kondisinya sudah diatas target yang ditetapkan atau sangat baik.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan penghitungan IKLI sejak tahun 2019. Perkembangan nilai IKLI Kota Padang Panjang sejak Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.26



Sumber: Setdako, 2025



Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian IKLI Kota Padang Panjang cenderung naik dari tahun ke tahun dan mencapai nilai tertinggi di tahun 2024 bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada RPD Tahun 2026 dengan capaian 205,08%.

Tabel 2.93
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	95,65	96,42	100,81	91,56	105,31

Sumber : Setdako, 2025

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas melaksanakan pengukuran IKLI pada layanan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan hasil secara beurutan Adalah 96,62, 96,71 dan 95,93.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,34	77,70	104,52	62,62	84,39

Sumber : Dinas PerkimLH, 2025

Dari tabel di atas terlihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang pada tahun 2025 tertinggi dalam 4 tahun terakhir, meningkat sebesar 15,08 poin dari 62,62 pada tahun 2024 menjadi 77,70, melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 104,52%. Bahkan ILKH Tahun 2025 telah melebihi target akhir RPD 2024-2026, dengan capaian 115,90% seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

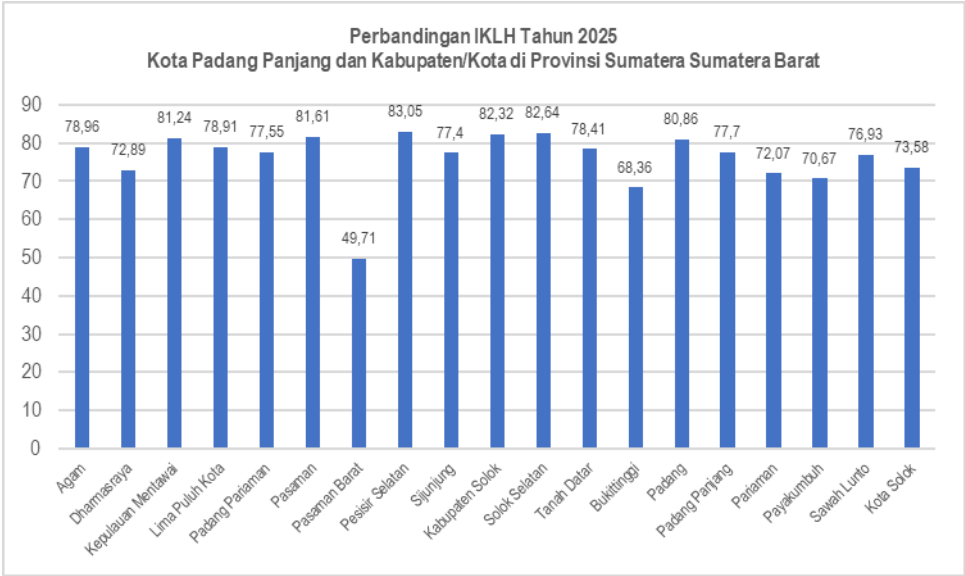
Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,34	77,70	104,52	66,76	116,39

Sumber : Dinas PerkimLH, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menempati posisi ke- 10 .

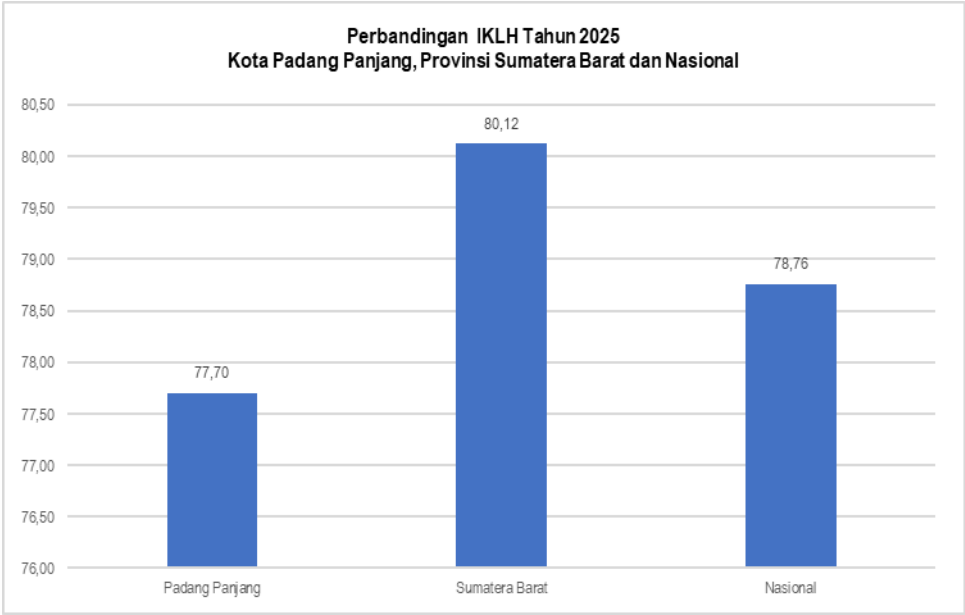


Grafik 2.27



Capaian ini lebih rendah dibanding Nilai IKLH Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80,12 dan lebih rendah dibanding Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional yang mencapai 78,76 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Grafik 2.28



Sumber: Dinas Perkim LH, 2025

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : (1) Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas, (2) Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang, dan (3) Meningkatnya Kualitas Udara dan Tutupan Lahan. Analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :



1. Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) meliputi ketersediaan fasilitas, kondisi fasilitas, kemanfaatan dari fasilitas layanan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat yang diukur melalui isian kuesioner survei oleh masyarakat/responden. IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2024-2024 diperoleh dari 3 komponen layanan infrastruktur, yaitu IKLI kePUan, IKLI Perkim dan IKLI Perhubungan. IKLI kePUan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur ke PU an diukur melauai layanan infrastruktur jalan, trotoar dan drainase. IKLI Perkim merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Dinas Perkim LH yang diukur melalui layanan sarana pembuangan sampah, jalan lingkungan, drainase lingkungan dan ruang terbuka hijau. IKLI Perhubungan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur perhubungan yang diukur melalui layanan sarana rambu lalu lintas, marka jalan, *traffict light*, petugas perhubungan, lampu penerangan jalan dan sarana parkir. Capaian IKLI kePUan, IKLI Perkim dan IKLI Perhubungan Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.96
Capaian Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 IKLI KePUan	98,00	96,62	98,59	96.71	99.90
2 IKLI Perkim	100,00	95,93	95.93	94.56	95.94
3 IKLI Perhubungan	98,00	96,71	98,68	95.22	97.16

Sumber : *Bagian Organisasi Setdako, 2025*

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.97
Capaian Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 IKLI KePUan	96,00	96,62	98,59	90,26	107,05
2 IKLI Perkim	100,00	95,93	95.93	96,92	98,98
3 IKLI Perhubungan	98,00	96,71	98,68	96,83	99,88

Sumber : *Bagian Organisasi Setdako, 2025*



Secara umum terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada masing-masing indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan walaupun terdapat indikator yang nilainya meningkat. Penjabaran lebih lanjut terkait masing-masing indikator kinerja tersebut disajikan sebagai berikut:

(a) IKLI KePUan

Capaian IKLI KePUan pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.98
Capaian Indikator IKLI KePUan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
IKLI KePUan	98,00	96,62	98,59	96,71	99,90

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Dari tabel terlihat bahwa terjadi penurunan IKLI KePUan Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 sebesar 0,09 poin dari 96,71 pada tahun 2024 menjadi 96,62 masih lebih rendah dari target yang ditetapkan dengan capaian 98,59%. Walaupun demikian nilai ini sudah melebihi target akhir RPD 2024-2026, yaitu 90,46 dengan capaian 106,81% seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.99
Capaian Indikator IKLI KePUan Tahun ke-2 RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
IKLI KePUan	98,00	96,62	98,59	90,26	107,05

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian IKLI KePUan Tahun 2025 yaitu :

- 1. Masih banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan (*on street*) terutama pada kelurahan Balai-Balai, Kelurahan Kampung Manggis dan Kelurahan Tanah Hitam
- 2. Terdapat beberapa area trotoar yang berlumut di bawah pohon pelindung, sehingga licin dan beresiko bagi pengguna
- 3. Terjadi alih fungsi trotoar menjadi tempat berjualan dan parkir motor
- 4. Terdapat jalan arteri/ beraspal yang banyak berlobang, kurang bagus kondisinya dan turun.

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian IKLI diantaranya berupa:

- 1. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik bagi pengguna layanan pada tanggal 10 Juli 2025



2. Berkoordinas dengan Satpol PP Damkar dan Dinas Pehubungan terkait parkir di bdan jalan

Nilai IKLI KePUan Kota Padang Panjang tahun 2025 berdasarkan komponen penyusunnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.100
IKLI KePUan Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai SKM per unsur	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan
1	Ketersediaan jalan arteri/ beraspal	100,00	0,308	Sangat Baik
2	Kondisi jalan arteri/ beraspal	90,00	0,277	Sangat Baik
3	Kemanfaatan jalan arteri/ beraspal	100,00	0,208	Sangat Baik
4	Kesesuaian pemanfaatan jalan arteri/ beraspal	88,50	0,273	Sangat Baik
5	Ketersediaan trotoar pada sisi kiri dan kanan jalan di sepanjang jalan	99,75	0,307	Sangat Baik
6	Kondisi trotoar pada sisi kiri dan kanan jalan di sepanjang jalan	97,25	0,300	Sangat Baik
7	Kemanfaatan trotoar pada sisi kiri dan kanan jalan di sepanjang jalan	100,00	0,308	Sangat Baik
8	Kenyamanan penggunaan trotoar di sepanjang jalan	89,75	0,276	Sangat Baik
9	Ketersediaan trotoar bagi penyandang disabilitas	93,25	0,287	Sangat Baik
10	Ketersediaan drainase	98,75	0,304	Sangat Baik
11	Kondisi drainase	99,25	0,306	Sangat Baik
12	Kemanfaatan drainase	100,00	0,308	Sangat Baik
13	Kesesuaian pemanfaatan drainase	98,25	0,303	Sangat Baik
Total			3,865	
Total Nilai Konversi			96,62	
Mutu Pelayanan			A	
Kinerja Pelayanan			Sangat Baik	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

b) IKLI Perkim

Capaian IKLI Perkim Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.101
Capaian Indikator IKLI Perkim Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
IKLI Perkim	100,00	95,93	95,93	94,56	95,94

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

IKLI Perkim Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 meningkat 1,37 poin dari 94,56 pada tahun 2024 menjadi 95,93, namun masih lebih rendah dari target yang ditetapkan dan juga target akhir RPD 2024-2026.



Tabel 2.102
Capaian Indikator IKLI Perkim Tahun ke-2 RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
IKLI Perkim	100,00	95,93	95,93	96,92	98,98

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang diselenggarakan oleh Dinas PerkimLH dan perlu dilaksanakan upaya lanjutan agar kepuasan masyarakat tercapai secara maksimal.

Faktor-faktor penghambat pencapaian IKLI Perkim Tahun 2025 berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat antara lain Adalah masih terbatasnya sarana bagi penyandang disabilitas pada ruang terbuka hijau publik yang dapat dimanfaatkan warga Kota Padang Panjang.

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian IKLI Perkim diantaranya dengan melaksanakan Forum Konsultasi Publik bagi pengguna layanan pada tanggal 10 Juli 2025.

Nilai IKLI Perkim Kota Padang Panjang tahun 2025 berdasarkan komponen penyusunnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.103
IKLI Perkim Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai SKM per unsur	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan
1	Ketersediaan fisik tempat pembuangan sampah	91,25	0,215	Sangat Baik
2	Kondisi fisik tempat pembuangan sampah	90,00	0,212	Sangat Baik
3	Pemanfaatan tempat pembuangan sampah	98,75	0,233	Sangat Baik
4	Kesesuaian lokasi tempat pembuangan sampah	92,75	0,219	Sangat Baik
5	Ketersediaan Jalan Lingkungan	99,00	0,234	Sangat Baik
6	Kondisi Jalan Lingkungan	97,00	0,229	Sangat Baik
7	Pemanfaatan Jalan Lingkungan	99,75	0,235	Sangat Baik
8	Kesuaian Pemanfaatan Jalan Lingkungan	97,25	0,230	Sangat Baik
9	Ketersediaan drainase jalan lingkungan/ kawasan permukiman	95,25	0,225	Sangat Baik
10	Kondisi drainase jalan lingkungan/ kawasan permukiman	95,50	0,225	Sangat Baik
11	Pemanfaatan drainase jalan lingkungan/ kawasan permukiman	99,75	0,235	Sangat Baik
12	Kesesuaian pemanfaatan drainase jalan lingkungan/ kawasan permukiman	95,25	0,225	Sangat Baik
13	Ketersediaan ruang hijau publik	93,75	0,221	Sangat Baik
14	Kondisi ruang hijau publik	96,25	0,227	Sangat Baik
15	Kemanfaatan ruang hijau publik	99,25	0,234	Sangat Baik
16	Keuaian pemanfaatan ruang hijau publik	94,75	0,224	Sangat Baik



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

17	Ketersediaan sarana pada ruang hijau publik bagi penyandang disabilitas	90,50	0,214	Sangat Baik
Total			3,837	
Total Nilai Konversi			95,93	
Mutu Pelayanan			A	
Kinerja Pelayanan			Sangat Baik	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

c) IKLI Perhubungan

Capaian IKLI Perhubungan Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.104
Capaian Indikator IKLI Perhubungan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
IKLI Perhubungan	98,00	96,71	98,68	95.22	97.16

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

IKLI Pehubungan Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 meningkat 1,49 poin dari 95,22 pada tahun 2024 menjadi 96,71, masih rendah dari target yang ditetapkan dengan capaian 98,68%. Namun telah hampir mencapai target akhir RPD 2024-2026, yaitu 96,90 dengan capaian 99,80%.

Tabel 2.105
Capaian Indikator IKLI Perhubungan Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
IKLI Perhubungan	98,00	96,71	98,68	96,83	99,88

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya yang signifikan.

Faktor-faktor penghambat pencapaian IKLI Perhubungan Tahun 2025 berdasarkan pendapat responden antara lain adalah:

1. Minimnya ketersediaan lahan parkir menyebabkan banyak bahu jalan yang digunakan sebagai tempat parkir yang mengakibatkan kemacetan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
2. Masih ada lampu penerangan jalan yang redup dan mati
3. Masih sering terjadinya pelanggaran di sejumlah ruas jalan yang menjadi Lokasi Sistem Satu Arah

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian target IKLI perhubungan antara lain adalah:

1. melaksanakan Forum Konsultasi Publik bagi pengguna layanan pada tanggal 10 Juli 2025



- 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Satpol PP Damkar dan kepolisian terkait ketertiban berlalu lintas melalui forum lalu lintas.
- 3. Melakukan koordinasi dengan pemilik lahan disekitar kuliner dalam penyediaan lahan parkir serta pengaturan jam parkir dilokasi kuliner

Nilai IKLI Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2025 berdasarkan komponen penyusunnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.106
IKLI Perhubungan Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai SKM per unsur	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan
1	Ketersediaan rambu lalu lintas	92,25	0,176	Sangat Baik
2	Kondisi rambu lalu lintas	92,75	0,180	Sangat Baik
3	Manfaat rambu lalu lintas	100,00	0,190	Sangat Baik
4	Ketersediaan Marka jalan	98,50	0,188	Sangat Baik
5	Kondisi marka jalan	95,50	0,182	Sangat Baik
6	Manfaat marka jalan	100,00	0,190	Sangat Baik
7	Ketersediaan Traffic Light	100,00	0,190	Sangat Baik
8	Kondisi Traffic Light	100,00	0,190	Sangat Baik
9	Manfaat Traffic Light	100,00	0,190	Sangat Baik
10	Perlunya Traffic Light ber-CCTV	100,00	0,190	Sangat Baik
11	Manfaat Traffic Light ber-CCTV	100,00	0,190	Sangat Baik
12	Keberadaan petugas dishub dalam membantu masyarakat pada jam padat aktifitas publik	100,00	0,190	Sangat Baik
13	Kepedulian petugas dishub di area padat aktifitas publik	100,00	0,190	Sangat Baik
14	Ketersediaan lampu penerangan jalan	91,25	0,174	Sangat Baik
15	Kondisi lampu penerangan jalan	92,00	0,175	Sangat Baik
16	Manfaat lampu penerangan jalan	100,00	0,190	Sangat Baik
17	Ketersediaan fasilitas parkir	67,50	0,129	Kurang Baik
18	Manfaat fasilitas parkir	100,00	0,190	Sangat Baik
19	Keberadaan petugas parkir	100,00	0,190	Sangat Baik
20	Fungsi petugas parkir	100,00	0,190	Sangat Baik
21	Biaya retribusi parkir yang harus dibayar	100,00	0,190	Sangat Baik
Total			3,868	
Total Nilai Konversi			96,71	
Mutu Pelayanan			A	
Kinerja Pelayanan			Sangat Baik	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024

Dalam upaya mencapai target Terbangunnya Infrastruktur layanan dasar Perkotaan yang Berkualitas telah dialokasikan dana sebesar **Rp. 27.164.286.318.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.191.240.863,79 ,-** (87,12%) pada Dinas PUPR, Dinas Perkim LH dan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan 9 program, yaitu :

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah



- 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 6. Program Pengembangan Perumahan
- 7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- 8. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 9. Program Penyelenggaraan Jalan

2. Sasaran Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang

Sasaran Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang diukur melalui indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, indikator ini merupakan indikator baru dalam RPD 2024-2026. Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah rata-rata dari prosentase keterlaksanaan indikasi program struktur ruang dan pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang. Semakin tinggi persentase keterlaksanaan indikasi program tata ruang maka diasumsikan konsistensi/ kesesuaian pemanfaatan ruang juga meningkat. Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.107
Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,50	84,00	100,60	83	100

Sumber : Dinas PUPR, 2025

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang pada Tahun 2025, meningkat 0,5% persen dari 83% pada tahun 2024 menjadi 84,00% dengan capaian 100,60% Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilihat dari keterlaksanaan indikasi program struktur dan pola ruang sudah terlaksana dengan cukup baik.

Jika dilihat dari perspektif RPD Tahun 2024-2026, capaian tahun 2025 telah sesuai dengan target akhir RPD, capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD secara berturut-turut adalah 100,60% dan 100,00% seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.108
Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,50	84,00	100,60	83,50	100,60

Sumber : Dinas PUPR, 2025



Dari data prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun prosentase kesesuaian tata ruang menunjukkan peningkatan. Namun jika dilihat dari data Propinsi Sumatera Barat , indeks kesesuaian penataan ruang Kota Padang Panjang masih dibawah Provinsi, sebagaimana data dibawah ini :

Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Propinsi Sumatera Barat

No	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2022	2023	2024	2025
1	Kota Padang Panjang	81%	82%	83%	83,35%
2	Provinsi Sumatera Barat	86%	87,75%	89,52%	89,70%

Sumber : Dinas PUPR, 2025

Faktor-faktor pendukung pencapaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 yaitu:

1. Kebijakan nasional yang mensyaratkan sinkronisasi program kegiatan terkait tata ruang dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan semakin meningkatkan perhatian pemerintah daerah dalam mengimplementasikan indikasi program/kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Tata Ruang.
2. Pengembangan sistem informasi penataan ruang berbasis web (Simtaru: simtaru.padangpanjang.go.id) yang telah dilakukan sejak tahun 2022 memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Padang Panjang untuk mendapatkan akses informasi terkait tata ruang. Melalui aplikasi simtaru masyarakat dapat dengan mudah mengetahui lokasi yang bisa/tidak bisa dibangun tanpa harus berkunjung ke OPD terkait.
3. Menjalin kerjasama pengawasan pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak kelurahan dan instansi vertikal lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Padang Panjang tahun 2025 antara lain adalah:

1. Melaksanakan sinkronisasi antara indikasi program tata ruang dengan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.
2. Melaksanakan sosialisasi kesesuaian ruang melalui pemanfaatan Sistem Informasi Penataan Ruang di dua Kecamatan.
3. Melengkapi fitur pengaduan masyarakat pada aplikasi simtaru sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dilaporkan dengan mudah
4. Melaksanakan pengawasan gabungan pemanfaatan ruang dengan melibatkan Satpol PP dan kepolisian.



Dalam upaya mencapai sasaran Konsistensi Penataan Ruang telah dialokasikan dana sebesar **Rp. 3.791.295.600.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.548.414.454.00,- (49,29%)** untuk melaksanakan 2 program, yaitu :

- 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 2. Program Penataan Bangunan Gedung

3. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan diukur melalui 3 indikator, yaitu indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan. Tiga Indikator ini merupakan indikator baru dalam RPD 2024-2026. Capaian Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 Indeks Kualitas Air	72,47	72,72	100,34	34.65	47.81
2 Indeks Kualitas Udara	78,68	85,50	108,67	89.08	113.65
3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,51	71,81	103,31	61.70	88.84

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Perspektif capaian terhadap target tahun kedua dan tahun terakhir RPD Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel 2.110
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1 Indeks Kualitas Air	72,47	72,72	100,34	46,50	156,39
2 Indeks Kualitas Udara	78,68	85,50	108,67	90,10	94,89
3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,51	71,81	103,31	57,50	124,89

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Terkait perbedaan yang signifikan antara target RPD dengan Target Tahun 2024 terjadi akibat perbedaan metode perhitungan sebagaimana dibahas di capaian IKLH.

(a) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penentuan nilai IKA ini didapat dari hasil perhitungan terhadap kualitas 5 sungai di Kota Padang Panjang yang sebelumnya telah diuji masing-masing sampelnya di laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi. Perhitungan IKA ini berpedoman



kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Air disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Capaian Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	72,47	72,72	100,34	34.65	47.81

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 meningkat signifikan 38,07 poin dari 34.65 pada tahun 2024 menjadi 72,72, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan capaian 100,34%.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, target Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang Tahun 2025 tercapai sebesar 153,90%. Hal ini berarti bahwa Indeks Kualitas Air telah melebihi target akhir RPD.

Tabel 2.112
Capaian Indikator Indeks Kualitas Air Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Air	72,47	72,72	100,34	46,50	156,39

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang Tahun 2025 menempati posisi ke-11 dengan Indeks Kualitas Air sebesar 72,72, nilai ini dibawah Pasaman dengan nilai IKA 73,87 sedangkan Kabupaten/Kota yang tertinggi nilai IKA nya di Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai IKA 81,51.

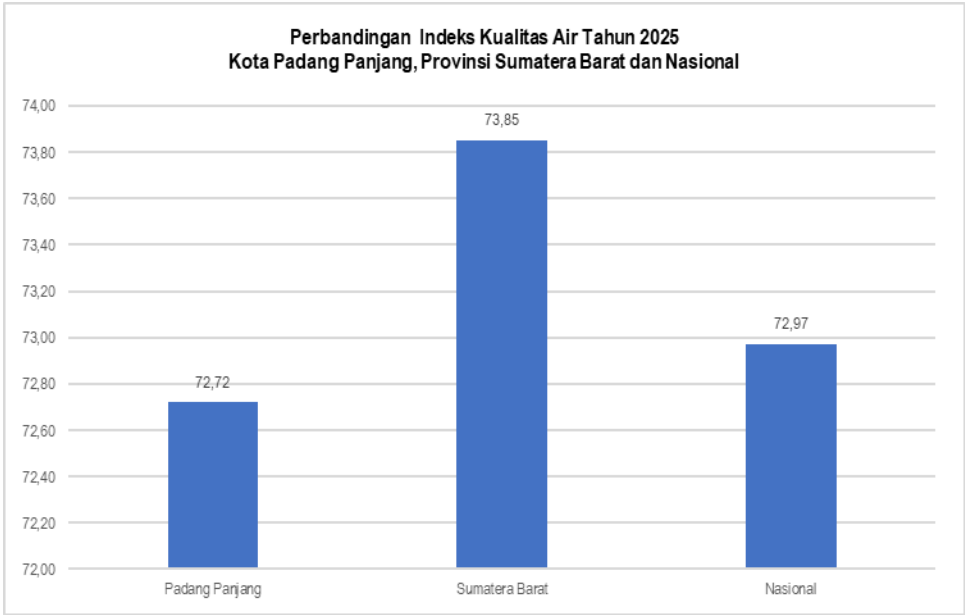


Grafik 2.29



Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang masih berada dibawah capaian IKA provinsi Sumatera Barat yaitu 73,85, (lebih rendah 1,13 poin). Nilai IKA Padang Panjang juga berada dibawah nilai IKA Nasional (lebih rendah 0,25 poin) sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.30



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Faktor-faktor penghambat pencapaian Indeks Kualitas Air Tahun 2025 adalah:

1. Posisi Sungai-sungai Kota Padang Panjang yang secara geografis merupakan bagian dari rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar yang kondisinya sudah tercemar saat memasuki wilayah Kota Padang Panjang. Permasalahan/pencemaran yang terjadi di bagian hulu tidak bisa diinvensi langsung oleh Pemerintah Kota Padang



Panjang mengingat lokasi dimaksud tidak berada di wilayah administrasi Kota Padang Panjang.

- 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter e coli hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang
- 3. Terjadinya bencana erupsi gunung merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai IKA ini antara lain:

- 1. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten tetangga untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan antar Kabupaten Kota
- 2. Melaksanakan program peningkatan kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang dalam pengelolaan limbah domestik khususnya tinja sebelum dibuang ke badan air.
- 3. Melakukan pembangunan jamban sehat/tanki septik individual bagi masyarakat yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

(b) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penentuan IKU dilakukan melalui pengambilan sampel udara ambien pada 4 lokasi yang mewakili pemukiman, jalan raya, industri, dan perkantoran, dan dihitung dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Udara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.113
Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	78,68	85,50	108,67	89.08	113.65

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Terjadi penurunan Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 sebanyak 3,58 poin dari 89,08 pada tahun 2024 menjadi 85,50 dengan capaian 108,67%.

Penentuan angka target lebih rendah dari target tahun kedua RPD 2024-2026 karena berdasarkan arahan SK Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor 129 tahun 2024, dimana



terdapat perubahan cara perhitungan Indeks Kualitas Udara yang merupakan pengembangan dari formulasi sebelumnya. Sedangkan perhitungan realisasi dilakukan Kemen LHK masih menggunakan formula lama yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan yang cukup besar antara realisasi dengan target.

Tabel 2.114
Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Udara	78,68	85,50	108,67	90,10	94,89

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 -2026, Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang Tahun 2025 tercapai sebesar 94,48% (target 90,15, realisasi 85,50). Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya tambahan.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang Tahun 2025 menempati posisi ke-3 dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 85,5. Nilai ini berada diatas Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai IKU 85,39. Kabupaten/Kota yang mencapai nilai IKU tertinggi di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman dengan nilai 86,88 seperti ditunjukkanoleh grafike berikut :

Grafik 2.31

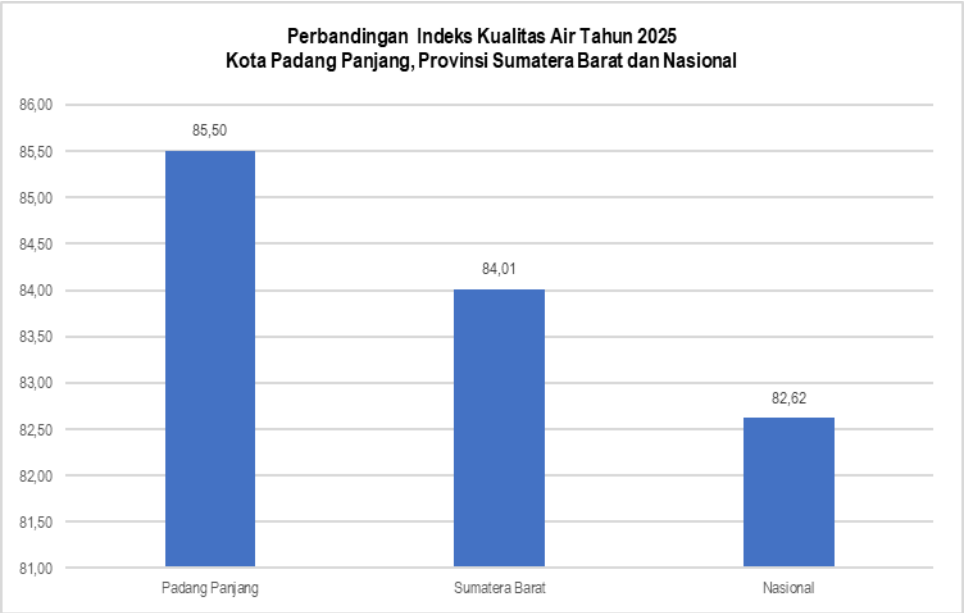


Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025



Sementara jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang lebih baik sebesar 1,49 poin dari IKU Provinsi Sumatera Barat dan lebih baik 2,88 poin dari IKU Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.32



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Faktor-faktor penghambat pencapaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 yaitu:

1. Terjadinya erupsi Gunung Marapi dalam periode waktu yang lama di tahun 2025
2. Posisi Padang Panjang yang berada di jalur perlintasan utama Padang-Pekanbaru menyebabkan tingginya emisi gas buak dari kendaraan yang melewati Kota Padang Panjang
3. Kondisi Padang Panjang yang memiliki kontur berbukit dan dikelilingi pegunungan menyebabkan sirkulasi udara terhambat pada kondisi tertentu sehingga polutan lebih lama berada di udara.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai IKU ini antara lain:

1. Peningkatan kualitas udara melalui penghijauan
2. Pengendalian emisi kendaraan bermotor melalui uji emisi berkala kendaraan bermotor

(c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, karena di Kota Padang Panjang tidak terdapat



Ekosistem Gambut maka yang diukur hanya Tutupan Lahan. Pengukuran IKTL dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara terhadap lokasi kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2024-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.115
Capaian Indikator Indeks Kualitas Tututan Lahan Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2025			2024	
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,51	71,81	103,31	61.70	88.84

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 meningkat 10,11 poin dar 61,70 pada tahun 2024 menjadi 71,81 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 103,31%.

Tabel 2.116
Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Tahun ke-2 RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	2025			TAHUN KE-2 RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,51	71,81	103,31	57,50	124,89

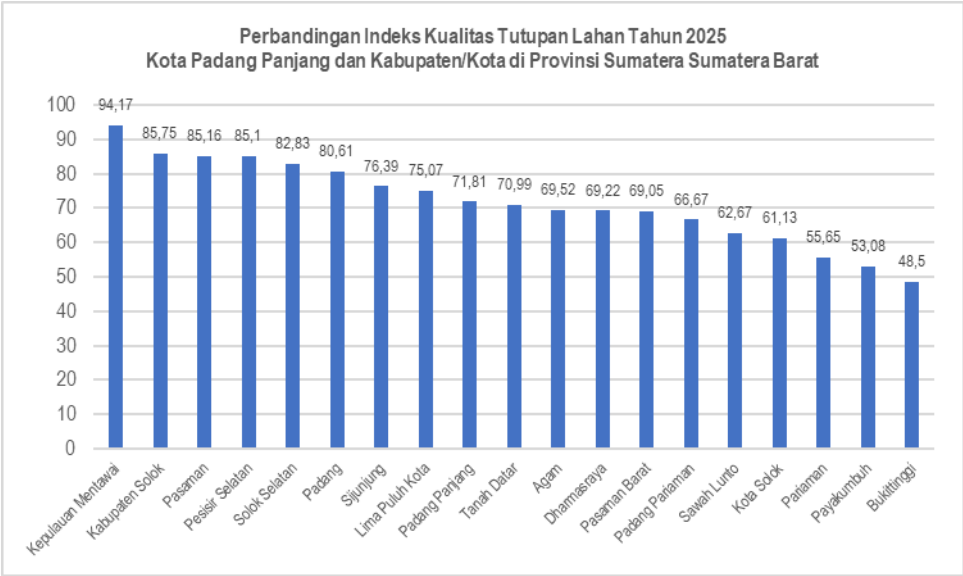
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah melebihi target akhir secara signifikan dengan capaian 123,81%.

Apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang menempati posisi ke-9 dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 71,81. Nilai ini berada diatas capaian Kabupaten Tanah Datar dengan nilai IKTL 70,99. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IKTL tertinggi di Sumatera Barat adalah Kabupaten Mentawai dengan nilai IKTL 94,17.



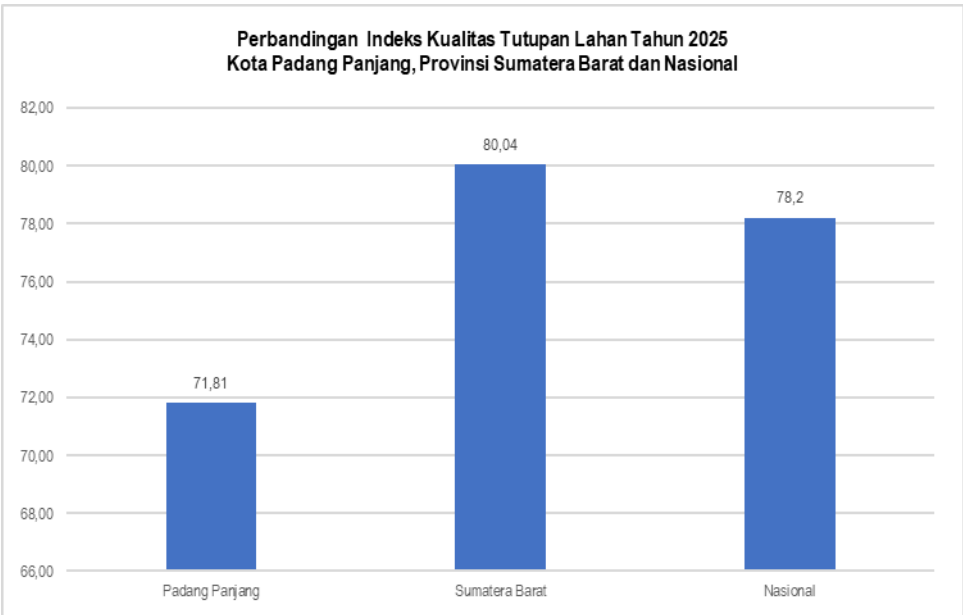
Grafik 2.33



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Jika dibandingkan dengan Realisasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang masih berada dibawah capaian IKTL Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80,04 dan lebih rendah 6,39 poin dibanding nilai IKTL Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.34



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Faktor-faktor penghambat pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2025 adalah:

1. Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah yang relatif kecil (23 km²) dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Dengan wilayah yang sempit, ruang untuk tutupan lahan hijau seperti hutan kota dan area resapan air menjadi lebih terbatas.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan kota menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman, industri, dan infrastruktur. Sebagai kota perdagangan dan persinggahan di jalur lintas Sumatera, sebagian besar wilayah telah menjadi kawasan terbangun (permukiman dan fasilitas umum).

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai IKTL ini antara lain adalah memberikan stimulasi gerakan penghijauan kepada masyarakat melalui:

1. Pemberian bantuan bibit pohon pelindung ke RT-RT yang ada di Kota Padang Panjang
2. Pemberian bantuan bibit pohon pelindung ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di Kota Padang Panjang
3. Gerakan menanam pohon bagi seluruh ASN

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Tutupan Lahan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 11.757.459.842.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.304.890.151,00 (79,10%)** untuk melaksanakan 13 program, yaitu:

1. Program Penatagunaan Tanah
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Penanggulangan Bencana
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)
10. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
12. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
13. Program Perencanaan Lingkungan Hidup



2. Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) tujuan dengan 20 (dua puluh) sasaran dan 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan RPD tahun 2024-2026, terjadi penambahan atau perubahan indikator kinerja sebanyak 34 indikator yang terdiri dari 3 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran.

Untuk mempermudah penelaahan, berikut digambarkan tabel perbandingan indikator kinerja antara RPD tahun 2024-2026 dengan RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 2.117
Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029

SEBELUM (RPD 2024-2026)					SESUDAH (RPJMD 2025-2029)				
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	
1			2		12			13	
T1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		1.	Indeks Pembangunan Manusia	T1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi		1.	Indeks Pembangunan Manusia (angka)
	S1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah		S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
			2.	Harapan Lama Sekolah				2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)
				-				3.	Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan (%)
				-				4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)
	S2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.	Umur Harapan Hidup		S2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5.	Usia Harapan Hidup (tahun)
			4.	Prevalensi Stunting					-
	S3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (angka)
			6.	Predikat Kota Layak Anak				7.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (angka)
				-				8.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (angka)
	S4.	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	7.	Status Kota Layak Pemuda		S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	9.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

				-				10.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)
			8.	Rasio Daya Saing Keolahragaan				11.	Rasio Daya Saing Keolahragaan (%)
T2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel		2	Indeks Reformasi Birokrasi	T3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani		2	Indeks Reformasi Birokrasi (angka)
	S5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9.	Nilai SAKIP		S11.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	12.	Nilai AKIP Kota (Angka)
			13.	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik				13.	Indeks Pelayanan Publik (Angka)
			14.	Indeks SPBE				14.	Indeks SPBE (Angka)
				-				15.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)
				-				16.	Indeks Reformasi Hukum (Angka)
				-				17.	Indeks Inovasi Daerah (angka)
			11.	Indeks Sistem Merit		S13.	Meningkatnya profesionalisme ASN	18.	Indeks Profesionalitas ASN (Angka)
			12.	Maturitas SPIP		S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan da set daerah	19.	Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) (Angka)
				-				20.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)
			10.	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)				21.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)
				-				22.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Angka)
				-		S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	23.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
				-				24.	Nilai Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)
T3.	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai dengan Penurunan Ketimpangan		3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	T2.	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat		3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
				-				4.	Tingkat Kemiskinan (%)
				-				5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
				-				6.	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)
			4	Indeks Gini					-
	S6.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	15.	LPE Sektor Perdagangan		S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	25.	Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran (%)
				-				26.	Rasio PDRB Industri Pengolahan
			16.	LPE Sektor Pertanian		S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	27.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
				-				28.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			17.	LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum		S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	29.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)
				-				30.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)
	S7.	Meningkatnya Investasi	18.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi		S7.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	31.	Nilai Investasi (Milyar rupiah)
				-				32.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)
	S8.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	19.	Tingkat Kemiskinan		S9.	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	33.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)
			20.	Tingkat Pengangguran Terbuka		S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	34.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)
				-				35.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
	S9.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	21.	Pengeluaran Perkapita			-		-
T4.	Terwujudnya Tatahidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis		5	Indeks Rasa Aman	T4.	Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya		8.	Indeks Rasa Aman (Angka)
	S10.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	22.	Persentase Pemajuan Kebudayaan		S17.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	36.	Persentase objek pemajuan objek kebudayaan (%)
			23.	Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan				37.	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan (%)
	S11.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.	Persentase penurunan pelanggaran perda (%)
				-				39.	Indeks Harmoni (indeks)
	S12.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	25.	Angka PPKS		S16.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	40.	Angka PPKS (Angka)
T5.	Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas		6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	T5.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tanggung bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan		9.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (angka)
			7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (angka)
	S13.	Terbangunnya Insfrastruktur layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	26.	IKLI KePUan		S18.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses infrastruktur serta hunian layak	41.	IKLI KePUan (angka)
			27.	IKLI Perkim				42.	IKLI Perkim (angka)
			28.	IKLI Perhubungan				43.	IKLI Perhubungan (angka)
				-				44.	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan (%)
	S14.	Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	29.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang					-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	S15.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	30.	Indeks Kualitas Air		S19.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	45.	Indeks Kualitas Air (angka)
			31.	Indeks Kualitas Udara				46.	Indeks Kualitas Udara (angka)
			32.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				47.	Indeks Kualitas Lahan (angka)
				-		S20.	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	48.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Angka)

Sumber: Data Bagian Organisasi (diolah)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa indikator kinerja yang muncul pada RPD tahun 2024-2026 juga menjadi indikator kinerja pada RPJMD tahun 2025-2029. Untuk efisiensi dan efektivitas pelaporan, pada subbab 2.3.2 ini, penjelasan capaian kinerja akan difokuskan pada 34 indikator yang tidak menjadi indikator pada RPD 2024-2026 yang terdiri dari 3 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran. Data 34 indikator tersebut ditandai dengan arsiran berwarna abu-abu pada tabel 2.117 di atas.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode RPJMD 2025-2029 dijabarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2.118
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH					
MISI I					
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi					
T1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi		1.	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	81,5
	S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,16
			2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,67
			3.	Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan (%)	100,00
			4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)	97,88
	S2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5.	Usia Harapan Hidup (tahun)	76,17
	S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	1,24
			7.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	0,96
			8.	Rasio Daya Saing Keolahragaan (%)	29,76
	S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	9.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (angka)	70



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			10.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (angka)	66,56
			11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (angka)	98,25
MISI 2					
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal					
T2.	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat		2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15
			3.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,71
			4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,43
			5.	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	88,50
	S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	12.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	9,54
			13.	Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran (%)	18,35
	S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	14.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,94
			15.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,38
	S7.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	16.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	30,19
			17.	Nilai Investasi (Milyar rupiah)	44,75
	S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	18.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137,78
			19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) (%)	69,20
	S9.	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	20.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	2,714
	S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	21.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,20
			22.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	5,31
MISI 3					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif					
T3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani		6.	Indeks Reformasi Birokrasi (angka)	79,72
	S11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	23.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)	3,38
			24.	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,20
			25.	Indeks Reformasi Hukum (Angka)	96,82
			26.	Nilai AKIP Kota (Angka)	65,00
			27.	Indeks SPBE (Angka)	3,16



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			28.	Indeks Inovasi Daerah (angka)	82,22 (Sangat Inovatif)
	S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan da set daerah	29.	Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) (Angka)	78,5
			30.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)	73,00
			31.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)	68,40
			32.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Angka)	2,00
	S13.	Meningkatnya profesionalisme ASN	33.	Indeks Profesionalitas ASN (Angka)	86,4
	S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	34.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,29
			35.	Nilai Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)	112,742
MISI 4 Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
T4.	Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya		7.	Indeks Rasa Aman (Angka)	61,57 (Aman)
	S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.	Persentase penurunan pelanggaran perda (%)	2,50
			37.	Indeks Harmoni (indeks)	70,00
	S16.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	38.	Angka PPKS (Angka)	3,34
	S17.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	39.	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan (%)	85,00
			40.	Persentase objek pemajuan objek kebudayaan (%)	66.60
MISI 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan					
T5.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tanggung bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan		8.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (angka)	95,60
			9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (angka)	74,34
	S18.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses infrastruktur serta hunian layak	41.	IKLI KePUan (angka)	96,81
			42.	IKLI Perkim (angka)	96,92
			43.	IKLI Perhubungan (angka)	96,83
			44.	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,63
	S19.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	45.	Indeks Kualitas Air (angka)	72,47
			46.	Indeks Kualitas Udara (angka)	78,68
			47.	Indeks Kualitas Lahan (angka)	69,51



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	S20.	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	48.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Angka)	0,32
--	------	---	-----	---------------------------------------	------

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tabel 2.118 di atas menampilkan 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja Kota Padang Panjang tahun 2025 dengan target kinerja yang ditampilkan adalah target kinerja perubahan tahun 2025. Terdapat beberapa target kinerja yang mengalami perubahan jika dibandingkan dengan target awal tahun berdasarkan RPD 2024-2026. Alasan yang mendasari adanya penyesuaian target indikator kinerja tersebut sudah dijelaskan pada bagian 2.3.1 poin a di atas.

b. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Kota Padang Panjang berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 ditampilkan melalui beberapa aspek pembanding diantaranya:

- 1. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- 2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya (jika ada) bagi 34 indikator kinerja; dan
- 3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 atas beberapa aspek pembanding dijelaskan sebagai berikut:

a) Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi

- 1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat

a. Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan

Pemenuhan SPM urusan pendidikan merupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat capaian pemerintah daerah dalam memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan minimal yang wajib diperoleh setiap warga negara sesuai standar nasional. Bentuk capaian kinerja dari inidkator ini adalah rasio perbandingan antara jumlah target SPM Pendidikan yang *berhasil dipenuhi* dengan total jumlah target SPM Pendidikan yang *harus dipenuhi* pada tahun 2025. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:



Tabel 2.119
Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	3.	Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan (%)	100	100	100

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Tabel 2.119 menampilkan capaian pemenuhan SPM urusan pendidikan tahunn 2025 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pencapaian di tahun 2024 juga menunjukkan hasil sama yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.120
Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	3.	Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan (%)	100	100	100

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Hal yang sama juga dapat dilihat pada tabel 2.121 di bawah ini. Jika dilihat dari rencana jangka menengah tahun 2025-2030, Kota Padang Panjang menargetkan pencapaian 100% sampai dengan tahun 2030. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat daerah dalam menjaga konsistensi pemenuhan SPM urusan pendidikan di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.121
Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	3.	Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan (%)	100	100	100,00

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Untuk menjaga konsistensi pencapaian indikator kinerja tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan arah kebijakan diantaranya:



- 1)Peningkatan kualitas pembelajaran dan daya saing pendidikan;
- 2)Peningkatan layanan PAUD dan PNF/pendidikan masyarakat;
- 3)Peningkatan daya saing pendidikan menuju padang panjang juara;
- 4)Pemenuhan dan peningkatan kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan;
- 5)Optimalisasi infrastruktur pendidikan;
- 6)Peningkatan standarisasi dan kualitas infrastruktur pendidikan;
- 7)Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat;
- 8)Pelestarian adat dan budaya; dan
- 9)Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah indikator yang disusun oleh Perpustakaan Nasional RI dan BPS untuk mengukur tingkat usaha pemerintah daerah dalam membina perpustakaan serta keterlibatan masyarakat dalam budaya literasi. IPLM menilai tujuh unsur, termasuk sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga, kunjungan, dan jumlah anggota. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.122
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)	97,88	32,47	33,17

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Tabel 2.123
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)	97,88	32,47	96,78

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Berdasarkan tabel 2.123 di atas, capaian indikator IPLM tahun 2025 tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan



nilai IPLM yang sangat signifikan karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan perubahan rumus dan instrumen pengukuran IPLM yang disesuaikan dengan kewenangan pada pemerintah daerah. Adapun pokok perubahan tersebut meliputi:

- 1)Penyesuaian metodologi pengukuran IPLM yang disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah;
- 2)Integrasi indikator baru yang merefleksikan perkembangan ketersediaan anggaran, kolaborasi/kerjasama dengan mitra, dokumen kebijakan, dan perilaku literasi masyarakat;
- 3)Penyesuaian dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPLM;
- 4)Penyelarasan bobot dimensi dalam penghitungan IPLM antara kepatuhan dan kinerja guna memastikan akurasi, reliabilitas, serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional; dan
- 5)Penyelarasan bobot dimensi dalam penghitungan TKM antara pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca guna memastikan akurasi, reliabilitas, serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional.

Tabel 2.124
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)	97,88	32,37	98,50

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada akhir RPJMD tahun 2030, indeks pembangunan literasi masyarakat ditargetkan sebesar 98,5%. Karena terjadinya perubahan rumus dan instrumen dalam penilaian IPLM, maka perlu dilakukan penyesuaian IPLM pada target RPJMD 2025-2029.

Namun demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan IPLM diantaranya:

- 1)Meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan Kota Padang Panjang;
- 2)Menjalankan program layanan perpustakaan keliling dan lapak baca yang bekerjasama dengan Forum Pegiat Literasi Kota Padang Panjang.



2. Sasaran 3: Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan

a. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri merupakan persentase penduduk usia 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, atau dibantu buruh tetap. Indikator ini diukur dalam satuan persen untuk menunjukkan tingkat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi pemuda di Kota Padang Panjang. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.125
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	1,24	1,216	98,06

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Persentase ketercapaian indikator di tahun 2025 sebesar 98,06%. Meskipun pencapaian indikator kinerja sudah mendekati target, namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

- 1)Keterbatasan akses permodalan sebagian pemuda mengalami kesulitan memperoleh modal usaha, baik dari lembaga keuangan formal maupun program bantuan pemerintah, sehingga rencana memulai usaha tertunda;
- 2)Kurangnya literasi dan keterampilan kewirausahaan tidak semua calon wirausaha memiliki pengetahuan manajemen usaha, pemasaran digital, maupun pengelolaan keuangan yang memadai, sehingga belum siap menjalankan usaha secara mandiri;
- 3)Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat situasi ekonomi yang belum stabil dapat memengaruhi minat pemuda untuk memulai usaha karena kekhawatiran terhadap risiko kerugian dan rendahnya permintaan pasar; dan
- 4)Kendala administratif dan legalitas usaha proses perizinan atau persyaratan administrasi lainnya dapat menjadi hambatan bagi pemuda untuk segera merealisasikan usahanya.



Namun demikian, untuk mengatasi kendala tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya antara lain:

- 1)Meningkatkan pelatihan kewirausahaan pemuda berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif; dan
- 2)Mendorong peningkatan kualitas layanan usaha akomodasi dan kuliner.

Tabel 2.126
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	1,24	1,216	0,89

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2024, capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 0,89%. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 36,62%.

Tabel 2.127
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	1,24	1,216	2,75

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2030, indikator kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri ditargetkan sebesar 2,75%. Target ini mengalami peningkatan sebesar 1,51% dari tahun 2025. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan salah satu upaya yang akan dilaksanakan di tahun 2026 adalah pelatihan dasar kepemudaan dan kewirausahaan.

- b. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan persentase jumlah pemuda yang aktif terlibat,



baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan program, untuk mengembangkan potensi diri dan kontribusi sosial. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.128
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	7.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	0,96	0,677	70,52

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Dari tabel 2.128 di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan tahun 2025 sebesar 0,677% atau dengan persentase capaian sebesar 70,52%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.129, realisasi capaian di tahun 2024 sebesar 0,96%. Terjadi penurunan realisasi di tahun 2025 sebesar 0,283%.

Tabel 2.129
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	7.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	0,96	0,677	0,96

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Penurunan capaian indikator kinerja di atas dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat keanggotaan formal serta terbatasnya kegiatan organisasi yang menarik bagi generasi muda. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Meningkatkan pembinaan dan penguatan kapasitas organisasi kepemudaan;
- 2)Memfasilitasi forum komunikasi dan kolaborasi antar organisasi kepemudaan; dan
- 3)Memberikan dukungan fasilitasi kegiatan kepemudaan dalam bentuk organisasi dan forum diskusi.



Tabel 2.130
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S3.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	7.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	0,96	0,677	1,41

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Kota Padang Panjang menargetkan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat sebesar 1,41% di tahun 2030. Target ini ditetapkan sebagai langkah konkret Kota Padang Panjang untuk mencapai SDM yang tangguh dan produktif.

3. Sasaran 4: Meningkatkan pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

a. Indeks Perlindungan Anak (IPA) (angka)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus. Untuk tahun 2025, Nilai IPA Kota Padang Panjang secara resmi belum dirilis oleh Kementerian PPPA RI sehingga pada tabel 2.131 di bawah dibuatkan keterangan N/A.

Tabel 2.131
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	9.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (angka)	70	N/A	*nilai belum dirilis

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Untuk meningkatkan indeks perlindungan anak, Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan beberapa upaya diantaranya:

- 1)Penguatan ketahanan keluarga melaui kegiatan Sekolah Keluarga yang bekerjasama dengan TP-PKK dalam mengedukasi ibu-ibu dalam mempelajari pola asuh positif dalam mendidik anak, komunikasi keluarga memajemen keuangan keluarga serta pengendalian emosi;
- 2)Pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak melaui pendekatan preventif ke sekolah-sekolah serta *screening* kesehatan mental anak di sekolah melalui Relawan SAPA yang sudah terbentuk di 16 Kelurahan;
- 3)Deteksi dini potensi masalah psikologis dan sosial anak dan melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai fokrum di kelurahan;
- 4)Penguatan layanan perlindungan anak (responsif & terintegrasi) melalui penyediaan layanan cepat bagi korban dengan mengoptimlkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berupa layanan pengaduan, pendampingan hukum, layanan psikologis, layanan pendampiangn ke fasilitas kesehatan, layanan spesifik korban.serta layanan rumah perlindungan; dan
- 5)Penguatan kapasitas kelembagaan & koordinasi lintas sektor melalui kegiatan rapat Koordinasi OPD dan lintas sektor serta stakeholder serta peningkatan kapasitas SDM Tim Penganan Kasus.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel 2.132 di bawah ini, Indeks Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 66,6. Pada tahun 2030 yang merupakan tahun akhir RPJMD, IPA ditargetkan sebesar 75.

Tabel 2.132
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	9.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (angka)	70	N/A	66.6

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Adapun arah kebijakan yang disusun untuk mencapai target tersebut di tahun 2030 adalah sebagai berikut:



- 1)Penguatan regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- 2)Fasilitasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.133
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	9.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (angka)	70	NA	75.00

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

b. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menilai kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi utama: Ketentraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan. iBangga menjadi indikator keberhasilan program pembangunan keluarga, berkorelasi dengan IPM, dan mengklasifikasikan keluarga menjadi kategori Tangguh, Berkembang, atau Rentan. Untuk tahun 2025, nilai iBangga Kota Padang Panjang secara resmi belum dirilis oleh BKKBN sehingga pada tabel 2.134 di bawah dibuatkan keterangan N/A.

Tabel 2.134
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	10.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (angka)	66.56	N/A	*nilai belum dirilis

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Tabel 2.135
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	10.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (angka)	66.56	N/A	66.46

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indeks pembangunan keluarga (iBangga) Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 66,46. Pada tahun 2030 yang merupakan tahun akhir RPJMD, iBangga ditargetkan sebesar 67,06.

Tabel 2.136
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI I						
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi						
S4.	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	10.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (angka)	66,56	NA	67,06

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Adapun arah kebijakan yang disusun untuk mencapai target tersebut di tahun 2030 adalah sebagai berikut:

- 3)Pelaksanaan konseling keluarga;
- 4)Peningkatan pengetahuan orang tua terhadap cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- 5)Peningkatan insfrastruktur pelayanan keluarga; dan
- 6)Peningkatan insfrastruktur layanan perlindungan perempuan dan anak.

b) Tujuan 2: Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat

1. Indikator tujuan 2: Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan Kota Padang Panjang yang terdiri dari 3 (tiga) aspen yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:



Tabel 2.137
Indeks Ketahanan Pangan Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
T2.	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat	5.	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	88,5	81,46	92,05

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2025, IKP Kota Padang Panjang adalah 81,46 dari target 88,50 dengan capaian 92,05. Meskipun belum mencapai target, IKP Kota Padang Panjang berada di atas IKP Provinsi dan IKP Nasional dimana IKP Provinsi sebesar 77,72 dan nasional sebesar 73,00.

Tabel 2.138
Indeks Ketahanan Pangan Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
T2.	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya	5.	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	88,5	81,46	87,02

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 87,02. Terjadi penurunan capaian pada tahun 2025 sebesar 5,56 poin. %. Namun demikian, nilai IKP tahun 2025 ini termasuk pada prioritas komposit 6 yang berarti merupakan daerah yang sangat tahan pangan.

Meskipun sudah dikategorikan sebagai daerah yang sangat tahan pangan, Kota Padang Panjang menghadapi beberapa kendala dalam pencapaian target diantaranya:

- 1)PoU yang tinggi, terbatasnya daya beli masyarakat dan harga pangan yang fluktuatif;
- 2)Keamanan pangan, pola konsumsi pangan yang belum beragam, prevalensi balita stunting dan akses air bersih; dan
- 3)Sinergi lintas sektor dan koordinasi pusat-daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem pangan yang resilien dan berkelanjutan.



Tabel 2.139
Indeks Ketahanan Pangan Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
T2.	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat	5.	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	88,5	81,46	94,28

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026

Jika dilihat dari perencanaan jangka menengah, target IKP Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 94,28 pada akhir tahun 2030 Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan regulasi ketahanan pangan, dukungan anggaran yang berkelanjutan, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi dan program inovatif untuk mencegah kerawanan pangan.

2. Sasaran 5: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah kontribusi (persentase) nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.140
Rasio PDRB Industri Pengolahan Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	12.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	9,54	8,98	94,13

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa industri pengolahan di Kota Padang Panjang berkontribusi sebesar 8,98% terhadap total PDRB tahun 2025 atau dengan persentase capaian sebesar 94,13%. Meskipun target pada perjanjian kinerja belum tercapai, namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, rasio industri pengolahan terhadap PDRB di tahun 2025 mengalami peningkatan



sebesar 0,68%. Peningkatan ini secara konstan terlaksana sejak 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.141
Rasio PDRB Industri Pengolahan Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	12.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	9.54	8,98	8,3

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika mempedomani perencanaan jangka menengah, target rasio industri pengolahan terhadap PDRB Kota Padang Panjang di tahun 2030 ditargetkan sebesar 14,51%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang mengagendakan beberapa strategi diantaranya:

- 1)Pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
- 2)Fasilitasi izin dan pelatihan tenaga industri; dan
- 3)Ekspansi pasar dan digitalisasi UKM;

Tabel 2.142
Rasio PDRB Industri Pengolahan Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	12.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	9.54	8,98	14,51

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026

b. Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran (%)

Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran adalah salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kontribusi atau porsi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:



Tabel 2.143
Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	13.	Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran (%)	18,35	18,24	99,40

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa perdagangan besar, kecil dan eceran di Kota Padang Panjang berkontribusi sebesar 18,24% terhadap total PDRB tahun 2025 atau dengan persentase capaian sebesar 99,40%. Capaian ini hampir target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh kondisi geografis Kota Padang Panjang yang menjadi kota transit atau sebagai kota penghubung antar kota besar di Sumatera Barat namun juga dipengaruhi oleh kondisi bencana alam galodo dalam 2 tahun terakhir yang mempengaruhi akses ke kota besar tujuan seperti Kota Padang dan Bukittinggi.

Tabel 2.144
Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	13.	Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran (%)	18,35	18,42	18,28

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tabel 2.144 di atas dapat dilihat bahwa rasio perdagangan besar, kecil dan eceran terhadap PDRB Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah sebesar 18,28. Terjadi penurunan realisasi sebesar 0,04% pada tahun 2025. Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tahun 2026, secara kuantitas perdagangan besar, kecil dan eceran Kota Padang Panjang selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021 meskipun secara persentase kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan.

Pada tahun akhir RPJMD, rasio perdagangan besar, kecil dan eceran terhadap PDRB Kota Padang Panjang pada tahun 2030 ditargetkan sebesar 18,73%. Pemerintah Kota Padang Panjang akan mengupayakan peningkatan sebesar 0,49% dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.



Tabel 2.145
Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	13.	Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran (%)	18,35	18,24	18,73

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026

Adapun upaya yang sudah dirancang untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Pelatihan usaha dagang dan penguatan manajemen;
 - 2)Revitalisasi pasar dan promosi produk local
 - 3)Digitalisasi perdagangan dan sistem transaksi; dan
 - 4)Integrasi produk lokal ke pasar regional.
4. Sasaran 6: Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah
- a. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum merupakan indikator kontribusi sektor pariwisata/jasa terhadap total PDRB Kota Padang Panjang. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.146
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	14.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,94	2,92	99,32

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026, diolah

Capaian indikator rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah sebesar 2,92% dengan persentase ketercapaian sebesar 99,32%. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Kota Padang Panjang dalam pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Posisi Kota Padang Panjang sebagai kota transit. Padang Panjang lebih sering berfungsi sebagai kota perlintasan antar-daerah wisata utama seperti Bukittinggi dan Padang daripada tujuan inap utama. Hal ini



menyebabkan durasi menginap (*length of stay*) wisatawan rendah, sehingga rasio penggunaan akomodasi tidak maksimal; dan

- 2) Bencana galodo yang terjadi di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 dan 2025 yang menyebabkan sangat terbatasnya akses ke Kota Padang Panjang.

Tabel 2.147
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	14.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,94	2,92	2,89

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026, diolah

Jika dilihat berdasarkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 2,89, capaian indikator rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Padang Panjang pada tahun 2025 mengalami peningkatan capaian sebesar 0,3%.

Tabel 2.148
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	14.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,94	2,92	3,23

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026, diolah

Pada tahun 2030, rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Padang Panjang pada akhir RPJMD ditargetkan sebesar 0,31%. Target ini dapat dicapai melalui beberapa upaya diantaranya:

- 1) Penyiapan SDM dan infrastruktur pariwisata dasar;

2) Promosi berbasis media sosial dan komunitas;

3) Melakukan event pariwisata unggulan tahunan; dan

4) Kerjasama promosi dengan daerah dan nasional.
- b. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)
- Rasio PDRB ekonomi kreatif mengukur kontribusi sektor kreatif terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang.



Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.149
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja
Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	15.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,38	5,39	100,19

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026, diolah

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi rasio PDRB ekonomi kreatif Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah sebesar 5,39% dengan persentase ketercapaian 100,19%. Jika dilihat berdasarkan realisasi pada tahun 2024, sektor ekonomi kreatif Kota Padang Panjang berkontribusi terhadap PDRB 5,1% yang artinya realisasi ekonomi kretaif di tahun 2025 sudah melebihi pencapaian pada tahun 2024 yang lalu.

Tabel 2.150
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Dibandingkan dengan Realisasi Tahun
Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	15.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,38	5,39	5,1

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2030, rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Padang Panjang pada akhir RPJMD ditargetkan sebesar 6,26%. Target ini dapat dicapai melalui beberapa strategi diantaranya:

- 1) Pelatihan dan inkubasi usaha kreatif pemula;
- 2) Pembentukan klaster ekonomi kreatif;
- 3) Fasilitasi akses pasar dan prmosi produk kreatif; dan
- 4) Kolaborasi antar pelaku dan sektor penndukung.



Tabel 2.151
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	15.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,38	5,39	6,26

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

5. Sasaran 7: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.152
Pembentukan Modal Tetap Bruto Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S7.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	16.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	30,19	*belum rilis	-

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan dokumen Kota Padang Panjang dalam Angka 2026 yang dipublish oleh BPS Kota Padang Panjang, pembentukan modal tetap bruto Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 belum dirilis. Namun demikian, sebagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1)Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota;
dan
- 2)Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.



Tabel 2.153
Pembentukan Modal Tetap Bruto Dibandingkan dengan Realisasi Tahun
Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S7.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	16.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	30,19	*belum rilis	29,55

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dilihat pencapaian pada tahun sebelumnya, berdasarkan data yang disajikan oleh BPS, pembentukan modal tetap bruto Kota Padnag Panjang selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021 yang lalu.

Tabel 2.154
Pembentukan Modal Tetap Bruto Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD
Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S7.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	16.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	30,19	*belum rilis	30,94

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tahun 2030, pembentukan modal tetap bruto Kota Padang Panjang pada akhir RPJMD ditargetkan sebesar 30,94%. Pemerintah Kota Padang Panjang perlu mengupayakan peningkatan sebesar 1,39% dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

b. Nilai Investasi (Milyar rupiah)

Nilai investasi adalah besarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Pada tahun 2025, nilai investasi Kota Padang Panjang adalah sebesar 48,8 miliar. Capaian ini sudah melampaui target kinerja yang sudah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 112,28%.



Tabel 2.155
Nilai Investasi Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
SI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH					
MISI 2					
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal					
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	17	Nilai Investasi (Milyar rupiah)	44,75	49,8	111,28

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Adapun strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik;
- 2)Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- 3)Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Tabel 2.156
Nilai Investasi Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH							
MISI 2							
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal							
	S7.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	17	Nilai Investasi (Milyar rupiah)	44,75	49,8	37,9

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2024 yang lalu, nilai investasi Kota Padnag Panjang teralisasi sebesar 37,9 miliar. Terjadi peningkatan sebesar 11,9 miliar pada tahun 2025. Selain strategi di atas, Pemerintah Kota Padang Panjang juga membuat regulasi dan meningkatkan implementasinya sehingga mampu meningkatkan investasi diantaranya:

- 1)Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
- 2)Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang



Tabel 2.157
Nilai Investasi Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S7.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	17	Nilai Investasi (Milyar rupiah)	44,75	49,8	68,40

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Jika dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka menengah, pada tahun 2030 mendatang nilai investasi Kota Padang Panjang ditargetkan mencapai nilai 68,40 miliar. Adapun arah kebijakan untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Meningkatkan tata kelola penanaman modal dan perizian;
- 2)Meningkatkan fasilitasi dan promosi penanaman modal; dan
- 3)Melakukan pengkajian terhadap potensi investasi yang sesuai dengan potensi daerah.

6. Sasaran 8: Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah ukuran efisiensi yang menunjukkan rasio antara output (hasil produksi barang/jasa) dan input (jumlah tenaga kerja atau jam kerja) di Kota Padang Panjang tahun 2025. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.158
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	18	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137,78	160,39	116,41

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2025, tingkat produktivitas tenaga kerja di Kota Padang Panjang sebesar 160,39 juta/tenaga kerja. Capaian ini melebihi dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan persentase ketercapaian sebesar 116,41%.



Tabel 2.159
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	18	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137,78	160,39	108,5

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang lalu sebesar 108,5 juta/tenaga kerja, capaian produktivitas tenaga kerja Kota Padagg Panjang mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2025. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Pengembangan SDM dan Reformasi Ketenagakerjaan dengan kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Program Penempatan Kerja; dan
- 2)Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi dengan menerapkan kebijakan fasilitasi akses pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi.

Tabel 2.160
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	18	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137,78	160,39	152,78

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tahun 2030, tingkat produktivitas tenaga kerja ditargetkan sebesar 152,78 juta/tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 dan 2025, target pada tahun 2030 ini diproyeksikan dapat tercapai sebelum periode RPJMD berakhir.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) (%)



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja (penduduk yang bekerja atau mencari kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.161
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) (%)	69,2	69,2	100

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Padang Panjang sebesar 69,2%. Capaian ini memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan persentase ketercapaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pad atahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ketercapaian indikator kinerja ini merupakan hasil dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- 1)Pengembangan kerjasama penempatan tenaga kerja dengaan fasilitasi pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- 2)Peningkatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK);
- 3)Meningkatkan jejaring penyedia lapangan kerja (*Job Fair/Walk In Interview*); dan
- 4)Fasilitasi pelaksanaan program magang bagi pencari kerja.

Tabel 2.162
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) (%)	69,2	69,2	66,33

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Tabel 2.163
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) Dibandingkan dengan Target Akhir
RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S8.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) (%)	69,2	69,2	70,20

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Jika dibandingkan dengan RPJMD, pada tahun 2030 tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 70,20%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 dan 2025, target pada tahun 2030 ini diproyeksikan dapat tercapai sebelum periode RPJMD berakhir.

7. Sasaran 9: Menurunnya tingkat kemiskinan daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)

Jumlah penduduk miskin Kota Padang Panjang tahun 2025 jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2025 dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.164
Jumlah Penduduk Miskin Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan
2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S9.	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	20.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	2,714	2,9	93,15

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Kota Padang Panjang tahun 2025 sebanyak 2.900 jiwa atau sebesar 4,5% dari total penduduk Kota Padang Panjang.

Tabel 2.165
Jumlah Penduduk Miskin Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH							
MISI 2							
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal							
S9.	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	20.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)		2,714	2,9	3.060

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2024 yang lalu, jumlah penduduk miskin Kota Padang Panjang mengalami penurunan sebanyak 160 jiwa yang artinya 160 orang penduduk Kota Padang Panjang sudah berada di atas garis kemiskinan.

Tabel 2.166
Jumlah Penduduk Miskin Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S9.	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	20.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	2,714	2,9	980

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tahun akhir periode RPJMD, jumlah penduduk miskin ditargetkan hanya sebanyak 980 jiwa pada tahun 2030. Kendala yang dihadapi dalam penurunan tingkat kemiskinan serta upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan dijelaskan pada subbab 2.3.1 di atas.

8. Sasaran 10: Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan

a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah kontribusi nilai tambah sektor tersebut terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Padang Panjang yang mencakup kegiatan usaha primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.167
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	21.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,2	5,08	97,69

Sumber: Kota Padang Panjang dalam angka 2026, diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 5,08% terhadap total PDRB Kota Padang Panjang tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 97,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 4,99% terhadap PDRB Kota Padnag Panjang tahun 2024.



Tabel 2.168
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	21.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,2	5,08	4,99

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dilihat dari data yang dirilis oleh BPS Kota Padang Panjang, secara kuantitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Padang Panjang selalu menunjukkan trend positif dengan nilai 186,94 milyar pada tahun 2021, 209,9 milyar pada tahun 2022, 227,85 milyar pada tahun 2023 dan 239,11 milyar pada tahun 2024.

Tabel 2.169
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	21.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,2	5,08	5,50

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Padang Panjang ditergetkat dapat berkontribusi terhadap PDRB sebesar 5,50 dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1)Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan pelaku usaha perikanan;

2)Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan dan subsidi bagi petani;

3)Kerja sama wilayah pengembangan peternakan;

4)Pengembangan pertanian perkotaan;

5)Pengembangan produk pertanian unggulan daerah;

6)Peningkatan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk pangan diversifikasi; dan

7)Penataan dan pembangunan infrastruktur pertanian.
- b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)



Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah proporsi penduduk di Kota Padang Panjang yang mengonsumsi energi pangan lebih rendah dari standar kebutuhan minimum (MDER) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.170
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	22.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	5,31	8,72	35,78

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 8,72% dengan persentase ketercapaian kinerja sebesar 35,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, capaian di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 2.171
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	22.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	5,31	8,72	5,33

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Adapun faktor penghambat pencapaian indikator kinerja Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah:

- 1)Tidak stabilnya harga pangan strategis yang berpengaruh besar terhadap masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, seperti beras, telur daan minyak goreng.
- 2)Tingginya tingkat inflasi yang menyebabkan tinggi harga bahan pangan menyebabkan rendahnya daya beli dan akses pangan masyarakat.

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang sudah melakukan upaya berupa pelaksanaan GPM (Gerakan Pasar



Murah) yaitu menjual komoditi pangan untuk masyarakat Kota Padang Panjang dengan harga murah atau di bawah harga pasar.

Tabel 2.172
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 2						
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal						
S10.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	22.	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)	5,31	8,72	5,20

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tahun 2030 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kota Padang Panjang ditergetkat sebesar 5,20%. Jika mengacu pada capaian tahun 2024 yang lalu, target ini sangat mungkin untuk dicapai pada tahun 2030 namun jika dilihat pada capaian tahun 2025, angka 5,20% pada tahun 2030 akan menjadi tantangan yang cukup signifikan untuk 4 (empat) tahun mendatang. Namun demikian, target di tahun 2030 ini sudah disertai dengan beberapa rancangan tindakan seperti penerapan pola konsumsi beragam bergizi, seimbang dan aman dan pengawasan harga pasar dan intervensi tepat waktu.

c) Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani

1. Sasaran 11 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif

a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil penilaian Pemerintah Pusat terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang. Nilai LPPD tahun 2025 Kota Padang Panjang akan dirilis pada tahun 2026 dan saat ini masih menunggu penetapan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.



Tabel 2.173
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	23.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)	3.38	NA	*nilai belum dirilis

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Tabel 2.174
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	23.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)	3.38	NA	3,14

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2024, nilai LPPD Kota Padang Panjang adalah 3,14. Capaian ini dikategorikan sebagai kategori sedang. Pad atahun 2030, nilai LPPD Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 3,41 dengan kategori nilai tinggi.

Tabel 2.175
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	23.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)	3.38	NA	3,41

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Untuk mencapai target nlai 3,41 pada tahun akhir RPJMD, Pemerintah Kota Padnag Panjang menyusun strategi “Meningkatkan transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan arah kebijakan berupa:



- 1)Penguatan sistem informasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik; dan
 - 2)Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan peanganan pengaduan.
- b. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padnag Panjang kepada masyarakat. Indeks ini dinilai setiap tahunnya oleh Kementerian PAN dan RB. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.176
Indeks Pelayanan Publik Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	24.	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,2	4,47	106,43

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator indeks kualitas pelayanan publik Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah 4,47 dengan kategori A. Capaian ini melebihi dari target yang sudah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 106,43%. Jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, nilai pelayanan publik Kota Padang Panjang berada pada posisi 1 tertinggi untuk level kota dan posisi 2 untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Tabel 2.177
Indeks Pelayanan Publik Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	24.	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,2	4,47	4,17

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Pada tahun 2024, Kota Padang Panjang memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,17 dengan kategori nilai A-. Pada tahun 2025 Kota Padang Panjang mampu mencapai kategori yang lebih tinggi dengan peningkatan nilai sebesar 0,30. Capaian ini dapat diperoleh melalui pendampingan yang intensif serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap unit layanan di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.178
Indeks Pelayanan Publik Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	24.	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,2	4,47	4,30

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tahun 2030, nilai pelayanan publik Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 4,30 dengan kategori nilai A. Namun nilai ini sudah terlampaui pada capaian tahun 2025. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyusunan strategi pembangunan berupa “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dengan arah kebijakan berupa:

- 1)Pengembangan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi/digital;
 - 2)Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik;
 - 3)Penguatan regulasi pelayanan publik; dan
 - 4)Peningkatan infrastruktur pelayanan publik.
- c. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen pengukuran keberhasilan reformasi hukum Kota Padang Panjang yang diberikan oleh Kementerian Hukum yang berfokus pada evaluasi, penyederhanaan, dan harmonisasi regulasi agar tidak tumpang tindih. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:



Tabel 2.179
Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	25.	Indeks Reformasi Hukum (Angka)	96,82	98,76	102

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Tabel di atas menampilkan capaian indikator Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebesar 98,76 dengan kategori AA atau istimewa dengan persentase capaian sebesar 102%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, reformasi hukum Kota Padang Panjang memperoleh nilai 96,66 yang juga dikategorikan dengan nilai istimewa. Hal ini dapat dicapai karena kedisiplinan Kota Padang Panjang dalam melaporkan data dan bukti dukung yang dipersyaratkan serta sebagian besar indikator yang dijadikan penilaian sudah terpenuhi.

Tabel 2.180
Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan
Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	25.	Indeks Reformasi Hukum (Angka)	96,82	98,76	96,66

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Dari sudut pandang perencanaan jangka menengah, nilai reformasi hukum Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 98,90. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang, Pemerintah Kota Padang Panjang akan mengupayakan peningkatan nilai sebesar 0,14. Jika dilihat dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, capaian ini diproyeksikan dapat tercapai dalam waktu 2 tahun kedepan.



Tabel 2.181
Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Target Akhir
RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	25.	Indeks Reformasi Hukum (Angka)	96,82	98,76	98,90

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

d. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah mekanisme pengukuran dan penilaian komprehensif oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.182
Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	28.	Indeks Inovasi Daerah (angka)	82,22 (Sangat Inovatif)	87,94 (Sangat inovatif)	106,96

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indeks inovasi daerah Kota Padnag Panjang tahun 2025 adalah 87,94 dengan kategori sangat inovatif. Persentase ketercapaian indikator indeks inovasi daerah ini adalah sebesar 106,96%.

Tabel 2.183
Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH							
MISI 3							
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif							
	S16	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	28.	Indeks Inovasi Daerah (angka)	82,22 (Sangat Inovatif)	87,94 (Sangat Inovatif)	81,35 (Sangat Inovatif)

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Jika dilihat pencapaian tahun sebelumnya, IDD Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah 81,35 dengan kategori sangat inovatif. Terjadi peningkatan skor IDD pada tahun 2025 sebesar 6,59. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut adalah:

- 1)Peranan tim pendamping inovasi daerah dalam memastikan akurasi data dukung inovasi daerah;
- 2)Pemberian reward bagi OPD terinovatif; dan
- 3)Dukungan unsur pimpinan terhadap pelaporan IID.

Tabel 2.184
Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Target Akhir
RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH							
MISI 3							
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif							
	S16	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	28.	Indeks Inovasi Daerah (angka)	82,22 (Sangat Inovatif)	87,94 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat Inovatif)

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2030, nilai IDD Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 89,34 dengan kategori sangat inovatif. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Kota Padang Panjang mengupayakan strategi peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintah dengan fokus kepada layanan digital.

- 2. Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Pengawasan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK)

Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) inisiatif tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur dan memetakan tingkat integritas serta risiko korupsi di Kota Padang Panjang. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:



Tabel 2.185
Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) Kota Padang Panjang
Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	29.	Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) (Angka)	78,5	76,5	97,45

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh indeks integritas dari KPK sebesar 76,5 dengan persentase ketercapaian sebesar 97,45. Namun demikian, nilai ini jauh melebihi capaian indeks integritas nasional yaitu sebesar 72,32.

Tabel 2.186
Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) Kota Padang Panjang
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	29.	Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) (Angka)	78,5	76,5	78,03

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dilihat capaian pada tahun sebelumnya, indeks integritas Kota Padnag Panjang pada tahun 2024 adalah 78,03. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025 sebesar 1,53 poin. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah masih ditemukan kurangnya pemahaman pengisian kuesioner SPI oleh responden baik intenal sehingga pesan pengisian survey seringkali diabaikan. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Inspektorat menetapkan strategi pemecahan masalah tersebut dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif atas survey penilaian integritas kepada para responden.



Tabel 2.187
Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) Kota Padang Panjang
Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan da set daerah	29.	Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) (Angka)	78,5	76,5	78,30

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada akhir periode RPJMD, indeks integritas Kota Padang Panjang ditergetkan sebesar 78,30 dengan kategori Terjaga. Untuk mecapai target tersebut, pemerintah Kota Padang Panjang terus berkomitmen untuk menyusun langkah konkret berupa penguatan pencegahan korupsi, melakukan edukasi dan kampanye anti korupsi serta meningkatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat.

b. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas secara kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi Pemerintah Kota Padang Panjang. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.188
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang
Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	30.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)	73	73,5	100,68

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Padatahun 2025, indeks perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar 73,5 dengan persentase ketercapaian sebesar 100,68%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, indeks perencanaan pembangunan daerah Kota Padnag Panjang tahun 2024 berada pada angka 72,2. Terjadi peningkatan skor sebesar 1,3 pada tahun 2025.



Tabel 2.189
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	30.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)	73	73,5	72,2

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Adapun peran yang dijalankan sebagai upaya dalam mencapai target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1)Peningkatan kualitas koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan peran Bappeda dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan menjaga konsistensi antara progam kegiatan dan prioritas daerah;
- 2)Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan, termasuk data statistik sektoral, spasial dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
- 3)Pendampingan intensif dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan dalam bentuk desk per OPD untuk setiap tahapan perencanaan melalui penunjukan PIC untuk masing-masing OPD.

Jika dilihat dari perencanaan jangka menengah, indeks perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 78,00 pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya meningkatkan komponen penilaian yang ditetapkan oleh Bappenas.

Tabel 2.190
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan da set daerah	30.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)	73	73,5	78,00

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

c. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Angka)

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Daerah adalah parameter atau indikator kinerja untuk mengukur kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola Barang



Milik Daerah (BMD). Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.191
Indeks Pengelolaan Aset Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	32.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Angka)	2	2,89	144,5

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Indeks pengelolaan aset daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 sebesar 2,89 dengan tingkat ketercapaian sebesar 144,5%. Pada tahun 2024 yang lalu, Pemerintah Kota Padang Panjang belum memiliki nilai indeks pengelolaan aset daerah sehingga pada tabel 2.191 di bawah dibuatkan keterangan N/A.

Tabel 2.192
Indeks Pengelolaan Aset Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	32.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Angka)	2	2,89	NA

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pencapaian indikator indeks pengelolaan aset daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 didukung oleh sasaran strategis berupa:

- 1)Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif;
- 2)Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3)Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif; dan
- 4)Administrasi BMD yang andal.

Selain beberapa sasaran strategis di atas, pencapaian ini juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran dan kepedulian dari seluruh stakeholder pengelolaan BMD mulai dari Pengelola BMD, Pengguna BMD, Pejabat Penatausahaan BMD, sampai dengan Pengurus Barang OPD untuk mengelola BMD lebih baik lagi.



Pada perencanaan jangka menengah, Kota Padang Panjang menargetkan indeks pengelolaan asset daerah sebesar 3,20. Target ini diproyeksikan akan mampu tercapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

Tabel 2.193
Indeks Pengelolaan Aset Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S12.	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan da set daerah	32.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Angka)	2	2,89	3,20

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

3. Sasaran 13: Meningkatnya profesionalisme ASN dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (Angka)
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang dikeluarkan oleh BKN yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Tabel 2.194
Indeks Profesionalitas ASN Kota Padang Panjang dibandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S13.	Meningkatnya profesionalisme ASN	33.	Indeks Profesionalitas ASN (Angka)	86,4	NA	NA

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2025 melalui surat BKN Nomor: BO.15014/B-BM 02.01/sd/c.vii/2025 perihal pengukuran IP ASN, BKN menegaskan bahwasanya BKN tidak lagi melakukan penilaian IP ASN bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tabel 2.195
Indeks Profesionalitas ASN Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S13.	Meningkatnya profesionalisme ASN	33.	Indeks Profesionalitas ASN (Angka)	86,4	NA	85,1

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Pada tahun 2024 yang lalu, Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh nilai IP ASN sebesar 85,1 yang berada pada ketogori tinggi. Nilai IP ASN Kota Padang Panjang ini melampaui pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan beberapa kabupaten kota lain di Sumatera Barat.

Tabel 2.196
Indeks Profesionalitas ASN Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S13.	Meningkatnya profesionalisme ASN	33.	Indeks Profesionalitas ASN (Angka)	86,4	NA	86,90

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2030, IP ASN Kota Padang Panjang ditargetkan meningkat sebesar 0,5 poin dari target tahun 2025. Mengingat BKN tidak lagi melakukan ppenilaian IP ASN, maka Pemerintah Kota Padang Panjang akan melakukan penyesuaian indikator pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029.

4. Sasaran 14: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator kinerja yang mengukur persentase kontribusi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang tahhun 2025. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.197
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang dibandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	34.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,29	0,34	113,79

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah Kota Padang Panjang berkontribusi sebesar 0,34% terhadap total PDRB Kota Padang Panjang tahun 2025. Pencapaian ini melebihi target yang sudah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 113,79. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya, pajak daerah Kota Padang Panjang berkontribusi sebesar 0,2%



terhadap total PDRB Kota Padang Panjang tahun 2024. Terjadi peningkatan sebesar 0,14% di tahun 2025.

Tabel 2.198
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	34.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,29	0,34	0,2

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Peningkatan realisasi pajak daerah ini dapat diperoleh melalui beberapa upaya diantaranya:

- 1)Menyepakati MoU dengan Pemerintah Provisni terkait opsen pajak;
- 2)Melaksanakan program pemutihan denda pajak PBB;
- 3)Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan pajak; dan
- 4)Melakukan penagihan pajak terhadap objek pajak yang menunggak dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI dan kejaksaan.

Tabel 2.199
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH							
MISI 3							
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif							
	S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	34.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,29	0,34	0,40

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Jika diamati melalui perencanaan jangka menengah, pajak daerah Kota Padang Panjang tahun 2030 ditargetkan berkontribusi sebesar 0,40% terhadap total PDRB. Sebagai salah satu upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Padnag Panjang sudah menetapkan arah kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029 berupa peningkatan efektivitas oenarikan pajak da retribusi daerah.

b. Nilai Pendapatan Asli Daerah

Nilai PAD Kota Padang Panjang pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.100.390.000.000,- (seratus milyar tiga ratus sempilan puluh juta rupiah). Capaian ini belum memenuhi target dengan ketercapaian indikator sebesar 89,04% seperti yang dijelaskan tabel di ba wah ini.



Tabel 2.200
Nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang dibandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	35.	Nilai Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)	112,742	100,39	89,04

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Belum tercapainya target PAD yang ditetapkan pad atahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1)Bencana galodo pada tanggal 27 November 2025 yang menyebabkan terputusnya akses ke Kota Padang Panjang dari arah Padang. Hal ini mempengaruhi askesibilitas wisman ke Kota Padang Panjang sehingga mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor perhotelan dan restoran; dan
- 2)Kerusuhan di Pati terkait Pajak Daerah khususnya PBB mempengaruhi stigma masyarakat atas pembayaran PBB.

Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, PAD Kota Padang Panjang tahun 2024 terealisasi sebesar 94,37 milyar. Terjadi peningkatan penerimaan sebesar 6,2 milyar pada tahun 2025.

Tabel 2.201
Nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 3						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif						
S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	35.	Nilai Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)	112,742	100,39	94,37

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun akhir RPJMD, PAD Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 200,114 milyar atau dengan peningkatan penerimaan sebesar 87,372 milyar jika dibandingkan dengan target tahun 2025. Untuk memenuhi target tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan strategi dan arah pembangunan untuk 4 (empat) tahun mendatang yaitu:



- 1)Strategi optimalisasi pengelolaan sumber PAD dengan arah kebijakan:
- ✓ Peningkatan pemanfaatan teknologi digital;
 - ✓ Peningkatan efektivitas penarikan pajak dan retribusi daerah;
 - ✓ Peningkatan kapasitas SDM Pengelola PAD; dan
 - ✓ Penguatan regulasi dan kebijakan PAD.
- 2)Strategi diversifikasi dan pengembangan sumber PAD baru dengan arah kebijakan:
- ✓ Indentifkasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai sumber PAD baru;
 - ✓ Peningkatan pemanfaatan asset daerah secara optimal;
 - ✓ Pengembangan BUMD yang sehat dan produktif;
 - ✓ Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan potensi daerah.

Tabel 2.202
Nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH					
MISI 3					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif					
S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	35. Nilai Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)	112,742	100,39	200,114

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

d) Tujuan 4: Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya

1. Sasaran 15: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda

Persentase penurunan pelanggaran perda merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan jumlah pelanggaran terhadap Perda pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator persentase penurunan pelanggaran perda di Kota Padnag Panjang tahun 2025 dijelaskan melalui tabel 2.203 di bawah ini.



Tabel 2.203
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Kota Padang Panjang
Dibandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 4						
Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat						
S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.	Persentase penurunan pelanggaran perda (%)	2,5	5,88	235,2

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2025, persentase penurunan pelanggaran perda terealisasi sebesar 5,88% dengan persentase capaian sebesar 235,2%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, persentase penurunan pelanggaran perda di Kota Padang Panjang sudah jauh melebihi daeri capaian tahun 2024. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target ini sudah dijelaskan pada subbab 2.3.1 di atas pada indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 2.204
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Kota Padang Panjang
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 4						
Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial serta aktualisasi nilai-nilai agama dam budaya dalam kehidupan masyarakat						
S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.	Persentase penurunan pelanggaran perda (%)	2,5	5,88	2,4

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Tabel 2.205
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Kota Padang Panjang
Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 4						
Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat						
S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum	36.	Persentase penurunan pelanggaran perda (%)	2,5	5,88	2,75

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2026, diolah

Pada tahun 2030, persentase penurunan pelanggaran perda ditargetkan sebesar 2,75. Target ini sudah tercapai pada tahun 2025. Namun demikian,



pemerintah Kota Padang Panjang terus berkomitmen menurunkan pelanggaran dengan menyusun arah kebijakan berupa:

- 1)Peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak peraturan daerah;
- 2)Intensifikasi sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
- 3)Penguatan forum komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum;
- 4)Optimalisasi penegakan perda; dan
- 5)Peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum.

b. Indeks Harmoni (indeks)

Indeks harmoni adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial, kerukunan, dan toleransi dalam masyarakat Kota Padang Panjang. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya.

Tabel 2.206
Indeks Harmoni Kota Padang Panjang dibandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 4						
Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat						
S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.	Indeks Harmoni (indeks)	70	NA	-

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 tidak ada realisasi Indeks Harmoni Kota Padang Panjang karena tidak memenuhi target minimum responden tahun 2025 yaitu 127 responden dari minimal 1.250 responden.

Tabel 2.207
Indeks Harmoni Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH							
MISI 4							
Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial serta aktualisasi nilai-nilai agama dam budaya dalam kehidupan masyarakat							
	S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Keterliban Umum	37.	Indeks Harmoni (indeks)	70	NA	NA

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah



Pada tahun 2024, Kota Padang Panjang belum memperoleh nilai indeks harmoni sehingga pada tabel di atas dibuat keterangan N/A

Tabel 2.208
Indeks Harmoni Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 4						
Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam						
S15.	Meningkatnya Ketentraman dan Keterlibatan Umum	37.	Indeks Harmoni (indeks)	70	NA	80,00

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2030 yang merupakan tahun akhir rencana pembangunan jangka menengah, indeks harmoni Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 80,00. Nilai ini meningkat 10 poin dari yang dutargetkan pada tahun 2025.

e) Tujuan 5: Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tanggung bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- 1) Sasaran 18: Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses infrastruktur serta hunian layak dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan (%)

Capain indikator Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah sebesar 119,69%. Hal ini didasari atas kajian RP2KPKPK yang menyimpulkan luasan kawasan kumuh Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah 25,64Ha.

Tabel 2.209
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau dan Berkelanjutan Kota Padang Panjang dibandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 5						
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan						
S18.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses infrastruktur serta hunian layak	44.	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,63	88,13	119,69

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah sebesar 71,28%. Terjadi peningkatan yang positif pada tahu 2025.



Tabel 2.210
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau dan Berkelanjutan Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 5						
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan						
S18.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses infrastruktur serta hunian layak	44.	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,63	88,13	71,28

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pencapaian indikator tersebut merupakan outcome dari program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - ✓ Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.
 - ✓ Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.
- b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.



Tabel 2.211
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau dan Berkelanjutan Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH							
MISI 5							
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan							
	S18.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses infrastruktur serta hunian layak	44.	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,63	88,13	85,35

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2030 yang merupakan tahun akhir rencana pembangunan jangka menengah, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 85,35%. Nilai ini meningkat 11,72% dari yang dutargetkan pada tahun 2025.

2) Sasaran 20: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Angka)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen komposit yang digunakan oleh BNPB untuk mengukur kapasitas dan kemampuan Kota Padang Panjang dalam menghadapi, memitigasi, beradaptasi, dan pulih dari risiko bencana. Adapun capaian indikator jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.212
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang Panjang dibandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 5						
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan						
S20.	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	48.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Angka)	0,32	0,37	115,53

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2025, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang Panjang adalah 0,37 dengan persentase capaian sebesar 115,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang Panjang sudah melebihi dari capaian tahun 2024.



Tabel 2.213
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 5						
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan						
S20.	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	48.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Angka)	0,32	0,37	0,3

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Tabel 2.214
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang Panjang Dibandingkan dengan
Target Akhir RPJMD Tahun 2030

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2030
VISI “ PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH						
MISI 5						
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan						
S20.	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	48.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Angka)	0,32	0,37	0,38

Sumber: Bagian Organisasi 2026, diolah

Pada tahun 2030, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 0,38. Adapun arah kebijakan untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Penguatan kebijakan dan kelembagan;
- 2)Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu;
- 3)Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- 4)Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- 5)Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
- 6)Pengembangan sistem pemulihan bencana;
- 7)Koordinasi rekonstruksi padca bencana; dan
- 8)Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana non alam.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Untuk mendukung seluruh sasaran kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang telah diperjanjikan melalui 15 sasaran strategis Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasi anggaran sebesar **Rp.503.526.586.124,-** untuk menyelenggarakan 107 program. Anggaran ini terealisasi sebesar **Rp. 464.174.212.803,76 (92,18%)**. Pada Triwulan III 2025 dilaksanakan kebijakan refocusing/pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa program yang mengalami perubahan anggaran dari dokumen Perjanjian Kinerja. Dan sebanyak 2 program tidak jadi dilaksanakan dari Perjanjian Kinerja yang semula sebanyak 109 program.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- 1) Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 secara rinci seperti ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 2.215
Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja per Program Tahun 2025

Sasaran/Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	51.866.844.061,00	44.958.101.825,00	84,50
1 Pengelolaan Pendidikan	37.522.975.356,00	33.751.701.430,00	89,95
2 Pembinaan Perpustakaan	949.282.025,00	885.251.545,00	93,25
3 Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	101.377.050,00	78.799.822,00	77,73
4 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	13.293.209.630,00	10.242.349.028,00	77,05
S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	22.441.062.079,00	20.493.842.165,60	88,10
1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.913.913.729,00	19.212.728.293,60	91,87
2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	384.083.150,00	342.140.750,00	89,08
3 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	530.504.600,00	448.059.930,00	84,46
4 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	114.880.900,00	114.154.250,00	99,37
5 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	497.679.700,00	376.758.942,00	75,70
S3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Penguatan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	3.023.779.555,00	2.416.402.515,00	76,88
1 Penguatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	254.165.440,00	196.914.350,00	77,47
2 Perlindungan Perempuan	147.632.000,00	94.048.050,00	63,70
3 Pemenuhan Hak Anak	79.570.950,00	65.537.550,00	82,36
4 Perlindungan Khusus Anak	315.970.700,00	242.185.784,00	76,65
5 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.005.030.465,00	694.835.891,00	69,14
6 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.221.410.000,00	1.122.880.890,00	91,93
S4. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	2.422.324.837,00	1.176.706.914,00	69,80
1 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	232.512.950,00	151.447.750,00	65,14
2 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	2.089.811.887,00	925.259.164,00	44,27
3 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
S5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	342.360.756.901,00	331.706.955.333,00	76,78
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	308.622.409.042,00	301.537.481.925,00	97,70
2 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.319.873.450,00	13.257.997.452,00	92,58
3 Perekonomian dan Pembangunan	317.111.600,00	188.939.809,00	59,58
4 Penyelenggaraan Pengawasan	463.218.000,00	459.229.000,00	99,14
5 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	52.594.400,00	48.925.850,00	93,02
6 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.204.723.400,00	1.154.274.150,00	95,81
7 Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.359.527.000,00	1.292.657.178,00	95,08
8 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5.505.000,00	4.376.925,00	79,51
9 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.850.000,00	2.895.000,00	75,19
10 Pengelolaan Arsip	15.667.850,00	13.451.050,00	85,85
11 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	283.559.890,00	191.298.460,00	67,46



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	61.835.950,00	23.316.700,00	37,71
13	Penelitian dan Pengembangan Daerah	302.698.960,00	251.761.863,00	83,17
14	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.354.568.750,00	2.304.568.750,00	97,88
15	Pengelolaan Barang Milik Daerah	471.984.100,00	158.541.732,00	33,59
16	Kepegawaian Daerah	635.732.600,00	544.126.082,00	85,59
17	Pengembangan Sumber Daya Manusia	800.414.000,00	603.860.576,00	75,44
18	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.251.045.986,00	7.447.114.806,00	90,26
19	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.640.684.423,00	2.207.611.750,00	83,60
20	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	193.752.500,00	14.526.275,00	7,50
S6.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	12.476.628.490,00	9.344.635.837,00	72,77
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	591.673.170,00	249.462.300,00	42,16
2	Pemasaran Pariwisata	362.508.800,00	252.034.022,00	69,52
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	662.215.150,00	35.042.381,00	5,29
4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	285.489.500,00	216.082.000,00	75,69
5	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.670.137.280,00	1.608.690.275,00	96,32
6	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	69.549.780,00	39.801.200,00	57,23
7	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	105.143.200,00	98.167.952,00	93,37
8	Penyuluhan Pertanian	225.029.400,00	182.779.450,00	81,22
9	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	111.200.000,00	101.219.550,00	91,02
11	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.867.922.060,00	5.598.428.763,00	81,52
12	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	43.051.300,00	34.421.200,00	79,95
13	Pengendalian Izin Usaha Industri	1.093.250,00	1.050.000,00	96,04
14	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	843.718.700,00	604.414.314,00	71,64
15	Pengelolaan Pendapatan Daerah	636.286.900,00	321.432.430,00	50,52
S7.	Meningkatnya Investasi	720.462.702,00	550.089.357,00	66,01
1	Pelayanan Penanaman Modal	500.000,00	500.000,00	100,00
2	Promosi Penanaman Modal	42.270.000,00	1.842.750,00	4,36
3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	55.991.000,00	52.109.607,00	93,07
4	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	10.787.300,00	7.292.800,00	67,61
5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	59.385.850,00	28.263.500,00	47,59
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri	551.528.552,00	460.080.700,00	83,42
S8.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	6.458.576.462,00	5.429.072.381,00	66,77
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	91,99
2	Penempatan Tenaga Kerja	226.222.000,00	31.831.139,00	14,07
3	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	531.666.684,00	409.938.192,00	77,10
4	Pengembangan UMKM	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	83,93
S9.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	697.218.900,00	468.360.366,00	78,16
1	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	640.769.000,00	418.713.630,00	65,35
2	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44.175.000,00	39.999.986,00	90,55
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	12.274.900,00	9.646.750,00	78,59
S10.	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	751.379.500,00	685.911.600,00	86,13



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	Pengembangan Kebudayaan	643.712.000,00	600.964.100,00	93,36
2	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	107.667.500,00	84.947.500,00	78,90
S11. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		9.998.015.466,00	9.360.650.206,37	83,61
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.854.966.500,00	3.692.337.050,00	95,78
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.933.683.700,00	2.787.190.290,00	95,01
3	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	711.840.750,00	699.349.850,00	98,25
4	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.308.064.716,00	2.004.621.602,37	86,85
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.000.000,00	74.193.400,00	98,92
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	101.816.000,00	101.608.014,00	99,80
7	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.643.800,00	1.350.000,00	10,68
S12. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial		2.720.637.744,00	2.538.938.835,00	86,60
1	Pemberdayaan Sosial	1.068.070.000,00	1.040.648.011,00	97,43
2	Rehabilitasi Sosial	1.106.400.584,00	1.027.505.951,00	92,87
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	70.905.900,00	62.327.220,00	87,90
4	Pengendalian Penduduk	73.344.600,00	65.076.231,00	88,73
5	Pendaftaran Penduduk	195.078.840,00	182.790.502,00	93,70
6	Pencatatan Sipil	98.276.970,00	79.554.154,00	80,95
7	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.579.850,00	73.371.766,00	74,43
8	Pengelolaan Profil Kependudukan	9.981.000,00	7.665.000,00	76,80
S13. Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas		27.164.286.318,00	24.191.240.863,79	87,12
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.982.406.630,00	2.925.489.700,37	98,09
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	823.951.100,00	589.453.114,00	71,54
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	70,34
5	Penyelenggaraan Jalan	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	92,50
6	Pengembangan Jasa Konstruksi	92.376.500,00	88.314.700,00	95,60
7	Pengembangan Perumahan	374.760.230,00	292.922.665,00	78,16
8	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.451.667.195,00	7.991.854.071,00	94,56
9	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.414.753.856,00	2.932.157.183,00	85,87
S14. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang		3.791.295.600,00	1.548.414.454,00	49,29
1	Penataan Bangunan Gedung	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	36,27
2	Penyelenggaraan Penataan Ruang	665.468.600,00	414.582.160,00	62,30
S15. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan		11.757.459.842,00	9.304.890.151,00	73,51
1	Penatagunaan Tanah	81.149.700,00	29.345.175,00	36,16
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	171.067.200,00	145.110.625,00	84,83
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	411.878.500,00	273.975.988,00	66,52
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	96,79
5	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	28.218.360,00	25.587.205,00	90,68



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	17.987.420,00	14.831.965,00	82,46
7	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	117.395.900,00	84.998.865,00	72,40
8	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	78.454.650,00	37.101.485,00	47,29
9	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.536.700,00	751.820,00	8,81
10	Pengelolaan Persampahan	8.051.157.442,00	5.876.270.644,00	72,99
11	Penanganan Bencana	90.911.840,00	178.348.250,00	196,18
12	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7.600.000,00	0,00	0,00
13	Penanggulangan Bencana	850.402.760,00	854.931.922,00	100,53

Sumber : Bappeda dan BPKD, 2025 (diolah)

2) Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 seperti ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 2.216
Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja per Program Tahun 2025

Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
S1.	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat	29.910.114.101.721,00	28.650.924.302.133,30	86,70
1	Pengelolaan Pendidikan	37.522.975.356,00	33.751.701.430,00	89,95
2	Pembinaan Perpustakaan	949.282.025,00	885.251.545,00	93,25
3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	101.377.050,00	78.799.822,00	77,73
4	Pengelolaan Arsip	15.667.850,00	13.451.050,00	85,85
S2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	14.936.092.926.395,00	14.308.385.381.758,20	85,28
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.913.913.729,00	19.212.728.293,60	91,87
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	384.083.150,00	342.140.750,00	89,08
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	497.679.700,00	376.758.942,00	75,70
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	530.504.600,00	448.059.930,00	84,46
S3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	7.457.198.624.908,00	7.144.276.876.886,28	69,80
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	232.512.950,00	151.447.750,00	65,14
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.089.811.887,00	925.259.164,00	44,27
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
S4.	Meningkatnya Pembangunan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	3.728.709.355.618,00	3.572.630.036.268,64	76,88
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	254.165.440,00	196.914.350,00	77,47
2	Perlindungan Perempuan	147.632.000,00	94.048.050,00	63,70
3	Pemenuhan Hak Anak	79.570.950,00	65.537.550,00	82,36
4	Perlindungan Khusus Anak	315.970.700,00	242.185.784,00	76,65
5	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.005.030.465,00	694.835.891,00	69,14
6	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.221.410.000,00	1.122.880.890,00	91,93
S5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	3.073.570.426.330,00	2.650.882.695.192,26	85,32
1	Pengendalian Izin Usaha Industri	1.093.250,00	1.050.000,00	96,04



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	843.718.700,00	604.414.314,00	71,64
3	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	531.666.684,00	409.938.192,00	77,10
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.867.922.060,00	5.598.428.763,00	81,52
5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	105.143.200,00	98.167.952,00	93,37
6	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
7	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	111.200.000,00	101.219.550,00	91,02
8	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	43.051.300,00	34.421.200,00	79,95
9	Pengembangan UMKM	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	83,93
10	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	12.274.900,00	9.646.750,00	78,59
S6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah	3.092.652.043.710,00	2.668.081.712.291,26	53,42
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	591.673.170,00	249.462.300,00	42,16
2	Pemasaran Pariwisata	362.508.800,00	252.034.022,00	69,52
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44.175.000,00	39.999.986,00	90,55
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	662.215.150,00	35.042.381,00	5,29
5	Perekonomian dan Pembangunan	317.111.600,00	188.939.809,00	59,58
S7.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1.517.153.953.257,00	1.451.059.086.906,32	66,01
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	55.991.000,00	52.109.607,00	93,07
2	Promosi Penanaman Modal	42.270.000,00	1.842.750,00	4,36
3	Pelayanan Penanaman Modal	500.000,00	500.000,00	100,00
4	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	10.787.300,00	7.292.800,00	67,61
5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	59.385.850,00	28.263.500,00	47,59
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri	551.528.552,00	460.080.700,00	83,42
S8.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.700.687.778,00	4.987.303.050,00	39,71
1	Penempatan Tenaga Kerja	226.222.000,00	31.831.139,00	14,07
2	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	640.769.000,00	418.713.630,00	65,35
S9.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Daerah	653.043.900,00	428.360.380,00	89,83
1	Rehabilitasi Sosial	1.106.400.584,00	1.027.505.951,00	92,87
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	70.905.900,00	62.327.220,00	87,90
3	Pengendalian Penduduk	73.344.600,00	65.076.231,00	88,73
S10.	Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan	3.092.652.043.710,00	2.668.081.712.291,26	68,30
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	114.880.900,00	114.154.250,00	99,37
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	285.489.500,00	216.082.000,00	75,69
3	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.670.137.280,00	1.608.690.275,00	96,32
4	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	69.549.780,00	39.801.200,00	57,23
5	Penyuluhan Pertanian	225.029.400,00	182.779.450,00	81,22
6	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7.600.000,00	0,00	0,00
S11.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif	1.546.422.898.105,00	1.334.048.119.283,13	77,78
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	308.622.409.042,00	301.537.481.925,00	97,70
2	Pendaftaran Penduduk	195.078.840,00	182.790.502,00	93,70
3	Pencatatan Sipil	98.276.970,00	79.554.154,00	80,95
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.579.850,00	73.371.766,00	74,43
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	9.981.000,00	7.665.000,00	76,80



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
6	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.204.723.400,00	1.154.274.150,00	95,81
7	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.359.527.000,00	1.292.657.178,00	95,08
8	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.850.000,00	2.895.000,00	75,19
9	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5.505.000,00	4.376.925,00	79,51
10	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	283.559.890,00	191.298.460,00	67,46
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	61.835.950,00	23.316.700,00	37,71
12	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.640.684.423,00	2.207.611.750,00	83,60
13	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.643.800,00	1.350.000,00	10,68
14	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.251.045.986,00	7.447.114.806,00	90,26
15	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.319.873.450,00	13.257.997.452,00	92,58
16	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	52.594.400,00	48.925.850,00	93,02
S12.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	127.348.466.391,00	105.509.787.894,95	63,27
1	Penyelenggaraan Pengawasan	463.218.000,00	459.229.000,00	99,14
2	Penelitian dan Pengembangan Daerah	302.698.960,00	251.761.863,00	83,17
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	193.752.500,00	14.526.275,00	7,50
S13.	Meningkatnya Profesionalisme ASN	113.411.544.761,00	94.666.474.766,95	80,52
1	Kepegawaian Daerah	635.732.600,00	544.126.082,00	85,59
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	800.414.000,00	603.860.576,00	75,44
S14.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	107.667.500,00	84.947.500,00	60,66
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.354.568.750,00	2.304.568.750,00	97,88
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	471.984.100,00	158.541.732,00	33,59
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	636.286.900,00	321.432.430,00	50,52
S15.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	489.864.189.334,00	408.634.103.618,80	95,77
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.854.966.500,00	3.692.337.050,00	95,78
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.933.683.700,00	2.787.190.290,00	95,01
3	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	711.840.750,00	699.349.850,00	98,25
4	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	101.816.000,00	101.608.014,00	99,80
5	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.308.064.716,00	2.004.621.602,37	86,85
6	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.000.000,00	74.193.400,00	98,92
S16.	Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Masyarakat	241.167.613.492,00	200.709.347.322,90	146,80
1	Pemberdayaan Sosial	1.068.070.000,00	1.040.648.011,00	97,43
2	Penanganan Bencana	90.911.840,00	178.348.250,00	196,18
S17.	Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat	113.411.544.761,00	94.666.474.766,95	85,20
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	13.293.209.630,00	10.242.349.028,00	77,05
2	Pengembangan Kebudayaan	643.712.000,00	600.964.100,00	93,36
S18.	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses dan Infrastruktur serta Hunian Layak	30.251.664.378,00	26.830.517.223,79	81,04
1	Penataan Bangunan Gedung	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	36,27
2	Pengembangan Jasa Konstruksi	92.376.500,00	88.314.700,00	95,60
3	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.982.406.630,00	2.925.489.700,37	98,09
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	823.951.100,00	589.453.114,00	71,54
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	70,34



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
7	Penyelenggaraan Jalan	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	92,50
8	Penyelenggaraan Penataan Ruang	665.468.600,00	414.582.160,00	62,30
9	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.414.753.856,00	2.932.157.183,00	85,87
10	Pengembangan Perumahan	374.760.230,00	292.922.665,00	78,16
11	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	91,99
12	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	107.667.500,00	84.947.500,00	78,90
13	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.451.667.195,00	7.991.854.071,00	94,56
S19.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	482.191.570,00	312.139.935,00	65,89
1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	411.878.500,00	273.975.988,00	66,52
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	96,79
3	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	28.218.360,00	25.587.205,00	90,68
4	Pengelolaan Persampahan	8.051.157.442,00	5.876.270.644,00	72,99
5	Penatagunaan Tanah	81.149.700,00	29.345.175,00	36,16
6	Perencanaan Lingkungan Hidup	171.067.200,00	145.110.625,00	84,83
7	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	17.987.420,00	14.831.965,00	82,46
8	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	117.395.900,00	84.998.865,00	72,40
9	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	78.454.650,00	37.101.485,00	47,29
10	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.536.700,00	751.820,00	8,81
S20.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	3.791.295.600,00	1.548.414.454,00	100,53
1	Penanggulangan Bencana	850.402.760,00	854.931.922,00	100,53

Sumber : Bagian Organisasi dan BPKD 2025, data diolah

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian anggaran setiap program pendukung sasaran. Besarnya efisensi atau inefisiensi diperoleh dari pengurangan angka rata-rata capaian indikator kinerja persasaran terhadap angka rata-rata capaian anggaran program persasaran.

- 1) Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang Mendukung Sasaran Kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.217
Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang Mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (7=5-6)
1	2	3	4	5	6	7
S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah	12,16	12,01	98,77	84,50	15,11
	2. Harapan Lama Sekolah	15,67	15,74	100,45		
	Rata-rata			99,61		
S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Umur Harapan Hidup	76,17	74,86	98,28	88,10	12,07



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (7=5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	4. Prevalensi Stunting	9,22	9,03	102,06		
Rata-rata				100,17		
S3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,05	NILAI BELUM DIRILIS	NA	76,88	NA
	6. Predikat Kota Layak Anak	Utama	NILAI BELUM DIRILIS	NA		
Rata-rata				NA		
S4. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	7. Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00	69,80	80,20
	8. Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,50	1,00	200,00		
Rata-rata				150,00		
S5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Nilai SAKIP	65,00	65,06	100,09	76,78	14,19
	10. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	68,40	53,9064	78,81		
	11. Indeks Sistem Merit	325	325	100,00		
	12. Maturitas SPIP	3 (3,2)	2 (2,69)	84,06		
	13. Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	94,50	78,28	82,84		
	14. Indeks SPBE	3,16	3,16	100,00		
Rata-rata				90,97		
S6. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	15. LPE Sektor Perdagangan	6,90	4,27	61,88	72,77	-14,49
	16. LPE Sektor Pertanian	5,69	3,93	69,07		
	17. LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	11,19	4,91	43,88		
Rata-rata				58,28		
S7. Meningkatnya Investasi	18. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	39,00	34,79	89,21	66,01	18,02
S8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	19. Tingkat Kemiskinan	4,23	4,97	82,51	66,77	17,26
	20. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43	5,07	85,55		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (7=5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Rata-rata				84,03		
S9. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	21. Pengeluaran Perkapita	12,010	12,148	101,15	78,16	22,99
S10. Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	22. Persentase Pemajuan Kebudayaan	66,60	68,60	103,00	86,13	15,79
	23. Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan	85,00	85,71	100,84		
Rata-rata				101,92		
S11. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	24. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100,00	83,61	16,39
S12. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	25. Angka PPKS	3,68	4,96	65,22	86,60	-21,38
S13. Terbangunnya Infrastruktur layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	26. IKLI KePUan	98,00	96,62	98,59	87,12	10,62
	27. IKLI Perkim	100,00	95,93	95,93		
	28. IKLI Perhubungan	98,00	96,71	98,68		
Rata-rata				97,74		
S14. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	29. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84,00	83,35	99,23	49,29	49,94
S15. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	30. Indeks Kualitas Air	72,47	72,72	100,34	73,51	30,60
	31. Indeks Kualitas Udara	78,68	85,50	108,67		
	32. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,51	71,81	103,31		
Rata-rata				104,11		

Sumber : Bagian Organisasi dan BPKD 2025, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, secara umum terjadi efisiensi dalam pencapaian kinerja di Kota Padang Panjang. Dari 15 (lima belas) sasaran, 12 (dua belas) sasaran mengalami efisiensi dan 2 (dua) sasaran mengalami inefisiensi yaitu pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah dan Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial. Sedangkan 1 (satu) sasaran belum bisa diukur efisiensinya karena data kinerja belum dirilis yaitu pada sasaran Meningkatnya



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

2) Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang Mendukung Sasaran Kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.218
Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang Mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (7=5-6)
1	2	3	4	5	6	7
S1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah	12,16	12,01	98,77	86,70	-3,60
	2. Harapan Lama Sekolah	15,67	15,74	100,45		
	3. Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan	100,00	100,00	100,00		
	4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	97,88	32,47	33,17		
	Rata-rata			83,10		
S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5. Usia Harapan Hidup	76,17	74,86	98,28	85,28	13,00
S3. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	6. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,24	1,216	98,06	69,80	22,65
	7. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,96	0,677	70,52		
	8. Rasio Daya Saing Keolahragaan	29,76	32,37	108,77		
	Rata-rata			92,45		
	9. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,00	NILAI BELUM DIRILIS	NA		
S4. Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	10. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	66,56	NILAI BELUM DIRILIS	NA	76,88	NA
	11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,25	NILAI BELUM DIRILIS	NA		
	Rata-rata			NA		
S5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	12. Rasio PDRB Industri Pengolahan	9,54	8,98	94,13	85,32	11,45



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (7=5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	13. Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran	18,35	18,24	99,40		
	Rata-rata			96,77		
S6. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	14. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	2,94	2,92	99,32	54,32	45,43
	15. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	5,38	5,39	100,19		
	Rata-rata			99,75		
S7. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	16. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,19	NILAI BELUM DIRILIS	NA	66,01	NA
	17. Nilai Investasi	44,75	49,80	111,28		
	Rata-rata			NA		
S8. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	18. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	137,78	160,39	116,41	39,71	68,50
	19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,20	69,20	100,00		
	Rata-rata			108,21		
S9. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Daerah	20. Jumlah Penduduk Miskin	2,714	2,900	93,15	89,83	3,32
S10. Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan	21. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,20	5,08	97,69	68,30	-1,56
	22. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	5,31	8,72	35,78		
	Rata-rata			66,74		
S11. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif	23. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,38	NILAI BELUM DIRILIS	NA	77,78	NA
	24. Indeks Pelayanan Publik	4,20	4,47	106,43		
	25. Indeks Reformasi Hukum	96,82	98,7600	102,00		
	26. Nilai AKIP Kota	65	65,06	100,09		
	27. Indeks SPBE	3,16	3,16	100,00		
	28. Indeks Inovasi Daerah	82,22	87,94	106,96		
	Rata-rata			NA		
S12. Meningkatnya Kualitas Pengawasan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	29. Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK)	78,50	76,5	97,45	63,27	42,09



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (7=5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	30. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	73,00	73,50	100,68		
	31. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	68,40	53,90	78,80		
	32. Indeks Pengelolaan Aset Darah	2,00	2,89	144,50		
Rata-rata				105,36		
S13. Meningkatnya Profesionalitas ASN	33. Indeks Profesionalitas ASN	86,40	NILAI BELUM DIRILIS	NA	80,52	NA
S14. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	34. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,29	0,34	117,24	60,66	42,48
	35. Nilai Pendapatan Asli Daerah	112,742	100,39	89,04		
Rata-rata				103,14		
S15. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	36. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	2,50	5,88	235,20	95,77	21,83
	37. Indeks Harmoni	70,00	0,00	0,00		
Rata-rata				117,60		
S16. Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Masyarakat	38. Angka PPKS	3,34	4,96	51,50	146,80	-95,30
S17. Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	39. Persentase objek Pemajuan Kebudayaan	66,60	68,60	103,00	85,20	16,72
	40. Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85,00	85,71	100,84		
Rata-rata				101,92		
S18. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak	41. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau dan Berkelanjutan	73,63	88,13	119,69	81,04	23,55
	42. IKLI KePUan	96,81	96,62	99,80		
	43. IKLI Perkim	96,92	95,93	98,98		
	44. IKLI Perhubungan	96,83	96,71	99,88		
Rata-rata				104,59		
S19. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	45. Indeks Kualitas Air	72,47	72,72	100,34	65,89	38,22
	46. Indeks Kualitas Udara	78,68	85,50	108,67		
	47. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,51	71,81	103,31		
Rata-rata				104,11		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI (7=5-6)
1	2	3	4	5	6	7
S20. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	48. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,32	0,37	115,63	100,53	15,10

Sumber : Bagian Organisasi dan BPKD 2025, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, secara umum terjadi efisiensi dalam pencapaian kinerja di Kota Padang Panjang. Dari 20 (dua puluh) sasaran, 14 (empat belas) sasaran mengalami efisiensi dan 2 (dua) sasaran mengalami inefisiensi yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat dan **Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Masyarakat**. Sedangkan 4 (empat) sasaran belum bisa diukur efisiensinya karena masih ada data kinerja belum dirilis yaitu pada sasaran Meningkatnya Pembangunan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Berusaha di Daerah, dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif, serta Meningkatnya Profesionalitas ASN.

Dinas Sosial PPKBPPPA dan BPBD Kesbangpol realisasi anggarannya lebih dari 100% karena adanya tambahan dana BTT pasca bencana banjir bandang di Batas Kota Padang Panjang



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Tugas Pembantuan, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 368 ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah yang pendanaannya disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pemberian tugas pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Pendidikan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan ini ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Pendidikan Dasar Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian penerapanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 direncanakan100% dengan terlayannya pemenuhan kebutuhan dasar angka partisipasi sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Target capaian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	100 %
2 .	Pendidikan Dasar	100 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan	100 %

4.1.3. Realisasi

Pada tahun 2025 realisasi capaian SPM pada Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100.00 % (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
01.00	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	69.99	69.99	00.00	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2501	2501	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			Harus Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	73.62	73.62	00.00	100.00 %	
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	94.07.00	94.07.00	00.00	100.00 %	
02.00	Pendidikan Dasar					100.00 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99	99	00.00	100.00 %	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99	99	00.00	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9439	9439	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	SD (2025)					100.00 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	87.76	87.76	00.00	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	83.21.00	83.21.00	00.00	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80.03.00	80.03.00	00.00	100.00 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.87	74.87	00.00	100.00 %	
	5 . Indeks iklim inkluisivitas	Nilai	61.74	61.74	00.00	100.00 %	
	SMP (2025)					100.00 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	92.23.00	92.23.00	00.00	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	88.85	88.85	00.00	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.76	70.76	00.00	100.00 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.76	69.76	00.00	100.00 %	
	5 . Indeks iklim inkluisivitas	Nilai	60.61	60.61	00.00	100.00 %	
03.00	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	40.87	40.87	00.00	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	316	316	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS					100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	DILAYANI/DIPENUHI						
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	40.87	40.87	00.00	100.00 %	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1374/5/2025, 8 Maret 2026, Pukul 12.37 WIB

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	41,566,441,000
	APBD	41,566,441,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	41,566,441,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	0.00 %
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD	7.09 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1374/5/2025, 8 Maret 2026, Pukul 12.37 WIB

4.1.5. Dukungan Personil

Gambaran data kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	STATUS PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ASN	28	27	55
2	Non ASN	0	0	0
	JUMLAH	28	27	55

Sumber : Disdikbud Data keadaan Desember 2025

Tabel 4.5
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	JENJANG	PENDIDIK	TENDIK	JUMLAH
				(Org)
1	PAUD	180	60	245
2	SEKOLAH DASAR	364	156	520
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	238	69	307
4	KESETARAAN	30	5	35
	JUMLAH	812	290	1102

Sumber : Disdikbud Data keadaan Desember 2025



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM bidang pendidikan diperbarui dengan Permendikbud No 32 Tahun 2022. Permasalahan dalam pencapaian SPM belum adanya Data terpilah sebagai dasar penghitungan kebutuhan dalam penganggaran SPM dalam RKPD dan terbatasnya anggaran untuk pemenuhan SPM tahun 2025 tetap menjadi permasalahan utama dalam penerapan SPM bidang pendidikan.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan pada masa yang akan datang.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Kesehatan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan ini ada 12 (dua belas) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehtan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.6
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100 %

4.2.3. Realisasi

Pada tahun 2025 realisasi capaian SPM pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yaitu sebesar 96,21% (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.21 %	
01.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					84.89 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	64.89 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	932	756	176	81.12 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	687	687	0	100.00 %	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	171504	171504	0	100.00 %	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	1032	1032	0	100.00 %	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	1032	1032	0	100.00 %	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	1032	1032	0	100.00 %	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	3104	3104	0	100.00 %	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	1324	1324	0	100.00 %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1032	1032	0	100.00 %	
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1032	1032	0	100.00 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16	16	0	100.00 %	
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	58	58	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	2	2	0	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)						
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)						
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	11	11	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	808	808	0	100.00 %	
	(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)						
02.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					86.09 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	66.09 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	909	751	158	82.62 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	667	667	0	100.00 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	667	667	0	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	667	667	0	100.00 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	2	2	0	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	20	20	0	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	7	7	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
03.00	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					91.06 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	71.06 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	823	731	92	88.82 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG					100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	HARUS DILAYANI/DIPENUHI						
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	751	751	0	100.00 %	
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	420	420	0	100.00 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	420	420	0	100.00 %	
	(sesuai standar 12-59 bulan)						
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	751	751	0	100.00 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	751	751	0	100.00 %	
	(sesuai standar 12-59 bulan)						
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	548	548	0	100.00 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	2	2	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	10	10	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	3	3	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	487	487	0	100.00 %	
04.00	Pelayanan Kesehatan Balita					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	3567	3567	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	3567	3567	0	100.00 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	3567	3567	0	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3567	3567	0	100.00 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1755	1755	0	100.00 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	10808	10808	0	100.00 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1616	1616	0	100.00 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	1616	1616	0	100.00 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	1616	1616	0	100.00 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	1616	1616	0	100.00 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	1616	1616	0	100.00 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	1616	1616	0	100.00 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1616	1616	0	100.00 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	10680	10680	0	100.00 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	23	23	0	100.00 %	
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	400	400	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	13	13	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	20 . Guru PAUD	Orang	15	15	0	100.00 %	
	21 . Kader kesehatan	Orang	487	487	0	100.00 %	
05.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	7146	7146	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	11582	11582	0	100.00 %	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	7511	7511	0	100.00 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	7511	7511	0	100.00 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	53	53	0	100.00 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	53	53	0	100.00 %	
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	115798	115798	0	100.00 %	
	7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	11	11	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	1831	1831	0	100.00 %	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	16	16	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan	Vaksin	410	410	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)						
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	11	11	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	8	8	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	29	29	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	487	487	0	100.00 %	
06.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	22047	22047	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100.00 %	
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	38	38	0	100.00 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	48	48	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	66	66	0	100.00 %	
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	22	22	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	19952	19952	0	100.00 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	4	4	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	15992	15992	0	100.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	2	2	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	4616	4616	0	100.00 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	22	22	0	100.00 %	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	4	4	0	100.00 %	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	14	14	0	100.00 %	
	c. Vasektomi set	Unit	4	4	0	100.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	4	4	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	200	200	0	100.00 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	13	13	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	38	38	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan :	Orang	7	7	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Tenaga Kesehatan Masyarakat						
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	196	196	0	100.00 %	
07.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	5689	5689	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	76	76	0	100.00 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	76	76	0	100.00 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	58	58	0	100.00 %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	8429	8429	0	100.00 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	2201	2201	0	100.00 %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	1185	1185	0	100.00 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31	31	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	13	13	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	38	38	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	8	8	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	196	196	0	100.00 %	
08.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	6147	6147	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	31	31	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	1185	1185	0	100.00 %	
	3 . Tensimeter	Unit	4	4	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	(mengukur tekanan darah)						
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	1871	1871	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31	31	0	100.00 %	
	(peningkatan pengetahuan masyarakat)						
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	11	11	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	5	5	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	8	8	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	7	7	0	100.00 %	
09.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	1043	1043	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	50895	50895	0	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	4	4	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	10619	10619	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	12	12	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	31	31	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	11	11	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	8	8	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	7	7	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	8	8	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00 %	
10.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					92.53 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	72.53 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH	Orang	150	136	14	90.67 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	4	4	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	440	440	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	2542	2542	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	2542	2542	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	4	4	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	2	2	0	100.00 %	
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	2	2	0	100.00 %	
11.00	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	1400	1400	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	8	8	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	2	2	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	957	957	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak penering	Paket	1857	1857	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	514	514	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	446	446	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	4	4	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	8 . Tuberkulin	Vial	35	35	0	100.00 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	11	11	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	36	36	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	8	8	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	7	7	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	5	5	0	100.00 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	342	342	0	100.00 %	
12.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	1510	1510	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	4	4	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	1780	1780	0	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancel/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1780	1780	0	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	4	4	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	15	15	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32	32	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	7	7	0	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	4	4	0	100.00 %	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1374/2/2025, 8 Maret 2026, Pukul 13.00 WIB



4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116 8
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	16,492,543,803
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,500,716,920
	APBD	1,500,716,920
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	1,500,716,920
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: https://spm.bangka.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1374/2/2025, 8 Maret 2026, Pukul 13.02 WIB

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Keadaan SDM Kesehatan di Kota Padang Panjang Berdasarkan Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	2	3	4
1	Spesialis	26	
2	Profesi	34	
3	Sarjana S-2	21	
4	Sarjana S-1	151	
5	Diploma -4	112	
6	Diploma -3	236	
7	SLTA	77	
8	SLTP	10	
9	SD	-	
	Jumlah	706	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2025

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah berupaya optimal untuk mencapai seluruh indikator yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang memengaruhi capaian sebagian indikator pelayanan sebagai berikut:



1. Mobilitas penduduk (pindah domisili, persalinan di luar daerah) menyebabkan ketidaksesuaian
2. Kepatuhan kunjungan neonatal dan pemantauan bayi baru lahir belum optimal.
3. Pada pasien ODGJ berat tidak ditemukan sebanyak target
4. Masih ada Ibu hamil mendapatkan pelayanan diluar wilayah Kota Padang Panjang.
5. Pencatatan dan pelaporan dari faskes swasta belum terakmodir dengan baik.
6. Ibu bersalin melahirkan di luar wilayah kerja Kota Padang Panjang. Masih ada pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan
7. Belum semua bayi baru lahir , menerima imunisasi HB0 karena orang tua tidak bersedia
8. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala
9. Tantangan dalam sinkronisasi data dan program lintas sektor, khususnya untuk kelompok rentan dan
10. Pasien dengan gangguan jiwa yg ada hnaya sebanya 136 orang dan telah dilakukan layanan kesehatan sesuai standar

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi lebih bersifat teknis operasional dan sosial, buka pada aspek komitmen maupun kebijakan. Dengan penguatan sistem pendataan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi edukasi dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan hambatan yang ada dapat diminimalkan sehingga seluruh indikator SPM dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan pada masa yang akan datang.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pekerjaan Umum ini ada 2 (dua) yaitu: Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai berikut:



Tabel 4.10
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100 %

4.3.3. Realisasi

Pada tahun 2025 realisasi capaian SPM pada Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yaitu sebesar 95,70% (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					95.70 %	
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	63895	63895	0	63,895.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2500	2500	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	500	500	00.00	100.00 %	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	500	500	00.00	100.00 %	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan	Rumah Tangga	0	0	00.00	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)						
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	00.00	100.00 %	
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					91.39 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	63895	57020	6875	57,020.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	71.39 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	63895	57020	6875	89.24 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	KUANTITAS SPALD					100.00 %	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1220	1220	00.00	100.00 %	
	KUALITAS SPALD					100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	00.00	100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun	Rumah Tangga	240	240	00.00	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota						
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	4	4	00.00	100.00 %	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/6/2025, 8 Maret 2026, Pukul 13.25 WIB

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	23,699,580,902
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,935,887,440
	APBD	1,215,887,440
	A. APBD MURNI	1,215,887,440
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	720,000,000
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	8.17 %
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD	0.33 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/6/2025, 8 Maret 2026, Pukul 13.30 WIB

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM baik itu pemenuhan pelayanan air minum maupun pengolahan air limbah. Untuk kondisi tahun 2025 totasl pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebanyak 45 orang (sumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025).

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Pekerjaan Umum ada beberapa permasalahan, antara lain:



- a. belum lengkapnya data primer atau data dasa;
- b. Belum adanya RISPAL, Jakstrada air limbah dan air minum;
- c. belum di review nya RISPAM;
- d. Adanya pengurangan anggaran kegiatan bidang air minum dan air limbah, dan
- e. Kurangnya personil yang membidangi air minum dan air limbah.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan pada masa yang akan datang.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat ini ada 2 (dua) yaitu: Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.13
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1.	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %

4.4.3. Realisasi

Pada tahun 2025 realisasi capaian SPM pada Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100% (Tuntas Paripurna) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.14
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %		
01.00	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %		
	Bencana Meliputi :							
	a) Letusan gunung berapi;							
	b) Gempa bumi;							
	c) Tanah longsor;							
	d) Gelombang pasang;							
	e) Banjir bandang; dan/atau							
	f) Bencana lainnya.							
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)							
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %		
	1. Format Tahapan	Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)				100.00 %		
	1.PENDATAAN					100.00 %		
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA					100%		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH							
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100%		
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100%		
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%		
	2.PERHITUNGAN					100.00 %		
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%		
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100%		
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%		
	3.PERENCANAAN					100.00 %		
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%		
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH					100%		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :							
02.00	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %		
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi :							
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;							
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;							
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;							
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau							
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)							
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah							
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %		
	1. Format Tahapan	Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)				100.00 %		
	1.PENDATAAN					100.00 %		
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%		
	FORM 4.A.11					100%		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA							
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100%		
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%		
	2.PERHITUNGAN					100.00 %		
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%		
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%		
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100%		
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%		
	3.PERENCANAAN					100.00 %		
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%		
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM					100%		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KABUPATEN/KOTA :						
------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: https://spm.bangka.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/3/2025, 8 Maret 2026, Pukul 16.26 WIB

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	28,751,982,353
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	98,211,450
	APBD	98,211,4500
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	98,211,450
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	0,34 %
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD	0,02 %

Sumber: https://spm.bangka.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/3/2025, 8 Maret 2026, Pukul 16.32 WIB

4.4.5. Dukungan Personil

Untuk kondisi tahun 2025 total pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebanyak 45 orang (sumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025).

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Perumahan Rakyat ada beberapa permasalahan, antara lain:

- a. SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- b. Sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak terealisasi karena sesuai Permenpupr 13 Tahun 2023 pemenuhan layanan n+1 atau masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Tahapan terdiri dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan perangkat daerah, dan
- c. Penanganan bencana galodo pada tanggal 27 november 2025 di Kota Padang Panjang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan pada masa yang akan datang.



4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota . Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 (dua) yaitu: Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

4.5.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.16
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100 %
2 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100 %

4.5.1.3. Realisasi

Pada tahun 2025 realisasi capaian SPM pada Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) sebesar 97,21 % (Tuntas Utama) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) sebesar 96,97% (Tuntas Utama), dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						97.33 %	
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					97.33 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	0	 100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)						-20%	17.33 %
			Jumlah Mutu Yang	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			Harus Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					86.64 %	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	663	160	503	24.13 %	
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)						
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	21	21	0	100.00 %	
	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)						
Data Dukung : 1374-20250415024235sop trantibum 1.pdf Status : Approved							
Catatan : Maximal 10 Mb							
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.							
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	633	606	27	95.73 %	
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)						
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100.00 %	
Data Dukung : 1374-20250415025511standar peyanan terdampak.pdf Status : Approved							
Catatan : Maximal 10 Mb							
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.							
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	100.00 %	
	(kerusakan akibat						



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)						
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100.00 %	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						96.97 %	
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.97 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	0	 100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	16.97 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					84.87 %	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	25	25	0	100.00 %	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	5	5	0	100.00 %	
Data Dukung : 1374-20251010030153SOP 5 BUAH GABUNG KOMPRES.pdf Status : Approved							
Catatan : Maximal 10 Mb							
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.							
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	517	252	265	48.74 %	
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	43	26	17	60.47 %	
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	25	25	0	100.00 %	
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	25	25	0	100.00 %	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/4/2025, 9 Maret 2026, Pukul 07.38 WIB



4.5.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibum
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	3,925,898,500
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3,854,966,500
	APBD	3,854,966,500
	A. APBD MURNI	3,643,226,400
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	211,740,100
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	98,19 %
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD	0,66 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/4/2025, 9 Maret 2026, Pukul 07.40 WIB

Tabel 4.19
Alokasi Anggaran Urusan Urusan Damkar
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2,933,683,700
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,933,683,700
	APBD	2,933,683,700
	A. APBD MURNI	2,933,683,700
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	100 %
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD	0,50 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/4/2025, 9 Maret 2026, Pukul 07.51 WIB



4.5.1.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang didukung oleh 170 orang personil dengan komposisi 24 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja, 11 orang PNS Pemadam Kebakaran, 26 orang PPPK Pemadam Kebakaran dan 6 PPPK Satuan Polisi Pamong Praja, jumlah ASN tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 93 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 10 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang:

Tabel 4.20
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	SLTP	2	0	2
3	SLTA	118	19	137
4	D3	2	2	4
5	S.1	18	7	25
6	S.2	0	1	1
	Jumlah total			170

Sumber: Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

Tabel 4.21
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	Golongan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	I	0	0	0
2	II	4	0	4
3	III	22	5	27
4	IV	4	0	4
5	PPPK Damkar	23	3	26
6	PPPK Satpol PP	4	2	6
7	Honorer/ Banpol PP + Damkar	84	19	103
	Jumlah total			170

Sumber: Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

Karyawan/ karyawan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2025 berjumlah 170 pegawai yang terdiri dari 35 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 32 Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 103 Non ASN.

4.5.1.6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

- Dalam penerapannya SPM Urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ada beberapa permasalahan, antara lain:
- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas seperti: Gedung yang kurang representatif, sarana yang terbatas dalam melaksanakan operasi penegakan Perda dan pelayanan pemadam kebakaran.



- b. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam segi kualitas dan kuantitas.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya antara lain:

- a. Mengajukan perencanaan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran guna mendukung pelaksanaan tugas dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah Kota Padang Panjang maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- b. Mengirimkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Penegakan Perda.

4.5.2. BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

4.5.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, pada Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang ada 3 (tiga) yaitu : Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN).

4.5.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.22
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100 %

4.5.2.3. Realisasi

Pada tahun 2025 realisasi capaian SPM pada Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yaitu sebesar 97,33 % (Tuntas Utama), dengan tabel sebagai berikut :



Tabel 4.23
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						97.33 %	
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2500	2500	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	100.00 %	
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1	1	0	100.00 %	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	16	16	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7	7	0	100.00 %	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	1	0	1	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	0	1	100.00 %	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	100.00 %	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	100.00 %	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai	orang	7	0	7	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	dengan kebutuhan)						
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	13	13	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	19	19	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7	7	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %	
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					93.33 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	300	0	 100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	13.33 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					66.67 %	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	0.00 %	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	0.00 %	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	100.00 %	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %	
1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
2) . Gladi Lapangan *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %	
1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %	
b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	2	2	0	100.00 %	
c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00 %	
d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %	
e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	23	23	0	100.00 %	
2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5	0	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100.00 %	
c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %	
d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %	
3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan	paket	0	0	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)						
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	15	15	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	100	100	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	50	50	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	7	7	0	100.00 %	
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					98.67 %	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
Download SK Yang Telah Di Upload 1374-20260106095605SK TDB Hidrometeorologi Padang Panjang.pdf							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1275	1275	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	18.67 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.33 %	
	1. Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	120	120	0	100.00 %	
	2 . Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0	0	0	80.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan	paket	1	1	0	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)						
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	0.00 %	
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	3 . Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	0	100.00 %	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	23	23	0	100.00 %	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	100	100	0	100.00 %	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/4/2025, 9 Maret 2026, Pukul 08.13 WIB

4.5.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	8,969,795,069
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	896,737,760



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	PENDANAAN	PAGU
	APBD	896,737,760
	A. APBD MURNI	896,737,760
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	10 %
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD	1,15 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/4/2025, 9 Maret 2026, Pukul 08.16 WIB

4.5.2.5. Dukungan Personil

Untuk kondisi tahun 2025 total pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebanyak 26 orang (sumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025).

4.5.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Trantibumlinmas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang ada beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Masih diperlukan pemahaman yang seragam terkait tata cara pelaporan SPM, khususnya dalam penetapan target capaian SPM;
- b. Pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana belum dilakukan secara maksimal dan belum sepenuhnya menjadi prioritas, sehingga pemenuhan indikator SPM masih terkendala, terutama dari sisi dukungan anggaran;
- c. Kegiatan penanggulangan bencana belum sepenuhnya tercantum sebagai prioritas kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah;
- d. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana belum optimal karena keterbatasan pemahaman teknis pengisian dan penghitungan kebutuhan, dan
- e. Pengumpulan data masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana belum optimal, khususnya pemenuhan data by name by address sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Keterbatasan SDM dan belum tersedianya anggaran khusus pendataan menyebabkan data yang tersedia belum lengkap.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan pada masa yang akan datang.



4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Sosial ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Sosial ini ada 3 (tiga) yaitu :

- 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti;
- 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti;
- 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- dan
- 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 4.25
Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %

4.6.3. Realisasi

Pada tahun 2025 realisasi capaian SPM pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar 100% (Tuntas Paripurna) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.26
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
01.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	350	350	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	225	225	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	350	350	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	350	350	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	00.00	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	225	255	-30.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	50	50	00.00	100.00 %	
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	225	225	00.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	225	225	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	7	7	00.00	100.00 %	
02.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	35	35	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	35	35	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	4	4	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	4	4	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	6 . Pemberian	Orang	35	35	00.00	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial						
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	35	35	00.00	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	22	22	00.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	3	3	00.00	100.00 %	
03.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	450	450	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	450	450	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	75	75	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	450	450	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	225	225	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	00.00	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	400	400	00.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	70	70	00.00	100.00 %	
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	450	450	00.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	4	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	00.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	5	5	00.00	100.00 %	
04.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar					100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	Panti						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	60	60	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	32	32	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	20	20	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	45	45	00.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	15	15	00.00	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	15	15	00.00	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	18	18	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
05.00	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	1343	1343	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyediaan	Orang	1343	1343	00.00	100.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	permakanaan						
2	Penyediaan sandang	Orang	515	515	00.00	100.00 %	
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	7	7	00.00	100.00 %	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	3	3	00.00	100.00 %	
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	5	5	00.00	100.00 %	

Sumber: https://spm.bangka.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1374/1/2025, 9 Maret 2026, Pukul 08.28 WIB

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Sosial pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.27
Alokasi Anggaran Urusan Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	586,247,216,116
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	12,602,173,454
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6,186,765,790
	APBD	1,024,765,790
	A. APBD MURNI	1,024,765,790
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	5,162,000,000
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	5,162,000,000
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	5,162,000,000
	DANA LAINNYA	0

Sumber: https://spm.bangka.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1374/1/2025, 9 Maret 2026, Pukul 08.30 WIB

4.6.5. Dukungan Personil

Untuk dukungan personil dalam pencapaian kinerja standar pelayanan minimal Bidang Urusan Sosial ini pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.28
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	2	2	4
2	SMA Sederajat	2	1	7	2	12
3	D3	1	-	-	2	3
4	S1	4	20	-	5	29
5	S2	3	4	-	-	57
Jumlah		10	25	9	11	55
		35		20		

Untuk dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Padang Panjang pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :



- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan : 1 orang
- Penyuluh Sosial Masyarakat : 92 orang
- Relawan Sosial : 24 orang
- Taruna Siaga Bencana : 28 orang
- Karang Taruna : 19 Kelompok
- LK3 Raudhah : 1 Lembaga
- Penata Layanan Operasional Kemensos : 6 orang
- Operator Layanan Operasional Kemensos : 1 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Sosial, ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Anggaran yang tersedia belum optimal:

Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan pendanaan.

b. Data PPKS belum akurat:

Terdapat beberapa kriteria dan teknik pengumpulan data yang berbeda dari beberapa instansi, sehingga membuat tidak tersedianya data yang komprehensif dalam penyusunan/perhitungan kebutuhan.

c. Petugas lapangan belum memadai:

Masih kurangnya SDM petugas lapangan yang ada.

d. Pelaksanaan:

Masih belum optimalnya koordinasi antara para stakeholde

Menyikapi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025 di Kota Padang Panjang dapat diatasi dengan solusi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sector untuk penanganan PPKS lebih lanjut;
- b. Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social, dan
- c. Perlunya peningkatan kapasitas SDM petugas lapangan serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4.7. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.7.1. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 4.29
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								17,635,559,686	14,146,818,159	80.22 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						4,996,051,096	4,755,574,975	95.19 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	1,000,000	1,000,000	100.00 %	
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	4,370,700,000	4,191,100,000	95.89 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	15,760,000	14,209,675	90.16 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	0.00 %	
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %	
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	19,944,496	19,944,496	100.00 %	
Kekhususan PAUD											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	175,000,000	170,701,114	97.54 %	
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	20,000,000	20,000,000	100.00 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	343,776,600	311,014,470	90.47 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	49,870,000	27,605,220	55.35 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	0.00 %	
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	0	0	0.00 %	
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	0.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		9	Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				4,996,051,096	4,755,574,975	95.19 %				
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						7,874,471,800	6,306,736,978	80.09 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	333,430,000	280,000,000	83.98 %	
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	20,000,000	3,338,250	16.69 %	
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	136,890,000	129,715,950	94.76 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	0	0	0.00 %	
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	2,856,504,000	2,400,690,690	84.04 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	532,846,900	317,782,499	59.64 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	170,000,000	170,000,000	100.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	87,725,000	34,351,550	39.16 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Numerasi										
	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	2,856,504,000	2,400,690,690	84.04 %	
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	532,846,900	317,782,499	59.64 %	
	3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00 %	
	4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %	
	5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	
	6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	87,725,000	34,351,550	39.16 %	
	7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	170,000,000	170,000,000	100.00 %	
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	0.00 %	
	9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
	10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
Keamanan										
	1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
	2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	30,000,000	16,011,100	53.37 %	
	4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
Kebhinekaan										
	1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
	2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	30,000,000	16,011,100	53.37 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	30,000,000	16,011,100	53.37 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				7,874,471,800	6,306,736,978	80.09 %				
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						4,765,036,790	3,084,506,206	64.73 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	267,990,000	195,991,400	73.13 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	20,000,000	10,549,300	52.75 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	0	0	0.00 %	
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	452,176,390	391,457,980	86.57 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	30,000,000	29,970,000	99.90 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	1,369,418,400	999,146,698	72.96 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	227,762,800	98,896,065	43.42 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	270,000,000	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	115,254,000	115,241,000	99.99 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	1,369,418,400	999,146,698	72.96 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	227,762,800	98,896,065	43.42 %	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00 %	
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	270,000,000	0	0.00 %	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	115,254,000	115,241,000	99.99 %	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	30,000,000	29,970,000	99.90 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				4,765,036,790	3,084,506,206	64.73 %				
	4	Pendidikan Kesetaraan						0	0	0.00 %	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
K20250805052437											
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	01.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	01.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	0	0	0.00 %	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %					
5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842						0	0	0.00 %		
Literasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	01.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	01.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %				
	JUMLAH PROGRAM				17,635,559,686	14,146,818,159	80.22 %				
KEGIATAN LAINNYA											
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							0	0	0%	
1	Literasi										
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LITERASI LAINYA											
2	Numerasi										
TIDAK ADA DATA KEGIATAN NUMERASI LAINYA											
3	Inklusifitas										
TIDAK ADA DATA KEGIATAN INKLUSIFITAS LAINYA											
4	Kebhinekaan										
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEBHINEKAAN LAINYA											
5	Keamanan										
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEAMANAN LAINYA											
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/5/2025, 9 Maret 2026 Pukul 09.09 WIB



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4.7.2 URUSAN KESEHATAN

Tabel 4.30
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				1,500,717,020	1,349,530,117	89.93 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,500,717,020	1,349,530,117	89.93 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			1,500,717,020	1,349,530,117	89.93 %
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	161,790,000	121,356,194	75.01 %
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	20,000,100	19,971,498	99.86 %
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	20,000,100	18,950,000	94.75 %
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	19,999,700	19,991,400	99.96 %
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	174,250,000	149,765,200	85.95 %
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	89,490,000	67,781,000	75.74 %
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	360,968,920	326,055,905	90.33 %
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	34,998,800	34,796,520	99.42 %
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	218,177,100	210,641,000	96.55 %
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	42,594,600	35,002,500	82.18 %
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	291,340,900	282,054,900	96.81 %
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	67,106,800	63,164,000	94.12 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,500,717,020	1,349,530,117	89.93 %
	JUMLAH PROGRAM				1,500,717,020	1,349,530,117	89.93 %
KEGIATAN LAINNYA							
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/2/2025, 9 Maret 2026 Pukul 09.24 WIB



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.31
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				1,188,887,440	944,987,114	79.48 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				364,936,340	355,534,000	97.42 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			364,936,340	355,534,000	97.42 %
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0020	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0021	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan	Dokumen	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			Air Minum (SPAM)				
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0030	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	364,936,340	355,534,000	97.42 %
	1.03.03.2.01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				364,936,340	355,534,000	97.42 %
	JUMLAH PROGRAM				364,936,340	355,534,000	97.42 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				823,951,100	589,453,114	71.54 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			823,951,100	589,453,114	71.54 %
	1.03.05.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan	Dokumen	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			prasarana IPLT				
	1.03.05.2.01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	209,889,500	208,062,000	99.13 %
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	331,500,000	313,753,000	94.65 %
	1.03.05.2.01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	282,561,600	67,638,114	23.94 %
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan	Orang	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
	1.03.05.2.01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				823,951,100	589,453,114	71.54 %
	JUMLAH PROGRAM				823,951,100	589,453,114	71.54 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA							

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/6/2025, 9 Maret 2026 Pukul 09.40 WIB

4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 4.32
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No	ROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				98,211,450	51,336,550	52.27 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				98,211,450	51,336,550	52.27 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			51,723,450	51,336,550	99.25 %
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	51,723,450	51,336,550	99.25 %
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				51,723,450	51,336,550	99.25 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			46,488,000	0	0.00 %
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	46,488,000	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				46,488,000	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				98,211,450	51,336,550	52.27 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/3/2025, 9 Maret 2026 Pukul 09.46 WIB



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4.7.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.33
Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				7,685,387,960	7,334,459,262	95.43 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				3,854,966,500	3,692,337,050	95.78 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			3,643,226,400	3,524,750,800	96.75 %
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	3,500,000	0	0%
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Laporan	3,639,726,400	3,524,750,800	96.84 %



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0017	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					3,643,226,400	3,524,750,800	96.75 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			211,740,100	167,586,250	79.15 %
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	211,740,100	167,586,250	79.15 %
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					211,740,100	167,586,250	79.15 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			0	0	0.00 %
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0005	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				3,854,966,500	3,692,337,050	95.78 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				896,737,760	854,931,922	95.34 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			35,669,000	27,086,000	75.94 %
	1.05.03.2.01.0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	35,669,000	27,086,000	75.94 %
	JUMLAH INDIKATOR				35,669,000	27,086,000	75.94 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			769,887,600	760,723,050	98.81 %
	1.05.03.2.02.0001	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	769,887,600	760,723,050	98.81 %
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0010	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0011	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				769,887,600	760,723,050	98.81 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			68,340,000	46,074,180	67.42 %
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis	Laporan	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			prioritas				
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	68,340,000	46,074,180	67.42 %
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				68,340,000	46,074,180	67.42 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			22,841,160	21,048,692	92.15 %
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	22,841,160	21,048,692	92.15 %
	1.05.03.2.04.0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				22,841,160	21,048,692	92.15 %
	JUMLAH PROGRAM				896,737,760	854,931,922	95.34 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				2,933,683,700	2,787,190,290	95.01 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			2,889,424,700	2,747,292,690	95.08 %



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

	1.05.04.2.01.0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	497,749,000	464,837,250	93.39 %
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulanggann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0015	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	2,391,675,700	2,282,455,440	95.43 %
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					2,889,424,700	2,747,292,690	95.08 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.02.0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.03.0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	Orang	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			masyarakat				
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			44,259,000	39,897,600	90.15 %
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	5,259,000	1,713,600	32.58 %
	1.05.04.2.05.0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0004	3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	39,000,000	38,184,000	97.91 %
	JUMLAH INDIKATOR				44,259,000	39,897,600	90.15 %
	JUMLAH PROGRAM				2,933,683,700	2,787,190,290	95.01 %
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/4/2025#tabs-sub-3, 9 Maret 2026 Pukul 10.03 WIB

4.7.6 URUSAN SOSIAL

Tabel 4.34
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				1,024,765,790	992,326,641	96.83 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				849,596,950	821,761,041	96.72 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			746,303,950	718,794,041	96.31 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	543,868,450	532,952,241	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	127,876,500	123,134,500	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	35,186,000	33,390,750	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	28,974,000	20,495,000	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas	Orang	10,399,000	8,821,550	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

			terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat				
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					746,303,950	718,794,041	96.31 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			103,293,000	102,967,000	99.68 %
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	101,850,000	101,525,000	99.68 %
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1,443,000	1,442,000	99.93 %
JUMLAH INDIKATOR					103,293,000	102,967,000	99.68 %
JUMLAH PROGRAM					849,596,950	821,761,041	96.72 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		01.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		47,300,000	46,107,500	97.48 %
		02.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sub Kegiatan Penyediaan Sandang		44,000,000	42,025,000	95.51 %
		03.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu		7,500,000	6,686,250	89.15 %
		04.00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		76,368,840	75,746,850	99.19 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/1374/1/2025, 9 Maret 2026 Pukul 10.07 WIB



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pada hakekatnya merupakan wujud nyata adanya hubungan antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara aplikatif menjadi wahana dan sarana bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025. Sehingga dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kota Padang Panjang mulai dari proses perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025, dalam konteks tatanan manajemen pemerintahan daerah merupakan pengaktualisasian prinsip konsepsi pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini merupakan suatu proses komitmen dan *political will* dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar stakeholder terkait dalam mewujudkan *Good Local Governance*.

Pada akhirnya kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Sumatera Barat akan memberikan *feedback* secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah Kota
Padang Panjang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)